



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020
(AUDITED)

BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

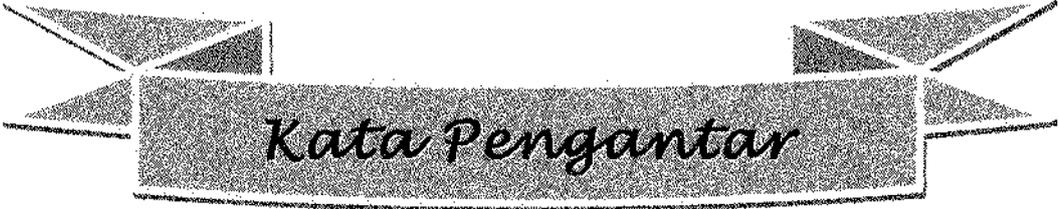
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

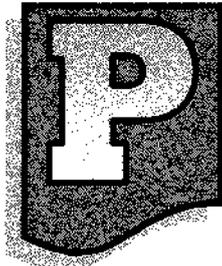
Bengkalis, April 2021

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP



Kata Pengantar



uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di awal tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang disusun dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

tanggapan, dukungan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders*. Selanjutnya, kami akan tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya, teriring ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini. Semoga Allah SWT tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk dapat berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Kabupaten Bengkalis dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkalis, April 2021

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP

Daftar Isi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xiv
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN ARUS KAS	xix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	8
1.5. Sumber Dana.....	11
1.6. Kebijakan Konversi.....	11
1.7. Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	12
1.8. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	15
2.1. Ekonomi Makro.....	15
2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	17
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.....	21
2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Bengkalis.....	21
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	24
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	

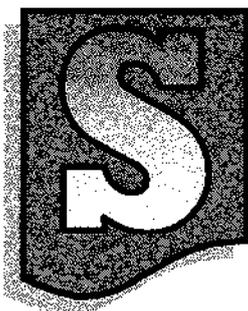
	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.....	24
3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2015.....	30
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	32
4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.....	32
4.2	Basis Akuntansi.....	32
4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akreal.....	32
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	96
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	
5.1.1	Pendapatan – LRA.....	96
5.1.2	Belanja.....	123
5.1.3	Transfer.....	149
5.1.4	Surplus/Defisit.....	151
5.1.5	Pembiayaan.....	151
5.1.6	SiLPA.....	152
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	154
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal.....	154
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	154
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA.....	154
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	154
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih	154
5.3	Neraca	156
5.3.1	Aset.....	156
5.3.2	Kewajiban.....	222
5.3.3	Ekuitas.....	227
5.4	Laporan Operasional	228
5.4.1	Pendapatan – LO.....	228
5.4.2	Beban.....	259
5.4.3	Surplus Non Operasional.....	288
5.4.4	Defisit Non Operasional.....	288



5.4.5	Surplus/Defisit – LO.....	289
5.5	Laporan Arus Kas	290
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	290
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	297
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.....	298
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....	298
5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	300
5.5.6	Saldo Akhir Kas	300
5.5.7	Perbandingan antara Saldo Akhir Kas dengan SiLPA..	303
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas	304
5.6.1	Ekuitas Awal.....	304
5.6.2	Surplus/Defisit – LO.....	304
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan.....	314
5.6.4	Ekuitas Akhir.....	
BAB VI	Pengungkapan Informasi Lainnya	315
BAB VII	Penutup	321



RINGKASAN



sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, PPKD Kabupaten Bengkalis selaku salah satu entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh PPKD Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh PPKD Kabupaten Bengkalis selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari sd 31 Desember 2020 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2020 adalah **Rp2.917.393.229.734,02** atau **99,32%** dari anggarannya. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2020 adalah sebesar **Rp2.634.561.696.928,84** atau mencapai **93,95%** dari anggarannya. Realisasi Transfer Daerah pada TA 2020 adalah **Rp353.910.554.625,00** atau **99,58%** dari anggarannya. Realisasi Defisit TA 2020 adalah sebesar **Rp71.079.021.819,82** yang berarti mencapai **32,00%** dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2020 sebesar **Rp222.090.595.626,37**. Selanjutnya Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2020 adalah **Rp222.090.595.626,37** yang terdiri dari Penggunaan SiLPA. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2020 adalah **Rp0,00**. SiLPA pada TA 2020 adalah sebesar **Rp151.011.573.806,55**.

	TA 2020		TA 2019
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
☑ Pendapatan Daerah	2.937.425.679.887,83	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69
☑ Belanja Daerah	2.804.107.020.265,62	2.634.581.696.928,84	3.300.154.218.224,97
☑ Transfer Daerah	355.409.255.248,58	353.910.554.625,00	457.694.035.532,81
☑ Surplus (Defisit)	(222.090.595.626,37)	(71.079.021.819,82)	16.589.510.186,91
☑ Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46
☑ Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	10.000.000.000,00
☑ SILPA	0,00	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar **Rp222.090.595.626,37**. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar **Rp 222.090.595.626,37**. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) adalah sebesar **Rp151.011.573.806,55**. Dan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp151.011.573.8076,55**.

	TA 2020	TA 2019
☑ Saldo Anggaran Lebih Awal	222.090.595.626,37	215.501.085.439,00
☑ Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,00
☑ Subtotal	0,00	0,00
☑ Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	151.011.573.806,55	222.090.595.626,00
☑ Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
☑ Saldo Anggaran Lebih Akhir	151.011.573.806,55	222.090.595.626

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp9.298.185.596.626,77** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp684.450.486.246,14**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp518.962.048.762,00**, Aset Tetap sebesar **Rp7.879.234.544.017,06**, Dana Cadangan sebesar **Rp0,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp215.538.517.601,57**.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp82.537.732.628,60** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp9.215.647.863.998,17**, mengalami penurunan sebesar **Rp670.373.014.915,77** jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2019 sebesar **Rp9.886.020.878.913,95**.

	TA 2020	TA 2019
<input checked="" type="checkbox"/> Aset	9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20
<input checked="" type="checkbox"/> Aset Lancar	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47
<input checked="" type="checkbox"/> Investasi Jk Panjang	518.962.048.762,00	519.711.981.948,00
<input checked="" type="checkbox"/> Aset Tetap	7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85
<input checked="" type="checkbox"/> Dana Cadangan	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Aset Lainnya	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88
<input checked="" type="checkbox"/> Kewajiban	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25
<input checked="" type="checkbox"/> Kewajiban Jk. Pendek dan Panjang	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25
<input checked="" type="checkbox"/> Ekuitas	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95
<input checked="" type="checkbox"/> Ekuitas	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menggambarkan seluruh dana atau uang yang digunakan oleh dalam menjalankan Kegiatan Operasionalnya selama periode 1 Januari sd 31 Desember 2020. Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban LO, Pos Luar Biasa LO dan surplus/(defisit) dari kegiatan Operasional. Laporan Operasional Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan LO sebesar **Rp2.450.428.050.457,24** Beban LO sebesar **Rp3.309.350.282.481,56** Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar **Rp723.380.000,00**, Pos Luar Biasa LO sebesar **Rp0,00** dan Defisit untuk 1 (satu) Tahun 2020 adalah sebesar **Rp (858.198.852.024,32)**.

	TA 2020	TA 2019
	Realisasi	Realisasi
☑ Pendapatan - LO	2.450.428.050.457,24	4.150.634.368.095,16
☑ Beban - LO	3.309.350.282.481,56	3.467.156.573.112,11
☑ Surplus Penjualan Aset NonLancar	723.380.000,00	355.850.000,00
☑ Pos Luar Biasa - LO	0,00	0,00
☑ Surplus/(Defisit) - LO	(858.198.852.024,32)	683.833.644.983,05

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas terdiri dari Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 sebesar **Rp222.090.595.626,37** Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp429.250.641.163,02**, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus **Rp500.329.662.982,84**, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar **Rp0,00**, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris minus sebesar **Rp0,00**, Kenaikan dan Penurunan Kas sebesar minus **Rp71.079.021.819,82** dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar **Rp151.011.573.806,55**.

	TA 2020	TA 2019
	☑ Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020	222.090.595.626,37
☑ Arus Kas dari Aktivitas Operasi	429.250.641.163,02	1.124.765.091.081,90
☑ Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(500.329.662.982,84)	(1.118.175.580.894,99)
☑ Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
☑ Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
☑ Kenaikan dan Penurunan Kas	(71.079.021.819,82)	6.589.510.186,91
☑ Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 sebesar **Rp9.886.020.878.913,95**, Defisit LO sebesar **Rp858.198.852.024,32**, dan Dampak Kumulatif Perubahan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar **Rp187.825.837.108,54** Ekuitas Akhir sebesar **Rp9.215.647.863.998,17**

	TA 2020	TA 2019
Ekuitas Awal	9.886.020.878.913,95	8.995.912.143.158,84
Surplus/(Defisit) – LO	(858.198.852.024,32)	683.797.544.983,05
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	187.825.837.108,54	206.311.190.772,06
Ekuitas Akhir	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	RASIO (%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.A				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.A1	60.500.000.000,00	63.664.818.589,25	105,23	67.049.392.095,39
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.A2	11.276.500.000,00	8.956.066.385,34	79,42	10.232.707.278,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.1.1.A3	28.920.504.935,00	20.920.504.935,00	72,34	28.788.248.654,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.A4	206.145.385.213,23	158.384.480.005,94	76,83	120.175.536.704,60
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		306.842.390.148,23	251.925.969.915,53	82,10	226.245.884.732,22
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.B				
TRANSFER PEMPUS - DANA PEREMBANGAN	5.1.1.B1				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.B1a	1.121.341.257.294,08	1.050.702.831.784,00	93,70	1.416.335.599.329,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	5.1.1.B1b	566.887.394.191,72	678.078.156.631,00	119,61	1.139.933.590.010,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.B1c	344.485.485.000,00	338.731.609.000,00	98,33	373.268.646.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.B1d	211.654.489.000,00	208.140.860.895,00	98,34	262.925.372.294,00
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan		2.244.368.625.485,80	2.275.653.458.310,00	101,39	3.192.463.207.633,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.B2				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.B2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.B2	166.657.936.000,00	166.657.936.000,00	100,00	131.071.695.996,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		166.657.936.000,00	166.657.936.000,00	100,00	131.071.695.996,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		2.411.026.561.485,80	2.442.311.394.310,00	101,30	3.323.534.903.629,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.B3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.B3a	96.937.271.783,80	104.662.859.108,49	107,97	131.841.460.583,47
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.1.1.B3b	30.375.600.000,00	26.623.226.400,00	87,65	7.769.995.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemerintah Provinsi		127.312.871.783,80	131.286.085.508,49	103,12	139.611.455.583,47
Jumlah Pendapatan Transfer		2.538.339.433.269,60	2.573.597.479.818,49	101,39	3.463.146.359.212,47
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.C				
Pendapatan Hibah	5.1.1.C	92.243.856.470,00	91.438.330.000,00	99,13	85.045.520.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.C	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.C	0,00	431.550.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		92.243.856.470,00	91.869.880.000,00	99,59	85.045.520.000,00
TOTAL PENDAPATAN		2.937.425.679.887,83	2.917.393.229.734,02	99,32	3.774.437.763.944,69
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.A				
Belanja Pegawai	5.1.2.A1	997.589.744.011,46	967.266.480.083,00	96,96	1.077.884.549.964,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.A2	998.125.522.329,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98
Belanja Subsidi	5.1.2.A3	9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00
Belanja Hibah	5.1.2.A4	72.764.589.031,00	71.023.667.791,00	97,61	59.946.830.651,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A5	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00
Jumlah Belanja Operasi		2.079.598.552.265,06	1.981.293.374.799,00	95,27	2.191.978.637.329,98
BELANJA MODAL	5.1.2.B				
Belanja Tanah	5.1.2.B1	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.B2	102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.B3	154.765.085.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.B4	290.484.350.499,07	260.976.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B5	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.665.825,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.B6	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		559.891.175.437,55	500.329.662.982,84	89,36	1.108.175.580.894,99
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.C				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.C	164.617.292.563,01	152.938.659.147,00	92,91	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		164.617.292.563,01	152.938.659.147,00	92,91	0,00
JUMLAH BELANJA		2.804.107.020.265,62	2.634.561.696.928,84	93,95	3.300.154.218.224,97
TRANSFER	5.1.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.A	6.050.000.000,00	4.915.347.049,00	81,25	6.654.649.412,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.A	1.127.650.000,00	763.602.328,00	67,72	1.114.409.571,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.B				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.B	348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	448.416.849.049,81
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.B	0,00	0,00	0,00	1.508.127.500,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81
JUMLAH TRANSFER		355.409.255.248,58	353.910.554.625,00	99,58	457.694.035.532,81
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.159.516.275.514,20	2.988.472.251.553,84	94,59	3.757.848.253.757,78
SURPLUS (DEFISIT)	5.1.4	(222.090.595.626,37)	(71.079.021.819,82)	32,00	16.589.510.186,91

PEMBIAYAAN	5.1.5					
PENERIMAAN	5.1.5.A					
Penggunaan SILPA Tahun Lalu	5.1.5.A	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	
Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.A	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Penerimaan		222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	
PENGELUARAN	5.1.5.B					
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.B	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.B	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	
ADB		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO		222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	205.501.085.439,46	
SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	5.1.6	0,00	151.011.573.806,55	0,00	222.090.595.626,37	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
OPERASIONAL
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	Reff	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46
3	Subtotal (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SilPA/SiKPA)	5.2.3	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
5	Subtotal (3 + 4)		151.011.573.806,55	222.090.595.626,37
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NERACA
PER 31 DESEMBER 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	REFF	2020 (Rp)	2019 (Rp)
2	3	4	5
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.A		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.A.1	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.2	1.876.550.420,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.3	0,00	6.767.355,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.A.4	0,00	5.900.000,00
Kas di Bendahara JKN	5.3.1.A.5	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00
Kas di BLUD	5.3.1.A.6	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.A.7	139.307.364,00	4.860.382.090,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.A.8	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73
Piutang Retribusi	5.3.1.A.8	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.A.8	2.682.331.914,00	11.214.397.462,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	5.3.1.A.8	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.3.1.A.8	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00
Piutang Lainnya	5.3.1.A.8	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24
Penyisihan Piutang	5.3.1.A.9	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.A.10	77.190.900,00	54.750.033,33
Persediaan	5.3.1.A.11	61.779.121.203,23	260.803.124.727,78
Jumlah Aset Lancar		684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.B		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1	31.670.421.119,00	31.777.844.627,00
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	5.3.1.B.1	(31.252.521.119,00)	(31.300.244.627,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		417.900.000,00	477.600.000,00
Investasi Permanen	5.3.1.B.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.B.2	518.544.148.762,00	519.234.381.948,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		518.544.148.762,00	519.234.381.948,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		518.962.048.762,00	519.711.981.948,00
ASET TETAP	5.3.1.C		
Tanah	5.3.1.C.1	1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04
Peralatan dan Mesin	5.3.1.C.2	1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33
Gedung dan Bangunan	5.3.1.C.3	3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.C.4	8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.C.5	126.159.968.170,72	117.319.205.805,72
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.C.6	335.652.200.689,21	807.736.619.379,16
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.C.7	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)
Jumlah Aset Tetap		7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85
DANA CADANGAN	5.3.1.D		
Dana Cadangan	5.3.1.D	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan (41)		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.E		
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.E.1	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.E.2	488.750.000,00	488.750.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.E.3	3.604.936.620,03	6.811.093.726,95
Aset Lain-lain	5.3.1.E.5	205.137.864.730,88	101.928.248.672,27
Jumlah Aset Lainnya		215.538.517.601,57	115.535.058.649,88
JUMLAH ASET		9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20

KEWAJIBAN	5.3.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.A.1	0,00	2.780.922,00
Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri	5.3.2.A.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.A.3	57.533.376.593,10	180.617.509,75
Utang Pihak Ketiga	5.3.2.A.4	22.100.255.714,50	21.185.961.691,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.A.5	2.904.100.321,00	3.190.512.616,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		82.537.732.628,60	24.559.872.739,25
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.B		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		82.537.732.628,60	24.559.872.739,25
EKUITAS	5.3.3.	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95
JUMLAH EKUITAS		9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULUS

LAPORAN
PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

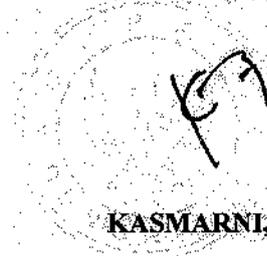
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Pemurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.A.1	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)	(3,54)
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.A.2	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)	(10,38)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.A.3	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)	(27,33)
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.A.4	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91	31,08
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23	10,45
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.B.				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.B.1.a	877.285.068.514,00	1.615.971.473.471,00	(738.686.404.957,00)	(45,71)
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)	5.4.1.B.1.b	516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)	(60,55)
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.B.1.c	338.731.609.000,00	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)	(9,25)
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.4.1.B.1.d	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)	(20,84)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemas - Dana Perimbangan		1.940.237.147.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)	(45,59)
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.B.2				
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian	5.4.1.B.2.a	35.625.236.000,00	131.071.695.996,00	(95.446.459.996,00)	(72,82)
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		35.625.236.000,00	131.071.695.996,00	(95.446.459.996,00)	(72,82)
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/ PROVINSI	5.4.1.B.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.B.3.a	95.257.229.490,00	132.430.002.667,00	(37.172.773.177,00)	(28,07)
22	Bantuan Keuangan Pemprov/Kab/ Kota Lainnya	5.4.1.B.3.b	26.623.226.400,00	7.769.995.000,00	18.853.231.400,00	242,64
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi		121.880.455.890,00	140.199.997.667,00	(18.319.541.777,00)	(13,07)
25	Jumlah Pendapatan Transfer		2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)	(45,25)
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.C.				
27	Pendapatan Hibah	5.4.1.C.1	99.896.028.750,00	90.386.240.620,90	9.509.788.129,10	10,52
28	Pendapatan Lainnya	5.4.1.C.2	1.467.653.652,06	1.213.822.843,31	253.830.808,75	20,91
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		101.363.682.402,06	91.600.063.464,21	9.763.618.937,85	10,66
30	JUMLAH PENDAPATAN		2.450.428.050.457,24	4.150.634.368.095,16	(1.700.206.317.637,92)	(40,96)
31	BEBAN	5.4.2.				
32	BEBAN OPERASI	5.4.2.A.				
33	Beban Pegawai	5.4.2.A.a	967.266.480.083,00	1.077.884.549.964,00	(110.618.069.881,00)	(10,26)
34	Beban Persediaan	5.4.2.A.b	146.227.778.397,64	185.050.865.506,90	(38.823.087.109,26)	(20,98)
35	Beban Jasa	5.4.2.A.c	621.807.784.795,33	575.449.029.301,67	46.358.755.493,66	8,06
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.A.d	47.889.394.732,47	45.935.865.935,46	1.953.528.797,01	4,25
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.A.e	129.718.994.022,00	173.457.848.433,00	(43.738.854.411,00)	(25,22)
38	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Subsidi	5.4.2.A.f	9.618.696.893,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)	(11,72)
40	Beban Hibah	5.4.2.A.g	174.181.813.556,46	200.980.871.790,52	(26.799.058.234,06)	(13,33)
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.A.h	0,00	9.585.830.382,00	(9.585.830.382,00)	(100,00)
42	Beban Penyusutan	5.4.2.A.i	842.136.619.622,64	708.365.794.491,14	133.770.825.131,50	18,88
43	Beban Amortisasi	5.4.2.A.j	3.817.484.659,92	3.698.195.725,09	119.288.934,83	3,23
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.A.k	6.328.008.927,10	729.397.896,54	5.598.611.030,56	767,57
45	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Penghapusan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Hibah Aset	5.4.2.A.l	0,00	2.367.921.402,98	(2.367.921.402,98)	(100,00)
48	Beban Lain-lain	5.4.2.A.m	137.479.372.167,00	15.060.613.142,00	122.418.759.025,00	812,84
49	Beban Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Jumlah Beban Operasi		3.086.472.427.856,56	3.089.462.537.579,36	77.009.898.277,26	2,56
51	BEBAN TRANSFER	5.4.2.B.				
52	Beban Transfer Bagi hasil Pajak	5.4.2.B.a	4.915.347.049,00	6.654.649.412,00	(1.739.302.363,00)	(26,14)
53	Beban Transfer Retribusi	5.4.2.B.b	763.602.328,00	1.114.409.571,00	(350.807.243,00)	(31,48)
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.2.B.c	217.198.905.248,00	449.924.976.549,81	(232.726.071.301,81)	(51,73)
57	Jumlah Beban Transfer		222.877.854.625,00	457.694.035.532,81	(234.816.180.907,81)	(51,30)
58	JUMLAH BEBAN		3.309.350.282.481,56	3.467.156.573.112,11	(157.806.290.630,55)	(4,55)
59	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI		(838.922.232.024,32)	683.477.794.983,05	(1.542.400.027.007,37)	(225,67)
60	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
61	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.				
62	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.a	723.380.000,00	0,00	723.380.000,00	0,00
63	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	355.850.000,00	(355.850.000,00)	(100,00)
65	Jumlah Surplus Non Operasional		723.380.000,00	355.850.000,00	367.530.000,00	0,00

66	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.				
67	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	36.100.000,00	(36.100.000,00)	(100,00)
68	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	36.100.000,00	(36.100.000,00)	0,00
71	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		723.380.000,00	319.750.000,00	403.630.000,00	0,00
72	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(858.198.852.024,32)	683.797.544.983,05	(1.541.996.397.007,37)	(225,50)
73	POS LUAR BIASA					
74	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
76	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
77	SURPLUS / DEFISIT - LO	5.4.5.	(858.198.852.024,32)	683.797.544.983,05	(1.541.996.397.007,37)	(225,50)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS



KASAMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN ARUS KAS

Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
Metode Langsung

(dalam rupiah)

	Uraian	Reff	TA 2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.A		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.Aa	63.664.818.589,25	67.049.392.095,39
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.Ab	8.956.066.385,34	10.232.707.278,23
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.Ac	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.Ad	157.661.100.005,94	120.175.536.704,60
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.Ae	1.050.702.831.784,00	1.416.335.599.329,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.Af	678.078.156.631,00	1.139.933.590.010,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.Ag	338.731.609.000,00	373.268.646.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.Ah	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.Ai	166.657.936.000,00	131.071.695.996,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.Aj	104.662.859.108,49	131.841.460.583,47
14	Penerimaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.5.1.Ak	26.623.226.400,00	7.769.995.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
16	Penerimaan Hibah	5.5.1.Al	91.438.330.000,00	85.045.520.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya	5.5.1.Am	431.550.000,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		2.916.669.849.734,02	3.774.437.763.944,69
21	Arus Keluar Kas	5.5.1.B		
22	Pembayaran Pegawai	5.5.1.B	967.266.480.083,00	1.077.884.549.964,00
23	Pembayaran Barang	5.5.1.B	933.384.530.032,00	1.041.554.003.106,98
24	Pembayaran Bunga	5.5.1.B	0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi	5.5.1.B	9.618.696.893,00	10.895.753.608,00
26	Pembayaran Hibah	5.5.1.B	71.023.667.791,00	59.946.830.651,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.B	0,00	1.697.500.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.B	348.231.605.248,00	449.924.976.549,81
29	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.B	152.938.659.147,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.B	4.915.347.049,00	6.654.649.412,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.B	763.602.328,00	1.114.409.571,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran dari Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)		2.488.142.588.571,00	2.649.672.672.862,79
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		428.527.261.163,02	1.124.765.091.081,90
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
37	Arus Masuk Kas	5.5.2.A		
38	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.A	0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah	5.5.2.A	0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.A	723.380.000,00	0,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.A	0,00	0,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.A	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap	5.5.2.A	0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.A	0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.A	0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.A	0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (38 s/d 46)		723.380.000,00	0,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.2.B		
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.B	0,00	0,00
50	Perolehan Tanah	5.5.2.B	815.248.000,00	9.634.892.400,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.B	97.002.850.638,45	159.391.025.569,48
52	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.B	131.718.395.987,69	254.922.045.126,71
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.B	260.976.621.697,70	671.190.951.973,80
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.B	9.816.546.659,00	13.036.665.825,00
55	Perolehan Aset lainnya	5.5.2.B	0,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.B	0,00	10.000.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)		500.329.662.982,84	1.118.175.588.894,99
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)		(499.606.282.982,84)	(1.118.175.588.894,99)

60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
61	Arus Masuk Kas	5.5.3.A		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.A	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.A	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.A	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.A	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
71	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)		0,00	0,00
72	Arus Keluar Kas	5.5.3.B		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.B	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.B	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.B	0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.B	0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.B	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.B	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.B	0,00	0,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s/d 81)		0,00	0,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (71 - 82)		0,00	0,00
84	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
85	Arus Masuk Kas	5.5.4.A		
86	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.A	130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
87	Pengembalian UP TA 2019 (Pengembalian di tahun berjalan)	5.5.4.A	0,00	0,00
88	Pengembalian UP TA 2020 (Pengembalian di tahun berjalan)	5.5.4.A	0,00	0,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas (86 s/d 88)		130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
90	Arus Keluar Kas	5.5.4.B		
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.B	130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
92	SP2D - SPJ	5.5.4.B	0,00	0,00
93	Jumlah Arus Keluar Kas (91 s/d 92)		130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 93)		0,00	0,00
95	Kenaikan/Penurunan Kas (35 + 39 + 83 + 94)	5.5.5	(71.079.021.819,82)	6.589.510.186,91
96	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS		222.090.595.626,37	215.501.085.439,46
97	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6a	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6b	1.876.550.420,00	0,00
99	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.6c	0,00	3.986.433,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6d	0,00	5.900.000,00
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN	5.5.6e	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.5.6f	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.5.6g	139.307.364,00	4.960.382.090,00
104	Saldo Akhir Kas (97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104)	5.5.6	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN
ARUS KAS
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Reff.	2020	2019
EKUITAS AWAL	5.6.1.	9.886.020.878.913,95	8.995.912.143.158,84
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2.	(858.193.852.024,32)	683.797.544.983,05
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3.	187.825.837.108,54	206.311.190.772,06
Koreksi Nilai Pinang	5.6.3.a.	278.822.675.350,00	122.251.860.690,07
Koreksi Nilai Penyisihan Pinang	5.6.3.b.	287.099.911,90	10.810.324.957,11
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Koreksi Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap	5.6.3.c.	132.201.518.281,20	132.475.873.429,26
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.d.	(158.612.144.168,79)	(19.816.105.845,81)
Koreksi Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	5.6.3.e.	15.000.000,00	(600,00)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.6.3.f.	(721.447,00)	0,00
Koreksi Nilai Aset Lain-lain	5.6.3.g.	(6.997.500,00)	(157.270.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.6.3.h.	6.324.470.748,23	(54.264.770.348,57)
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	5.6.3.i.	(71.205.078.231,00)	0,00
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	5.6.3.j.	14.166,00	(4.988.721.510,00)
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Penyertian Modal Pemerintah Daerah	5.6.3.k.	(2,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4.	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,95

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan disusun guna memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selama Tahun Anggaran 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan antara lain mengenai pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

- a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu untuk mendanai kegiatan yang telah dianggarkan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak, retribusi dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020; dan
- f. Informasi tentang perubahan Posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor;);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pematangan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Negara;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelompokan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- bb. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- ee. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020; dan
- gg. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

1.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 yang berbasis akrual terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1) Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan terdiri dari aset lancar dan aset nonlancar, kewajiban disajikan terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Untuk data mengenai kas daerah, investasi, dana cadangan, tuntutan perbendaharaan, piutang dana transfer, utang bunga, utang luar negeri (jangka pendek dan jangka panjang) didasarkan pada neraca PPKD (Bendahara Umum Daerah), sedangkan data mengenai kas dibendahara penerimaan, kas dibendahara pengeluaran, piutang pajak, piutang retribusi, tuntutan ganti rugi, persediaan, aset tetap, aset lainnya, utang pemotongan pajak (PFK) didasarkan pada neraca konsolidasi dari SKPD.

2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Daerah menyajikan data tentang pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Data/informasi keuangan dari PPKD (BUD) terdiri dari Pendapatan Transfer, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan berupa bantuan kepada partai politik dan Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3) Laporan Arus Kas (LAK)

Data keuangan mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) disusun dalam salah satu Laporan Keuangan yaitu Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh Entitas Pelaporan yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada dibawah pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Silpa/Sikpa, Koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

5) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan LO, Beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menjelaskan tentang akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, Ekonomi makro, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Informasi tambahan dengan diterapkan akuntansi berbasis akrual yakni pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Semua informasi dan penjelasan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan guna pengungkapan yang andal dan memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berjumlah 48 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Kecamatan, dengan rincian pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

No	SKPD	Alamat Kantor
1	Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
2	Sekretariat Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
3	Sekretariat DPRD	Jl. Antara Bengkulu
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Antara Bengkulu
5	Dinas Kesehatan	Jl. Pertanian Bengkulu
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jl. Pertanian Bengkulu
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Pertanian Bengkulu
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Antara Bengkulu
9	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Sudirman Bengkulu
10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. H.R Subrantas Bengkulu
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Pertanian Bengkulu
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Pertanian Bengkulu
13	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Antara Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Alamat Kantor
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Antara Bengkulu
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Arif Rahman Bengkulu
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Pertanian Bengkulu
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Jl. Kartini Bengkulu
18	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pertanian Bengkulu
19	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Pertanian Bengkulu
20	Dinas Pendidikan	Jl. Pertanian Bengkulu
21	Dinas Perikanan	Jl. Pertanian Bengkulu
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pertanian Bengkulu
23	Dinas Pertanian	Jl. Pertanian Bengkulu
24	Dinas Perhubungan	Jl. Pramuka Bengkulu
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pertanian Bengkulu
26	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Pramuka Bengkulu
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Hang Tuah Bengkulu
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Duri Kec. Mandau
29	Inspektorat	Jl. Antara Bengkulu
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Pertanian Bengkulu
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Antara Bengkulu
32	Dinas Sosial	Jl. Antara Bengkulu
33	RSUD Kabupaten Bengkulu	Jl. Kelapapati Tengah Bengkulu
34	RSUD Kecamatan Mandau	Duri Kec. Mandau
35	Kantor Camat Mandau	Kec. Mandau
36	Kantor Camat Rupal	Kec. Rupal
37	Kantor Camat Rupal Utara	Kec. Rupal Utara
38	Kantor Camat Bengkulu	Jl. Panglima Minal Bengkulu
39	Kantor Camat Bukit Batu	Kec. Bukit Batu
40	Kantor Camat Bantan	Kec. Bantan
41	Kantor Camat Siak Kecil	Kec. Siak Kecil
42	Kantor Camat Pinggir	Kec. Pinggir
43	PPKD	Jl. Pertanian Bengkulu
44	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Sudirman Bengkulu
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
46	Kantor Camat Bandar Laksamana	Kec. Bandar Laksamana
47	Kantor Camat Talang Muandau	Kec. Talang Muandau
48	Kantor Camat Bathin Solapan	Kec. Bathin Solapan

c. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang berbasis akrual merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan PPKD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

a. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera (Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil) terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera, yang selanjutnya semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan-endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya, diantaranya Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamákannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada saat itu Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis. Dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kabupaten Bengkalis dikenal orang dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari dari berbagai versi “*Folklore*” (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejahrawan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti: “Kisah Pelayaran Raja Kecil Ke Johor”, “Asal-muasal Nama Terubuk” dan “Syair Ikan Terubuk”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada Abad Ke-16 sampai dengan Abad-17 Masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan Kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama “Pulau Sembilan” yang merujuk kepada penyebutan tumpukan tanah busut (tasik) di hulu Sungai Jantan (yang saat ini dikenal belakangan sebagai Sungai Siak). Selain itu juga para pedagang melayu pada abad itu mengenal tanah tersebut dengan nama “Kuala Batanghari” yang merujuk kepada tanah di muara sungai.

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari akhir perjalanan panjang pelarian Raja Kecil sang pendiri Kerajaan Siak mengalir Sungai Jantan bersama pengikutnya dari tanah Melaka untuk membangun kembali kekuatan dalam rangka merebut hak atas tahtanya. Pada saat itu, Kuala Batanghari selain merupakan kampung nelayan juga sebagai tempat singgah sementara (transit) kapal-kapal pedagang yang mengarungi Selat Malaka dari berbagai tempat seperti: Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Jawa, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan Minangkabau yang mengambil kebutuhan kapal termasuk ikan terubuk yang menjadi tangkapan utama masyarakat pulau sebelum melanjutkan perjalanannya.

Alkisah kedatangan Raja Kecil bersama pengikutnya disambut oleh Datuk Bandar Pulau Bengkalis bersama pejabatnya. Maksud dari persinggahannya tersebut, Raja Kecil ingin membangun kekuatan baru yang akan dipusatkan di Pulau Bengkalis, namun atas saran dan pertimbangan para pembesar yang hadir pada waktu musyawarah berlangsung menyarankan agar pusat kekuatan diletakkan di muara sungai jantan atau di Sabak Auh yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan pertama dari Kerajaan Siak sebelum akhirnya berlokasi ditempatnya sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kuala Batanghari (Bengkalis) inilah tapak awal pembentukan Kerajaan Siak.

Pada persinggahan itulah Raja Kecil memberikan beberapa nama baru untuk hal-hal yang dijumpainya termasuk perubahan Kuala Batanghari menjadi Bengkalis yang merupakan nama dari induk ikan terubuk yang banyak terdapat di sana. Selanjutnya, pada masa keemasan Kerajaan Siak, Pulau Bengkalis, Bukit Batu dan Sabak Auh merupakan garda terdepan yang dipimpin oleh Datuk Laksamana Raja Dilaut dalam menghadapi kekuatan Portugis dan Johor.

Pada bulan Juli 1512 pasukan gabungan pimpinan Hang Nadim yang terdiri dari Bengkalis, Bukit Batu, Siak-Gasib dan Bintan menyerang Portugis yang dipimpin oleh Fernao Peres de Andrade di Malaka. Perlawanan yang sengit antara Portugis dengan Bengkalis dan gabungan negeri Melayu tersebut mampu menyeret pasukan hingga ke wilayah Pagoh di Muar. Tahun peristiwa penyerangan besar-besaran tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi Bengkalis.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Ketika Pulau Bengkalis berada pada kekuasaan kolonial Belanda sempat dijadikan pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur. Namun kemudian Belanda memindahkan pusat keresidenan dari Pulau Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut di Pulau Bengkalis dijadikan pusat pemerintahan *Afdeling* Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Pulau Bengkalis dijadikan pusat ibukota Kewedanan Bengkalis yang kemudian berperan besar pada fase perang kemerdekaan Indonesia. Perjuangan masyarakat Pulau Bengkalis khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis yang dipimpin oleh kesatuan TKR dimana pertempuran terbesarnya terjadi di sekitar Desa Pedekik sekarang.

Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dipimpin oleh seorang Pejabat Bupati bernama SYAHRIAL ABDI. Selanjutnya dari hasil pelaksanaan Pilkada pada bulan September 2020, telah terpilih Bupati baru untuk masa jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu KASMARNI, S.Sos, MMP. Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, telah dilaksanakan pelantikan Bupati terpilih KASMARNI, S.Sos, MMP sebagai Bupati Bengkalis.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Jumlah Kecamatan sebanyak 11 Kecamatan, bagian yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Mandau
- 2) Kecamatan Pinggir
- 3) Kecamatan Bukit Batu
- 4) Kecamatan Siak Kecil
- 5) Kecamatan Rupert
- 6) Kecamatan Rupert Utara
- 7) Kecamatan Bengkalis
- 8) Kecamatan Bantan
- 9) Kecamatan Bandar Laksamana
- 10) Kecamatan Talang Muandau
- 11) Kecamatan Bathin Solapan

Batas Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Pantai Barat Semenanjung Malaysia;
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Siak; dan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Geologi

Kabupaten Bengkalis keadaannya relatif merupakan daerah datar dengan:

- ◆ Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pesisir.
- ◆ Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

Sungai

Kabupaten Bengkalis dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukui, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, Sungai Tampan dan Sungai Sail.

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Iklim

Kabupaten Bengkalis pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,4° C - 33,8° C dan suhu minimum antara 23,0° C - 24,2° C

Curah hujan antara 66,3 – 392,4 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi pada bulan November, serta kelembaban rata-rata berkisar 68 – 83 %.

1.5 SUMBER DANA

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3.159.516.275.514,20 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar	:	Rp	306.842.390.148,23
b. Pendapatan Transfer sebesar	:	Rp	2.538.339.433.269,60
c. Lain-lain Pendapatan Sah sebesar	:	Rp	92.243.856.470,00
d. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	222.090.595.626,37

1.6 KEBIJAKAN KONVERSI

Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian untuk mensinergikan antara Peraturan sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 melakukan konversi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kode rekening dikonversi ke kode akun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah daerah, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

1.7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis
- 1.5. Sumber Dana
- 1.6. Kebijakan Konversi
- 1.7. Perubahan kebijakan Akuntansi
- 1.8. Sistematiika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 3.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
 - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
 - 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
 - 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan
 - 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.5. Pendapatan-LO
 - 5.1.6. Beban
 - 5.1.7. Aset
 - 5.1.8. Kewajiban
 - 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrua atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrua pada Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

- 6.1. Informasi Rekening Giro yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.2. Informasi Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- 6.3. Informasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
- 6.4. Informasi Lainnya

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kota besar di Indonesia, saat ini mengalami perkembangan sangat pesat terutama di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan letak dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang cukup strategis. Ekonomi makro merupakan cerminan kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis yang merupakan bagian dari proses pembangunan secara umum, khususnya pembangunan dibidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Ekonomi Makro Kabupaten Bengkalis

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan perkembangan riil perekonomian atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. PDRB juga memberikan informasi mengenai struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.

Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk mendorong daya beli (*purchasing power*) masyarakat menjadi bertambah sehingga kebutuhan rumah tangga (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Dengan demikian, apabila *demand* diikuti oleh *purchasing power* berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan dapat dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020).

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Stabilitasnya ekonomi makro Kabupaten Bengkalis, salah satu dampak positifnya yang terjadi antara lain Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu Kota tujuan investor untuk berinvestasi. Hal ini cukup wajar dilihat dari komposisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis menurut lapangan usaha dari tahun ketahun. Sektor tersier tetap menjadi sektor yang pertumbuhannya paling tinggi dan sektor ini adalah sektor yang terus memerlukan aliran investasi sehingga cita-cita untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa semakin mendekati kenyataan.

Target ekonomi makro Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 adalah tetap pada pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja untuk mengurangi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pengangguran, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Target ekonomi makro Kabupaten Bengkalis disusun dengan memakai dasar asumsi sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis;
- 2) Tingkat Inflasi;
- 3) ICOR tahunan selama periode proyeksi;
- 4) Kebutuhan investasi selama periode proyeksi;
- 5) *Tax ratio* (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi;
- 6) Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan; dan
- 7) Komponen Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

b. Permasalahan Kependudukan Lapangan Kerja

Sebagai kota yang perkembangan penduduknya cukup tinggi dan memiliki karakteristik perdagangan dan kegiatan jasa maka penanganan permasalahan kependudukan, ketenagakerjaan menjadi sangat penting, ditambahkan lagi Bengkalis merupakan Ibukota Kabupaten yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi, hal ini menjadi daya tarik bagi penduduk yang bermigrasi dari kota asal ke Kabupaten Bengkalis.

Fenomena ini dapat digambarkan dengan *sex ratio* penduduk cenderung diatas angka 100 (seratus) dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir. Penduduk di Kabupaten Bengkalis sama halnya seperti penduduk daerah lain di Indonesia, dimana program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran menurunkan tingkat kematian bagi ibu dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk Bengkalis sebesar 1,67. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 sebanyak 519.389 jiwa, Tahun 2013 tercatat jumlah penduduk mencapai 527.918 jiwa, Tahun 2014 tercatat jumlah penduduk mencapai 536.138 jiwa, Tahun 2015 tercatat jumlah penduduk diproyeksi mencapai 543.987 jiwa, Tahun 2016 tercatat proyeksi jumlah penduduk sebanyak 551.683 jiwa, Tahun 2017 tercatat proyeksi jumlah penduduk sebanyak 559.081 jiwa, Tahun 2018 tercatat jumlah penduduk mencapai 566.228 jiwa, Tahun 2019 tercatat jumlah penduduk mencapai 573.003 jiwa, Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,51 persen.

Masalah penduduk tidak terlepas dengan masalah ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh kepada penyediaan tenaga kerja. Apabila permintaan tenaga kerja yang tinggi namun tidak diimbangi kesempatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

kerja yang cukup tentu akan menimbulkan dampak banyaknya pengangguran. Hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019 tercatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 64,03 persen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 9,62 persen.

Penduduk sebagai subjek dan objek dari pembangunan, dimana jumlah penduduk menjadi modal potensial dan juga akan menjadi masalah yang mengganggu proses pembangunan jika tidak dikelola oleh Pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan baik.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Bengkalis

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kabupaten Bengkalis sebesar Rp248,60 juta, turun dibanding tahun 2018. Tahun 2018, PDRB per kapita atas harga berlaku sebesar Rp263,66 juta.

Tabel 2.1

Data Pengangguran, IPM, dan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis

No.	Tahun	Pengangguran	Kemiskinan	IPM
1.	2017	10,05%	6,22%	72,94%
2.	2018	9,62 %	6,27%	72,94%

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, meningkatkan realisasi penerimaan daerah dan mengefektifkan belanja serta mengefisiensikan pembiayaan diperlukan adanya kebijakan keuangan yang mengatur hal tersebut. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyederhanakan proses administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk dana perimbangan dilakukan dengan mengupayakan optimalisasi dana perimbangan agar bagian daerah dapat diterima secara proporsional dengan meningkatkan pengawasan dan koordinasi.

Untuk mempercepat pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan perlu adanya maksimalisasi usaha peningkatan pencapaian penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan dana transfer;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun dalam pembangunan;
- 3) Meningkatkan penerimaan PAD dan melakukan sistem pengelolaan PAD dengan baik; dan
- 4) Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi Riau untuk mendapatkan hasil yang proporsional.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah:
 - a) Melakukan pendataan ulang objek pajak yang telah terdaftar secara langsung kelapangan (tempat usaha);
 - b) Melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum terdaftar;
 - c) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi
 - d) Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan secara mandiri mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan wajib retribusi;
 - e) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi agar membayar pajak atau retribusi tepat pada waktu;
 - f) Melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang belum membayar pajak dan retribusi atau menunggak;
 - g) Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayarannya;
 - h) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkesimbangan dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretris Daerah;
 - i) Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan melakukan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan;
 - j) Peningkatan pelayanan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana terutama peningkatan mutu system aplikasi pengelolaan pendapatan dan pengelolaan PBB;
 - k) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke rekening kas umum daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan penyelewengan hasil pungutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- l) Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.
 - m) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan menggunakan teknologi informasi yang memadai;
 - n) Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreatifitas dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - o) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - p) Memverifikasi dan mengevaluasi untuk menjamin akurasi data Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - q) Pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi, himbuan melalui media cetak dan elektronik dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi; dan
 - r) Menyempurnakan dan mengkaji regulasi/peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai kegiatan yang bersifat reviewing terhadap peraturan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- Disamping intensifikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga melakukan tindakan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah dengan cara menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2008. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yakni:
- a) Objek dasar pajak dan retribusi tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b) Objek pajak dan retribusi terletak diwilayah Kabupaten Bengkalis;
 - c) Objek pajak dan retribusi bukan merupakan objek pajak provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - d) Potensi yang memadai;
 - e) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; dan
 - f) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Dana Perimbangan atau Dana Transfer
- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen atau indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan atau dana transfer; dan
 - b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI utusan Daerah Pemilihan Provinsi Riau dan dengan Pemerintah Provinsi Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a) Optimalisasi pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mengevaluasi dan memverifikasi data-data dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan; dan
- b) Potensi-potensi diluar pendapatan daerah untuk dikaji dan dianalisa apabila memungkinkan diusulkan menjadi salah satu penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk membiayai atau mendanai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang diprioritaskan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD baik murni maupun APBD Perubahan menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui penerapan strategi yang mengutamakan pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dan penanganan masalah-masalah khusus yang perlu ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkulu pada umumnya berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga lainnya serta untuk menutup defisit Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2020. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang APBD-P Tahun 2020 yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2020.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN /PENURUNAN APBD	
	Rp	Rp	Rp	%
I.Pendapatan	3.524.252,00	2.937.425,00	(586.826,00)	(16,65)
I.1.Pendapatan Asli Daerah	400.509,00	306.842,00	(93.667,00)	(23,39)
I.2.Dana Perimbangan	2.771.882,00	2.244.368,00	(527.513,00)	(19,03)
I.3.Lain Pendapatan yang sah	351.860,00	386.214,00	34.354,00	9,76
II.Belanja	3.820.517,00	3.159.516,00	(661.001,00)	(17,30)
II.1.Belanja Tidak Langsung	1.477.553,00	1.601.499,00	123.946,00	8,39
II.2.Belanja Langsung	2.342.964,00	1.558.016,00	(784.947,00)	(33,50)
Surplus/Defisit	(296.265,00)	(222.090,00)	(74.174,00)	(25,04)
III.Pembiayaan	296.265,00	222.090,00	(74.174,00)	(25,04)
III.1.Penerimaan	296.265,00	222.090,00	74.174,00	(25,04)
III.2.Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2020, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan tema yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2020 sebagai berikut:

- Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3)
- Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
- Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021 untuk rencana



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

pembangunan tahun 2020 serta penyesuaian terhadap RKP 2020 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2020. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen teknokratias pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah.

Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2020 dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 antara lain :

- a. Penguatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa;
- b. Peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa;
- c. Pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif;
- d. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
- e. Peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat; dan
- f. Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebudayaan yang Bekepribadian Nasional.

Untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bengkalis digunakan jenjang atau tingkatan prioritas dari program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama merupakan prioritas utama yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis karena berhubungan langsung dengan kinerja Bupati pada aspek kebijakan yang dikaitkan dengan visi Kabupaten Bengkalis yakni "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia". Sebagai wujud dari visi tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan-kegiatan berupa urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Program pada prioritas pertama dari masing-masing misi pembangunan tersebut sebagai berikut:

- 1) Program pembangunan untuk misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional adalah:

- Program pendidikan dasar;
- Program pengembangan kepemudaan;
- Program peningkatan budaya olahraga masyarakat;
- Program peningkatan pelayanan kesehatan;
- Program pengembangan pelayanan perpustakaan; dan
- Program reformasi birokrasi.

- 2) Program pembangunan daerah untuk misi "Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berrahmat yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai", sebagai berikut:

- Program keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- Program pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Program Pembangunan daerah untuk misi “Meningkatkan infrastruktur daerah berupa prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri pariwisata serta daerah pinggiran kota”, sebagai berikut:
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan;
 - Pengendalian banjir;
 - Penataan dan pengembangan kawasan perkotaan;
 - Konservasi sumber daya air;
 - Penataan lingkungan pemukiman;
 - Peningkatan pelayanan air bersih;
 - Pengelolaan limbah dan sanitasi perkotaan;
 - Pembangunan sistem transportasi perkotaan; dan
 - Penyediaan layanan energi listrik.
- 4) Program pembangunan daerah untuk misi “Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” sebagai berikut:
 - Program penataan ruang perkotaan;
 - Program kebersihan lingkungan; dan
 - Program penghijauan kota.
- 5) Program pembangunan daerah untuk misi “Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif”, sebagai berikut:
 - Program peningkatan perekonomian dan daya saing daerah; dan
 - Program ekonomi kerakyatan.
- b. Prioritas Kedua merupakan prioritas program ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya tergambar penghitungan pagu kewilayahan dengan memperhatikan prioritas pertama yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas ini merupakan program dan kegiatan unggulan pada SKPD sesuai dengan urusan wajib atau urusan pilihan yang merupakan kewenangannya yang berdampak luas terhadap masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayaninya. Program dan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- c. Prioritas Ketiga merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.



BAB III

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

Pada hakekatnya anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan adanya anggaran pada setiap daerah di seluruh Indonesia yang dikelola dengan baik dan transparan maka tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat akan tercapai sebagai mana mestinya. Penyelenggaraan urusan Pemerintah akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis setelah perubahan sebesar Rp3.159.516.275.514,20 (Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah Dua Puluh Sen), terdiri dari pendapatan daerah Rp2.937.425.679.887,83 ditambah penerimaan pembiayaan Rp222.090.595.626,37.

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp306.842.390.148,23, dana Transfer ditargetkan sebesar Rp2.538.339.433.269,60 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp92.243.856.470,00. Sementara itu belanja dianggarkan sebesar Rp3.159.516.275.514,20 terdiri dari Belanja Operasi Rp2.079.598.552.265,06, Belanja Modal sebesar Rp559.891.175.437,55, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp164.617.292.563,01 serta Transfer Rp355.409.255.248,58. Untuk penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp222.090.595.626,37 sementara pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00.

Realisasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selama Tahun Anggaran 2020 secara ringkas dapat digambar pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 202

(dalam jutaan)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	2.937.425	2.917.393	20.032	0,69
I.1 Pendapatan Asli Daerah	306.842	251.925	54.916	21,80
I.2 Pendapatan Transfer	2.538.339	2.573.597	(35.258)	(1,37)
I.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	92.243	91.869	373	0,41
II. Belanja	3.159.516	2.988.472	171.044	5,72
II.1 Belanja Operasi	2.079.598	1.981.293	98.305	4,96
II.2 Belanja Modal	559.891	500.329	59.561	11,90



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecualiditentukan lain)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
III.3 Belanja Tak Terduga	164.617	152.938	11.678	7,64
IV. Transfer	355.409	353.910	1.498	0,42
Surplus/Defisit	(222.090)	(71.079)	(151.011)	212,46
III. Pembiayaan	222.090	222.090	0	0,00
III.1 Penerimaan	222.090	222.090	0	0,00
III.2 Pengeluaran	0	0	0	0,00
SILPA Tahun Berjalan	0	151.011	(151.011)	0,00

Tabel 3.1 merupakan ringkasan dari Realisasi Anggaran dalam jutaan rupiah, dengan penjelasan sebagai berikut, untuk Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp2.937.425.679.887,83 dengan realisasi sebesar Rp2.917.393.229.734,02 atau 99,32%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk lebih jelas dan juga sebagai data pembanding tentang posisi Pendapatan Daerah mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, digambarkan berupa Tabel, hal ini dilakukan guna mempermudah dalam membaca dan memahami isi laporan yang disajikan. Berikut digambarkan tabel dan penjelasan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan beserta realisasi dan persentase perkembangannya.

a. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas.

1) Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020
(dalam juta rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	337.287	258.889
2	2016	335.584	199.026
3	2017	373.540	271.149
4	2018	444.510	319.280
5	2019	429.370	226.245
6	2020	306.842	251.925

Secara keseluruhan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 baik target maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan kecuali ada penurunan pada tahun 2016, 2019 dan 2020. Untuk Tahun Anggaran 2020 penurunan target sebesar Rp122.528.282.978,77 atau 28,54% yaitu Rp306.842.390.148,23 dari tahun 2019 sebesar Rp429.370.673.127,00. Dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp251.925.869.915,53 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp226.245.884.732,22 atau 11,35%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecualiditentukan lain)

Dilihat dari realisasi PAD Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp59.862.881.246,08 atau 23,12% dibanding realisasi Tahun 2015. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan Rp.37.956.224.715,47 atau 11,31% dibandingkan realisasi tahun 2016. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.93.000.628.059,89 atau 41,09% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Pada tahun 2019 sebesar Rp226.245.884.732,22 terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2018 yang realisasinya sebesar Rp319.280.511.084,00.

2) Pendapatan Dana Transfer

Target dan realisasi dana transfer dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, digambarkan dengan tabel dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

Tabel 3.2

Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	2.919.911	2.414.593
2	2016	3.409.853	2.639.454
3	2017	3.536.299	2.909.490
4	2018	3.055.965	3.040.447
5	2019	3.385.824	3.463.146
6	2020	2.538.339	2.573.597

Dana Transfer Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.538.339.433.269,00 dan target Tahun 2019 sebesar Rp3.385.824.184.746,00, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp847.484.751.476,40 atau 25,03%.

Realisasi Dana Transfer tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 mengalami penurunan sebesar Rp889.548.879.393,98 atau 26,27%. Realisasi Dana Transfer tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.040.447.453.438,88 mengalami kenaikan sebesar Rp422.698.905.773,59 atau 12,48%. Realisasi Dana Transfer tahun 2017 sebesar Rp2.909.490.189.881,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2.639.454.503.255,94 mengalami kenaikan sebesar Rp270.035.686.625,06 atau 10,23%. Realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp224.860.888.106,04 atau 9,31% dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp2.414.593.615.149,90.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mencakup beberapa ketentuan antara lain:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecualiditentukan lain)

- 1) Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3) Dana bagi hasil pajak dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota;
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Dengan berubahnya format laporan pertanggungjawaban, yakni mengelompokkan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal ini secara data berdampak pada pengurangan target dan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

**Tabel 3.3
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020**

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	12.500	11.031
2	2016	44.069	42.118
3	2017	52.315	50.142
4	2018	0.00	0.00
5	2019	86.287	85.045
6	2020	92.243	91.869

Sebagaimana yang digambarkan pada tabel dijelaskan sebagai berikut dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp31.086.566.181,00 atau 281,79%, dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp8.245.799.012,00 atau 18,71%. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp52.315.168.000,00 atau 100%, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp85.045.520.000 atau 100%, dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp5.956.256.470,00 atau 6,90%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecualliditentukan lain)

b. BELANJA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, pasal 36 ayat (1) berbunyi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Tahun Anggaran 2020 belanja ditargetkan sebesar Rp3.159.516.275.514,20 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.064.983.543.312,46, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp905.467.267.798,26 atau 22,27%. Untuk tahun anggaran 2020 realisasi belanja sebesar Rp2.988.472.251.553,84 dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja sebesar Rp3.757.848.253.757,78, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp769.376.002.203,94 atau 20,47%. Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Tabel 3.4
Perkembangan Belanja Operasi Tahun
Anggaran 2015 s.d. 2020

(Dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	3.167.224	2.720.062
2	2016	2.822.151	2.373.545
3	2017	2.541.067	2.234.571
4	2018	2.070.115	1.846.310
5	2019	2.374.493	2.191.978
6	2020	2.079.598	1.981.293

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.079.598.552.265,06 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.374.493.419.263,80, terdapat pengurangan target sebesar Rp294.894.866.998,74 atau 12,42%, Realisasi belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp1.981.293.374.799,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp2.191.978.637.329,98, terdapat penurunan realisasi belanja operasi sebesar Rp210.685.262.530,98 atau 8,87%.

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 hampir setiap tahun mengalami penurunan, kecuali tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecualiditentukan lain)

2) Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu amanah dari peraturan tersebut mengenai belanja modal, bahwa belanja modal dianggarkan minimal 29% dari total belanja daerah. Untuk Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran Belanja Modal belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanahkan pada peraturan tersebut diatas, hal ini dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran Belanja Modal untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Persentase belanja modal dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015 sebesar 40,53%. Untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 30,12%, Tahun Anggaran 2017 sebesar 35,68%, Tahun Anggaran 2018 sebesar 28,18%, Tahun Anggaran 2019 sebesar 90,99% dan Tahun Anggaran 2020 sebesar 17,72%. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel dan penjelasan terinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020
(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2015	2.179.005	1.815.703
2	2016	1.221.641	765.742
3	2017	1.417.368	982.284
4	2018	982.172	903.407
5	2019	1.217.603	1.108.175
6	2020	559.891	500.329

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp559.891.175.437,55, dibandingkan dengan target belanja modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.217.603.885.303,19, terdapat kenaikan target belanja modal sebesar Rp657.712.709.865,64 atau 54,02%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500.329.662.982,84 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.108.175.580.894,99, terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp607.845.917.912,15 atau 54,85%.

Perkembangan realisasi belanja modal dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut: dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp499.386.465.111,35 atau 37,94%, dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan Rp1.049.961.004.812,05 atau 57,83%, dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan Rp216.541.501.250,05 atau 22,04%, dari



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecualiditentukan lain)

tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan Rp78.877.097.909,68 atau 8,03%, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp204.768.232.108,67 atau 22,66%.

Pembiayaan daerah merupakan salah satu pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus, Tahun Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp222.090.595.626,37 direalisasikan sebesar 100,00% realisasi penerimaan pembiayaan tersebut merupakan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp222.090.595.626,37. Sedangkan alokasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2020 dianggarkan defisit sebesar Rp222.090.595.626,37 namun terjadi defisit anggaran sebesar Rp17.079.021.819,82 realisasi belanja lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan pembiayaan neto dianggarkan sebesar Rp Rp222.090.595.626,37 dan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp Rp222.090.595.626,37 sehingga pembiayaan netto ditambah dengan surplus anggaran terdapat SiLPA sebesar Rp151.011.573.806,55.

3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Secara umum faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2020 antara lain:

- a. Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan, baik secara eksternal maupun internal atau peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi semakin memadai; dan
- e. Adanya rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap bulannya dengan memanggil seluruh SKPD yang langsung dipimpin oleh Bupati.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2020 antara lain:

- a. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap mobilisasi perekonomian di Kabupaten Bengkulu;
- b. Peremajaan data dan validasi data objek pajak dan objek retribusi Belum memadai;
- c. Pengawasan dan evaluasi dari pejabat terkait terhadap pemungutan pajak dan retribusi kurang optimal; dan
- d. Sosialisasi oleh pejabat terkait terhadap Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak dan retribusi belum Optimal;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi kurang maksimal oleh setiap SKPD penerima pajak atau retribusi;
- f. Pertambahan wajib pajak dan wajib retribusi baru untuk sebagian jenis pajak/retribusi tidak signifikan terutama wajib pajak reklame dan wajib pajak PBB;
- g. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- h. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari SKPD penerima pajak dan retribusi untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah;
- i. Birokrasi yang berbelit dan proses yang lama membuat wajib pajak dan wajib retribusi mengurungkan niatnya untuk membayar pajak dan retribusi;
- j. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Instansi vertikal lainnya;
- k. Sistem aplikasi pengelolaan pendapatan dan retribusi yang digunakan belum sepenuhnya menghasilkan laporan-laporan yang diinginkan;
- l. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah berkaitan dengan pajak dan retribusi; dan
- m. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengkonsolidasi Laporan Keuangan setiap entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh Pengawas internal yakni Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/TKAB-SET/III/2020/161.

Jumlah Entitas Akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 46 (empat puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditambah PPKD (BUD), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD. Untuk 46 SKPD dan PPKD menyampaikan Laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sementara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD hanya Laporan Realisasi Anggaran saja. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan ke Bupati Kabupaten Bengkulu (entitas pelaporan) melalui Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018 menggunakan Basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkulu. Basis Akrua digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khusus Lampiran I yang mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kabupaten Bengkulu dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 mengacu pada standar tersebut. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu merupakan perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Didalam Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Nomor 93 Tahun 2020 tersebut telah mengakomodir basis akrual sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2015 Kementerian Dalam Negeri menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, yang diterbitkan tanggal 18 November 2015. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tersebut tentunya akan berpengaruh pada kebijakan akuntansi yang telah disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merevisi kebijakan akuntansi dengan mencabut kebijakan akuntansi yang sebelumnya. Perubahan kebijakan tersebut dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap kebijakan akuntansi seperti kebijakan tentang aset tetap, investasi non permanen (dana bergulir) dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat selama ini guna menciptakan laporan keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2016, kembali dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016. Perubahan ini untuk mengakomodir Perubahan Pencatatan terhadap Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah dari Pendapatan Pajak Tipe B yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesement*) menjadi Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah), kemudian pada tahun 2018 dilakukan lagi perubahan terhadap kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018. Perubahan ini untuk mengakomodir temuan atas LHP BPK mengenai waktu perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan juga penghapusan piutang tak tertagih. Selanjutnya untuk mengakomodir adanya perubahan masa manfaat dan perubahan kodefikasi barang milik daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang pengelompokan dan kodefikasi barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali melakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020.

Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berada pada entitas pelaporan yakni Bupati Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh setiap entitas akuntansi (SKPD dan PPKD) dalam satu set Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu) dalam satu Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dan informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu berupaya untuk menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang lebih baik.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 berupaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 22 kebijakan. Berikut ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan/penyajian dan pengungkapan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan pada Entitas Pelaporan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. LP-SAL memberikan informasi tentang kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Kewajiban jangka pendek;
- 8) Kewajiban jangka panjang; dan
- 9) Ekuitas.

Informasi yang disajikan dalam Neraca mengungkapkan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bila mana perlu, sesuai dengan sifatnya.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun oleh entitas pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktifitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- 4) Pos luar biasa, bila ada; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 3) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- 4) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

h. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- 1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- 2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding ditingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Pernyataan Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan pemerintahan daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam beberapa format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selaku entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 TENTANG LAPORAN ARUS KAS

Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pencatatan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pendanaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

Untuk transaksi bukan kas, transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian struktur organisasi dan fungsi selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan struktur organisasi dan fungsi terdahulu yang telah dikoreksi oleh yang baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; dan
- d. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas akuntansi/pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- a. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- b. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05 TENTANG PENDAPATAN-LO

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan-LO pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut atau terdapat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

d. Pendapatan Non Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD:

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1) Pendapatan Pajak Tipe A

Merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

3) Pendapatan Pajak Tipe C

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan.

4) Pendapatan Retribusi Tipe A

Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan.

5) Pendapatan Retribusi Tipe B

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi (SKR) terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 TENTANG PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan-LRA untuk PPKD dan Pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah lain atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat diajarkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07 TENTANG BEBAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas, antara lain meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari:

- a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat timbulnya kewajiban. Meskipun demikian Beban



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan sosial. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah timbul setelah Pemda secara formal mengakuinya.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. Beban Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yaitu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD. Beban Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Beban Perjalanan Dinas. Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Beban Barang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pematkhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Metode periodik tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban Hibah dan Bantuan SKPD dalam bentuk barang diakui pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial.

Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Beban dan pendekatan Aset.

4.3.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 TENTANG BELANJA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- Rincian belanja per SKPD;
- Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 TENTANG PEMBIAYAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan di SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.3.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 TENTANG KAS DAN SETARA KAS

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, missal Bendahara Pengeluaran.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

4.3.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 TENTANG PIUTANG

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Piutang pemerintah daerah karena pungutan adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang termasuk dalam piutang yang timbul karena peristiwa pungutan adalah:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Sarang burung walet;
- 10) PBB pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya.

Piutang yang berasal dari pungutan diakui pada saat munculnya klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Secara umum, pengakuan piutang yang berasal dari pungutan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

Piutang yang timbul karena peristiwa perikatan terdiri atas:

- a. Piutang karena Pemberian Pinjaman

Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemda. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan).

- b. Piutang karena Penjualan

Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah antara lain melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran.

- c. Piutang karena Kemitraan

Pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. Piutang yang timbul diakui sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Piutang karena Pemberian Fasilitas

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat.

Pengakuan piutang karena perikatan dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan yang berasal dari perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang berasal dari perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

a. Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Transfer dana bagi hasil dari provinsi dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasikan. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Tuntutan ganti rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah daerah menderita kerugian.

Kerugian pemerintah daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Pada prinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar;
- c. Kualitas Diragukan;
- d. Kualitas Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesement*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesement*) dilakukan dengan ketentuan:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak dapat dipilah berdasarkan karakter sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas Piutang Lain-lain PAD yang sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Besaran Penyisihan Piutang Setiap Tahun

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Piutang pemerintah daerah yang tidak tertagih dapat dihapus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsure pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di Neraca, informasi mengenai piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut harus menjelaskan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang.

4.3.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 TENTANG BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Beban Dibayar Dimuka yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikati oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (cut off).

Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari Aset Lancar.

4.3.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 TENTANG PERSEDIAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- b. Instrumen keuangan.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya barang pakai habis seperti Alat Tulis Kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas seperti komponen bekas.
- b. Branga atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode sistematis berupa FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama);
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pencatatan beban persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan metode periodik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode Perpetual ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Metode Periodik digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di SKPD.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan: kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.14 TENTANG INVESTASI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Kerja sama operasi; dan
- d. Investasi dalam properti.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrument ekuitas.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 4) Penerimaan dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam property dan kerja sama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek).
 - 1) Dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
 - 3) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh diakhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Investasi jangka panjang disajikan sebagai akun Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 TENTANG ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap harus memenuhi kriteria bahwa suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisii seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraph diatas dan dengan suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan sudah dilakukan penyusutan sejak aset tetap tersebut dicatat ke dalam Pencatatan Barang Milik Daerah maupun ke dalam pencatatan akuntansi. Terhadap aset tetap tersebut dilakukan proses penyusutan dihitung sebulan penuh. Penyajian laporan penyusutan dilakukan tiap semester dan tahunan.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Buku/Barang Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- c. Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud di atas:

- a. Direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
- b. Tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang/Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Necara; dan
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun dikemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:

- a. Ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan
- b. Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas, nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.

Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.
- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4.3.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16 TENTANG KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bias kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standard ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

e. Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17 TENTANG DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Klasifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan nilai yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening Koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, seperti: bunga deposito. Sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, seperti: biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum pembentukan dana cadangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan;
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.3.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18 TENTANG ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau sebesar daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BKS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada akhir masa konsesi, nilai BKS dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan terjadi.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BSK dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada saat bangunan diserahkan dari pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah maka nilai BSK dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

- a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. *Lisensi* dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.3.19 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19 TENTANG KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancer utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi dan Penghapusan Kewajiban akan diatur dalam regulasi tersendiri. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Terdapat dua arus timba balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran untuk kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

a. Utang Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Contoh pembangunan fasilitas atau peralatan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, maka jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Utang Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Utang Bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai.

Pengukuran untuk kewajiban jangka panjang:

a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman.
 - 2) Modifikasi persyaratan utang.
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.3.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20 TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan regulasi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

noi untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi

4.3.22 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 22 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan berlaku untuk pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*);
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.937.425.679.887,83	2.917.393.229.734,02	99,32	3.774.437.763.944,69	(857.044.534.210,67)

Sumber Pendapatan Kabupaten Bengkulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi per 31 Desember TA. 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Asli Daerah	306.842.390.148,23	251.925.869.915,53	82,10	226.245.884.732,22	25.679.985.183,31
Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan	2.244.368.625.485,80	2.275.653.458.310,00	101,39	3.192.463.207.633,00	(916.809.749.323,00)
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	166.657.936.000,00	166.657.936.000,00	100,00	131.071.695.996,00	35.586.240.004,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	127.312.871.783,80	131.286.085.508,49	103,12	139.611.455.583,47	(8.325.370.074,98)
Lain-lain Pendapatan yang sah	92.243.856.470,00	91.869.880.000,00	99,59	85.045.520.000,00	6.824.360.000,00
Jumlah	2.937.425.679.887,83	2.917.393.229.734,02	99,32	3.774.437.763.944,69	(857.044.534.210,67)

Realisasi Pendapatan Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.917.393.229.734,02 atau 99,32% dari nilai anggaran sebesar Rp2.937.425.679.887,83. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.774.437.763.944,69 mengalami penurunan sebesar Rp857.044.534.210,67 atau 22,71%.

Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
306.842.390.148,23	251.925.869.915,53	82,10	226.245.884.732,22	25.679.985.183,31

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp251.925.869.915,53 atau 82,10% dari nilai anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp226.245.884.732,22 mengalami kenaikan sebesar Rp25.679.985.183,31 atau 11,35%.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Pajak Daerah	60.500.000.000,00	63.664.818.589,25	105,23	67.049.392.095,39	(3.384.573.506,14)
Pendapatan Retribusi Daerah	11.276.500.000,00	8.966.066.385,34	79,42	10.232.707.278,23	(1.276.640.892,89)
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	28.920.504.935,00	20.920.504.935,00	72,34	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	206.145.385.213,23	158.384.480.005,94	76,83	120.175.536.704,60	38.208.943.301,34
Jumlah	306.842.390.148,23	251.925.869.915,53	82,10	226.245.884.732,22	25.679.985.183,31

Realisasi masing-masing jenis PAD per 31 Desember 2020 dan TA 2019 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
60.500.000.000,00	63.664.818.589,25	105,23	67.049.392.095,39	(3.384.573.506,14)

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2020 serta realisasi TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

Jenis Pajak	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pajak Hotel	2.050.000.000,00	1.509.075.439,25	73,61	2.751.356.084,25	(1.242.280.645,00)
Pajak Restoran	5.500.000.000,00	8.781.178.472,00	159,68	10.757.834.432,00	(1.976.656.960,00)
Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	672.591.600,00	56,05	2.042.325.384,00	(1.369.733.784,00)
Pajak Reklame	600.000.000,00	449.235.275,00	74,87	446.739.096,00	2.496.179,00
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	19.150.000.000,00	19.340.014.933,00	100,99	18.623.714.559,00	716.300.374,00
Pajak Penerangan Jalan sumber lain	12.050.000.000,00	13.827.016.897,00	114,75	12.207.819.542,04	1.619.197.354,96
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	3.936.415.145,00	98,41	4.520.885.840,00	(584.470.695,00)
Pajak Parkir	400.000.000,00	286.723.466,00	71,68	463.670.066,00	(176.946.600,00)
Pajak Air Tanah	800.000.000,00	557.236.551,00	69,65	681.742.756,30	(124.506.205,30)
Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00	336.843.119,00	84,21	368.332.930,00	(31.489.811,00)
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	9.350.000.000,00	9.680.396.732,00	103,53	9.711.689.715,00	(31.292.983,00)
Pajak BPHTB	5.000.000.000,00	4.288.090.960,00	85,76	4.473.281.690,80	(185.190.730,80)
Jumlah	60.500.000.000,00	63.664.818.589,25	105,23	67.049.392.095,39	(3.384.573.506,14)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dengan melihat tabel diatas menunjukkan Penerimaan pajak daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp63.664.818.589,25 atau 105,23% dari anggaran. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp67.049.392.095,39 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp3.384.573.506,14 atau 5,05%. Pendapatan Pajak Daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pajak Reklame, Pajak Bagi Hasil dari PBB P2 menggunakan metode Official Assesment sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak BPHTB menggunakan metode Self Assesment sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
11.276.500.000,00	8.956.066.385,34	79,42	10.232.707.278,23	(1.276.640.892,89)

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan retribusi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.956.066.385,34 atau 79,42% dari anggaran sebesar Rp11.276.500.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp10.232.707.278,23 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.276.640.892,89 atau 12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Jasa Umum	3.872.000.000,00	3.834.835.750,00	99,04	3.520.044.600,00	314.791.150,00
Jasa Usaha	7.053.000.000,00	4.551.142.399,00	64,53	6.084.638.063,00	(1.533.495.664,00)
Perizinan Tertentu	351.500.000,00	570.088.236,34	162,19	628.024.615,23	(67.936.378,89)
Jumlah	11.276.500.000,00	8.956.066.385,34	79,42	10.232.707.278,23	(1.276.640.892,89)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa umum dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00	1.161.435.000,00	145,18	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	400.000.000,00	487.575.000,00	121,89	556.200.000,00	(68.625.000)
Retribusi Pelayanan Pasar	180.000.000,00	210.853.000,00	117,14	232.043.000,00	(21.190.000)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.400.000.000,00	1.316.189.500,00	94,01	1.447.064.500,00	(130.875.000)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	32.000.000,00	41.891.000,00	130,91	32.806.000,00	9.085.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	60.000.000,00	133.005.000,00	221,68	91.940.100,00	41.064.900,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	483.887.250,00	241,94	0,00	483.887.250,00
Jumlah	3.872.000.000,00	3.834.835.750,00	99,04	3.520.044.600,00	314.791.150,00

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum selama TA 2020 sebesar Rp3.872.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.834.835.750,00 atau 99,04%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	371.000.000,00	293.260.000,00	79,05	370.230.000,00	(76.970.000,00)
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	218.000.000,00	211.840.000,00	97,17	218.460.000,00	(6.620.000,00)
Retribusi Terminal	14.000.000,00	8.536.000,00	60,97	14.145.000,00	(5.609.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	106.000.000,00	121.195.000,00	114,33	113.635.000,00	7.560.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	16.895.000,00	67,58	16.000.000,00	895.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000.000,00	3.603.566.399,00	60,06	5.336.518.063,00	(1.731.951.664,00)
Retribusi Penyebrangan Air	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	288.000.000,00	288.600.000,00	100,21	0,00	288.600.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.000.000,00	7.250.000,00	45,31	16.650.000,00	(9.400.000,00)
Jumlah	7.053.000.000,00	4.551.142.399,00	64,53	6.084.638.063,00	(1.533.495.664,00)

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha TA 2020 sebesar Rp7.053.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.551.142.399,00 atau 64,53%.

Retribusi yang tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2020 adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penyebrangan Air dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

1. Tidak tercapainya Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan :

- Keadaan tempat khusus parkir yang ada di Kecamatan Mandau (kota Duri) tidak kondusif sehingga akses jalan masuk sulit. Serta kondisi gedung yang kurang memungkinkan untuk dijadikan tempat parkir.

2. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Air dikarenakan :

- Saat ini kapal KMP. Tasik Gemilang dalam keadaan Docking, belum dapat diselesaikan proses dockingnya karena tidak ada rekanan yang berminat meskipun telah dilakukan tiga kali (3x) proses lelang. Hingga saat ini pun belum ada pihak ke-3 yang mengelola KMP. Tasik Gemilang.

3. Tidak tercapainya Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikarenakan :

- Adanya pandemi Covid 19, tempat wisata khusus nya selatbaru, sepi pengunjung, sehingga pendapatan kios-kios tidak memadai, akhirnya retribusi tidak dipungut. Retribusi tidak dipungut mulai dari bulan maret 2020, sehingga jumlah retribusi yang didapat tidak mencapai target anggaran.

4. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi izin mendirikan Bangunan	345.000.000,00	569.518.236,34	165,08	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	6.500.000,00	570.000,00	8,77	3.820.000,00	(3.250.000,00)
Jumlah	351.500.000,00	570.088.236,34	162,19	628.024.615,23	(57.936.378,89)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2020 sebesar Rp351.500.000,00 terealisasi sebesar Rp570.088.236,34 atau 162,19%. Retribusi perizinan tertentu yang tidak mencapai target anggaran TA 2020 adalah Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP) dikarenakan Kurangnya Jumlah Pengurusan Izin Trayek akibat adanya moda transportasi alternatif lainnya.

OPD yang mengelola Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Retribusi per OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	0,00	166.600.000,00	0,00	159.020.000,00	7.580.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	345.000.000,00	569.518.236,34	165,08	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Dinas Perikanan	288.000.000,00	288.600.000,00	100,21	0,00	288.600.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	277.000.000,00	8.485.000,00	3,06	26.875.000,00	(18.410.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	458.000.000,00	555.698.000,00	121,33	542.443.100,00	13.254.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00	1.161.435.000,00	145,18	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Dinas Pertanian	25.000.000,00	16.895.000,00	67,58	16.000.000,00	895.000,0000
Dinas Perhubungan	7.835.500.000,00	5.416.436.899,00	69,13	7.356.747.563,00	(1.940.310.664,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	239.390.000,00	119,70	297.970.000,00	(58.580.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	32.000.000,00	41.891.000,00	130,91	32.806.000,00	9.085.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	16.000.000,00	7.250.000,00	45,31	16.650.000,00	(9.400.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	200.000.000,00	483.887.250,00	241,94	0,00	483.887.250,00
Dinas Kesehatan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.278.500.000,00	8.956.066.385,34	79,42	10.232.707.278,23	(1.276.640.692,89)

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

Tabel 5.9 Rincian Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	0,00	52.120.000,00	0,00	53.560.000,00	(1.440.000,00)
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	0,00	114.480.000,00	0,00	105.460.000,00	9.020.000,00
Jumlah	0,00	166.600.000,00	0,00	159.020.000,00	7.580.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Tabel 5.10 Rincian Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi izin mendirikan bangunan	345.000.000,00	569.518.236,34	165,08	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Jumlah	345.000.000,00	569.518.236,34	165,08	624.204.615,23	(54.686.378,89)

Dinas Perikanan

Tabel 5.11 Rincian Retribusi Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	288.000.000,00	288.600.000,00	100,21	0,00	288.600.000,00
Jumlah	288.000.000,00	288.600.000,00	100,21	0,00	288.600.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	171.000.000,00	1.750.000,00	1,02	18.700.000,00	(16.950.000,00)
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	106.000.000,00	6.715.000,00	6,33	8.175.000,00	(1.460.000,00)
Jumlah	277.000.000,00	8.465.000,00	3,06	26.875.000,00	(18.410.000,00)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Pasar	180.000.000,00	210.853.000,00	117,14	232.043.000,00	(21.190.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	60.000.000,00	133.005.000,00	221,68	91.940.100,00	41.064.900,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	218.000.000,00	211.840.000,00	97,17	218.460.000,00	(6.620.000,00)
Jumlah	458.000.000,00	555.698.000,00	121,33	542.443.100,00	13.254.900,00

Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	800.000.000,00	1.161.435.000,00	145,18	1.169.991.000,00	1.444.000,00
Jumlah	800.000.000,00	1.161.435.000,00	145,18	1.169.991.000,00	1.444.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pertanian

Tabel 5.15 Rincian Retribusi Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Jasa usaha tempat rumah potong hewan	25.000.000,00	16.895.000,00	67,58	16.000.000,00	895.000,00
Jumlah	25.000.000,00	16.895.000,00	67,58	16.000.000,00	895.000,00

Dinas Perhubungan

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Parkir Diregi Jalan Umum	400.000.000,00	487.575.000,00	121,89	558.200.000,00	(68.625.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.400.000.000,00	1.316.189.500,00	94,01	1.447.064.500,00	(130.875.000,00)
Retribusi Terminal	14.000.000,00	8.536.000,00	60,97	14.145.000,00	(5.609.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000.000,00	3.603.566.399,00	60,06	5.336.518.063,00	(1.731.951.664,00)
Retribusi izin Trayek	6.500.000,00	570.000,00	8,77	3.820.000,00	(3.250.000,00)
Retribusi Penyebrangan Air	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.835.500.000,00	5.416.436.899,00	69,13	7.356.747.563,00	(1.940.310.664,00)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	239.390.000,00	119,70	297.970.000,00	(58.580.000,00)
Jumlah	200.000.000,00	239.390.000,00	119,70	297.970.000,00	(58.580.000,00)

Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran	32.000.000,00	41.891.000,00	130,91	32.806.000,00	9.085.000,00
Jumlah	32.000.000,00	41.891.000,00	130,91	32.806.000,00	9.085.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.000.000,00	7.250.000,00	45,31	16.650.000,00	(9.400.000,00)
Jumlah	16.000.000,00	7.250.000,00	45,31	16.650.000,00	(9.400.000,00)

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	483.887.250,00	241,94	0,00	483.887.250,00
Jumlah	200.000.000,00	483.887.250,00	241,94	0,00	483.887.250,00

Tabel 5.21 Rincian Retribusi Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2019
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
28.920.504.935,00	20.920.504.935,00	72,34	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen sebesar Rp20.920.504.935,00 dari anggaran sebesar Rp28.920.504.935,00 atau 72,34% yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
PT Bank Riau	28.920.504.935,00	20.920.504.935,00	72,34	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)
Jumlah	28.920.504.935,00	20.920.504.935,00	72,34	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)

Penerimaan pendapatan dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama TA. 2020 adalah sebesar Rp20.920.504.935,00 atau 72,34% dari anggaran sebesar RpRp28.920.504.935,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan penerimaan sebesar Rp7.867.743,719,00 atau 27,33%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola oleh PPKD Kabupaten Bengkalis.

Pendapatan deviden sebesar Rp20.920.504.935,00 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri disingkat Bank Riau Kepri" tanggal 08 Juli 2020 nomor 11, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pupung Mulyantini, SH, M.H.

4. Lain-lain PAD yang sah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
206.145.385.213,23	158.384.480.005,94	76,83	120.175.536.704,600	38.208.943.301,34



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai

Tabel 5.23 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	723.380.000,00	0,00	382.150.000,00	341.230.000,00
Penjualan Hasil Perikanan	215.000.000,00	303.269.700,00	141,06	557.782.000,00	(254.512.300,00)
Jasa Giro Kas Daerah	7.500.000.000,00	3.256.110.350,00	43,41	9.158.047.982,00	(5.901.937.632,00)
Jasa Giro Pemegang Kas	5.000.000.000,00	830.541.708,00	16,61	938.861.598,00	(108.319.890,00)
Pendapatan Bunga Deposito	18.000.000.000,00	19.481.596.510,00	108,23	2.983.980.005,00	16.497.616.505,00
Pendapatan Denda Pajak	106.999.000,00	91.501.945,00	85,52	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Hasil Eksekusi Jaminan	15.934.915.976,13	7.147.958.273,22	44,86	88.497.550,00	7.059.460.723,22
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	5.000.000.000,00	23.675.778,00	0,47	183.260.386,00	(159.584.608,00)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00	1.177.969.623,26	7,85	6.457.956.358,50	(5.279.986.735,24)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	15.000.000.000,00	6.991.293.456,46	46,61	10.457.039.231,100	(3.465.745.774,64)
Pendapatan BLUD	108.165.960.237,10	104.360.891.054,00	96,48	74.729.082.176,000	29.631.808.878,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.037.510.000,00	13.888.888.100,00	86,60	13.567.724.070,000	321.144.030,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	185.000.000,00	107.423.508,00	58,07	159.734.980,000	(52.311.472,00)
Jumlah	206.145.385.213,23	158.384.480.005,94	76,83	120.175.536.704,60	38.208.943.301,34

Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp158.384.480.005,94 atau 76,83% dari nilai anggaran sebesar Rp206.145.385.213,23. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp120.175.536.704,60 menunjukkan adanya kenaikan penerimaan sebesar Rp38.208.943.301,34 atau 31,79%. Pendapatan lain-lain PAD ini dikelola oleh beberapa OPD sebagai berikut.

a) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.24 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Badan Pendapatan Daerah

Urutan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.950.000,00	2.697.912,00	68,30	11.470.954,000	(8.773.042,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.450.000,00	14.398.842,00	115,65	6.175.024,000	8.223.818,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	2.320.000,00	1.726.572,00	74,42	403.704,000	1.322.868,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	1.429.000,00	1.154.540,00	80,79	1.394.625,000	(240.085,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	9.300.000,00	9.279.159,00	99,78	8.189.541,000	1.089.618,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.500.000,00	21.840,00	1,46	0,00	21.840,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.100.000,00	3.071.256,00	99,07	0,00	3.071.256,00
Pendapatan Denda Pajak Walet	1.900.000,00	2.108.800,00	110,57	11.100,000	2.089.700,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bekuan	4.500.000,00	1.740.000,00	38,67	0,00	1.740.000,00
Pendapatan Denda PBB P2	65.000.000,00	55.311.024,00	85,09	483.775.420,000	(428.464.396,00)
Pendapatan Denda BPHTP	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	106.999.000,00	81.501.945,00	85,52	511.420.368,00	(419.918.423,00)

b) Dinas Kesehatan

Tabel 5.25 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.037.510.000,00	13.888.868.100,00	86,60	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Jumlah	16.037.510.000,00	13.888.868.100,00	86,60	13.567.724.070,00	321.144.030,00

c) RSUD Bengkalis

Tabel 5.26 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	53.165.960.237,10	50.424.925.340,00	94,84	41.135.545.419,00	9.289.379.921,00
Jumlah	53.165.960.237,10	50.424.925.340,00	94,84	41.135.545.419,00	9.289.379.921,00

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis TA 2020 sebesar Rp50.424.925.340,- atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp53.165.960.237,10 dengan rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	43.486.884.485,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp	372.722.244,00
* Pendapatan Hibah	Rp	6.564.483.611,00
* Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	835.000,00
Jumlah	Rp	50.424.925.340,00

d) RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5.27 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	53.935.965.714,00	98,07	33.593.536.757,00	20.342.428.957,00
Jumlah	55.000.000.000,00	53.935.965.714,00	98,07	33.593.536.757,00	20.342.428.957,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau TA 2020 sebesar Rp53.935.965.714,- atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp55.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	53.713.159.493,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp	74.551.221,00
* Pendapatan BLUD yang sah	Rp	148.255.000,00
		<u>53.935.965.714,00</u>

e) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.28 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Kelautan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penjualan Hasil Perikanan	215.000.000,00	303.289.700,00	141,06	557.782.000,00	(254.512.300,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00	909.090,00	18,18	545.454,00	363.636,00
Jumlah	220.000.000,00	304.178.790,00	138,26	558.327.454,00	(254.148.664,00)

f) PPKD

Tabel 5.29 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah PPKD

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	723.380.000,00	0,00	382.150.000,00	341.230.000,00
Jasa Giro Kas Daerah	7.500.000.000,00	3.256.110.350,00	43,41	9.158.047.982,00	(5.901.937.632,00)
Jasa Giro Pemegang Kas	5.000.000.000,00	830.541.708,00	16,61	938.861.598,00	(108.319.890,00)
Pendapatan Bunga Deposito	18.000.000.000,00	19.481.596.510,00	108,23	2.983.980.005,00	16.497.616.505,00
Hasil Eksekusi Jaminan	16.934.915.976,13	7.147.958.273,22	44,86	88.497.550,00	7.059.460.723,22
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	5.000.000.000,00	23.675.778,00	0,47	183.260.386,00	(159.584.608,00)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00	1.177.969.623,26	7,85	6.457.956.358,50	(5.279.986.735,24)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	15.000.000.000,00	6.991.293.458,46	46,61	10.457.039.231,10	(3.465.745.774,64)
Jumlah	61.434.915.976,13	39.632.525.698,94	48,67	30.649.793.710,60	8.982.732.588,34

Pendapatan Bunga Deposito dari anggaran sebesar Rp 18.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp19.481.596.510,-

Tabel 5.30 Rekap Bunga Deposito

Uraian	Tgl Terima	Jumlah
1	2	3
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bunga Deposito Pemerintah Kab. Bengkalis pada PT. Bank	10 Februari 2020	541.666.590,00
Total		541.666.590,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Maret 2020	270.138.866,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Maret 2020	135.069.418,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	09 Maret 2020	135.069.418,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	20 Maret 2020	291.666.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - BUDEP Pemda	09 April 2020	291.666.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - BUDEP Pemda	09 April 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - BUDEP Pemda	09 April 2020	145.833.330,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bunga Deposito Bank Riau Kepri - BUDEP Pemda	20 April 2020	291.666.660,00
Total		1.706.944.342,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	05 Mei 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	05 Mei 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	05 Mei 2020	147.916.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	13 Mei 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	13 Mei 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	13 Mei 2020	291.666.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB April Tahun 2020	20 Mei 2020	291.666.660,00
Total		1.614.583.290,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Mei 2020	03 Juni 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Mei 2020	03 Juni 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Mei 2020	03 Juni 2020	147.916.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Mei 2020	09 Juni 2020	291.666.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Mei 2020	09 Juni 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Mei 2020	22 Juni 2020	291.666.660,00
Total		1.468.749.960,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Juni 2020	06 Juli 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Juni 2020	06 Juli 2020	147.916.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Juni 2020	06 Juli 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Juni 2020	14 Juli 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Juni 2020	14 Juli 2020	291.666.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Juni 2020	20 Juli 2020	291.666.660,00
Total		1.466.749.960,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	03 Agustus 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	03 Agustus 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	03 Agustus 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	03 Agustus 2020	147.916.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	10 Agustus 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	10 Agustus 2020	291.666.660,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Juli 2020	26 Agustus 2020	291.666.660,00
Total		1.708.333.290,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	01 September 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	03 September 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	03 September 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	03 September 2020	147.916.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	11 September 2020	145.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri	23 September 2020	238.194.438,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	26 September 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	26 September 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	26 September 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	26 September 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	26 September 2020	239.583.330,00
Total		2.561.111.056,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	01 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	01 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	01 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	01 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	01 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	08 Oktober 2020	147.916.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	08 Oktober 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	08 Oktober 2020	295.833.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	12 Oktober 2020	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB September 2020	12 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Oktober 2020	23 Oktober 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Oktober 2020	26 Oktober 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Oktober 2020	26 Oktober 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Oktober 2020	26 Oktober 2020	208.333.320,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Oktober 2020	26 Oktober 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Oktober 2020	26 Oktober 2020	208.333.320,00
Total		3.578.124.870,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	02 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	02 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	02 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	02 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	02 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	02 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	09 Nopember 2020	218.749.980,00
Bunga Deposito Bank Riau - UB Oktober 2020	09 Nopember 2020	218.749.980,00
Bunga Deposito Bank Riau	09 Nopember 2020	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Oktober 2020	26 Nopember 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Oktober 2020	26 Nopember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Oktober 2020	26 Nopember 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Oktober 2020	26 Nopember 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Oktober 2020	26 Nopember 2020	208.333.320,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - Bulan Oktober 2020	26 Nopember 2020	208.333.320,00
Total		3.276.041.520,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	01 Desember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	01 Desember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	01 Desember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	01 Desember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	01 Desember 2020	239.583.330,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	10 Desember 2020	119.791.650,00
Bunga Deposito Bank Riau Kepri - UB Nov 2020	21 Desember 2020	239.583.330,00
Total		1.557.291.630,00
Total Feb sd Des 2020		19.481.596.510,00

Hasil Eksekusi Jaminan dari anggaran Rp15.934.915.976,13 terealisasi sebesar Rp7.147.958.273,22 merupakan pembayaran klaim dari PT. Mawartido Road Construction terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalam Nyirih (MY) berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II nomor 329B/Pdt.Sus-Arbt/2019 dan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 600/PUPR/LX/2019/617 tanggal 05 September 2019 perihal Peringatan ke-11 Klaim Jaminan Pelaksanaan.

g) Dinas Pertanian

Tabel 5.31 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000,00
Dana Bergulir					
Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000,00

h) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.31 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan	60.000.000,00	20.287.148,00	33,81	47.220.181,00	(26.933.033,00)
Dana Bergulir					
Jumlah	60.000.000,00	20.287.148,00	33,81	47.220.181,00	(26.933.033,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

i) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.32 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	60.000.000,00	26.227.270,00	43,71	51.969.345,00	(25.742.075,00)
Jumlah	60.000.000,00	26.227.270,00	43,71	51.969.345,00	(25.742.075,00)

B. Pendapatan Transfer

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.538.339.433.269,60	2.573.597.479.818,49	101,39	3.463.146.359.212,47	(89.548.879.393,98)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.573.597.479.818,49 atau 101,39% dari anggaran sebesar Rp2.538.339.433.269,60, sementara realisasi pendapatan transfer TA. 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta transfer pemerintah provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer selama TA 2020 dan Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.33 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.244.368.625.485,80	2.275.653.458.310,00	101,39	3.192.463.207.633,00	(916.809.749.323,00)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	166.657.936.000,00	166.657.936.000,00	100,00	131.071.695.996,00	35.586.240.004,00
Transfer Pemerintah Provinsi	127.312.871.783,80	131.286.085.508,49	103,12	139.611.456.583,47	(8.325.370.074,98)
Jumlah	2.538.339.433.269,60	2.573.597.479.818,49	101,39	3.463.146.359.212,47	(89.548.879.393,98)

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.244.368.625.485,80	2.275.653.458.310,00	101,39	3.192.463.207.633,00	(916.809.749.323,00)

Berikut ini adalah rincian realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020 dan TA. 2019 :

Tabel 5.34 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil Pajak	1.121.341.257.294,08	1.050.702.831.784,00	93,70	1.416.335.599.329,00	(365.632.767.545,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak	566.887.394.191,72	678.078.156.631,00	119,61	1.139.933.590.010,00	(461.855.433.379,00)
Dana Alokasi Umum	344.485.485.000,00	338.731.609.000,00	98,33	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)
Dana Alokasi Khusus	211.654.489.000,00	208.140.860.895,00	98,34	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)
Jumlah	2.244.368.625.485,80	2.275.653.458.310,00	101,39	3.192.463.207.633,00	(916.809.749.323,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

per 31 Desember 2020 realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan adalah sebesar Rp2.275.653.458.310,00 atau 101,39% dari anggaran sebesar Rp2.244.368.625.485,80. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2019 sebesar Rp3.192.463.207.633,00 terdapat penurunan sejumlah Rp916.809.749.323,00 atau 28,72%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.121.341.257.294,08	1.050.702.831.784,00	93,70	1.416.335.599.329,00	(365.632.767.545,00)

Realisasi Bagi Hasil Pajak selama TA.2020 sebesar Rp1.050.702.831.784,00 atau 93,70% dari anggaran sebesar Rp1.121.341.257.294,08 dan jika dibandingkan TA. 2019 sebesar Rp1.416.335.599.329,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp365.632.767.545,00 atau 25,82%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata, serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	3.819.146.996,28	59.289.166.551,00	1.552,42	0,00	59.289.166.551,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	35.003.200.502,44	1.643.380.893,00	4,69	0,00	1.643.380.893,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	1.052.446.527,88	3.399.342.940,00	322,99	0,00	3.399.342.940,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.945.182.636,88	3.860.526.654,00	198,47	0,00	3.860.526.654,00
Biaya Pemungutan	4.123.588.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Bangunan (Sektor Lainnya)	349.372.760,92	59.300.236,00	16,97	0,00	59.300.236,00
Bagi Hasil dari PPH	0,00	0,00	0,00	24.297.369.146,00	(24.297.369.146,00)
Bagi Hasil dari PBB	1.075.048.319.437,08	982.451.114.519,00	91,39	1.392.038.230.183,00	(409.587.115.673,00)
Lainnya	1.121.341.257.294,08	1.050.702.831.784,00	93,70	1.416.335.599.329,00	(365.632.767.545,00)

Tabel 5.36 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak

Urutan	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2020	Kurang Bayar	Total
a	b	c	d= b+c
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	34.128.793.890,00	25.160.372.751,00	59.289.166.551,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA. 2020	10.168.213.600,00		
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA. 2020	12.174.806.600,00		
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA. 2020	11.785.773.600,00		
Alokasi Sementara KB DBH PPh TA. 2019 yang dialokasikan pada TA. 2020		11.520.562.050,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020		13.639.810.701,00	
Bagi Hasil DBH Pajak Pasal 25/29	569.595.400,00	1.073.795.493,00	1.643.380.893,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA. 2020	157.664.800,00		
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA. 2020	209.304.400,00		
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA. 2020	202.616.200,00		
Kurang Bayar DBH PPh Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA. 2020		168.976.615,00	
Alokasi Sementara KB DBH PPh TA. 2019 yang dialokasikan pada TA. 2020		419.659.280,00	
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020		485.159.598,00	
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	2.220.378.400,00	1.178.964.540,00	3.399.342.940,00
DBH PBB Perhutanan, Minggu ke 1-8 TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	2.137.267.600,00		
DBH PBB Perhutanan, Minggu ke 1-8 TA. 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	83.110.800,00		
Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah		797.017.273,00	
Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan		30.995.116,00	
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah		350.952.151,00	
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	2.945.892.800,00	914.633.854,00	3.860.526.654,00
DBH PBB Perkebunan, Minggu ke 1-8 TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	2.820.551.600,00		
DBH PBB Perkebunan, Minggu ke 1-8 TA. 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	125.341.200,00		
Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah		254.552.164,00	
Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan		11.313.430,00	
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah		648.768.260,00	
Bagi Hasil Pajak dan Bangunan (Sektor Lainnya)	11.854.800,00	47.445.436,00	59.300.236,00
DBH PBB Sektor Lainnya, Minggu ke 1-8 TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	11.472.400,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH PBB Sektor Lainnya, Minggu ke 1-8 TA. 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	382.400,00		
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah		37.346.498,00	
Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan			1.244.884,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah			6.854.054,00
Bagi Hasil dari PBB	823.114.616.400,00	159.336.498.110,00	982.451.114.510,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	233.554.472.600,00		
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA. 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	7.785.149.000,00		
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	233.719.943.500,00		
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	7.800.672.000,00		
DBH PBB Migas, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	327.207.920.900,00		
DBH PBB Migas, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	10.920.940.800,00		
DBH PBB Bagi Rata, Tahap ke 1 TA. 2020	797.069.100,00		
DBH PBB Bagi Rata, Tahap ke 2 TA. 2020	1.328.448.500,00		
Kurang Bayar DBH PBB Migas Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah		121.139.255.506,00	
Kurang Bayar DBH PBB Migas Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan			4.037.975.184,00
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah			33.573.293.086,00
Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA, 2020 => 611215 DBH PBB Bagi Rata			585.974.334,00
Total	862.991.121.600,00	187.711.710.184,00	1.050.702.831.784,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak selama TA 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp51.941.949.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp1.013.081.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp58.928.868.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan TA 2018 yang Belum diselesaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp14.124.970.299,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp485.159.598,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp13.639.810.701,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

- Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp. 3.358.973.000,00. Bagian Daerah sebesar Rp1.181.639.653.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp8.522.079.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp5.305.384.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.167.772.363.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp39.827.000,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp39.512.152.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp378.759.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp206.320.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp38.925.745.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp1.328.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 PBB menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Bagi Rata sebesar Rp1.153.653.617,00. Bagian Daerah sebesar Rp454.751.760.737,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp6.947.080.845,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp3.758.033.671,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp428.071.080.886,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp94.810.172,00. Biaya Pemungutan sektor Perkebunan sebesar Rp308.759.246,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp146.145.941,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp14.269.035.913,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.160.446,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	a=b/a	d	a-b-d
566.887.394.191,72	678.078.156.631,00	119,61	1.139.933.590.010,00	(461.855.433.379)

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp678.078.156.631,00 atau 119,61% dari anggaran sebesar Rp566.887.394.191,72. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.139.933.590.010,00 mengalami penurunan sebesar Rp461.855.433.379,00 atau 40,52%.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	a=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	553.038.645.376,96	666.565.099.432,00	120,53	1.132.818.970.810,00	(466.253.871.378,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	1.607.780.471,48	1.418.038.691,00	88,20	1.758.400.000,00	(340.361.309,00)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	852.480.331,00	788.276.289,00	92,47	590.165.800,00	198.120.489,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	11.388.289.912,28	9.306.618.019,00	81,72	4.766.063.400,00	4.540.554.619,00
Cukai Hasil Tembakau	198.100,00	124.200,00	62,70	0,00	124.200,00
Jumlah	566.887.394.191,72	678.079.156.631,00	119,81	1.139.933.690.010,00	(461.855.433.379,00)

Tabel 5.38 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Urutan	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2020	Kurang Bayar	Total
a	b	c	d=b+c
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	508.889.468.800,00	157.675.630.632,00	666.565.099.432,00
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2020 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	173.763.958.400,00		
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2020 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	5.792.132.000,00		
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	132.056.612.000,00		
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	4.401.887.000,00		
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	184.879.256.800,00		
DBH SDA Minyak Bumi, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	6.162.641.800,00		
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2020 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%	708.881.400,00		
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2020 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	11.814.600,00		
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%	455.854.500,00		
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	7.597.500,00		
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%	638.196.300,00		
DBH SDA Gas Bumi, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	10.636.500,00		
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%		152.004.253.492,00	
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%		5.066.808.303,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%		594.658.053,00	
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%		9.910.784,00	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	773.227.050,00	644.811.641,00	1.418.038.691,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara, Triwulan ke 1 TA. 2020	193.012.600,00		
DBH SDA Minerba, Triwulan ke 2 TA. 2020 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti	260.887.750,00		
DBH SDA Minerba, Triwulan ke 3 TA. 2020 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti	319.326.700,00		
Kurang Bayar DBH SDA Minerba Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti		644.811.641,00	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	784.599.000,00	3.677.289,00	788.276.289,00
DBH SDA Perikanan, Triwulan ke 1 TA. 2020	75.418.500,00		
DBH SDA Perikanan, Triwulan ke 2 TA. 2020	212.754.150,00		
DBH SDA Perikanan, Triwulan ke 3 TA. 2020	496.426.350,00		
Kurang Bayar DBH SDA Perikanan Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA. 2020		3.677.289,00	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	5.632.185.050,00	3.674.432.969,00	9.306.618.019,00
DBH SDA Kehutanan, Triwulan ke 1 TA. 2020=> PSDH	1.164.569.400,00		
DBH SDA Kehutanan, Triwulan ke 2 TA. 2020 => PSDH	1.164.569.400,00		
DBH SDA Kehutanan, Triwulan ke 3 TA. 2020 => PSDH	3.303.046.250,00		
Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun 2018 yang Dialokasikan pada TA. 2020 => PSDH		3.674.432.969,00	
Cukai Hasil Tembakau	124.200,00	0,00	124.200,00
DBH Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ke 1 TA. 2020	51.000,00		
DBH Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ke 2 TA. 2020	73.200,00		
Total	516.079.004.100,00	161.988.552.531,00	678.073.156.631,00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak selama TA. 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp547.687.804.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp545.833.996.000,00 dan Gas Bumi sebesar Rp1.853.808.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp157.675.630.632 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp157.071.061.795,00 dan Gas Bumi sebesar Rp604.568.837,00.

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp912.362.000,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp912.362.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 698.814.018,00.

- Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp1.418.361.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp229.300.150,00

- Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp9.437.275.000,00 dengan Rincian IUPH sebesar Rp0,00; PSDH sebesar Rp9.437.275.000,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.434.542.476,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
344.485.485.000,00	338.731.608.000,00	98,33	373.268.646.000,00	(34.537.037.000)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2020 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp344.485.485.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.39 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Alokasi Umum	344.485.485.000,00	338.731.609.000,00	98,33	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)
Jumlah	344.485.485.000,00	338.731.609.000,00	98,33	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
211.654.489.000,00	208.140.860.895,00	98,34	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) selama per 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 . Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.140.860.895,00 atau 98,34% dari anggarannya sebesar Rp211.654.489.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Tabel 5.40 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

DAK Fisik	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Bidang Pendidikan	33.237.927.000,00	33.188.479.029,00	99,85	20.764.156.993,00	12.424.322.036,00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	21.482.575.000,00	19.484.492.836,00	90,78	16.363.720.515,00	3.120.772.321,00
DAK Bidang Kesehatan	2.226.007.000,00	2.216.867.750,00	99,59	18.849.667.658,00	(16.632.799.908,00)
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	649.241.000,00	649.241.000,00	100,00	725.538.306,00	(76.297.306,00)
DAK Afirmasi Bidang Penguatan Puskesmas OTPK	6.738.016.000,00	5.915.039.982,00	87,79	0,00	5.915.039.982,00
DAK Cadangan Afirmasi Bidang Sanitasi	570.501.000,00	570.501.000,00	100,00	0,00	570.501.000,00
DAK Cadangan Penugasan Bidang Irigasi	1.219.891.000,00	1.112.337.434,00	91,18	0,00	1.112.337.434,00
DAK Cadangan Afirmasi Bidang Air Minum	6.071.409.000,00	5.714.326.047,00	94,12	0,00	5.714.326.047,00
DAK Cadangan Afirmasi Bidang Perumahan Permukiman	3.491.250.000,00	3.462.428.565,00	99,17	0,00	3.462.428.565,00
DAK Cadangan Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.048.222.000,00	1.004.638.350,00	95,84	0,00	1.004.638.350,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	48.174.991.580,00	(48.174.991.580,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	10.034.128.377,00	(10.034.128.377,00)
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.314.900.000,00	(1.314.900.000,00)
DAK Bidang Transportasi Perdesaan	0,00	0,00	0,00	20.625.010,00	(20.625.010,00)
DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	2.508.252.135,00	(2.508.252.135,00)
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	1.829.200.000,00	(1.829.200.000,00)
DAK Bidang Sarana Prasarana Irigasi dan Air Minum	0,00	0,00	0,00	986.913.100,00	(986.913.100,00)
Jumlah	76.715.038.000,00	73.318.351.993,00	95,57	121.572.093.674,00	(48.253.741.681,00)

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tabel 5.41 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Keputusan	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	kenaikan/penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Tunjangan Profesi Guru PNSD	101.677.829.000,00	101.677.829.000,00	100,00	101.402.190.500,00	275.638.500,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	894.000.000,00	894.000.000,00	100,00	1.094.000.000,00	(200.000.000,00)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.812.600.000,00	7.435.600.000,00	95,18	7.583.400.000,00	(147.600.000,00)
Bantuan Operasional Kesehatan	8.112.480.000,00	11.658.944.275,00	143,73	8.609.485.000,00	3.050.459.275,00
Akreditasi Puskesmas	1.088.755.000,00	0,00	0,00	1.418.193.730,00	(1.418.193.730,00)
Jaminan Persalinan	3.520.693.000,00	0,00	0,00	2.822.525.840,00	(2.822.525.840,00)
Bantuan Operasional KB	2.456.820.000,00	2.233.525.000,00	90,91	2.070.183.550,00	163.341.450,00
Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	13.301.060.000,00	(13.301.060.000,00)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.377.184.000,00	2.230.729.976,00	93,84	689.370.000,00	1.541.359.976,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.349.200.000,00	1.349.200.000,00	100,00	1.610.700.000,00	(261.500.000,00)
DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	317.730.800,00	92,35	752.170.000,00	(434.439.200,00)
DAK Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan	5.250.000.000,00	7.023.749.851,00	133,79	0,00	7.023.749.851,00
Jumlah	134.939.450.000,00	134.822.508.902,00	99,91	141.353.278.620,00	(6.530.769.718,00)

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
166.657.936.000,00	166.657.936.000,00	100,00	131.071.695.996,00	35.586.240.004,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.42 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

DAK Non Fisik Menurut Syarat Ketentuan	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
Dana Insentif Daerah	35.625.236.000,00	100,00	0,00	35.625.236.000,00
Dana Desa dan Desa Adat	131.032.700.000,00	100,00	131.071.695.996,00	(38.995.996,00)
Jumlah	166.657.936.000,00	100,00	131.071.695.996,00	35.586.240.004,00

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp166.657.936.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.586.240.004,00 atau 27,15% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp131.071.695.996,00.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
127.312.871.783,80	131.288.085.508,49	103,12	139.611.455.583,47	(8.325.370.074,98)

Realisasi transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a). Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
96.937.271.783,80	104.662.859.108,49	107,97	131.841.460.583,47	(27.178.601.474,98)

Penerimaan yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp104.662.859.108,49 atau 107,97% dari anggaran sebesar Rp96.937.271.783,80, mengalami penurunan sebesar Rp27.178.601,474,98 atau 20,61% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang berjumlah Rp131.841.460.583,47.

Tabel 5.43 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pajak Kendaraan Bermotor	23.802.248.379,91	27.011.248.346,49	113,48	36.034.090.063,62	(9.022.841.707,13)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.139.125.223,37	14.501.043.214,00	89,85	25.625.132.014,75	(11.124.088.800,75)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.070.884.800,98	35.356.482.824,00	95,38	47.740.866.175,75	(12.384.383.351,75)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	679.948.604,21	879.211.610,00	129,31	1.347.251.693,35	(468.040.083,35)
Pajak Rokok	19.245.066.775,33	26.914.873.114,00	139,85	21.094.120.646,00	5.820.752.468,00
Jumlah	98.937.271.783,80	104.962.859.108,49	107,97	131.841.460.583,47	(27.178.601.474,98)

Realisasi dana bagi hasil dari selama TA 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 796 / V / 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.198.019.821,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.383.964.578,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.538.611.967,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp197.705.548,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 797 / V / 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.828.854.803,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 798 / V / 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2019 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.638.203.695,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1082 / VI / 2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2019) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.878.176.685,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.772.360.666,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.865.613.047,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp71.214.013,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1306 / VIII / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.785.275.765,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.150.791.758,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.524.364.289,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp246.727.018,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1380 /IX/ 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.309.407.509,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1567 / XI / 2020 tanggal 13 November 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.398.630.365,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.937.198.734,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.700.493.181,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp220.780.506,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1568 /XI/ 2020 tanggal 13 November 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.322.728.201,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 2049 / XII / 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.247.210.254,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.297.817.986,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.992.464.014,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp160.504.287,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 2085 /XII/ 2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober- November) tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.815.678.906,00.

b). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
30.375.600.000,00	26.623.226.400,00	87,65	7.769.995.000,00	18.853.231.400,00

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.623.226.400,00 atau 87,65% dari anggarannya sebesar Rp30.375.600.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.853.231.400,00 atau 242,64% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang berjumlah Rp7.769.995.000,00 yang berasal dari PPKD.

Tabel 5.44 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	30.375.600.000,00	26.623.226.400,00	87,65	7.769.995.000,00	18.853.231.400,00
Jumlah	30.375.600.000,00	26.623.226.400,00	87,65	7.769.995.000,00	18.853.231.400,00

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.142/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp. 8.060.000.000,-, Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.740/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan dampak sosial Corona Virus Disease (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, urusan Kesehatan sebesar Rp.1.900.000.000,- dan Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.848/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan dampak sosial Corona Virus Disease (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, urusan sosial sebesar Rp.20.415.600.000,-

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah sebesar Rp30.375.600.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp26.623.226.400,00 atau 87,65% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan per OPD

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	8.060.000.000,00	8.048.802.900,00	99,86	7.769.995.000,00	278.807.900,00
Bantuan Keuangan COVID 19	22.315.600.000,00	18.574.423.500,00	83,24	0,00	18.574.423.500,00
Jumlah	30.375.600.000,00	26.623.226.400,00	99,86	7.769.995.000,00	18.853.231.400,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
92.243.856.470,00	91.869.880.000,00	99,59	85.045.520.000,00	6.824.360.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah selama TA. 2020 adalah sebesar Rp91.869.880.000,00 atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp92.243.856.470,00 dan realisasi tahun 2019 yang berjumlah Rp85.045.520.000,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-e
Pendapatan Hibah	92.243.856.470,00	91.438.330.000,00	99,13	85.045.520.000,00	6.392.810.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	431.550.000,00	0,00	0,00	431.550.000,00
Jumlah	92.243.856.470,00	91.869.880.000,00	99,59	85.045.520.000,00	6.824.360.000,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp91.438.330.000 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bos yang disahkan berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) nomor 02/SP2H/BUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp90.754.330.000 dan Belanja Hibah Air Minum Perdesaan (transfer dari Pemerintah Pusat ke rekening kas daerah) sebesar Rp684.000.000,- .

Pendapatan lainnya merupakan Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan tarif non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Dana Non Kapitasi pada UPT Puskesmas bersumber dari Pelayanan Kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan diluar dana kapitasi.

Dana Tarif Non Kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan. Untuk Dana Non Kapitasi tidak dicantumkan aturan secara tertulis baik itu didalam Peraturan Bupati Bengkalis maupun didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Bahwa dana non kapitasi ini masuk ke Dana Retribusi. Atas saran dari Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Riau dana non kapitasi ini diakui sebagai Pendapatan Lainnya.

5.1.2. Belanja

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.804.107.020.265,62	2.634.561.696.928,84	93,95	3.300.154.218.224,97	(665.592.521.296)

Realisasi Belanja Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.634.561.696.928,84 atau 93,95% dari nilai anggaran sebesar Rp2.804.107.020.265,62. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.300.154.218.224,97 mengalami penurunan sebesar Rp665.592.521.296,13 atau 20,17% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.47 Belanja dan Transfer

Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Operasi	2.079.598.552.265,06	1.981.293.374.799,00	95,27	2.191.978.637.329,98	(210.685.262.530,98)
Belanja Modal	559.891.175.437,55	500.329.662.982,84	89,36	1.108.175.580.894,99	(607.845.917.912,15)
Belanja Tidak Terduga	164.617.292.563,01	152.938.659.147,00	92,91	0,00	152.938.659.147,00
Jumlah	2.804.107.020.265,62	2.634.561.696.928,64	93,96	3.300.154.218.224,97	(665.592.521.296,13)

A. Belanja Operasi

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.079.598.552.265,06	1.981.293.374.799,00	95,27	2.191.978.637.329,98	(210.685.262.530,98)

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.981.293.374.799,00 atau 95,27% dari nilai anggaran sebesar Rp2.079.598.552.265,06. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.191.978.637.329,98 mengalami penurunan sebesar Rp210.685.262.530,98 atau 9,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Pegawai	997.589.744.011,46	967.266.480.083,00	96,96	1.077.884.549.964,00	(110.618.069.881,00)
Belanja Barang dan Jasa	998.125.522.329,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98	(108.169.473.074,98)
Belanja Subsidi	9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)
Belanja Hibah	72.764.589.031,00	71.023.667.791,00	97,61	59.946.830.651,00	11.076.837.140,00
Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)
Jumlah	2.079.598.552.265,06	1.981.293.374.799,00	95,27	2.191.978.637.329,98	(210.685.262.530,98)

1. Belanja Pegawai

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
997.589.744.011,46	967.266.480.083,00	96,96	1.077.884.549.964,00	(110.618.069.881,00)

Realisasi belanja pegawai selama TA. 2020 sebesar Rp967.266.480.083,00 atau 96,96% dari anggaran sebesar Rp997.589.744.011,46,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.077.884.549.964,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp110.618.069.881,00 atau 10,26%.

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Gaji dan Tunjangan	491.080.203.003,65	479.340.587.981,00	97,61	473.298.338.919,00	6.042.249.062,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	348.170.939.556,65	341.144.645.529,00	97,98	347.042.443.516,00	(5.897.797.987,00)
Tunjangan Keluarga	36.446.990.479,85	34.536.571.402,00	97,43	35.250.387.929,00	(713.616.527,00)
Tunjangan Jabatan	11.843.984.232,00	10.926.155.680,00	92,25	10.949.943.364,00	(23.787.684,00)
Tunjangan Fungsional	21.676.620.201,00	21.595.659.200,00	99,63	21.155.802.200,00	439.857.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	5.381.942.634,00	5.051.250.000,00	93,86	5.627.549.000,00	(576.299.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan Beras	19.354.051.252,10	18.704.081.875,00	96,64	19.249.293.712,00	(545.211.837,00)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.101.548.436,05	1.419.939.987,00	67,57	1.415.450.234,00	4.489.753,00
Pembulatan Gaji	8.387.104,00	4.879.170,00	58,17	5.852.228,00	(773.058,00)
Iuran BPJS Kesehatan	23.724.212.752,00	23.405.003.357,00	98,65	9.845.761.660,00	13.559.241.697,00
Uang Paket	86.058.000,00	84.809.000,00	98,32	85.974.000,00	(1.385.000,00)
Tunjangan Badan Musyawarah	34.904.700,00	27.861.750,00	79,82	28.836.150,00	(974.400,00)
Tunjangan Komisi	60.303.000,00	55.175.400,00	91,50	56.271.600,00	(1.096.200,00)
Tunjangan Badan Anggaran	37.097.100,00	26.674.200,00	71,90	28.562.100,00	(1.887.900,00)
Tunjangan Badan Kehormatan	8.952.300,00	7.764.750,00	86,73	7.475.475,00	289.275,00
Tunjangan Alat Keengkapan Lainnya	19.183.500,00	15.620.850,00	81,43	15.072.750,00	548.100,00
Tunjangan Perumahan	8.856.000.000,00	8.748.000.000,00	98,78	8.928.000.000,00	(180.000.000,00)
Uang Jasa Pengabdian	430.290.000,00	0,00	0,00	376.740.000,00	(376.740.000,00)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	721.509.168,00	701.548.952,00	97,23	713.527.909,00	(11.978.957,00)
Iuran Jaminan Kematian	2.153.728.588,00	2.104.646.879,00	97,72	2.140.595.092,00	(36.948.213,00)
Tunjangan Transportasi	8.979.000.000,00	8.869.500.000,00	98,78	9.052.000.000,00	(182.500.000,00)
Tunjangan Reses	1.984.500.000,00	1.911.000.000,00	96,30	1.323.000.000,00	588.000.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	497.578.421.007,81	479.589.732.102	96,38	593.556.168.335	(113.966.436.233,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	101.619.689.643,00	99.955.271.981,00	98,17	22.472.324.000,00	77.482.947.981,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas	1.878.239.100,00	1.561.363.125,00	83,13	0,00	1.561.363.125,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	7.174.625.357,81	6.511.370.898,00	90,76	0,00	6.511.370.898,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	5.717.307.399,00	5.624.342.651,00	98,37	0,00	5.624.342.651,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	245.501.146.448,00	242.436.059.405,00	98,75	0,00	242.436.059.405,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	135.487.413.060,00	123.501.324.042,00	91,15	0,00	123.501.324.042,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	108.974.432.000,00	(108.974.432.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.576.000.000,00	(1.576.000.000,00)
Tambahan Penghasilan Pegawai	0,00	0,00	0,00	450.135.433.015,00	(450.135.433.015,00)
Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	10.397.979.320,00	(10.397.979.320,00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.931.120.000,00	8.336.160.000,00	93,34	8.898.360.000,00	(562.200.000,00)
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.805.700.000,00	98,33	7.938.000.000,00	(132.300.000,00)
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	157.500.000,00	26,25	600.000.000,00	(442.500.000,00)
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	372.960.000,00	94,87	360.360.000,00	12.600.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.885.245.210,00	(1.885.245.210,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	979.745.210,00	(979.745.210,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	(62.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00	(355.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00	(63.750.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	246.437.500,00	(246.437.500,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	(87.500.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00	(16.050.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	21.775.000,00	(21.775.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	11.812.500,00	(11.812.500,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	95.800.000,00	(95.800.000,00)
Jumlah	1.995.179.485.022,92	967.286.430.083,00	48,46	1.077.884.549.964,00	(110.618.068.881,00)

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan terealisasi sebesar Rp123.501.324.042,00 dari jumlah tersebut Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 1.447.122.625,00

Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkalis.

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.50 Rincian Belanja Pegawai Per OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=cb	e	f=c-e
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	758.839.806,00	232.288.844,00	30,61	757.644.950,00	(525.356.106,00)
Sekretariat Daerah	27.316.356.490,00	26.308.751.320,00	96,31	28.069.599.845,00	(1.760.848.525,00)
Sekretariat DPRD	38.985.916.204,00	37.648.674.158,00	96,57	38.956.179.772,00	(1.309.305.614,00)
Dinas Kesehatan	73.228.326.347,00	72.535.067.441,00	99,05	76.067.682.152,00	(3.472.614.711,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.925.745.356,00	7.453.678.733,00	94,04	7.478.144.842,00	(24.466.109,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.428.839.566,00	7.600.629.208,00	90,20	7.799.443.723,00	(198.814.515,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.266.284.368,00	8.000.405.955,00	96,78	7.677.581.892,00	322.824.063,00
Badan Pendapatan Daerah	13.299.647.588,00	12.736.554.045,00	95,77	14.908.474.294,00	(2.171.920.249,00)
Saluran Polisi Pamong Praja	9.816.815.664,00	9.571.201.173,00	97,50	10.584.448.745,00	(1.013.247.572,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.250.475.031,00	6.081.032.532,00	97,29	6.953.748.588,00	(872.716.056,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.847.799.056,00	5.408.837.079,00	92,49	5.472.085.282,00	(63.248.203,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.435.988.702,00	4.324.014.612,00	97,48	4.829.497.162,00	(505.482.550,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.105.121.410,78	4.678.210.015,00	91,64	4.781.370.590,00	(103.160.575,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.284.731.952,00	7.848.765.964,00	94,74	8.528.282.121,00	(679.516.157,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	4.207.701.449,00	3.965.168.424,00	94,24	4.324.671.647,00	(359.503.223,00)
Dinas Pendidikan	494.758.827.477,00	484.881.740.478,00	98,00	573.126.613.555,00	(88.244.873.077,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	7.081.693.321,00	6.772.828.420,00	95,64	7.362.650.381,00	(589.821.961,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.082.723.071,00	5.610.080.366,00	92,23	6.312.330.170,00	(702.249.804,00)
Inspektorat	6.942.194.360,00	6.535.536.211,00	94,14	6.701.017.932,00	(165.481.721,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8.598.050.887,25	8.249.241.147,00	95,94	9.028.473.082,00	(779.231.935,00)
Dinas Sosial	7.248.429.338,00	7.184.557.577,00	99,12	8.021.173.498,00	(836.515.921,00)
RSUD Bengkalis	32.520.890.412,00	30.538.944.084,00	93,91	32.766.159.714,00	(2.227.215.630,00)
RSUD Kecamatan Mandau	28.169.974.749,00	27.862.717.740,00	98,91	29.769.849.444,00	(1.907.131.704,00)
Kecamatan Mandau	12.577.538.388,00	11.377.282.946,00	90,46	12.189.447.517,00	(812.164.571,00)
Kecamatan Rupa	5.462.320.129,00	5.054.840.455,00	92,54	6.097.391.234,00	(1.042.550.779,00)
Kecamatan Rupa Utara	3.472.715.669,00	3.375.824.373,00	97,21	3.687.104.304,00	(311.279.931,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bengkulu	7.214.979.119,00	6.705.714.407,00	92,94	7.574.217.795,00	(868.503.388,00)
Kecamatan Bukit Batu	3.857.443.314,00	3.707.939.602,00	96,12	4.180.704.398,00	(472.764.796,00)
Kecamatan Bantan	2.898.369.353,00	2.857.201.611,00	98,58	3.444.959.243,00	(587.757.632,00)
Kecamatan Siak Kecil	3.310.720.503,00	3.122.008.010,00	94,30	3.396.296.617,00	(274.288.607,00)
Kecamatan Pinggir	4.078.922.588,00	4.016.946.489,00	98,48	4.117.504.085,00	(100.557.596,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.817.422.136,00	6.243.964.556,00	91,59	6.716.679.169,00	(472.714.613,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.267.665.983,00	8.006.488.599,00	96,84	9.221.868.814,00	(1.215.380.215,00)
Dinas Lingkungan Hidup	9.314.614.151,00	8.443.224.481,00	90,64	9.294.114.245,00	(850.869.764,00)
Dinas Pertanian	16.224.738.952,00	15.705.863.300,00	96,80	16.185.887.146,00	(480.023.846,00)
Dinas Perhubungan	13.312.640.144,00	12.129.541.817,00	91,11	12.977.498.621,00	(847.956.804,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.997.023.756,00	10.767.147.961,00	97,91	12.651.683.094,00	(1.884.535.133,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	7.967.459.396,78	7.564.610.751,00	94,94	8.140.338.310,00	(575.727.559,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.064.472.595,00	5.679.625.572,00	93,65	6.038.858.471,00	(359.232.899,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	5.844.746.359,00	5.347.698.565,00	91,74	5.899.061.017,00	(551.362.452,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.655.442.649,00	4.494.980.572,00	96,55	4.812.529.008,00	(317.548.436,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.077.901.181,65	34.797.264.697,00	99,20	23.407.592.216,00	11.389.672.481,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.387.096.858,00	5.151.008.087,00	95,62	5.330.124.158,00	(179.116.071,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.272.964.219,00	4.909.599.532,00	93,11	5.415.185.182,00	(505.585.650,00)
Kecamatan Bandar Leksamana	2.054.953.968,00	1.989.548.269,00	96,82	2.363.355.481,00	(373.809.212,00)
Kecamatan Talang Muandau	1.610.265.015,00	1.476.671.668,00	91,70	2.106.280.304,00	(629.608.636,00)
Kecamatan Bathin Solapan	2.487.924.990,00	2.314.260.227,00	93,02	2.418.746.144,00	(104.485.917,00)
Jumlah	997.589.744.011,46	967.268.480.083,00	96,96	1.077.884.549.964,00	(110.618.069.881,00)

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
998.125.522.329,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98	(108.169.473.074,98)

Realisasi belanja barang selama TA. 2020 sebesar Rp933.384.530.032,00 atau 93,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp998.125.522.329,60, jika dibandingkan TA 2019 sebesar Rp1.041.554.003.106,98 mengalami penurunan Rp108.169.473.074,98 atau 10,39%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja barang dan jasa merupakan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan/dimanfaatkan kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak, penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas serta perjalanan dinas dan lain-lain. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.51 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bahan Habis Pakai	59.712.535.752,00	57.266.015.905,00	95,90	53.498.269.458,36	3.787.746.446,64
Belanja Bahan/ Material	41.406.664.019,00	40.261.778.974,00	97,24	43.502.793.417,94	(3.241.014.443,94)
Belanja Jasa Kantor	403.739.094.584,00	378.230.261.743,00	93,68	331.804.370.276,00	46.425.891.467,00
Belanja Premi Asuransi	1.447.852.020,00	1.248.488.420,00	86,23	1.504.413.364,00	(255.924.944,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.409.874.209,00	21.407.500.385,00	81,06	26.784.475.559,00	(5.376.975.174,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.733.925.528,00	12.312.805.967,00	89,65	15.898.790.411,00	(3.585.964.444,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.155.121.335,00	2.797.607.914,00	88,67	4.990.494.683,00	(2.192.886.769,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.370.130.000,00	1.141.570.000,00	83,32	2.527.870.882,00	(1.386.300.882,00)
Belanja Sewa Alat Berat	37.500.000,00	19.000.000,00	50,67	196.544.000,00	(177.544.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.471.770.000,00	1.776.461.181,00	71,87	3.762.995.500,00	(1.986.534.319,00)
Belanja Makanan dan Minuman	36.784.229.206,00	32.756.781.786,00	89,05	47.487.068.080,00	(14.730.286.294,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	972.735.000,00	893.310.000,00	91,83	1.668.388.600,00	(775.078.600,00)
Belanja Pakaian Kerja	870.676.000,00	849.617.500,00	97,58	2.261.711.100,00	(1.412.093.600,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1.666.955.000,00	1.595.366.000,00	95,71	4.115.037.430,00	(2.519.671.430,00)
Belanja Perjalanan Dinas	140.557.401.872,50	128.718.002.452,00	91,58	171.618.053.707,00	(42.900.051.255,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	210.000.000,00	209.511.000,00	99,77	25.000.000,00	184.511.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	6.370.260.389,00	5.916.992.910,00	92,88	10.791.199.212,00	(4.874.206.302,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	4.555.325.000,00	4.541.700.000,00	99,70	0,00	4.541.700.000,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	65.000.000,00	25.460.000,00	39,17	45.235.000,00	(19.775.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Pemeliharaan	7.529.098.362,00	6.819.697.523,00	90,58	5.908.648.522,00	911.049.001,00
Belanja Jasa Konsultasi	14.603.269.000,00	13.170.473.315,00	90,19	12.874.548.917,00	295.924.398,00
Belanja Barang Dana BOS	38.457.755.547,00	39.965.187.757,00	103,92	40.449.864.233,00	(484.676.476,00)
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	835.478.000,00	562.307.004,00	67,30	7.535.086.083,00	(6.972.779.079,00)
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	15.660.664.000,00	14.642.862.909,00	93,50	92.227.000.625,00	(77.584.137.616,00)
Belanja Uang Saku	268.100.000,00	211.540.000,00	78,90	0,00	211.540.000,00
Honorarium PNS	17.476.470.000,00	16.301.185.500,00	93,27	12.949.115.000,00	3.352.050.500,00
Honorarium Non PNS	24.836.770.389,00	22.332.679.908,00	89,92	35.677.263.100,00	(13.344.583.192,00)
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	7.771.390.000,00	7.437.028.565,00	95,70	14.248.301.200,00	(6.811.272.635,00)
Belanja Pegawai BLUD	8.500.000.000,00	7.146.645.000,00	84,08	4.617.339.550,00	2.529.305.450,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.183.660.237,10	90.966.626.794,00	98,68	71.970.744.057,68	18.995.882.736,32
Belanja Pegawai Dana BOS	24.465.816.900,00	21.880.083.620,00	89,35	20.613.381.039,00	1.246.702.581,00
Jumlah	998.125.522.329,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98	(108.169.473.074,98)

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.52 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=cb	e	f=ce
Sekretariat Daerah	77.550.163.120,00	71.830.296.443,00	92,62	94.893.006.630,00	(23.062.710.187,00)
Sekretariat DPRD	71.190.941.649,50	65.477.024.269,00	91,97	66.606.770.865,00	(1.129.746.596,00)
Dinas Kesehatan	112.220.754.569,00	100.781.898.379,00	89,81	63.990.230.747,00	36.791.667.632,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.734.393.920,00	8.061.866.241,00	92,30	9.986.012.595,00	(1.924.146.354,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.496.695.420,00	3.493.951.096,00	99,92	4.564.742.711,00	(1.070.791.615,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.860.326.858,00	9.910.771.848,00	83,56	10.477.740.918,00	(586.969.070,00)
Badan Pendapatan Daerah	11.834.533.700,00	10.427.420.980,00	88,11	13.348.982.986,00	(2.921.562.006,00)
Saluan Polisi Pamong Praja	11.353.522.203,00	11.185.415.506,00	98,52	13.638.409.108,00	(2.452.993.602,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.043.780.225,00	4.701.632.809,00	93,22	6.553.097.955,00	(1.851.466.146,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.540.784.317,00	20.761.387.869,00	96,38	29.843.876.059,00	(9.082.488.190,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.132.997.677,00	3.943.097.088,00	95,41	4.605.477.798,00	(662.380.710,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.121.737.780,00	1.680.621.618,00	79,21	2.943.773.021,00	(1.263.151.403,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.939.433.500,00	9.339.474.016,00	93,96	16.549.879.239,00	(7.210.405.223,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.799.963.400,00	2.688.845.997,00	96,03	3.474.509.661,00	(785.663.664,00)
Dinas Pendidikan	171.724.346.009,00	167.909.875.982,00	97,78	157.836.751.336,00	10.073.124.646,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	7.011.378.317,00	6.600.602.394,00	94,14	7.287.842.742,00	(687.240.348,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.161.982.853,00	3.854.987.541,00	92,62	9.535.402.808,00	(5.680.415.267,00)
Inspektorat	5.145.805.716,00	4.223.430.890,00	82,08	5.410.334.439,00	(1.186.903.549,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	4.101.040.160,00	3.918.974.649,00	95,56	7.716.584.532,00	(3.797.609.883,00)
Dinas Sosial	30.165.024.357,00	29.285.951.889,00	97,09	37.014.342.781,00	(7.726.390.892,00)
RSUD Bengkalis	80.945.674.337,10	76.133.806.789,00	94,06	71.444.566.335,00	4.689.240.454,00
RSUD Kecamatan Mandau	86.903.565.132,00	82.372.985.960,00	94,79	65.408.376.583,98	16.964.609.376,02
Kecamatan Mandau	17.280.854.520,00	17.173.595.061,00	99,38	17.926.182.688,00	(752.587.627,00)
Kecamatan Rupal	6.069.400.177,00	5.926.374.027,00	97,64	6.606.357.428,00	(679.983.401,00)
Kecamatan Rupal Utara	3.389.343.450,00	3.299.248.700,00	97,34	5.571.800.575,00	(2.272.551.875,00)
Kecamatan Bengkalis	4.386.337.190,00	4.319.750.236,00	98,48	5.336.664.533,00	(1.016.914.297,00)
Kecamatan Bukit Batu	3.134.979.500,00	3.021.989.045,00	96,40	3.971.551.130,00	(949.582.085,00)
Kecamatan Barisan	2.521.221.113,00	2.516.074.422,00	99,80	2.941.810.467,00	(425.736.045,00)
Kecamatan Siak Kecil	2.587.114.350,00	2.496.927.400,00	96,51	2.963.602.900,00	(466.675.500,00)
Kecamatan Pinggir	4.809.025.480,00	4.647.294.041,00	96,64	4.341.285.876,00	306.008.165,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.204.354.425,00	4.182.073.599,00	80,36	9.494.027.728,00	(5.311.954.129,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.342.239.520,00	12.402.693.664,00	92,96	15.269.386.715,00	(2.866.693.051,00)
Dinas Lingkungan Hidup	29.532.481.194,00	28.496.440.823,00	96,49	29.194.760.864,00	(698.320.041,00)
Dinas Pertanian	9.142.775.428,00	7.976.866.622,00	87,25	10.660.756.267,00	(2.683.889.645,00)
Dinas Perhubungan	17.589.663.004,00	13.613.900.018,00	77,40	15.594.615.221,00	(1.989.715.203,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.614.182.700,00	16.906.872.851,00	90,83	12.922.984.003,00	3.983.888.848,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	36.029.158.900,00	33.110.445.746,00	91,90	108.617.106.989,00	(75.506.860.943,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.819.395.850,00	3.290.693.759,00	86,16	5.642.469.763,00	(2.351.776.004,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	10.106.814.338,00	9.427.435.713,00	93,29	10.187.088.035,00	(759.652.322,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.795.749.400,00	7.673.866.653,00	87,25	7.223.754.029,00	450.112.624,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.314.498.320,00	36.471.874.489,00	95,19	39.312.932.364,00	(2.841.057.875,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.977.431.870,00	4.033.798.116,00	81,04	7.714.358.219,00	(3.680.560.103,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.510.985.000,00	6.262.262.342,00	96,18	8.475.356.215,00	(2.213.093.873,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	2.504.601.680,00	2.384.509.130,00	95,21	2.831.072.986,00	(446.563.856,00)
Kecamatan Talang Muandau	2.785.530.161,00	2.483.821.010,00	89,17	2.857.120.637,00	(373.299.627,00)
Kecamatan Bathin Solapan	2.699.539.560,00	2.681.402.312,00	99,33	2.766.245.926,00	(84.843.614,00)
Jumlah	998.125.522.328,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98	(108.169.473.074,98)

3. Belanja Subsidi

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)

Realisasi belanja subsidi selama TA. 2020 adalah sebesar Rp9.618.696.893,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.618.696.893,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.277.056.715,00 atau 11,72% dibandingkan realisasi TA 2019 yang berjumlah Rp10.895.753.608,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)
Jumlah	9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)

Pemerintah Kabupaten Bengkulu mengalokasikan dana subsidi kepada Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat berdasar Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu.

4. Belanja Hibah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
72.764.589.031,00	71.023.667.791,00	97,61	59.946.830.651,00	11.076.837.140,00

Realisasi belanja hibah selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.023.667.791,00 atau 97,61% dari anggaran sebesar Rp72.764.589.031,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.076.837.140,00 atau 18,48% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp59.946.830.651,00 dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 408/KPTS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.54 Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Hibah kepada Pemerintah	43.150.000.000,00	43.016.390.862,00	99,69	22.000.000.000,00	21.016.390.862,00
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	14.007.000.000,00	13.701.866.551,00	97,82	20.590.267.479,00	(6.888.400.928,00)
Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	4.880.000.000,00	4.636.221.378,00	95,00	6.057.888.172,00	(1.421.666.794,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.351.775.000,00	(2.351.775.000,00)
BOP PAUD Masyarakat / Swasta	7.812.600.000,00	7.048.800.000,00	90,22	7.336.200.000,00	(287.400.000,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.398.100.000,00	1.103.500.000,00	78,93	1.610.700.000,00	(507.200.000,00)
Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.516.889.031,00	1.516.889.000,00	100,00	0,00	1.516.889.000,00
Jumlah	72.764.589.031,00	71.023.667.791,00	97,61	59.946.830.651,00	11.076.837.140,00

Tabel 5.55 Belanja Hibah kepada Pemerintah

Penerima Hibah kepada Pemerintah	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Polres Bengkalis	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	1.600.000.000,00	1.596.125.800,00	99,76
KPU Kabupaten Bengkalis	22.000.000.000,00	21.999.688.000,00	100,00
Bawaslu Kabupaten Bengkalis	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Kodim 0303 Bengkalis	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
Polteknik Bengkalis, Jalan Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis	2.800.000.000,00	2.670.577.062,00	95,38
Kodim 0303 Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020, Jl. Bantan-Bengkalis	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Polres Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020, Jl. Pertanian	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Jumlah	43.150.000.000,00	43.016.390.862,00	99,69

Tabel 5.56 Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

Penerima Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis	350.000.000,00	349.600.000,00	99,89
- KONI Kab. Bengkalis	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
- Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibu Harapan Bengkalis	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Bengkalis	250.000.000,00	210.241.900,00	84,10
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis	250.000.000,00	249.872.822,00	99,95
- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bengkalis	2.034.000.000,00	1.981.618.135,00	97,42
- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkalis	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
- Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bengkalis	100.000.000,00	99.290.000,00	99,29
- KORPRI Kabupaten Bengkalis	573.000.000,00	382.365.000,00	66,73
- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00
- PWI Kabupaten Bengkalis	200.000.000,00	193.741.088,00	96,87
- LAMR Kabupaten Bengkalis	1.015.000.000,00	1.014.762.000,00	99,98
- NPC Kabupaten Bengkalis	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syarifah Bengkalis	2.800.000.000,00	2.799.860.053,00	100,00
- Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bengkalis	140.000.000,00	127.994.805,00	91,42
- PMI Kabupaten Bengkalis	300.000.000,00	297.520.748,00	99,17
- Yayasan Darul Falah Bengkalis	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
- Yayasan Bengkalis Quran Center	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
- Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00
Jumlah	14.007.000.000,00	13.701.866.551,00	97,82

Tabel 5.57 Realisasi Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat

Penerima Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Rumah Ibadah	4.680.000.000,00	4.636.221.378,00	95,00
Jumlah	4.680.000.000,00	4.636.221.378,00	95,00

Tabel 5.58 Belanja Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat / Swasta

Penerima Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat / Swasta	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Kecamatan Bengkalis	1.427.400.000,00	1.260.900.000,00	88,34
Kecamatan Bentan	882.000.000,00	812.400.000,00	92,11
Kecamatan Bukit Batu	432.600.000,00	395.400.000,00	91,40
Kecamatan Siak Kecil	495.000.000,00	482.100.000,00	97,39
Kecamatan Mandau	1.603.200.000,00	1.384.800.000,00	86,38
Kecamatan Pinggir	761.400.000,00	731.700.000,00	96,10
Kecamatan Bathin Solepan	755.400.000,00	666.900.000,00	88,28
Kecamatan Talang Muandau	318.000.000,00	313.800.000,00	98,68
Kecamatan Rupal	634.800.000,00	576.900.000,00	90,88
Kecamatan Rupal Utara	217.200.000,00	144.900.000,00	66,71
Kecamatan Bandar Laksamana	285.600.000,00	279.000.000,00	97,69
Jumlah	7.812.600.000,00	7.048.800.000,00	90,22



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.59 Belanja Hibah kepada BOP Pendidikan Kesetaraan

Penerima Hibah kepada BOP Pendidikan Kesetaraan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	231.400.000,00	221.650.000,00	95,79
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	369.000.000,00	293.250.000,00	79,47
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	748.800.000,00	588.600.000,00	78,61
Jumlah	1.349.200.000,00	1.103.500.000,00	81,79

Tabel 5.60 Belanja Hibah kepada Partai Politik

Penerima Hibah kepada Partai Politik	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	208.488.531,00	208.488.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	234.245.000,00	234.245.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	105.347.000,00	105.347.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	197.092.500,00	197.092.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	58.135.000,00	58.135.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	178.376.000,00	178.376.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	52.827.500,00	52.827.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	121.192.500,00	121.192.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra	157.828.000,00	157.828.000,00	100,00
Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat	158.812.500,00	158.812.500,00	100,00
Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia	44.544.500,00	44.544.500,00	100,00
Jumlah	1.516.889.031,00	1.516.889.000,00	100,00

5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari

Tabel 5.61 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)
Jumlah	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)

B. Belanja Modal

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
559.891.175.437,55	500.329.662.982,84	89,36	1.108.175.580.894,99	(607.845.917.912,15)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja modal selama per 31 Desember 2020 sebesar Rp500.329.662.982,84 atau 89,36% dari anggaran sebesar Rp559.891.175.437,55 dan mengalami penurunan sebesar Rp607.845.917.912,15 atau 54,85% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.108.175.580.894,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Belanja Modal

Urutan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Tanah	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48	(62.388.174.931,03)
Belanja Gedung dan Bangunan	154.765.065.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)
Belanj Jalan, Irigasi dan Jaringan	290.484.350.499,07	260.976.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80	(410.214.330.276,10)
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.665.825,00	(3.220.119.166,00)
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	559.891.175.437,55	500.329.662.982,84	89,36	1.108.175.580.894,99	(607.845.917.912,15)

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian realisasi modal berdasarkan jenis aset tetap dan hak kepemilikannya tahun Anggaran 2020. Adapun realisasi belanja modal selama per 31 Desember 2020 dan TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Tanah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)

Realisasi belanja modal tanah selama TA 2020 sebesar Rp815.248.000,00 atau 76,07% dari anggaran sebesar Rp1.071.700.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.819.644.400,00 atau 91,54% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp9.634.892.400,00.

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp815.248.000,00 merupakan belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Belanja Tanah

Belanja Tanah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	204.050.000,00	94.060.000,00	46,10	8.954.073.900,00	(8.860.013.900,00)
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	867.650.000,00	721.188.000,00	83,12	680.818.500,00	40.369.500,00
Jumlah	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)

Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.64 Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Dinas Kesehatan	867.650.000,00	721.188.000,00	83,12	680.618.500,00	40.369.500,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00	1.108.377.900,00	(1.108.377.900,00)
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00	314.030.000,00	(314.030.000,00)
Kecamatan Bathin Sofapan	0,00	0,00	0,00	7.531.666.000,00	(7.531.666.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	204.060.000,00	94.060.000,00	46,10	0,00	94.060.000,00
Jumlah	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48	(62.388.174.931,03)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2020 sebesar Rp97.002.850.638,45 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp102.506.461.750,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp62.388.174.931,03 atau 39,14% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp159.391.025.569,48.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp97.002.850.638,45 merupakan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	501.942.250,00	498.961.000,00	99,40	2.640.199.200,71	(2.141.248.200,71)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	1.159.024.100,00	(1.159.024.100,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.934.206.000,00	1.891.093.267,00	48,07	16.667.471.318,00	(14.776.378.031,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	937.891.000,00	(937.891.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00	63.930.000,00	(63.930.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	41.495.000,00	(41.495.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	40.020.000,00	38.597.600,00	96,45	98.357.850,00	(59.760.250,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	569.842.500,00	(569.842.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	35.880.000,00	33.950.000,00	94,62	1.350.755.000,00	(1.316.805.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	253.650.000,00	250.700.000,00	98,84	73.850.000,00	176.850.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.993.508.300,00	1.893.462.445,45	94,98	9.189.197.170,00	(7.295.734.724,55)
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.245.969.500,00	4.595.971.100,00	37,53	13.539.255.015,00	(8.943.283.915,00)
Belanja modal Pengadaan Komputer	8.489.962.495,00	7.116.011.200,00	83,82	13.849.837.570,00	(6.733.826.370,00)
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.385.071.995,00	5.232.026.260,00	97,16	10.212.705.370,00	(4.980.679.110,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.517.166.000,00	2.094.258.800,00	83,20	5.390.565.860,00	(3.296.307.060,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	34.000.000,00	33.550.000,00	98,68	226.754.200,00	(193.204.200,00)
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	120.000.000,00	118.943.000,00	99,12	5.000.000,00	113.943.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	38.340.041.176,00	35.103.800.962,00	91,56	36.469.200.220,77	(1.365.399.258,77)
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	973.677.570,00	862.778.000,00	88,61	1.264.078.800,00	(401.300.800,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	2.595.920.844,00	2.513.565.236,00	96,83	1.170.597.513,00	1.342.967.723,00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.177.520.000,00	1.176.041.930,00	99,87	5.528.859.300,00	(4.352.817.370,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	8.437.500,00	7.500.000,00	88,89	78.900.000,00	(71.400.000,00)
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	170.000.000,00	167.230.000,00	98,37	155.540.000,00	11.690.000,00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	89.136.000,00	88.973.000,00	99,82	231.032.430,00	(142.059.430,00)
Belanja Modal BLUD	7.500.000.000,00	11.689.827.770,00	155,86	4.463.176.466,00	7.226.451.304,00
Belanja Modal Dana BOS	16.100.352.120,00	21.595.819.048,00	134,13	34.006.509.686,00	(12.410.690.638,00)
Jumlah	102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	158.391.025.569,48	(62.388.174.831,03)

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.66 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kelebihan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	5.313.443.000,00	4.915.984.690,00	92,52	8.208.166.365,00	(3.292.181.675,00)
Sekretariat DPRD	2.642.425.000,00	2.548.557.245,45	96,45	6.587.720.200,00	(4.039.162.954,55)
Dinas Kesehatan	16.277.613.171,00	13.081.061.363,00	80,36	10.468.610.336,71	2.612.451.046,29
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.736.220.000,00	2.215.664.200,00	80,98	1.819.106.795,00	396.557.405,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	245.140.000,00	242.890.000,00	99,08	396.960.000,00	(154.070.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.148.200.000,00	1.140.410.050,00	99,32	3.238.218.800,00	(2.097.808.750,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.859.658.650,00	(2.859.658.650,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	497.463.900,00	(497.463.900,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	635.573.000,00	(635.573.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.125.000,00	12.100.000,00	99,79	2.462.902.715,00	(2.450.802.715,00)
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	34.860.000,00	(34.860.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	(64.070.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	40.000.000,00	39.990.000,00	99,98	1.363.682.000,00	(1.323.692.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	59.700.000,00	44.498.000,00	74,54	245.465.000,00	(200.967.000,00)
Dinas Pendidikan	19.303.278.529,00	24.783.182.978,00	128,39	43.998.197.686,00	(19.215.014.708,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	120.000.000,00	119.446.000,00	99,54	262.234.000,00	(142.788.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	394.306.000,00	(394.306.000,00)
Inspektorat	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	183.645.000,00	(181.145.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	42.375.000,00	42.300.000,00	99,82	629.488.500,00	(587.188.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Sosial	307.000.000,00	299.374.500,00	97,52	747.013.777,00	(447.639.277,00)
RSUD Bengkulu	22.608.767.193,00	27.497.731.129,00	121,62	29.673.437.032,00	(2.175.705.903,00)
RSUD Kecamatan Mandau	13.471.156.807,00	10.642.582.176,00	79,00	7.095.757.336,77	3.546.824.839,23
Kecamatan Mandau	896.592.000,00	889.004.300,00	99,16	2.233.660.970,00	(1.344.656.670,00)
Kecamatan Rupet	203.670.000,00	203.670.000,00	100,00	1.323.997.300,00	(1.120.327.300,00)
Kecamatan Rupert Utara	22.500.000,00	22.110.000,00	98,27	1.291.201.900,00	(1.269.091.900,00)
Kecamatan Bengkulu	74.500.000,00	74.500.000,00	100,00	688.653.800,00	(614.153.800,00)
Kecamatan Bukit Batu	22.900.000,00	22.300.000,00	97,38	135.850.000,00	(113.550.000,00)
Kecamatan Bantan	44.062.500,00	44.062.500,00	100,00	302.317.800,00	(258.255.300,00)
Kecamatan Siak Kecil	61.500.000,00	61.250.000,00	99,59	164.050.000,00	(102.800.000,00)
Kecamatan Pinggir	90.500.000,00	71.182.000,00	78,65	22.495.000,00	48.687.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	61.225.000,00	58.985.000,00	96,34	27.100.000,00	31.885.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	206.000.000,00	203.150.000,00	98,62	1.239.050.800,00	(1.035.900.800,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.001.981.000,00	998.103.887,00	99,61	2.893.612.406,00	(1.895.508.519,00)
Dinas Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	849.085.000,00	(844.085.000,00)
Dinas Perhubungan	1.086.471.000,00	1.083.363.000,00	99,71	439.316.000,00	644.047.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.900.000,00	303.555.000,00	96,09	1.038.457.500,00	(734.902.500,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	390.150.000,00	(390.150.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	243.575.420,00	(243.575.420,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	909.449.250,00	904.238.700,00	99,43	856.787.000,00	47.451.700,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.726.095.000,00	277.300.000,00	3,59	720.357.830,00	(443.057.830,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.860.908.300,00	2.583.899.700,00	66,92	16.348.609.850,00	(13.764.710.150,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63.500.000,00	63.100.000,00	99,37	494.810.000,00	(431.710.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	782.386.000,00	775.294.200,00	99,09	4.943.019.900,00	(4.167.725.700,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	157.736.000,00	157.411.000,00	99,79	136.150.000,00	21.261.000,00
Kecamatan Talang Muandau	158.303.500,00	154.403.000,00	97,54	742.180.000,00	(587.777.000,00)
Kecamatan Bathin Solapan	422.928.500,00	418.896.000,00	99,00	0,00	418.696.000,00
Jumlah	102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48	(62.388.174.931,03)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
154.765.085.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama TA 2020 sebesar Rp131.718.395.987,69 atau 85,11% dari anggaran sebesar Rp154.765.085.363,48 dan mengalami penurunan sebesar Rp123.203.649.139,02 atau 48,33% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp254.922.045.126,71.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp131.718.395.987,69 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	147.219.474.845,48	124.412.877.642,69	84,51	242.996.168.267,10	(118.583.290.624,41)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.307.950.000,00	3.146.670.300,00	95,12	8.324.373.361,61	(5.177.703.061,61)
Belanja modal Pengadaan Rambu- Rambu	1.075.646.440,00	1.055.367.000,00	98,11	1.354.831.700,00	(299.464.700,00)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	653.500.000,00	594.438.000,00	90,96	175.374.000,00	419.064.000,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	295.000.000,00	292.987.000,00	99,01	847.654.760,00	(555.667.760,00)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	7.610.000,00	7.610.000,00	100,00	0,00	7.610.000,00
Belanja Modal Pengadaan Monumen / Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	1.223.643.038,00	(1.223.643.038,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	2.205.904.078,00	2.209.346.045,00	100,16	0,00	2.209.346.045,00
Jumlah	154.765.085.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.68 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	8.704.490.000,00	8.036.812.534,35	92,33	12.779.411.357,00	(4.742.598.822,65)
Sekretariat DPRD	2.192.180.000,00	2.171.769.252,10	99,07	3.737.141.000,00	(1.565.371.747,90)
Dinas Kesehatan	19.943.010.859,75	18.750.793.382,73	94,02	27.544.155.660,65	(8.793.362.297,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	887.000.000,00	882.563.428,00	99,50	1.203.409.616,00	(320.846.188,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	525.570.000,00	524.203.400,00	99,74	707.016.319,22	(182.812.919,22)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	799.300.000,00	796.413.808,12	99,64	546.741.760,00	249.672.048,12
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	613.842.000,00	(613.842.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	307.390.000,00	(280.390.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89.610.000,00	88.588.000,00	98,66	1.728.770.500,00	(1.640.182.500,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.721.000.000,00	5.714.328.200,00	99,88	1.310.860.760,00	4.403.867.440,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	15.147.963,00	(15.147.963,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.345.691.665,00	4.326.530.260,00	99,56	5.134.398.438,00	(807.868.178,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	395.000.000,00	394.013.000,00	99,75	305.109.000,00	88.904.000,00
Dinas Pendidikan	40.939.026.715,73	40.150.608.453,73	98,07	76.947.764.202,77	(36.797.155.749,04)
Dinas Perikanan	90.260.000,00	81.830.000,00	90,44	1.967.925.000,00	(1.886.295.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	631.325.000,00	620.369.163,00	98,26	1.817.315.700,00	(1.196.946.537,00)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	194.762.500,00	(194.762.500,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	452.000.000,00	451.869.000,00	99,97	1.212.862.000,00	(760.993.000,00)
Dinas Sosial	297.605.000,00	296.717.300,00	99,70	479.329.000,00	(182.611.700,00)
RSUD Bengkalis	6.311.280.000,00	206.025.000,00	3,26	4.088.789.000,00	(3.882.764.000,00)
RSUD Kecamatan Mandau	2.649.820.000,00	2.590.731.831,86	97,77	10.614.743.117,94	(8.024.011.286,08)
Kecamatan Mandau	189.915.000,00	187.752.734,90	98,86	3.739.231.000,00	(3.551.478.265,10)
Kecamatan Rupal	107.620.000,00	107.320.000,00	99,72	5.379.562.300,00	(5.272.242.300,00)
Kecamatan Rupal Utara	0,00	0,00	0,00	1.148.055.000,00	(1.148.055.000,00)
Kecamatan Bengkalis	0,00	0,00	0,00	197.112.000,00	(197.112.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	200.000.000,00	199.533.500,00	99,77	646.526.000,00	(446.992.500,00)
Kecamatan Bantan	11.000.000,00	4.500.000,00	40,91	0,00	4.500.000,00
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	358.355.000,00	(358.355.000,00)
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00	63.380.000,00	(63.380.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	79.150.000,00	(79.150.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.828.350.000,00	2.783.350.960,00	98,41	3.961.210.335,00	(1.177.859.375,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.829.070.000,00	1.813.985.334,00	99,18	3.338.195.000,00	(1.524.209.666,00)
Dinas Pertanian	604.754.733,00	599.887.000,00	99,20	687.563.600,00	(67.676.600,00)
Dinas Perhubungan	4.879.484.440,00	4.601.651.921,90	94,31	13.140.203.704,08	(8.538.651.782,18)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.643.021.950,00	29.276.195.862,00	68,65	60.097.479.403,05	(30.821.283.541,05)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	2.323.400.000,00	2.162.309.088,00	93,93	2.581.459.750,00	(399.150.662,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.500.000,00	31.370.000,00	99,59	341.474.000,00	(310.104.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	244.700.000,00	244.196.000,00	99,79	1.272.770.000,00	(1.028.574.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.006.800.000,00	1.784.498.715,00	88,92	701.694.000,00	1.082.804.715,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	175.000.000,00	174.391.000,00	99,65	2.354.818.000,00	(2.180.427.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.410.000.000,00	1.338.608.858,00	94,94	963.732.120,00	374.876.738,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	97.620.000,00	96.693.000,00	99,05	613.389.000,00	(516.696.000,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	181.700.000,00	181.186.000,00	99,72	0,00	181.186.000,00
Jumlah	154.765.085.363,48	131.718.395.987,89	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
290.484.350.499,07	260.976.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80	(410.214.330.276,10)

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan sebesar selama TA 2020 Rp260.976.621.697,70 atau 89,84% dari anggaran sebesar Rp290.484.350.499,07 dan mengalami penurunan sebesar Rp410.214.330.276,10 atau 61,12% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp671.190.951.973,80.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp260.976.621.697,70 merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Jalan	206.878.442.659,07	190.505.311.790,76	92,09	560.474.983.699,49	(369.969.671.908,73)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Jembatan	6.779.633.000,00	6.503.064.464,00	95,92	8.255.584.286,00	(1.752.519.822,00)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.587.465.518,00	6.641.068.705,28	77,33	16.373.172.813,60	(9.732.104.108,32)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.770.020.000,00	2.658.880.725,00	95,99	8.288.903.889,00	(5.630.023.164,00)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	35.247.169.000,00	26.693.886.785,00	75,73	39.838.774.051,35	(13.144.887.266,35)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.134.624.663,00	10.543.647.020,42	94,69	24.931.525.175,92	(14.387.878.155,50)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00	331.120.800,00	(331.120.800,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	50.000.000,00	48.898.000,00	97,80	0,00	48.898.000,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	226.800.000,00	224.590.000,00	99,03	720.430.000,00	(495.840.000,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	14.126.600,00	(14.126.600,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	119.650.000,00	(119.650.000,00)
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	700.931.000,00	683.235.348,24	97,48	483.019.280,00	200.216.068,24
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	18.109.264.459,00	16.474.038.859,00	90,97	11.359.661.378,44	5.114.377.480,56
Jumlah	290.484.350.499,07	260.978.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80	(410.214.330.276,10)

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.70 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kelebihan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	174.150.000,00	167.243.000,00	96,03	315.425.000,00	(148.182.000,00)
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	295.570.000,00	(295.570.000,00)
Dinas Kesehatan	226.800.000,00	224.590.000,00	99,03	424.860.000,00	(200.270.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	39.770.280,00	(39.770.280,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.943.100,00	(29.943.100,00)
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	179.500.000,00	(179.500.000,00)
Dinas Perikanan	179.772.000,00	174.558.000,00	97,10	14.126.600,00	160.431.400,00
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	267.545.000,00	(267.545.000,00)
Kecamatan Mendau	4.021.958.500,00	3.975.637.554,35	98,85	1.822.036.300,00	2.153.601.254,35
Kecamatan Rupat	2.715.881.200,00	2.713.622.800,00	99,92	2.666.014.200,00	47.608.600,00
Kecamatan Bengkalis	2.226.168.750,00	2.208.205.117,00	99,19	1.896.592.900,00	311.612.217,00
Kecamatan Bukit Batu	491.560.000,00	486.710.700,00	99,01	514.630.800,00	(27.920.100,00)
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	95.622.000,00	(95.622.000,00)
Kecamatan Pinggir	1.018.600.000,00	1.017.848.981,00	99,93	998.100.000,00	19.748.981,00
Dinas Pertanian	2.744.718.978,00	2.730.860.000,00	99,50	6.460.743.000,00	(3.729.883.000,00)
Dinas Perhubungan	80.000.000,00	79.200.000,00	99,00	49.929.000,00	29.271.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.578.535.099,00	191.259.520.718,28	89,55	490.046.134.963,95	(298.786.614.245,57)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	62.966.205.972,07	55.879.442.827,07	88,75	185.074.408.829,85	(109.194.966.002,78)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000,00	49.632.000,00	99,26	0,00	49.632.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	9.550.000,00	95,50	0,00	9.550.000,00
Jumlah	290.484.350.499,07	280.976.621.897,70	89,84	671.190.951.973,80	(440.214.330.276,10)

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.665.825,00	(3.220.119.166,00)

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya selama TA 2020 sebesar Rp9.816.546.659,00 atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp11.063.577.825,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.220.119.166,00 atau 24,70% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp13.036.665.825,00.

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp9.816.546.659,00 merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Buku	45.500.000,00	45.492.000,00	99,98	12.626.725.825,00	(12.581.233.825,00)
Belanja modal Pengadaan Tanaman	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	0,00	4.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal					
Pengadaan Barang	0,00	0,00	0,00	402.960.000,00	(402.960.000,00)
Bercorak Kebudayaan					
Belanja modal					
Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	(6.980.000,00)
Raga Lainnya					
Belanja Modal Aset					
tetap lainnya Dana	11.014.027.825,00	9.767.004.659,00	88,68	0,00	9.767.004.659,00
BOS					
Jumlah	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.965.825,00	(3.220.119.166,00)

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.72 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	(6.980.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	399.960.000,00	(399.960.000,00)
Dinas Pendidikan	11.014.027.825,00	9.767.004.659,00	88,68	12.516.626.025,00	(2.749.621.366,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)
Kecamatan Mandau	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	52.799.000,00	(47.799.000,00)
Kecamatan Bengkalis	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	26.210.000,00	(20.710.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	13.098.800,00	(13.098.800,00)
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00	2.992.000,00	(2.992.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	0,00	4.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00	24.992.000,00	99,97	0,00	24.992.000,00
Jumlah	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.965.825,00	(3.220.119.166,00)

6. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada realisasi belanja modal Aset lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
164.617.292.563,01	152.938.659.147,00	92,91	0,00	152.938.659.147,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp152.938.659.147,00 atau 92,91% dari anggarannya sebesar Rp164.617.292.563,01 mengalami kenaikan sebesar Rp152.938.659.147,00 atau 100.00% jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga terealisasi berdasarkan :

- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 287/KPTS/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan besaran Belanja Tidak Terduga yang diterima dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk penanganan dampak-dampak sosial Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk kabupaten Bengkalis tahun 2020.

-Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 441/KPTS/XI/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga yang diterima oleh perangkat daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 297/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Penyetoran Saldo Dana Unit Pelayanan Pengembangan Tuah Mina Lestari Cabang Pembantu Duri dari Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ke Rekening Kas Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 433/KPTS/XI/2020 tentang Penyetoran sisa dana desa Batang Duku Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dari Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.73 Rincian Belanja Tidak Terduga OPD berdasarkan SK Bupati

OPD	Berdasarkan SK Bupati	Realisasi 2020
	Besaran BTT (Rp)	Besaran BTT (Rp)
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	20.415.600.000,00	16.715.700.000,00
Dinas Kesehatan	688.000.000,00	660.000.000,00
RSUD Kabupaten Bengkalis	28.795.725.773,00	27.716.460.934,00
RSUD Kecamatan Mandau	3.978.250.000,00	3.955.913.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.350.805.250,00	13.284.555.218,00
Dinas Perhubungan	2.009.376.000,00	1.339.113.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24.277.398.960,00	23.867.851.246,00
Dinas Sosial	63.175.500.000,00	63.096.136.873,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	99.180.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	637.450.000,00	416.901.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	406.958.540,00	394.494.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00	244.982.000,00
Kecamatan Bengkalis	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Bantan	55.000.000,00	55.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Siak Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	150.000.000,00	150.000.000,00
Kecamatan Mandau	225.000.000,00	222.495.000,00
Kecamatan Pinggir	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Talang Muandau	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Rupert	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Rupert Utara	50.000.000,00	48.700.000,00
Total	161.015.064.523,00	152.716.482.271,00
Pengembalian Dana		



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengembalian Dana UPP Tuah Mina Lestari Cabang Pembantu Duri ke Rekening Kas Daerah Provinsi Riau TA. 2020		63.346.876,00
Penyetoran Sisa Dana Desa Batang Duku Kecamatan Bukit Batu dari TA. 2015 sampai dengan 2018		158.830.000,00
		222.176.876,00
Total ETT	184.617.292.563,01	152.938.659.147,00

5.1.3. Transfer

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
355.409.255.248,58	353.910.554.625,00	99,58	457.694.035.532,81	(103.783.480.907,81)

Realisasi Transfer Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah sebesar Rp353.910.554.625,00 atau 99,58% dari nilai anggaran sebesar Rp355.409.255.248,58. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp457.694.035.532,81 mengalami penurunan sebesar Rp103.783.480.907,81 atau 22,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Transfer

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00	(2.090.109.606,00)
Transfer Bantuan Keuangan	348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81	(101.693.371.301,81)
Jumlah	355.409.255.248,58	353.910.554.625,00	99,58	457.694.035.532,81	(103.783.480.907,81)

A. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00	(2.090.109.606,00)

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.678.949.377,00 atau 79,12% dari anggaran sebesar Rp7.177.650.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.090.109.606,00 atau 26,90% dibandingkan realisasi TA 2019 yang berjumlah Rp7.769.058.983,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	6.050.000.000,00	4.915.347.049,00	81,25	6.654.649.412,00	(1.739.302.363,00)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.127.650.000,00	763.602.328,00	67,72	1.114.409.571,00	(350.807.243,00)
Jumlah	7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00	(2.090.109.606,00)

Transfer Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

B. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81	(101.693.371.301,81)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan selama selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp348.231.605.248,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp348.231.605.248,58 mengalami penurunan sebesar Rp101.693.371.301,81 atau 22,60% dibandingkan realisasi TA 2019 yang berjumlah Rp449.924.976.549,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu	203.271.413.648,58	203.271.413.648,00	100,00	283.368.291.049,81	(80.096.877.401,81)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN Se-Kabupaten Bengkulu	131.360.191.600,00	131.360.191.600,00	100,00	134.130.368.000,00	(2.770.176.400,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se-Kabupaten Bengkulu	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	100,00	28.700.000.000,00	(15.100.000.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan PPKades Se-Kabupaten Bengkulu	0,00	0,00	0,00	2.218.190.000,00	(2.218.190.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	0,00	0,00	0,00	1.508.127.500,00	(1.508.127.500,00)
Jumlah	348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81	(101.693.371.301,81)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu terealisasi sebesar Rp203.271.413.648,0 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu nomor 43 tahun 2020 tentang Pengalokasian Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN Se-Kabupaten Bengkulu terealisasi sebesar Rp131.360.191.600,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 44 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se-Kabupaten Bengkulu terealisasi sebesar Rp13.600.000.000 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 343/KPTS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Percepatan Pembangunan Penyediaan Infrastruktur Desa Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Adanya kekurangan penyetoran sisa Dana Desa sebesar Rp. 344.286.654,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ke Kas Umum Negara. Berdasarkan pencatatan pada aplikasi OMSPAN dari hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Hasil rekonsiliasi terhadap 136 Desa se Kabupaten Bengkulu, terdapat 55 Desa yang seharusnya menyetorkan sisa Dana Desa ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Bengkulu sebesar Rp. 796.238.964,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Selanjutnya sesuai rekapitulasi bukti setor desa ke RKUD Kab. Bengkulu, diketahui hanya 53 desa yang telah melakukan penyetoran dengan jumlah total Rp. 451.952.310 (Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Terhadap 2 (dua) desa lainnya sejumlah Rp. 344.286.654,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) tidak dapat dilakukan penyetoran dikarenakan hal-hal berikut:

- Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu senilai Rp. 199.817.433,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak dapat disetor ke RKUD Kab. Bengkulu, karena berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Nomor: 29/ITKAB-RHS/XI/2020 terkait sisa Dana Desa (DD) pada Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Desa Jangkang Kecamatan Bantan senilai Rp. 144.469.221,- (Seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tidak dapat disetor ke RKUD Kab. Bengkulu dikarenakan berdasarkan LHP Nomor 22/ITKAB-RHS/IX/2018 tanggal 26 September 2018, adapun Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap APBDes T.A 2016 dan saat ini masih dalam proses penegakan hukum.

5.1.4. Surplus (Defisit)

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
(222.090.595.626,37)	(71.079.021.819,82)	32,00	18.589.510.186,91	(87.668.532.006,73)

Jumlah Surplus (Defisit) sebesar Rp71.079.021.819,82 tersebut merupakan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk tahun Anggaran 2020 dimana jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan lebih kecil dari jumlah belanja daerah dan transfer. Total realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.917.393.229.734,02 sementara total realisasi belanja daerah dan transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.988.472.251.553,84.

5.1.5. Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.065.436,46	6.589.510.186,91

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama TA. 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu atau akhir tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.77 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penggunaan SILPA tahun lalu	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	6.589.510.186,91
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	6.589.510.186,91

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 5.78 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)

5.1.6. SILPA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	151.011.573.806,55	0,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)

Jumlah SiLPA sebesar Rp151.011.573.806,55 tersebut merupakan selisih lebih anggaran untuk tahun Anggaran 2020 dimana jumlah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Total realisasi penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.139.483.825.360,39 sementara total realisasi pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.988.472.251.553,84.

Tabel 5.79 SILPA

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Daerah	2.937.425.679.887,83	222.090.595.626,37	7,56	3.774.437.763.944,69	(3.552.347.168.318,32)
Belanja dan Transfer Daerah	3.169.616.276.514,20	2.988.472.251.553,84	94,59	3.757.848.253.757,78	(769.376.002.203,94)
Surplus/ (Defisit): 1-2	(222.090.595.626,37)	(2.766.381.655.927)	1.245,61	16.589.510.186,91	(2.782.971.166.114,38)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	6.589.510.186,91
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto : 4-5	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	205.501.085.439,46	16.589.510.186,91
SILPA (SIKPA) 3+6	(0,00)	(2.544.291.060.301,10)	0,00	(222.090.595.626,37)	(2.766.381.655.927,47)

Jumlah SiLPA selama TA. 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp71.079.021.819,82 atau 32,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp222.090.595.626,37 dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.80 Rincian SILPA

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi 2019	%
Kas di BUD	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	143,66
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.876.550.420,00	0,00	0,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.986.433,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.900.000,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	1.624.173.188,00	1.271.486.892,00	78,28
Kas di Bendahara BLUD	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	299,73
Kas di Bendahara BOS	139.307.364,00	4.860.382.090,00	3.488,96
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	68,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37, mengalami kenaikan sebesar Rp6.589.510.186,91 atau 3,06% jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp215.501.085.439,46.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2020, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp222.090.595.626,37, mengalami kenaikan sebesar Rp6.589.510.186,91 atau 3,06% jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp215.501.085.439,46.

5.2.3. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA selama TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 mengalami penurunan sebesar Rp71.079.021.819,82 atau 32,00 % jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp222.090.595.626,37.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Untuk Tahun 2020 tidak terdapat koreksi.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih selama TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 terdiri dari :

Saldo Anggaran Lebih TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55.

Tabel 5. 81 Rincian Saldo Anggaran Lebih

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Tren
	Rp	Rp	%
Kas di BUD	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	(30,39)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.976.560.420,00	0,00	0,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.986.433,00	(100,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.900.000,00	(100,00)
Kas di Bendahara JKN	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00	27,74
Kas di Bendahara BLUD	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(66,64)
Kas di Bendahara BOS	139.307.384,00	4.660.382.090,00	(97,13)
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	-32,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37.
Penerimaan SAL TA 2020 terdiri dari :

Tabel 5. 82 Rincian Penerimaan SAL

	Tahun 2020	Tahun 2019	Tren
Pendapatan Asli Daerah	251.925.869.915,53	226.245.884.732,22	11,35
Pendapatan Transfer	2.573.597.479.818,49	3.463.146.359.212,47	(25,69)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	91.869.880.000,00	85.045.520.000,00	8,02
Jumlah	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69	(22,71)
Belanja Operasi	1.981.293.374.799,00	2.191.978.637.329,98	(9,61)
Belanja Modal	500.329.662.962,84	1.108.175.580.894,99	(54,85)
Belanja Tidak Terduga	152.938.659.147,00	0,00	0,00
Transfer	353.910.554.625,00	457.694.035.532,81	(22,68)
Jumlah	2.988.472.251.553,84	3.757.848.253.757,78	(20,47)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
Jumlah	222.090.595.626,37	205.501.085.439,46	8,07

Tabel 5. 83 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2020	Tahun 2019	Tren
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pendapatan	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69	(22,71)
Belanja dan Transfer	2.988.472.251.553,84	3.757.848.253.757,78	(20,47)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	(32,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2020 berasal dari:

Tabel 5. 84 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

	Tahun 2020	Tahun 2019	Tren
Realisasi Pendapatan	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69	(22,71)
Realisasi Belanja dan Transfer	2.988.472.251.553,84	3.757.848.253.757,78	(20,47)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
SILPA	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	(32,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 3. PENJELASAN POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

5. 3. 1. Aset

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
	9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20	(612.395.155.026,43)

Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.298.185.596.626,77 dan Rp9.910.580.751.653,20 terdiri dari:

Tabel 5. 85 Rincian Aset Kabupaten Bengkulu

	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Aset Lancar	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47	(354.761.016.239,33)
Investasi Jangka Panjang	518.962.048.762,00	519.711.981.948,00	(749.933.186,00)
Aset Tetap	7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85	(356.887.664.552,79)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88	100.003.458.951,69
	9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20	(612.395.155.026,43)

A. Aset Lancar

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47	(354.761.016.239,33)

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp684.450.486.246,14 dan Rp1.039.211.502.485,47 terdiri dari:

Tabel 5. 86 Rincian Aset Lancar

	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Kas di Kas Daerah	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	(63.153.009.866,82)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.767.355,00	(6.767.355,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)
Kas di Bendahara JKN	1.624.173.186,00	1.271.465.892,00	352.707.294,00
Kas di BLUD	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(5.424.308.510,00)
Kas di Bendahara BOS	139.307.364,00	4.860.382.090,00	(4.721.074.726,00)
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00
Piutang Retribusi Daerah	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.682.331.914,00	11.214.397.462,00	(8.532.065.548,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)
Piutang Lainnya	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00
Penyisihan Piutang	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)
Beban Dibayar Dimuka	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67
Persediaan	61.779.121.203,23	260.803.124.727,78	(199.024.003.524,55)
	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47	(354.761.016.239,33)

1. Kas di Kas Daerah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	(63.153.009.866,82)

Akun ini merupakan kas sebesar Rp144.655.673.806,01 yang berada di Kas Daerah Per 31 Desember 2020 dan Rp207.808.683.672,83 di Kas Daerah Per 31 Desember 2019. Nilai kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Kas di Kas Daerah

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Des 2020	31 Des 2019
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-00180	144.649.973.806,01	207.808.683.672,83
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-03-00022	0,00	0,00
Deposito Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-96000	0,00	0,00
Koreksi Kurang Kesalahan Pencatatan		5.700.000,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		144.655.673.806,01	207.808.683.672,83

Terjadinya perbedaan Saldo Rekening Koran Bank Riau dengan Saldo Pembukuan karena adanya:

1. Double Pencairan SP2D atas Nomor 06977/SP2D-LS yaitu BOP KB Amanah Bunda Siak Kecil	5.700.000,00
Jumlah	5.700.000,00

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 88 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	207.808.683.672,83
Pendapatan	2.577.356.225.962,02	0,00	2.785.164.909.634,85
Setoran Jasa Giro 2019	82.164.648,00	0,00	2.785.247.074.282,85



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Setoran UYHD 2020	25.661.716.880,00	0,00	2.810.908.791.162,85
Penempatan Deposito	0,00	825.000.000.000,00	1.985.908.791.162,85
Pencairan Deposito	825.000.000.000,00	0,00	2.810.908.791.162,85
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	5.900.000,00	0,00	2.810.914.691.162,85
Belanja (SP2D)		2.666.259.017.356,84	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Sosial Pemerintah Provinsi Riau Tahap I TA.2020	2.171.700.000,00	2.171.700.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Kelurahan se-Kab. Bengkalis TA. 2020	10.345.000,00	10.345.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Tidak Terduga dari Prov. Riau TA. 2020	583.500.000,00	583.500.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan Pemprov Riau TA. 2020	42.128.600,00	42.128.600,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Kesalahan Setor BPHTB TA. 2020 an. Yanti	37.493.600,00	37.493.600,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Kesalahan Setor BPHTB TA. 2020 an. Hengky Wanto Gurning	3.500.000,00	3.500.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Desa ke Kas Negara (kode Akun 425919)	451.952.314,00	451.952.314,00	144.655.673.806,01
Double SP2D-LS/06977 BOP KB Amanah Bunda Siak Kecil	0,00	5.700.000,00	144.649.973.806,01
	3.431.406.627.004,02	3.494.565.336.870,84	

Saldo kas pada Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.655.673.806,01.

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 89 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri (PFK) Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PFK	130.055.634.127,00	0,00	130.055.634.127,00
Pengeluaran PFK	0,00	130.055.634.127,00	0,00
	130.055.634.127,00	130.055.634.127,00	

Untuk melihat rincian Kas di Kasda dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Kasda



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00

Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00
Jumlah	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp1.876.550.420,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

Untuk melihat rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	6.767.355,00	(6.767.355,00)

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 terdiri dari Jasa Giro di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah serta utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	2.010.778,00	(2.010.778,00)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	8.686,00	(8.686,00)
Dinas Sosial	0,00	538,00	(538,00)
Kantor Camat Rupal	0,00	5.142,00	(5.142,00)
Kantor Camat Rupal Utara	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)
Kantor Camat Pinggir	0,00	13.830,00	(13.830,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.376,00	(9.376,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	1.938.083,00	(1.938.083,00)
Jumlah	0,00	6.767.355,00	(6.767.355,00)

4. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)

Akun ini merupakan saldo kas yang ada dalam pengelolaan bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

5. Kas di Bendahara JKN

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00	352.707.296,00

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Kas di Bendahara JKN merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di rekening maupun tangan Bendahara Penerimaan JKN pada FKTP-UPT Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 93 Rincian Kas di Bendahara JKN

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
UPT Puskesmas Bengkalis	367.325.940,00	189.552.547,00	177.773.393,00
UPT Puskesmas Pematang Duku	73.480,00	0,00	73.480,00
UPT Puskesmas Selat Baru	221.943.075,00	221.920.773,00	22.302,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

UPT Puskesmas Teluk Pambang	87.954.153,00	0,00	87.954.153,00
UPT Puskesmas Sungai Pakning	127.546.800,00	122.184.480,00	5.362.320,00
UPT Puskesmas Lubuk Muda	171.510,00	49.676,00	121.834,00
UPT Puskesmas Sadar Jaya	4.853.651,00	291.728,00	4.561.923,00
UPT Puskesmas Batu Panjang	144.310.892,00	144.310.892,00	0,00
UPT Puskesmas Teluk Lecah	195.627.200,00	195.255.800,00	371.400,00
UPT Puskesmas Tanjung Medang	25.607.820,00	25.607.820,00	0,00
UPT Puskesmas Duri Kota	199.764.918,00	180.624.661,00	19.140.257,00
UPT Puskesmas Balai Makam	79.871.418,00	50.326.569,00	29.544.849,00
UPT Puskesmas Sebangar	53.457.476,00	53.457.476,00	0,00
UPT Puskesmas Sebanga	46.194.970,00	46.194.970,00	0,00
UPT Puskesmas Muara Basung	36.025.325,00	30.688.500,00	5.336.825,00
UPT Puskesmas Serai Wangi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
UPT Puskesmas Tenggayun	22.444.560,00	0,00	22.444.560,00
UPT Puskesmas Pematang Pudu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00	352.707.296,00

6. Kas di BLUD

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(5.424.308.510,00)

Kas di BLUD merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BLUD pada Rumah sakit Umum Daerah Bengkulu dan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkulu.

Tabel 5. 94 Rincian Kas di BLUD per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
RSUD Bengkulu	186.037.729,10	7.665.960.237,10	(7.479.922.508,00)
RSUD Kecamatan Mandau	2.529.831.299,44	474.217.301,44	2.055.613.998,00
Jumlah	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(5.424.308.510,00)

OPD	Kas Di Bank	Kas Tunai	Jumlah
RSUD Bengkulu	178.257.554,10	7.780.175,00	186.037.729,10
RSUD Kecamatan Mandau	2.529.831.299,44	0,00	2.529.831.299,44
Jumlah	2.708.088.853,54	7.780.175,00	2.715.869.028,54



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas BLUD di RSUD Bengkalis

Tabel 5. 95 Mutasi Kas BLUD di RSUD Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	7.665.960.237,10
Pendapatan BLUD	50.424.925.340,00	0,00	58.090.885.577,10
Belanja BLUD	0,00	57.904.847.848,00	186.037.729,10
Jumlah	50.424.925.340,00	57.904.847.848,00	

Adapun Kas di Bendahara BLUD RSUD Bengkalis terdapat pada :

Tabel 5. 96 Rincian Kas BLUD di RSUD Bengkalis

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	7.780.175,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00086	1.440.757,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00087	1.190,00
4	Bank BRI Cabang Bengkalis	56001000864301	176.815.607,10
	Jumlah		186.037.729,10

Kas BLUD di RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5. 97 Mutasi Kas BLUD di RSUD Kecamatan Mandau

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	474.217.301,44
Pendapatan BLUD	53.935.965.714,00	0,00	54.410.183.015,44
Belanja BLUD	0,00	51.880.351.716,00	2.529.831.299,44
Jumlah	53.935.965.714,00	51.880.351.716,00	

Adapun Kas di Bendahara BLUD RSUD Kecamatan Mandau terdapat pada:

Tabel 5. 98 Rincian Kas BLUD di RSUD Kecamatan Mandau

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	0,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00006	27.693.342,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00034	679.348.698,59
4	Bank BRI Cabang Duri Kota	56001000834306	1.822.789.258,85
	Jumlah		2.529.831.299,44

7. Kas di Bendahara Dana BOS

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
139.307.364,00	4.860.382.090,00	(4.721.074.726,00)

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bengkalis.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 99 Rincian Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dana BOS Reguler / 391 Sekolah	135.112.897,00	129.344.409,00	5.768.488,00
Dana BOS Afimasi / 76 Sekolah	916.086,00	4.089.465.863,00	(4.088.549.777,00)
Dana BOS Kinerja / 46 Sekolah	237.660,00	560.567.500,00	(560.329.840,00)
Jumlah	136.266.643,00	4.779.377.772,00	(4.643.111.129,00)

Tabel 5. 100 Rincian Kas di Bendahara BOS (Jasa Giro)

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Giro	3.040.721,00	81.004.318,00	(77.963.597,00)
Jumlah	3.040.721,00	81.004.318,00	(77.963.597,00)

8. Piutang

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	471.659.791.236,36	556.315.001.209,32	(84.655.209.972,96)

Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp471.659.791.236,36 dan Rp556.315.001.209,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Rincian Piutang

Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Piutang Pajak Daerah	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00
Piutang Retribusi Daerah	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.682.331.914,00	11.214.397.462,00	(8.532.065.548,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)
Piutang Lainnya	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00
Penyisihan Piutang	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)
Beban Dibayar Dimuka	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67
	471.659.791.236,36	556.315.001.209,32	(84.655.209.972,96)

a) Piutang Pajak Daerah

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00

Akun piutang pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 102 Mutasi Piutang Pajak

Jenis Piutang	Saldo Awal 01 Jan 2020	Mutasi 2020	Saldo Akhir 2020
Pajak Hiburan	2.300.060,00	(1.154.300,00)	1.145.760,00
Pajak Hotel	1.256.764.312,56	(20.410.866,00)	1.236.353.444,56
Pajak Restoran	458.420.288,00	13.773.050,00	472.193.338,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	381.662.275,24	300.866.616,00	682.528.891,24
Pajak Sarang Burung Walet	84.025.000,00	940.000,00	84.965.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	40.801.935,60	11.343.877,00	52.145.812,60
Pajak PBB P2	71.444.029.225,00	8.362.817.474,00	79.806.846.699,00
Pajak Reklame	72.657.583,33	(4.562.500,00)	68.095.083,33
Jumlah	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00	82.404.274.028,73

b) Piutang Retribusi Daerah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiaku/(Penurunan)
5.631.891.589,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00

Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen penetapan retribusi lainnya. Adapun rincian piutang retribusi daerah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Mutasi Piutang Retribusi

Jenis Piutang	Saldo Awal 01 Jan 2020	Mutasi 2020	Saldo Akhir 2020
Retribusi Izin Gangguan / HO Golongan	3.002.227.945,50	0,00	3.002.227.945,50
Retribusi tempat pesangrahan/vila	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	732.725.500,00	219.500.000,00	952.225.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Retribusi Limbah Cair	3.517.300,00	0,00	3.517.300,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	784.232.306,00	(19.680.560,00)	764.551.746,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	131.600.000,00	(15.500.000,00)	116.100.000,00
Jasa umum Pasien 2011	12.706.150,00	0,00	12.706.150,00
Ambulance	0,00	0,00	0,00
Jamkesmas	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BPJS Kesehatan	280.259.100,00	0,00	280.259.100,00
BPJS Ketenagakerjaan	2.803.828,00	0,00	2.803.828,00
Jumlah	5.440.072.129,50	191.819.440,00	5.631.891.569,50

Untuk Piutang Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusinya adalah sebagai berikut :

Retribusi HO Golongan

Tabel 5. 104 Rincian Piutang Retribusi HO Golongan

- Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	426.426.125,00
Jumlah	3.002.227.945,50

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Tabel 5. 105 Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	952.225.500,00
Jumlah	952.225.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 5. 106 Rincian Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.500.000,00
Jumlah	7.500.000,00

Retribusi Limbah Cair

Tabel 5. 107 Rincian Piutang Retribusi Limbah Cair

- Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00
Jumlah	3.517.300,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 5. 108 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Dinas Perhubungan	490.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
Jumlah	490.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tabel 5. 109 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

- Dinas Perhubungan	764.551.746,00
Jumlah	764.551.746,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tabel 5. 110 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- Dinas Perhubungan	116.100.000,00
Jumlah	116.100.000,00

Jasa umum Pasien 2011

Tabel 5. 111 Rincian Piutang Retribusi Jasa umum Pasien 2011

- RSUD Bengkulu	12.706.150,00
Jumlah	12.706.150,00

BPJS Kesehatan

Tabel 5. 112 Rincian Piutang Retribusi BPJS Kesehatan

- RSUD Kecamatan Mandau	280.259.100,00
Jumlah	280.259.100,00

BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 5. 113 Rincian Piutang Retribusi BPJS Ketenagakerjaan

- RSUD Kecamatan Mandau	2.803.828,00
Jumlah	2.803.828,00

Jenis Piutang Retribusi Berdasarkan OPD terdiri dari :

Tabel 5. 114 Rincian Piutang Retribusi per OPD

Piutang Retribusi	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkulu	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	283.062.928,00	283.062.928,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00	3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.370.651.746,00	1.405.832.306,00	(35.180.560,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	959.725.500,00	732.725.500,00	227.000.000,00
Jumlah	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00

Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan Surat Ketetapan besarnya retribusi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 oleh pelanggan kepada pengelola pendapatan retribusi.

Untuk rincian Piutang retribusi per OPD dapat dilihat pada:

Lampiran Piutang Retribusi



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
2.662.331.914,00	11.214.397.462,00	(8.532.065.548,00)

Akun piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang BLUD yang merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang terdapat pada RSUD Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau. Adapun rincian piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

RSUD Bengkulu

Tabel 5. 115 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkulu

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
BPJS	2.220.347.000,00	4.735.097.000,00	(2.514.750.000,00)
Ambulance BPJS	70.376.000,00	70.376.000,00	0,00
Ambulance Jamkesda	0,00	0,00	0,00
Jamkesda Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Jamkesda Meranti	256.709.791,00	175.803.741,00	80.906.050,00
Jampersal 2019	0,00	0,00	0,00
Jampersal 2018	0,00	0,00	0,00
Obat RI (Jamkesda)	0,00	0,00	0,00
Obat RJ (Jamkesda)	0,00	0,00	0,00
Kantin	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.547.432.791,00	4.981.276.741,00	(2.433.843.950,00)

RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5. 116 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Jamkesda Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Jamkesda Siak	64.255.429,00	44.600.188,00	19.655.241,00
Jampersal Siak	70.643.694,00	42.049.400,00	28.594.294,00
Jampersal Rohil	0,00	0,00	0,00
Jampersal Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Inhealth	0,00	2.662.300,00	(2.662.300,00)
BPJS	0,00	6.143.628.233,00	(6.143.628.233,00)
Jasa Raharja 2019	0,00	180.600,00	(180.600,00)
Jumlah	134.899.123,00	6.233.120.721,00	(6.098.221.598,00)

d) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Akun piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan selisih antara surat ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan dana yang telah disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp428.603.107.748,00 dan Rp499.145.967.339,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	420.221.813.497,00	326.700.525.146,00	93.521.288.351,00
DBH Pajak Penghasilan	51.920.311,00	12.109.197.945,00	(12.057.277.634,00)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	420.169.893.186,00	314.591.327.201,00	105.578.565.985,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	8.381.294.251,00	172.445.442.193,00	(164.064.147.942,00)
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	166.072.426.367,00	(166.072.426.367,00)
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	698.814.018,00	935.589.809,00	(236.775.791,00)
DBH SDA Kehutanan	7.453.180.083,00	5.263.120.825,00	2.190.059.258,00
DBH SDA Perikanan	229.300.150,00	174.305.192,00	54.994.958,00
Jumlah	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)

Tabel 5. 118 Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	499.145.967.339,00
DBH Pajak Penghasilan	51.920.311,00	12.109.197.945,00	487.088.689.705,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	267.056.107.925,00	161.477.541.940,00	592.667.255.690,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	166.072.426.367,00	426.594.829.323,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	408.035.850,00	644.811.641,00	426.358.053.532,00
DBH SDA Kehutanan	5.864.492.227,00	3.674.432.969,00	428.548.112.790,00
DBH SDA Perikanan	58.672.247,00	3.677.289,00	428.603.107.748,00
Jumlah	273.439.228.560,00	343.982.088.151,00	

Piutang DBH Pusat berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 mengalami perubahan. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 menetapkan bahwa PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 di cabut dan tidak berlaku lagi.

e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi disajikan berdasarkan saldo bagi hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar dan Rp5.965.064.148,51 dan Rp15.370.693.767,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.100.125.752,51	3.482.237.894,00	617.887.858,51
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	0,00	1.731.270.158,00	(1.731.270.158,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.751.770.845,00	3.352.320.218,00	(1.600.549.373,00)
Pajak Air Permukaan (Pajak AP)	22.405.019,00	75.899.270,00	(53.494.251,00)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	6.638.203.695,00	(6.638.203.695,00)
Pendapatan Lainnya	86.712.532,00	86.712.532,00	0,00
Jumlah	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.965.064.148,51 berdasarkan rincian piutang dari Dinas Pendapatan Daerah. Terdapat pelunasan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.279.931.235,00 dan penambahan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.874.301.616,51.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, Pasal 26 dengan pembagian 70% Provinsi Riau dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Pendapatan Lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan, Pendapatan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis No 13/PK/III/2011 dan No 03/PJJ-HK/IV/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan pembagian Provinsi Riau 60% dan Kabupaten/Kota 40%.

f) Piutang Lainnya

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00

Akun piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 mempunyai saldo sebesar Rp11.493.903.651,24 dan Rp11.493.903.651,24 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 120 Rincian Piutang Lainnya

Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiatan/(Penurunan)
Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD	182.064.000,00	182.064.000,00	0,00
Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD	1.375.373.000,00	1.375.373.000,00	0,00
Piutang dari PT BLJ atas Bagi Hasil Penyediaan Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang	490.180.223,00	490.180.223,00	0,00
Piutang pada PT Tengganau Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Piutang pada Pihak Ketiga	7.446.286.428,24	7.446.286.428,24	0,00
Jumlah	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00

Akun Piutang Lain-lain merupakan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.493.903.651,24 terdiri atas :

Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

Saldo awal piutang penunjang operasi pimpinan DPRD sebesar Rp265.608.000,00 pada Tahun Anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2010 sebesar Rp21.000.000,00, TA 2011 sebesar Rp62.544.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2013 sebesar Rp182.064.000,00.

Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD

Saldo awal sebesar Rp2.191.626.000,00 pada tahun anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2009 sebesar Rp576.168.000,00, TA 2011 sebesar Rp30.500.000,00, TA 2012 sebesar Rp109.295.000,00, TA 2013 sebesar Rp72.095.000,00, TA 2014 sebesar Rp28.195.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.375.373.000,00.

Kewajiban Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. Terhadap saldo tersebut telah sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Piutang lain-lain khususnya pengembalian dana belanja operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis TA 2013 antara sub Bagian Keuangan pada Bagian umum sekretariat DPRD dengan sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Desember 2014.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Bagi Hasil dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) atas keuntungan pengelolaan Jual Beli Listrik dan Pengelolaan PKS dengan Rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2008, PT. BLJ berdasarkan perjanjian Kerjasama Nomor 07/PJJ-HK/VII/2007 dan atau nomor 002/PPJ-BLJ/LIST/IV/2008 tanggal 2 Januari 2008 antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) tentang Bagi Hasil Pembelian/ Penyediaan (Jual Beli Daya) Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menerima pendapatan Bersih sebesar 70% dari hasil penjualan daya listrik yang diterima oleh PT. BLJ dan harus dibayarkan oleh PT. BLJ paling lambat tanggal 20 setiap bulannya melalui penyetoran langsung ke Kas Daerah. Saldo awal piutang bagi hasil kepada BUMD sebesar Rp1.601.755.223,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.111.575.000,00 sehingga saldo piutang bagi hasil Per 31 Desember 2012 sebesar Rp490.180.223,00 sesuai berita acara rekonsiliasi realisasi pembayaran piutang lain-lain pada PT. Bumi Laksamana Jaya TA 2012 tanggal 10 Jan 2012 antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kab. Bengkalis.

Piutang pada PT Tengganau Mandiri

Piutang Kabupaten Bengkalis pada Koperasi Tengganau Mandiri tercatat sebesar Rp2.000.000.000,00. Piutang tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 29 agustus 2005 sesuai perjanjian kerjasama.

Nomor : 573 /EK /93

Nomor : 21 / KOP-TM / VIII / 2005

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125K/Pid.sus/2014 Tanggal 17 September 2014 JO putusan pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tinggi Riau nomor 05TIPIKOR/2014/PTR Tanggal 6 Mei 2014 jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 42/Pid.sus/TIPIKOR/2013/PN.pbr tanggal 4 Februari 2014, bahwa atas aset-aset pada PMKS Tengganau mandiri tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Piutang Pada Pihak Ketiga

Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan atau kontraktor) atas pelaksanaan kegiatan TA 2009 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp7.446.286.428,24. Kelebihan ini timbul akibat adanya perbedaan penetapan hutang yang lebih rendah berdasarkan LHP BPK RI No.52/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dengan SK Bupati Bengkalis No. 171/KPTS/V/2010 tanggal 03 Mei 2010.

9. Penyisihan Piutang

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.186.183.514,62 sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Rincian Penyisihan Piutang per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkalis	(394.144.540,00)	(115.819.595,00)	(278.324.945,00)
RSUD Kecamatan Mandau	(369.953.763,68)	(1.663.848.107,74)	1.293.894.344,06
PPKD	(4.047.617.223,00)	(4.047.617.223,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(50.372.571.608,60)	(44.568.467.933,75)	(5.804.103.674,85)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(426.426.125,00)	(426.426.125,00)	0,00
Dinas Perhubungan	(1.348.125.735,10)	(1.272.387.139,75)	(75.738.595,35)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.446.286.428,24)	(7.446.286.428,24)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(3.517.300,00)	(3.517.300,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(789.330.000,00)	(601.074.000,00)	(188.256.000,00)
Jumlah	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)

Tabel 5. 122 Rincian Jenis Penyisihan Piutang per OPD

	Penyisihan Piutang			
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
RSUD Bengkalis				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				12.706.150,00
	0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah				70.376.000,00
	135.220,00	228.519.820,00	82.407.350,00	
Total				394.144.540,00
RSUD Kec. Mandau				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				283.062.928,00
	0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah				86.649.588,00
	241.247,68	0,00	0,00	
Total				369.953.763,68
PPKD				
Piutang Lainnya				4.047.617.223,00
	0,00	0,00	0,00	
Total				4.047.617.223,00
Badan Pendapatan Daerah				
Piutang Pajak				37.489.894.071,00
	46.871.046,76	1.877.520.158,38	8.382.484.511,96	
Piutang Retribusi HO Golongan				2.575.801.820,50
	0,00	0,00	0,00	
Total				50.372.571.608,60



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Piutang Retribusi HO Golongan				
	0,00	0,00	0,00	426.426.125,00
Total				426.426.125,00
Dinas Perhubungan				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan				
	56.477,10	486.158,00	11.271.646,00	743.211.454,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	0,00	0,00	0,00	103.100.000,00
Total				1.348.125.735,10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Piutang Lainnya				
	0,00	0,00	0,00	7.446.286.428,24
Total				7.446.286.428,24
Dinas Lingkungan Hidup				
Retribusi Limbah Cair				
	0,00	0,00	0,00	3.517.300,00
Total				3.517.300,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
	141.250,00	8.335.000,00	60.725.000,00	719.175.500,00
Retribusi Jasa Pelayanan Pasar				
	8.250,00	495.000,00	450.000,00	0,00
Total				789.330.000,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG				65.197.972.723,62

10. Beban Dibayar Dimuka

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja tahun 2020 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Akun Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020 mempunyai saldo sebesar Rp77.190.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 123 Rincian Beban Dibayar Dimuka per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	48.315.900,00	13.316.700,00	34.999.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran	28.875.000,00	41.433.333,33	(12.558.333,33)
Jumlah	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67

Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan pembayaran belanja barang/jasa terhadap Sewa Tempat Server LPSE terhitung mulai bulan Maret 2020, serta Sewa Ruko/Gudang Bagian Umum terhitung mulai bulan Mei 2020. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 124 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
Tempat Server LPSE (Masa Pembayaran Bulan Maret)	79.900.700,00	66.584.000,00	13.316.700,00
Ruko/Gudang Bagian Umum (Masa Pembayaran Bulan Mei)	105.000.000,00	70.000.800,00	34.999.200,00
Jumlah	184.900.700,00	136.584.800,00	48.315.900,00

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja sewa terhadap pemakaian gedung untuk UPT pada satu kecamatan, yaitu kecamatan Mandau terhitung mulai bulan Desember 2020. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 125 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
UPT Kecamatan Mandau (Masa Pembayaran Bulan Desember)	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00
Jumlah	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00

11. Persediaan

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	61.779.121.203,23	260.803.124.727,78	(199.024.003.524,55)

Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp61.779.121.203,23 terdiri dari persediaan obat sebesar Rp22.881.348.638,42 dan persediaan non obat sebesar Rp38.897.772.564,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Rincian Persediaan

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Persediaan Obat	22.881.348.638,42	21.397.206.752,33	1.484.141.886,09
Persediaan Alat Kesehatan	13.536.278.688,47	6.127.122.431,08	7.409.156.257,39
Persediaan ATK	440.528.448,83	1.285.893.857,01	(825.365.408,18)
Persediaan Barang Cetak	963.631.750,97	599.079.422,00	364.552.328,97
Persediaan Alat Kebersihan	835.006.967,89	318.386.033,76	516.620.934,13
Persediaan Perlengkapan Listrik	194.488.909,20	236.900.647,89	(42.411.738,69)
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.133.600,00	2.409.000,00	7.724.600,00
Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih	118.494.845,00	101.528.614,00	16.966.231,00
Persediaan Suku Cadang	109.926.468,00	130.352.098,00	(20.425.630,00)
Persediaan Bahan Bakar	400.000,00	5.987.000,00	(5.587.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Persediaan Bahan Kimia	2.137.567.272,03	2.361.001.928,38	(223.434.656,35)
Persediaan Hibah pada Pihak Ketiga/ Masyarakat	20.179.501.814,42	228.096.303.143,33	(207.916.801.328,91)
Persediaan Makanan Pokok	371.813.800,00	160.953.800,00	210.860.000,00
Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	61.779.121.203,23	260.803.124.727,78	(199.024.003.524,55)

a) Persediaan Obat

Nilai persediaan obat per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.881.348.638,42 berada pada OPD:

Tabel 5. 127 Rincian Persediaan Obat per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	8.673.210.872,57	6.017.995.833,00	2.655.215.039,57
Dinas Perikanan	0,00	26.159.675,00	(26.159.675,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.321.326,00	94.381.559,00	(17.060.233,00)
RSUD Bengkalis	9.258.301.958,00	11.104.944.408,89	(1.846.642.450,89)
RSUD Kecamatan Mendau	4.872.514.481,85	4.153.725.276,44	718.789.205,41
Jumlah	22.881.348.638,42	21.397.206.752,33	1.484.141.886,09

b) Persediaan ATK

Nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp440.528.448,83 berada pada OPD:

Tabel 5. 128 Rincian Persediaan ATK per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	2.866.600,03	5.511.472,77	(2.644.872,74)
Sekretariat DPRD	4.820.100,00	6.073.100,00	(1.253.000,00)
Dinas Kesehatan	0,00	2.816.200,00	(2.816.200,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	161.600.100,00	1.048.102.100,00	(886.502.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Keersipan	770.000,00	1.023.400,00	(253.400,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	674.200,00	946.700,00	(272.500,00)
Badan Pendapatan Daerah	3.670.400,00	1.646.760,00	2.023.640,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.839.900,00	1.889.042,00	(49.142,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.123.600,00	2.391.400,00	(1.267.800,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.190.000,00	802.600,00	387.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.661.700,00	3.942.700,00	719.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.807.000,00	2.402.800,00	4.404.200,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	397.000,00	702.700,00	(305.700,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penelitian dan Pengembangan	5.313.500,00	4.620.000,00	693.500,00
Dinas Pendidikan	2.735.400,00	381.500,00	2.353.900,00
Dinas Perikanan	2.901.200,00	3.490.000,00	(588.800,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	578.060,00	588.100,00	(10.040,00)
Inspektorat	854.000,00	662.400,00	191.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.383.700,00	2.694.300,00	(1.310.600,00)
Dinas Sosial	650.000,00	896.000,00	(246.000,00)
RSUD Bengkulu	1.017.700,00	803.790,00	213.910,00
RSUD Kecamatan Mandau	173.827.898,80	111.243.588,24	62.584.310,56
Kantor Camat Mandau	937.200,00	812.500,00	124.700,00
Kantor Camat Rupal	516.600,00	538.800,00	(22.200,00)
Kantor Camat Rupal Utara	4.476.300,00	8.367.850,00	(3.891.550,00)
Kantor Camat Bengkulu	76.200,00	569.200,00	(493.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	282.000,00	341.000,00	(59.000,00)
Kantor Camat Bantan	1.459.300,00	3.024.100,00	(1.564.800,00)
Kantor Camat Siak Kecil	3.287.500,00	994.400,00	2.293.100,00
Kantor Camat Pinggir	2.180.500,00	2.689.000,00	(508.500,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	185.500,00	191.200,00	(5.700,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.011.800,00	3.796.000,00	(784.200,00)
Dinas Lingkungan Hidup	494.500,00	525.000,00	(30.500,00)
Dinas Pertanian	2.782.490,00	6.583.154,00	(3.800.664,00)
Dinas Perhubungan	3.674.400,00	3.961.000,00	(286.600,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.819.000,00	4.008.000,00	(2.189.000,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	364.300,00	763.200,00	(398.900,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	530.000,00	867.400,00	(337.400,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	287.000,00	2.172.600,00	(1.885.600,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.280.000,00	2.254.400,00	25.600,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.462.900,00	1.308.800,00	21.154.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.060.800,00	1.279.900,00	(219.100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.767.900,00	9.397.000,00	(4.629.100,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	788.200,00	1.314.100,00	(525.900,00)
Kantor Camat Talang Muandau	1.693.000,00	3.629.000,00	(1.936.000,00)
Kantor Camat Bathin Solapan	1.429.000,00	2.875.700,00	(1.446.700,00)
Jumlah	440.528.448,83	1.265.893.857,01	(825.365.408,18)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Persediaan Barang Cetak

Nilai persediaan barang cetakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp963.631.750,97 berada pada OPD:

Tabel 5. 129 Rincian Persediaan Barang Cetak per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	288.000,00	320.000,00	(32.000,00)
Sekretariat DPRD	1.955.500,00	2.082.000,00	(126.500,00)
Dinas Kesehatan	0,00	6.768.632,00	(6.768.632,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	471.333.750,00	287.317.625,00	184.016.125,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.000,00	262.000,00	(21.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.210.000,00	1.083.000,00	127.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.300.800,00	937.500,00	363.300,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.975.000,00	1.822.000,00	153.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.664.000,00	679.800,00	1.984.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.541.000,00	1.172.600,00	368.400,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	467.500,00	520.000,00	(52.500,00)
Dinas Pendidikan	300.000,00	350.200,00	(50.200,00)
Dinas Perikanan	975.000,00	0,00	975.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	2.016.320,00	2.397.850,00	(381.530,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	583.400,00	673.000,00	(89.600,00)
Dinas Sosial	0,00	780.500,00	(780.500,00)
RSUD Bengkalis	21.770.000,00	18.786.000,00	2.984.000,00
RSUD Kecamatan Mandau	223.257.472,97	164.644.950,00	58.612.522,97
Kantor Camat Mandau	270.000,00	270.000,00	0,00
Kantor Camat Rupat	22.500,00	272.700,00	(250.200,00)
Kantor Camat Bengkalis	0,00	204.000,00	(204.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	280.000,00	155.000,00	125.000,00
Kantor Camat Bantan	432.330,00	1.270.980,00	(838.650,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.744.000,00	1.030.000,00	714.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	424.500,00	554.500,00	(130.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	808.000,00	458.000,00	350.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	702.800,00	515.000,00	187.800,00
Dinas Pertanian	389.418,00	0,00	389.418,00
Dinas Perhubungan	221.684.460,00	98.457.885,00	123.226.575,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.237.500,00	2.160.500,00	(923.000,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	575.800,00	508.000,00	67.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	935.000,00	1.270.000,00	(335.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.700,00	165.000,00	(46.300,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.000,00	241.800,00	(131.800,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	346.000,00	568.400,00	(222.400,00)
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	380.000,00	(380.000,00)
Jumlah	963.631.750,97	599.079.422,00	364.552.328,97

d) Persediaan Alat Kebersihan

Nilai persediaan alat kebersihan per 31 Desember 2020 sebesar Rp835.006.967,89 berada pada OPD:

Tabel 5. 130 Rincian Persediaan Alat Kebersihan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	2.052.350,00	2.183.570,00	(131.220,00)
Sekretariat DPRD	2.474.000,00	2.083.000,00	391.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	679.500,00	(679.500,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	460.100,00	224.000,00	236.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	375.000,00	38.000,00	337.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	148.100,00	339.873,00	(191.773,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	730.000,00	0,00	730.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.658.000,00	734.000,00	3.924.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.057.600,00	644.000,00	413.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	218.000,00	272.600,00	(54.600,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	772.600,00	546.500,00	226.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pendidikan	0,00	70.200,00	(70.200,00)
Dinas Perikanan	0,00	661.000,00	(661.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	88.009,00	30.723,00	57.286,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	406.000,00	273.000,00	133.000,00
Dinas Sosial	680.000,00	850.000,00	(170.000,00)
RSUD Bengkulu	3.355.000,00	511.000,00	2.844.000,00
RSUD Kecamatan Mandau	795.022.508,89	293.672.567,76	501.349.941,13
Kantor Camat Mandau	1.037.200,00	363.300,00	673.900,00
Kantor Camat Rupal	104.300,00	104.000,00	300,00
Kantor Camat Bengkulu	9.000,00	115.000,00	(106.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	89.400,00	66.800,00	22.600,00
Kantor Camat Bantan	835.000,00	1.281.000,00	(446.000,00)
Kantor Camat Siak Kecil	927.000,00	700.000,00	227.000,00
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	42.000,00	166.200,00	(124.200,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.946.000,00	721.000,00	3.225.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.400,00	18.000,00	56.400,00
Dinas Pertanian	2.743.800,00	2.492.200,00	251.600,00
Dinas Perhubungan	7.098.000,00	1.485.000,00	5.613.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.900,00	628.700,00	(422.800,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	3.737.000,00	3.077.000,00	660.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	149.000,00	0,00	149.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	395.000,00	605.000,00	(210.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	490.000,00	543.000,00	(53.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.055.700,00	(1.055.700,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	182.800,00	297.000,00	(114.200,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bandar Laksamana	50.000,00	624.000,00	(574.000,00)
Kantor Camat Talang Muandau	160.000,00	160.000,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	233.900,00	69.600,00	164.300,00
Jumlah	835.006.967,89	318.386.033,76	516.620.934,13



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

e) Persediaan Perlengkapan Listrik

Nilai persediaan perlengkapan listrik per 31 Desember 2020 sebesar Rp194.488.909,20 berada pada OPD:

Tabel 5. 131 Rincian Persediaan Perlengkapan Listrik per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	3.838.909,20	3.686.181,89	152.727,31
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	227.400,00	413.400,00	(186.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	323.000,00	555.186,00	(232.186,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	126.000,00	252.000,00	(126.000,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.189.000,00	1.309.200,00	(120.200,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	925.000,00	490.000,00	435.000,00
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	375.000,00	70.000,00	305.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	171.076.000,00	196.732.800,00	(25.656.800,00)
Kantor Camat Bengkulu	0,00	87.500,00	(87.500,00)
Kantor Camat Bantan	100.000,00	252.000,00	(152.000,00)
Kantor Camat Siak Kecil	861.000,00	1.156.000,00	(295.000,00)
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.475.000,00	755.000,00	720.000,00
Dinas Pertanian	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	900.000,00	(900.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Perukiman dan Pertanahan	1.865.000,00	26.445.500,00	(24.580.500,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	677.000,00	(677.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	510.000,00	640.000,00	(130.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.978.000,00	1.891.200,00	3.086.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	160.000,00	203.680,00	(43.680,00)
Kantor Camat Talang Muandau	279.000,00	279.000,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	98.600,00	105.000,00	(6.400,00)
Jumlah	194.488.909,20	236.900.847,89	(42.411.738,69)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

f) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Nilai persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.133.600,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 132 Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	150.000,00	360.000,00	(210.000,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.000,00	0,00	12.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Mandau	90.000,00	60.000,00	30.000,00
Kantor Camat Rumpit Utara	90.000,00	90.000,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	90.000,00	210.000,00	(120.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	255.000,00	456.000,00	(201.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	825.000,00	450.000,00	375.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.393.600,00	0,00	5.393.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.000,00	90.000,00	45.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	693.000,00	693.000,00	0,00
Jumlah	10.133.600,00	2.409.000,00	7.724.600,00

g) Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih

Nilai persediaan pupuk/ pakan/ benih per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.494.845,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 133 Rincian Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Perikanan	118.494.845,00	101.528.614,00	16.966.231,00
Jumlah	118.494.845,00	101.528.614,00	16.966.231,00

h) Persediaan Suku Cadang Mobil

Nilai persediaan suku cadang mobil per 31 Desember 2020 sebesar Rp109.926.468,00 berada pada OPD:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 134 Rincian Persediaan Suku Cadang Mobil per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
RSUD Kecamatan Mandau	109.926.468,00	130.352.098,00	(20.425.630,00)
Jumlah	109.926.468,00	130.352.098,00	(20.425.630,00)

i) Persediaan Bahan Bakar

Nilai persediaan bahan bakar per 31 Desember 2020 sebesar Rp400.000,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 135 Rincian Persediaan Bahan Bakar per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Perikanan	0,00	5.537.000,00	(5.537.000,00)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Rupert Utara	400.000,00	450.000,00	(50.000,00)
Jumlah	400.000,00	5.987.000,00	(5.587.000,00)

j) Persediaan Bahan Kimia

Nilai persediaan bahan kimia per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.137.567.272,03 berada pada OPD:

Tabel 5. 136 Rincian Persediaan Bahan Kimia per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
RSUD Bengkalis	867.941.834,00	1.128.661.436,67	(260.719.602,67)
RSUD Kecamatan Mandau	1.269.625.438,03	1.232.340.491,71	37.284.946,32
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.137.567.272,03	2.361.001.928,38	(223.434.656,35)

k) Persediaan Hibah

Nilai persediaan yang akan dihibahkan pada masyarakat per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.179.501.814,42 berada pada OPD:

Tabel 5. 137 Rincian Persediaan Hibah per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	1.121.588.199,00	0,00	1.121.588.199,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.300.835.260,00	(1.300.835.260,00)
Dinas Pendidikan	7.850.497.699,81	14.495.112.438,65	(6.644.614.738,84)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	635.403.828,00	635.403.828,00	0,00
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	2.776.918.063,00	32.989.143.063,00	(30.212.225.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.980.000,00	0,00	199.980.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.763.164,61	32.598.815.340,63	(31.783.052.176,02)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.779.350.860,00	146.076.993.213,05	(139.297.642.353,05)
Jumlah	20.179.501.814,42	228.096.303.143,33	(207.916.801.328,91)

l) Persediaan Makanan Pokok

Nilai persediaan makanan pokok per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.813.800,00 Berada pada OPD:

Tabel 5. 138 Rincian Persediaan Makanan Pokok per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaihan/(Penurunan)
Dinas Ketahanan Pangan	371.813.800,00	160.953.800,00	210.860.000,00
Jumlah	371.813.800,00	160.953.800,00	210.860.000,00

m) Persediaan Alat Kesehatan

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.536.278.688,47 berada pada OPD:

Tabel 5. 139 Rincian Persediaan Alat Kesehatan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaihan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	7.737.907.385,61	0,00	7.737.907.385,61
RSUD Kecamatan Mandau	5.205.726.859,86	5.433.867.412,08	(228.140.552,22)
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	592.644.443,00	693.255.019,00	(100.610.576,00)
Jumlah	13.536.278.688,47	6.127.122.431,08	7.409.156.257,39

Rincian Persediaan Per OPD dapat dilihat pada:

Lampiran Persediaan

B. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Non Permanen

	31 Des 2020	31 Des 2019	kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	31.670.421.119,00	31.777.844.627,00	(107.423.508,00)
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	(31.252.521.119,00)	(31.300.244.627,00)	47.723.508,00
Nilai Bersih	417.900.000,00	477.600.000,00	(59.700.000,00)

Akun investasi non permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.670.421.119,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp31.777.844.627,00 merupakan pinjaman kepada masyarakat berupa Dana Bergulir, Pinjaman Lunak, Buffer Stock, Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan penagihan piutang terhadap investasi non permanen kepada KPKNL untuk diproses lebih lanjut, sampai dengan saat laporan keuangan dibuat investasi non permanen pada Dinas Perikanan sudah dilakukan proses penagihan kepada debitur.

Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Nomor SPnPPN-01/PUPNC.03.03/2016 perihal penolakan pengurusan Piutang Negara, proyek P3TP dan PUPR dikeluarkan dari investasi non permanen dikarenakan:

- 1) Tidak adanya kepastian ada dan besarnya piutang negara
- 2) Tidak adanya dokumen yang mendukung dan membuktikan sebagai piutang negara
- 3) Sesuai dengan surat nomor 5.24.3/DISTANNAK/XI/2015/135 tanggal 23 November 2015 terhadap dua proyek tersebut diatas telah dinyatakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Bahwa bukan Pinjaman bagi petani tetapi merupakan bantuan saprodi langsung habis pakai kepada petani.

Tabel 5. 140 Rincian Investasi Non Permanen per OPD

OPD	Nilai Kotor	Diragukan Tertagih	Nilai Bersih
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19.421.278.679,00	(19.421.278.679,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.476.548.860,00	(5.476.548.860,00)	0,00
Dinas Perikanan	2.167.432.180,00	(2.167.432.180,00)	0,00
Dinas Pertanian	4.405.161.400,00	(3.987.261.400,00)	417.900.000,00
Pabrik VCO Yayasan Melayu	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00
Jumlah	31.670.421.119,00	(31.252.521.119,00)	417.900.000,00

a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenakan/(Penurunan)
Investasi non permanen	19.421.278.679,00	19.447.505.949,00	(26.227.270,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(19.421.278.679,00)	(19.447.505.949,00)	26.227.270,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Koperasi dan UKM mempunyai 3 (tiga) rekening penampung yaitu: No.108-0321034, 108-0321046 dan 108-0307740. Saldo pada rekening penampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321034, sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321046 dan sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0307740.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM berasal dari Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM, Proyek Pengembangan Usaha Koperasi di Kecamatan Bantan dan Rangsang, Proyek Pembangunan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu dan Kegiatan Pengembangan Koperasi Unggulan.

b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	5.476.548.860,00	5.496.836.008,00	(20.287.148,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(5.476.548.860,00)	(5.496.836.008,00)	20.287.148,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 2 (dua) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu: No.108-0317190 sebesar Rp205.705.035,00 dan pada Rekening nomor 108-0300571 sebesar Rp51.993.230,00.

Investasi non permanen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kecil Kabupaten Bengkulu dan Proyek Peningkatan Pengembangan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2001, Proyek Pinjaman Lunak untuk Percepatan Ekonomi Tahun 2005 dan Penguatan Modal Usaha Kecil Kec. Pinggir dan Mandau, Penguatan Modal Usaha Kec. Merbau, T. Tinggi dan T. Tinggi Barat, Penguatan Modal Usaha Kec. Bantan, Bengkulu, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupal dan Rupal Utara.

c) Dinas Perikanan

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perikanan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	2.167.432.180,00	2.168.341.270,00	(909.090,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(2.167.432.180,00)	(2.168.341.270,00)	909.090,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perikanan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu: No.108-2000231 sebesar Rp0,00.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan berasal dari kegiatan Proyek Pinjaman Lunak Untuk Percepatan Ekonomi Masyarakat dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Jaring Apung.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d) Dinas Pertanian

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Pertanian

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	4.405.161.400,00	4.465.161.400,00	(60.000.000,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(3.987.261.400,00)	(3.987.561.400,00)	300.000,00
Nilai bersih investasi non permanen	417.900.000,00	477.600.000,00	(59.700.000,00)

Perlu kami informasikan Dinas Pertanian mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan No.10-80-32221-1 yang telah berstatus tidak aktif dan telah ditutup.

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian berasal dari Proyek Pinjaman Lunak Percepatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkalis (PPL PEK) dan Proyek Pengembangan Tanaman Holtikultura Kabupaten Bengkalis (PPTH) Tahun 2002.

f) Pabrik VCO Yayasan Melayu

Berdasarkan hasil inventarisasi, Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Pabrik VCO Yayasan Melayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Rincian Investasi Non Permanen Pabrik VCO Yayasan Melayu

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)	0,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	518.544.148.762,00	519.234.381.948,00	(690.233.186,00)

Akun investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan terdiri dari penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jenis Penyertaan	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Penyertaan Modal pada PDAM Bengkalis	0,00	1,00	(1,00)
Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Line	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	131.606.200.000,00	131.606.200.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu	378.937.948.762,00	379.628.181.946,00	(690.233.184,00)
Penyertaan Modal pada PT. S/MT Bengkulu	0,00	1,00	(1,00)
Jumlah	518.544.148.762,00	519.234.381.948,00	(690.233.186,00)

Penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) dilakukan kepada 5 Badan Usaha dengan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp518.544.148.762,00.

Penyertaan awal Modal Pemerintah Daerah (PMP) Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada 5 Badan Usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkulu

Pembentukan PDAM Bengkulu berdasarkan atas Perda Kabupaten Bengkulu No. 04 Tahun 1994 tanggal 20 Januari 1994. Pemerintah Kabupaten Bengkulu memiliki 100% kepemilikan atas PDAM Bengkulu. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu di PDAM Bengkulu hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp28.006.482.531,00. Berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2020 (Unaudit) diketahui bahwa PDAM Kabupaten Bengkulu memperoleh kerugian sebesar Rp1.142.611.127,00. Sehingga rugi tersebut menambah saldo laba ditahan tahun sebelumnya yang bernilai minus Rp62.443.530.963,94. Konsisten dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PDAM Kabupaten Bengkulu disajikan senilai Rp0,00 di karenakan Rugi PDAM masih belum melebihi penyertaan modal sebesar minus Rp63.586.142.090,94.

Hal tersebut didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 6 Revisi Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi paragraf 47 yang menyatakan bahwa Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, maka penyertaan modal PT. PDAM di sajikan Rp0,00 atau Nihil.

Tabel 5. 147 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkulu

Tahun	Jumlah
2000	350.000.000,00
2001	1.109.400.000,00
2002	1.000.000.000,00
2003	3.000.000.000,00
2004	3.187.500.000,00
2005	6.000.000.000,00
2006	6.000.000.000,00
2007	8.200.000.000,00
2012	(8.224.347.689,00)
2014	3.044.859.174,00
2016	4.339.071.046,00
Jumlah	28.006.482.531,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Berdasarkan data/informasi yang tersedia, kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas saham Maskapai Penerbangan Riau Airlines adalah 5,5% dari keseluruhan modal PT. Riau Airlines sesuai dengan Surat Pernyataan Penyertaan Modal tanggal 17 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT. Riau Airlines tercatat sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- per lembar saham. Pada Tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Air Line dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. RAL, sehingga status pailit PT. RAL dinyatakan berakhir.

Tabel 5. 148 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Tahun	Jumlah
2005	8.000.000.000,00
Jumlah	8.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pada Bank Riau Kepri

PT. Bank Riau merupakan perusahaan daerah di Provinsi Riau yang bergerak di bidang perbankan di mana sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sampai dengan 31 Desember 2019 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau sebesar Rp131.606.200.000,00, persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas PT. Bank Riau sebesar 11,81% untuk posisi Per 31 Desember 2019.

Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri pada Tahun 2017 sebesar Rp5.248.746.825,00 akan tetapi penyertaan modal tersebut belum bisa di akui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan belum terbitnya Perda Penyertaan Modal dan akan diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah di Perdakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5. 149 Rincian Penyertaan Modal Pada Riau Kepri

Tahun	Jumlah
2006	15.004.000.000,00
2007	25.000.000.000,00
2008	2.000.200.000,00
2009	50.000.000.000,00
2011	9.602.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2012	20.000.000.000,00
2019	10.000.000.000,00
Jumlah	131.606.200.000,00

Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 46 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001. Seluruh kepemilikan saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu ini dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu menambahkan penyertaan modal ke PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,-. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu di PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp426.630.3993.067,00.

Terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkulu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor B-3284/L.4.13/Fu.1/11/2019 tentang Jawaban Permohonan Pengembalian Aset PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 25 November 2019, bahwa barang bukti berupa Aset PT. Bumi Laksamana Jaya telah di Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 162/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp154.690.000,00 dan hasilnya telah disetor ke Kas Negara, serta barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.750.973.000,00 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Bank Riau Kepri dengan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 September 2018 dan 14 Maret 2019.

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu per 31 Desember 2020 (Unaudit) diketahui bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp690.233.184,00, dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkulu disajikan senilai Rp378.937.948.762,00.

Tabel 5. 150 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Tahun	Jumlah
2001	10.000.000.000,00
2002	2.000.000.000,00
2003	41.621.000.000,00
2004	11.150.000.000,00
2005	5.000.000.000,00
2007	7.500.000.000,00
2008	40.906.480.267,00
2009	8.452.912.800,00
2012	300.000.000.000,00
Jumlah	426.630.393.067,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Jumlah penyertaan modal berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Sri Junjungan Media Televisi (PT. SJMT) yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi hingga akhir tahun 2013 masih tercatat sebesar Rp8.236.000.000,00. PT SJMT sampai dengan laporan keuangan dibuat tidak beroperasi lagi. PT SJMT semula dikelola oleh PT. BLJ namun dilatarbelakangi oleh telah berakhirnya KSO antara Pemkab. Bengkalis dan PT. BLJ dalam pengelolaan PT. SJMT dan PT. BLJ tidak berhak melakukan Penyiaran televisi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. melalui surat kepada Bupati Bengkalis No.133/BLJ-Dirut/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 hal rencana serah terima, PT BLJ berkeinginan untuk menyerahkan seluruh aset dan pengelolaan PT.SJMT. Seluruh Aset PT SJMT telah diserahkan dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 151 Rincian Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Tahun	Jumlah
2005	1.236.000.000
2006	3.500.000.000
2007	3.500.000.000
Jumlah	8.236.000.000,00

Rincian Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada:
Lampiran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

C. Aset Tetap

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85	(356.887.664.552,79)

Jumlah Aset Tetap 31 Desember 2020 sebesar Rp7.879.234.544.017,06 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.236.122.208.569,85. Nilai aset tetap TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp356.887.664.554,79. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 152 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Tanah	1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04	53.711.769.740,27
Peralatan dan Mesin	1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33	116.769.806.056,70
Gedung dan Bangunan	3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10	184.282.733.426,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42	748.588.080.192,43
Aset Tetap Lainnya	126.159.968.170,72	117.319.205.805,72	8.840.762.365,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	335.652.200.689,21	807.736.619.379,16	(472.084.418.689,95)
Akumulasi Penyusutan	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)
Jumlah	7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85	(356.887.664.552,79)

Rincian dan uraian per masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

I. Tanah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04	53.711.769.740,27

Nilai aset tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.118.098.988.741,31 dan Rp1.064.387.219.001,04 maka terdapat kenaikan dari periode sebelumnya sebesar Rp53.711.769.740,27.

Mutasi aset tetap tanah sebesar Rp1.118.098.988.741,31 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	1.064.387.219.001,04
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja modal Tanah	721.188.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Hutang Pihak Ketiga	0,00
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	52.283.713.101,20
Reklasifikasi	259.971.369,07
Hibah	3.402.860.000,00
Total Mutasi Tambah	56.667.732.470,27
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi	508.369.500,00
Penghapusan	147.145.840,00
Koreksi Pencatatan	2.300.447.390,00
Total Mutasi Kurang	2.955.962.730,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020	1.118.098.988.741,31

Rincian aset tetap tanah sebesar Rp1.118.098.988.741,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Aset Tetap Tanah

Jenis	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah Persil			
Tanah Bangunan			
Perumahan/G. Tempat Tinggal	89.831.015.094,40	0,00	89.831.015.094,40
Tanah Untuk Bangunan			
Ged. Perdagangan/ Perusahaan	85.805.706.714,72	0,00	85.805.706.714,72
Tanah Untuk Bangunan Industri	20.490.951.100,00	0,00	20.490.951.100,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	479.363.971.102,15	0,00	479.363.971.102,15
Tanah Untuk Bangunan Gedung Serana Olah Raga	24.668.278.789,07	0,00	24.668.278.789,07
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadat	5.423.717.490,00	0,00	5.423.717.490,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	921.541.645.806,61	(921.541.645.806,61)
Tanah Non Persil			
Tanah Basah	13.851.048.000,00	0,00	13.851.048.000,00
Tanah Kering	5.321.118.800,00	0,00	5.321.118.800,00
Tanah Perkebunan	266.524.500,00	90.000.000,00	176.524.500,00
Tanah Hutan	6.799.979.600,00	6.799.979.600,00	0,00
Tanah Tandus	1.476.384.000,00	1.304.784.000,00	171.600.000,00
Tanah Pertanian	1.019.290.000,00	597.655.000,00	421.635.000,00
Tanah Kebun Campuran	0,00	100.674.500,00	(100.674.500,00)
Tanah Kolam Ikan	0,00	310.391.600,00	(310.391.600,00)
Tanah Danau/Rawa	0,00	9.657.636.400,00	(9.657.636.400,00)
Tanah Pengguna Lain	0,00	171.600.000,00	(171.600.000,00)
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	84.917.067.144,43	(84.917.067.144,43)
Lapangan			
Tanah Lapangan Olah Raga	22.324.993.570,00	0,00	22.324.993.570,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	17.593.785.066,66	0,00	17.593.785.066,66
Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	4.242.101.480,00	0,00	4.242.101.480,00
Tanah Untuk Jalan	245.942.478.075,34	0,00	245.942.478.075,34
Tanah Untuk Bangunan Air	36.580.337.248,97	0,00	36.580.337.248,97
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	76.625.000,00	0,00	76.625.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3.070.279.000,00	0,00	3.070.279.000,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	59.900.000,00	0,00	59.900.000,00
Tanah Untuk Makam	26.789.823.950,00	0,00	26.789.823.950,00
Tanah Untuk Taman	14.957.573.160,00	0,00	14.957.573.160,00
Tanah Kampung	12.143.107.000,00	38.895.784.950,00	(26.752.677.950,00)
Jumlah	1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04	53.711.769.740,27

Kenaikan Penurunan Aset Tanah dapat di lihat pada:

Lampiran Aset Tanah

2. Peralatan dan Mesin

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33	116.769.806.056,70

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.720.936.637.948,03 dan Rp1.604.166.831.891,33.

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.720.936.637.948,03 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)		1.604.166.831.891,33
Mutasi Tambah		
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Barang dan Jasa	263.833.800,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	85.484.297.958,45	
Belanja Gedung dan Bangunan	574.266.902,13	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.590.000,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	36.875.000,00	
Koreksi BPK	0,00	
Hutang Pihak Ketiga	81.232.550,00	
Total Pembelian		86.665.096.210,58
Hibah	3.178.237.727,00	
Transfer masuk	6.612.327.366,00	
Koreksi Pencatatan	4.480.000,00	
Reklasifikasi	18.275.895.816,68	
Aset Covid-19	13.129.542.330,00	
Koreksi BPK	0,00	
Total Mutasi Tambah		41.200.483.239,68
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	6.612.327.366,00	
Penghapusan	4.091.446.027,56	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	392.000.000,00	
Total Mutasi Kurang		11.095.773.393,56
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020		1.720.936.637.948,03

Rincian aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.720.936.637.948,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo 2020	Saldo 2019	Kerjakan/(Penurunan)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	62.426.616.910,01	61.711.331.610,01	715.285.300,00
Alat Besar Apung	482.279.137,24	1.064.598.137,24	(582.319.000,00)
Alat Bantu	61.816.138.388,38	59.071.016.346,00	2.745.122.042,38
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	275.911.112.196,49	279.069.578.617,05	(3.158.466.420,56)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.889.094.179,35	1.156.602.399,35	732.491.780,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	27.126.919.338,22	27.126.919.338,22	0,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10.289.897.406,00	10.289.897.406,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	2.762.546.304,85	2.764.425.269,85	(1.878.965,00)
Alat Bengkel Tak Bermesin	3.421.388.416,82	3.267.936.095,82	153.452.321,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Ukur	12.252.970.517,77	11.638.113.258,77	614.857.259,00
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	24.608.202.543,96	13.630.423.613,82	10.977.778.930,14
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	11.530.145.203,14	(11.530.145.203,14)
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	102.720.710.027,02	98.600.070.165,18	4.120.639.861,84
Alat Rumah Tangga	278.225.552.984,89	272.358.750.901,41	5.866.802.083,48
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.037.722.160,20	25.911.419.226,33	1.126.302.933,87
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	30.663.595.695,91	31.356.115.914,59	(692.520.218,68)
Alat Komunikasi	9.212.615.326,87	13.093.846.135,84	(3.881.230.808,97)
Peralatan Pemancar	19.093.207.850,52	3.251.108.359,13	15.842.099.491,39
Peralatan Komunikasi Navigasi	23.978.000,00	0,00	23.978.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	327.009.303.467,38	258.534.457.118,33	68.474.846.349,05
Alat Kesehatan Umum	1.321.678.474,28	15.900.639.501,78	(14.578.961.027,50)
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	175.062.376.419,40	167.805.596.071,01	7.256.780.348,39
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.001.974.722,00	3.903.876.404,00	98.098.318,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	87.722.698.158,60	86.774.147.069,67	948.551.088,93
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	432.912.022,72	449.831.622,72	(16.919.600,00)
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.682.637.807,84	3.194.145.191,84	488.492.616,00
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	2.397.500,00	6.316.332.553,94	(6.313.935.053,94)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.370.788.338,43	3.393.920.238,43	(23.131.900,00)
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.727.396.068,92	3.722.211.068,92	5.185.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	717.212.042,00	0,00	717.212.042,00
Alat Persenjataan			
Senjata Api	242.809.527,00	248.072.527,00	(5.263.000,00)
Persenjataan Non Senjata Api	1.717.851.535,21	385.471.290,10	1.332.380.245,11
Senjata Sinar	9.772.458,00	9.772.458,00	0,00
Alat Khusus Kepolisian	693.373.821,00	0,00	693.373.821,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	10.263.257.124,51	(10.263.257.124,51)
Komputer			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Komputer Unit	98.587.082.545,75	0,00	98.587.082.545,75
Peralatan Komputer	38.508.907.983,58	116.372.803.653,33	(77.863.895.669,75)
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	86.625.000,00	0,00	86.625.000,00
Alat Pelindung	4.885.041,00	0,00	4.885.041,00
Alat Sar	5.693.480.762,07	0,00	5.693.480.762,07
Alat Kerja Penerbangan	141.770.000,00	0,00	141.770.000,00
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Laku Lintas Darat	16.893.583.611,35	0,00	16.893.583.611,35
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	522.894.000,00	0,00	522.894.000,00
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	817.679.257,00	0,00	817.679.257,00
Jumlah	1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33	116.769.806.056,70

Kenaikan Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dapat di lihat pada:
Lampiran Aset Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10	184.282.733.426,63

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.135.001.432.141,73 dan Rp2.950.718.698.715,10.

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.135.001.432.141,73 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	2.950.718.698.715,10
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	2.821.243.000,00
Belanja Barang dan jasa menjadi Aset Gedung	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.156.052.675,00
Belanja Gedung dan Bangunan	91.508.752.001,09
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Hutang Pihak Ketiga	1.747.640.000,00
Total Pembelian	99.233.687.676,09
Transfer masuk	5.884.029.755,00
Aset Dari KDP	27.197.083.771,22
Reklasifikasi	2.896.887.200,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Covid-19	10.154.918.399,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	72.261.282.890,00	
Total Mutasi Tambah		118.394.202.015,22
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	5.884.029.755,00	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Reklasifikasi	26.985.384.059,68	
Penghapusan	64.896.000,00	
Koreksi Pencatatan	410.846.450,00	
Total Mutasi Kurang		33.345.156.264,68
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020		3.135.001.432.141,73

Rincian aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.135.001.432.141,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.791.116.269.245,22	2.660.179.939.221,90	130.936.330.023,32
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	240.437.789.197,21	230.778.918.518,62	9.658.870.678,59
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	34.426.806.561,45	0,00	34.426.806.561,45
Tugu Peringatan	0,00	8.580.875.623,93	(8.580.875.623,93)
Tugu Peringatan Lain	0,00	243.376.547,00	(243.376.547,00)
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	4.063.817.404,85	4.063.817.404,85	0,00
Bangunan Bersejarah	0,00	28.992.609.687,45	(28.992.609.687,45)
Monomen/Bangunan Bersejarah	0,00	380.067.000,00	(380.067.000,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	64.956.749.733,00	0,00	64.956.749.733,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	249.069.000,00	(249.069.000,00)
Rambu-Rambu	0,00	16.727.131.711,35	(16.727.131.711,35)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	522.894.000,00	(522.894.000,00)
Jumlah	3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10	184.282.733.426,63

Kenaikan Penurunan Aset Gedung dan Bangunan dapat di lihat pada:
Lampiran Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42	748.588.080.192,43

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.975.413.810.264,85 dan Rp8.226.825.730.072,42.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.975.413.810.264,85 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited) 8.226.825.730.072,42

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	240.180.000,00	
Belanja Modal Tanah	0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	800.605.692,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.626.986.718,70	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	
Total Pembelian		225.667.772.410,70

Transfer Masuk	0,00	
Aset dari KDP	458.387.608.817,73	
Reklasifikasi	68.486.969.006,00	
Aset Covid-19	7.000.000,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		526.881.577.823,73

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	0,00	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	3.961.270.042,00	
Total Mutasi Kurang		3.961.270.042,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 8.975.413.810.264,85

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.975.413.810.264,85 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 156 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Jalan dan Jembatan			
Jalan	6.520.578.663.309,70	5.977.703.129.443,18	542.875.533.866,52
Jembatan	523.408.864.540,76	425.936.886.992,57	97.471.977.548,19
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	340.980.152.634,34	339.587.275.134,34	1.392.877.500,00
Bangunan Pengaliran Pasang Surut	15.671.828.933,96	16.091.925.768,96	(420.096.835,00)
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	3.729.662.176,05	1.952.040.686,00	1.777.621.490,05
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	828.658.035.717,07	775.255.835.012,56	53.402.200.704,51
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	4.944.205.227,74	4.937.205.227,74	7.000.000,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	425.869.607.183,19	100.310.070.705,81	325.559.536.477,38
Bangunan Air Kotor	12.208.563.465,83	12.208.563.465,83	0,00
Bangunan Air	0,00	227.745.301.374,46	(227.745.301.374,46)
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	44.109.854.497,53	44.109.854.497,53	0,00
Instalasi Air Kotor	647.980.178,51	647.980.178,51	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.259.815.001,05	6.126.697.072,28	133.117.928,77
Instalasi Gardu Listrik	2.200.412.086,28	1.724.445.338,04	475.966.748,24
Instalasi Pertahanan	1.129.114.308,00	1.129.114.308,00	0,00
Instalasi Gas	388.540.793,10	388.540.793,10	0,00
Instalasi Pengaman	417.030.256,70	417.030.256,70	0,00
Jaringan			
Jaringan Air Minum	129.855.362.363,59	177.147.056.276,59	(47.291.693.913,00)
Jaringan Listrik	113.689.854.568,26	112.740.514.517,03	949.340.051,23
Jaringan Telepon	666.263.023,19	666.263.023,19	0,00
Jumlah	8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42	748.588.080.192,43

Kenaikan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di fihat pada:
Lampiran Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
126.159.968.170,72	117.319.205.805,72	8.840.762.365,00

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp126.159.968.170,72 dan Rp117.319.205.805,72.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Mutasi aset tetap lainnya sebesar Rp126.159.968.170,72 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	117.319.205.805,72
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	51.050.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.771.328.422,00
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	9.822.378.422,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi	95.252.000,00
Total Mutasi Tambah	95.252.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi	1.072.388.057,00
Koreksi Pencatatan	4.480.000,00
Total Mutasi Kurang	1.076.868.057,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020	126.159.968.170,72

Rincian aset tetap lainnya sebesar Rp126.159.968.170,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan			
Bahan Perpustakaan Tercetak	109.780.434.665,38	0,00	109.780.434.665,38
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	125.577.840,00	0,00	125.577.840,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	4.337.881.681,00	0,00	4.337.881.681,00
Musik	152.943.000,00	0,00	152.943.000,00
Karya Grafika (Graphic Material)	21.306.498,00	0,00	21.306.498,00
Three Dimensional Artefacts And Reelita	110.828.469,00	0,00	110.828.469,00
Tarsalit	790.000,00	0,00	790.000,00
Buku	0,00	100.901.687.749,38	(100.901.687.749,38)
Terbitan	0,00	363.147.837,00	(363.147.837,00)
Barang-Barang Perpustakaan	0,00	3.519.119.388,00	(3.519.119.388,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	2.052.957.567,95	0,00	2.052.957.567,95
Alat Bercorak Kebudayaan	2.321.919.285,00	4.544.556.687,95	(2.222.637.402,95)
Tanda Penghargaan	30.966.700,00	0,00	30.966.700,00
Alat Olah Raga Lainnya	0,00	558.231.679,00	(558.231.679,00)
Hewan			
Hewan Piaraan	0,00	95.000.000,00	(95.000.000,00)
Tanaman			
Tanaman	2.864.032.717,39	2.864.032.717,39	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.360.329.747,00	4.473.429.747,00	(113.100.000,00)
Jumlah	125.159.968.170,72	117.319.205.805,72	8.840.762.365,00

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
335.652.200.689,21	807.736.619.379,16	(472.084.418.689,95)

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp335.652.200.689,21 dan Rp807.736.619.379,16.

Mutasi KDP sebesar Rp335.652.200.689,21 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 31 Desember 2019 (Audited)	807.736.619.379,16
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	22.707.415.099,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.749.336.108,00
Utang Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	26.456.751.207,00
Transfer Masuk	9.223.390.000,00
Reklasifikasi	9.223.390.000,00
Koreksi Pencatatan	11.322.323.000,00
Total Mutasi Tambah	29.769.103.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	9.223.390.000,00
Reklasifikasi	519.034.482.896,95
Aset di Serahkan Pemda Lain	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penghapusan	52.400.000,00
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Kurang	528.310.272.896,95
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020	335.652.200.689,21

Rincian aset tetap KDP per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	24.417.999,82	24.417.999,82	0,00
Sekretariat DPRD	99.396.000,00	99.396.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	3.750.112.652,56	10.122.737.108,20	(6.372.624.455,64)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.800.309,00	98.800.309,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	24.770.000,00	(24.770.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.224.000,00	172.224.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	200.769.797,00	200.769.797,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.968.000,00	0,00	39.968.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	38.427.425,00	38.427.425,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00
Dinas Pendidikan	11.555.714.290,00	10.514.506.939,58	1.041.207.350,42
Dinas Perikanan	81.630.000,00	52.400.000,00	29.230.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
Dinas Sosial	2.095.198.645,51	2.120.245.645,51	(25.047.000,00)
RSUD Bengkalis	2.539.875.000,00	2.539.875.000,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	235.051.000,00	646.696.700,00	(411.645.700,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	190.650.000,00	(190.650.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	514.226.000,00	514.226.000,00	0,00
Dinas Pertanian	193.000.000,00	505.896.000,00	(312.896.000,00)
Dinas Perhubungan	8.464.830.467,80	9.033.513.428,80	(568.682.961,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.742.282.850,71	757.790.989.130,55	(464.048.706.279,84)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	4.690.347.147,00	5.749.853.207,89	(1.059.506.060,89)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.785.343.104,81	7.097.024.687,81	(311.681.583,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	181.186.000,00	0,00	181.186.000,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	335.652.200.689,21	807.736.619.379,16	(472.084.419.689,95)

7. Akumulasi Penyusutan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)

Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp7.532.028.493.938,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.430.450.968.470,36)	(1.295.152.550.625,79)	(135.298.417.844,57)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(954.785.318.054,54)	(881.584.309.120,07)	(73.201.008.934,47)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(5.086.892.120.199,48)	(4.298.230.189.221,19)	(788.661.930.978,29)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(59.900.087.214,41)	(60.065.047.327,87)	164.960.113,46
Jumlah	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)

Tabel 5. 160 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	(300.768.648.784,28)	(287.221.774.414,28)	(13.546.874.370,00)
Sekretariat DPRD	(61.008.095.532,77)	(54.960.296.127,09)	(6.047.799.405,68)
Dinas Kesehatan	(121.571.349.951,68)	(108.691.321.541,68)	(12.880.028.410,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(12.874.918.772,68)	(11.047.707.343,68)	(1.827.211.429,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(22.779.129.415,46)	(21.294.660.660,46)	(1.484.468.755,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(12.390.013.088,24)	(11.164.499.607,24)	(1.225.513.481,00)
Badan Pendapatan Daerah	(17.310.971.645,82)	(15.575.112.495,82)	(1.735.859.150,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(8.270.763.592,57)	(7.512.684.901,57)	(758.078.691,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(8.752.761.366,12)	(8.076.851.994,12)	(675.909.372,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(19.502.987.396,83)	(18.962.738.450,83)	(540.248.946,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(7.692.225.196,45)	(7.220.095.268,45)	(472.129.928,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(4.837.425.345,80)	(4.954.498.868,80)	117.073.523,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(56.272.799.423,66)	(46.726.000.916,77)	(9.546.798.506,89)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(14.994.719.335,01)	(14.212.351.274,01)	(782.368.061,00)
Dinas Pendidikan	(616.077.305.787,94)	(560.684.308.544,36)	(55.392.997.243,58)
Dinas Perikanan	(21.022.832.489,76)	(19.368.015.422,76)	(1.654.817.067,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(20.295.150.351,11)	(19.265.049.242,11)	(1.030.101.109,00)
Inspektorat	(8.392.900.273,25)	(8.089.856.414,25)	(303.043.859,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(8.515.510.574,09)	(7.917.168.651,09)	(598.341.923,00)
Dinas Sosial	(15.944.949.255,07)	(14.486.073.005,07)	(1.458.876.250,00)
RSUD Bengkalis	(188.734.312.069,62)	(165.261.435.838,62)	(23.472.876.231,00)
RSUD Kecamatan Mandau	(169.573.161.323,88)	(146.832.608.622,88)	(22.740.552.701,00)
Kantor Camat Mandau	(45.813.482.458,15)	(39.410.868.184,82)	(6.402.614.273,33)
Kantor Camat Rupat	(25.813.662.390,54)	(21.527.504.369,54)	(4.286.158.021,00)
Kantor Camat Rupat Utara	(13.355.399.938,17)	(11.159.338.871,17)	(2.196.061.067,00)
Kantor Camat Bengkalis	(25.584.061.436,14)	(22.416.023.585,14)	(3.168.037.851,00)
Kantor Camat Bukit Batu	(17.677.049.674,00)	(15.329.081.030,00)	(2.347.968.644,00)
Kantor Camat Bantan	(16.176.331.070,73)	(14.092.389.229,73)	(2.083.941.841,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(11.571.834.906,66)	(9.865.945.774,66)	(1.705.889.132,00)
Kantor Camat Pinggir	(19.342.035.620,70)	(16.102.214.671,70)	(3.239.820.949,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(20.297.343.715,85)	(19.574.785.647,85)	(722.558.068,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(61.792.523.319,88)	(56.879.107.813,88)	(4.913.415.506,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(55.702.556.607,62)	(51.073.362.401,62)	(4.629.194.206,00)
Dinas Pertanian	(60.096.276.185,59)	(54.395.149.221,59)	(5.701.126.964,00)
Dinas Perhubungan	(328.739.078.257,47)	(244.752.601.274,70)	(83.986.476.982,77)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(3.557.991.939.782,58)	(2.998.654.901.242,80)	(559.337.038.539,78)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	(1.240.001.221.403,19)	(1.106.674.943.071,68)	(133.326.278.331,51)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.690.515.076,23)	(5.275.550.871,23)	(414.964.205,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(22.951.800.900,22)	(21.826.110.824,22)	(1.125.690.076,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.953.643.687,36)	(5.760.206.880,36)	(1.193.436.807,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(263.005.805.262,21)	(248.871.823.026,88)	(14.133.982.235,33)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(4.568.077.862,14)	(4.075.037.416,14)	(493.040.446,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(7.181.511.497,60)	(5.472.541.551,60)	(1.708.969.946,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	(1.343.570.093,00)	(741.000.431,00)	(602.569.662,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Talang Muandau	(1.748.634.481,00)	(936.728.398,00)	(811.906.083,00)
Kantor Camat Bathin Solapan	(1.047.207.339,67)	(639.770.898,67)	(407.436.441,00)
Jumlah	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)

D. Dana Cadangan

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Akun Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 mempunyai saldo sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. Aset Lainnya

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88	100.003.458.951,69

Jumlah Aset lainnya sebesar Rp76.912.314.915,02 dan Rp115.535.058.649,88 merupakan aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap seperti: Tuntutan ganti rugi, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 161 Rincian Aset Lainnya

Jenis Aset Tetap	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Tuntutan Ganti Rugi	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	488.750.000,00	488.750.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.604.936.620,03	6.811.093.726,95	(3.206.157.106,92)
Aset Lain-lain	205.137.864.730,88	101.928.248.672,27	103.209.616.058,61
Jumlah	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88	100.003.458.951,69

1. Tuntutan Ganti Rugi

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Rincian Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai Berikut:

Tabel 5. 162 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

Inisial	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi 2020	Saldo 31 Desember 2020
I K	3.096.695.428,00	0,00	3.096.695.428,00
M K	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
A S	799.783.820,00	0,00	799.783.820,00
F M	364.045.684,00	0,00	364.045.684,00
E D			
M N	663.828.068,00	0,00	663.828.068,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

K H	651.250.097,00	0,00	651.250.097,00
A L	447.454.860	0,00	447.454.860,00
BAPENDA	126.908.294	0,00	126.908.293,66
JUMLAH	6.306.966.250,66	0,00	6.306.966.250,66

Rincian Mutasi TGR per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat DPRD	3.096.695.428,00	3.096.695.428,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	799.783.820,00	799.783.820,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	364.045.684,00	364.045.684,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	663.828.068,00	663.828.068,00	0,00
Dinas Perhubungan	651.250.097,00	651.250.097,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	126.908.293,66	126.908.293,66	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	447.454.860,00	447.454.860,00	0,00
Jumlah	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Proses Hukum TGR dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk TGR pada Badan Penelitian dan Pengembangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Pbr.
2. Untuk TGR pada Sekretariat DPRD telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/Tipikor/2017/PN.Pbr.
3. Untuk TGR pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
488.750.000,00	488.750.000,00	0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp488.750.000,00 berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Riau Angkasa Indah, surat perjanjian Nomor 01/PJJ-PSR/2000 tentang perjanjian kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan di Duri Kabupaten Bengkalis-Riau. Dalam kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan lahan senilai RP488.750.000,00 untuk dibangun lokasi dagang dan kantor UPTD dengan rincian :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

9 unit kios @ Rp. 50.000.000,00	450.000.000,00
1 unit kantor UPTD	38.750.000,00
	<u>488.750.000,00</u>

dimana sistem kerjasama adalah BOT (*Build Operate Transfer*) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditambah 3 (tiga) tahun masa pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan, terhitung bulan April 2000.

3. Aset Tidak Berwujud

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
3.604.936.620,03	6.811.093.726,95	(3.206.157.106,92)

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp21.708.968.193,57 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp18.104.031.573,54. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.604.936.620,03, sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.811.093.726,95.

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.304.786.148,53 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 (*Audited*) **6.811.093.726,95**

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	177.100.000,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	419.949.000,00	
Koreksi Pencatatan	15.000.000,00	
Hutang Pihak Ketiga	0,00	
Total Pembelian		612.049.000,00

Transfer Masuk	0,00	
Total Mutasi Tambah		0,00

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	0,00	
Aset diserahkan ke Pemda lain	0,00	
Amortisasi 2020	3.817.484.659,92	
Koreksi Amortisasi	721.447,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		3.818.206.106,92

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 **3.604.936.620,03**

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan Nilai Perolehan sebesar Rp21.708.968.193,57 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 164 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

Nama ATB	Nilai Perolehan	Tahun Pembelian	Perusahaan
Sekretariat Daerah			
Software/Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan	57.530.000,00	2011	CV. Adira
Website Dinamis dan Interaktif (bengkalisab.go.id)	19.900.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SMS Gateway Berbasis Web	34.950.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SIMBADA	18.500.000,00	2011	CV. Gold Print
Software/Aplikasi Gaji	189.000.000,00	2012	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi SIMPEG	97.800.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software OS Window Server	10.196.400,00	2013	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi Operating System	21.243.000,00	2015	CV. Ikrar Utama
Software/ Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	73.194.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software SIAP	61.899.000,00	2015	CV. Mahmudal Fata Akbar
Software/Aplikasi Data Rumah Ibadah	14.780.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Sistem dan Aplikasi Laporan Online untuk Bagian Penyusunan Program	49.398.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Sistem Informasi Manajemen Ruangannya Setda dan Software Sistem Informasi Document Sharing Berbasis Cloud	147.666.000,00	2016	CV. Pratama Cipta
Software OS Window Server	10.500.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Aplikasi Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa	74.855.000,00	2020	CV. Rishan Anugrah
Jumlah		881.411.400,00	
Sekretariat DPRD			
Software Website (http://dprd-bengkalisab.go.id/admindprd)	300.580.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software Website (www.DPRD.Bengkalisab.go.id)	58.711.700,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.e-wartawan.bengkalisab.go.id/HumasSetwan/)	44.598.400,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.SPPD.Bengkalisab.go.id)	47.960.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.DPRD.bengkalisab.go.id/perpustakaan/)	54.000.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	505.850.100,00		
Dinas Kesehatan			
Software Website dinkes.bengkalisab.go.id	86.661.400,00	2013	CV. Inti Media
Aplikasi Laporan Obat dan Perbekalan Kesehatan	95.219.196,00	2019	PT. Nuasa Cerah Informasi
Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	175.900.000,00	2020	PT. Nuasa Cerah Informasi
Jumlah	357.780.596,00		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Software Website (http://sidupa.bengkalisab.go.id/login)	199.670.000,00	2019	CV. Quantum Solution
Jumlah	199.670.000,00		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Komputer Server /Main Frame (Mikro Film) Perangkat Lunak NCI Book Man	122.300.000,00	2008	CV. Berkama Karya
Software Database Sistem Kearsipan	68.460.900,00	2011	CV. Defitra Konsultan
Aplikasi Untuk Pendataan Dan Pentaan Dokumen/Arsip Daerah (Digital Arsip)	33.733.483,00	2018	CV. Ladini
Jumlah	224.494.383,00		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Software Website (www.bappeda.bengkalisab.go.id)	17.618.183,00	2012	CV. Guna Dharma
Software E-Planning	194.150.000,00	2018	PT. Raja Sakti Telematika
Software E-Monev	187.000.000,00	2019	PT. Adityarama Daya Cipta
Jumlah	398.768.183,00		
Badan Pendapatan Daerah			
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL Core Lic Qlfd	81.257.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 ENG DiskKt MVL DVD	693.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssnts 2012 SNGL	14.410.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssnts 2012 64Bit	715.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Pemetaan Aplikasi SIM PBB : Aplikasi Pemetaan Mapinfo Profesional V 11.5	51.315.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Software Aplikasi Simpeg, Aplikasi Pajak Daerah dan Sistim Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (Simpeda)	650.570.000,00	2011	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB Online	261.118.205,80	2012	CV. Liandino Utama.
Software/Aplikasi Perjalanan Dinas dan Website Dispenda	69.025.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi POS (Pay- ment Online System) untuk PBB-P2	198.800.000,00	2013	PT. Citra Media Interaktif.
Software/Aplikasi Komputer (Smart Map) untuk Pengelolaan PBB-P2	170.500.000,00	2014	PT. Global Aero Dinamika
Connector LAN - AMP Ori	750.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Kabel LAN - Belden Ori	2.810.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Anti Virus Komputer Desktop (3 user) - Kaspersky 2016	5.460.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2 - Anti Virus Karperky - 1 Server 5 Client	4.000.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2	126.500.000,00	2015	PT. Cartenz Technology International.
Software/Aplikasi Komputer Sistem Informasi PBB-P2	65.827.200,00	2016	PT. Eloku Mitra Utama
Aplikasi Perhitungan Piutang PBB-P2	65.492.800,00	2016	PT. Borion Mitra Utama
Software Aplikasi Komputer SMS Gateway	66.630.000,00	2016	PT. Cipta Pusaka Utama
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Self Assesment berupa iTax - Hotel Tax Application dan iTax- Restaurant Tax Application.	197.890.000,00	2017	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Pemeliharaan Aplikasi Komputer Pengelolaan PBB-P2	20.000.000,00	2017	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi Imotax Pendaftaran Wajib Pajak	194.535.000,00	2018	PT. Mentari Kode Informatika.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sistem Aplikasi Informasi Manajemen Pajak Daerah Official Assesment dan Self Assesment	378.840.000,00	2018	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Windows Server	39.800.000,00	2019	CV. Dwi Mandiri
Aplikasi Informasi Pajak Daerah (Software Sistem Informasi Dashboard)	149.710.000,00	2019	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Aplikasi E-SPTPD Untuk Penerapan pajak secara On-Line	194.590.000,00	2019	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi System Informasi Pembukuan Pajak Daerah	97.289.000,00	2019	PT. Geo Space Informatika.
Jumlah			3.108.527.205,00
Dinas Ketahanan Pangan			
Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar	25.428.000,00	2013	CV. Media Jasa
Aplikasi Software Database Kelompok Tani pada Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluh	29.080.000,00	2013	Toko JC Computer
Software Website (www.dkp.bengkalisab.go.id)	43.450.400,00	2016	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			97.958.400,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Software Website (www.kesbangpol.bengkalisab.go.id)	49.000.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Jumlah			49.000.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Software /Aplikasi Elibrary/ fitur	21.158.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Software /Aplikasi Database berbasis WEB	20.993.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Visualisasi Website Ekominia Wisata Tasik Biospher (www.ecominawisatabiosphere.com)	57.924.467,00	2012	CV. Mitra Utama Konsultan
Software Website (www.balibang.bengkalisab.go.id)	31.185.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Aplikasi sistem Keuangan	12.000.000,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Penatausahaan Keuangan	13.500.000,00	2016	CV. Mahmudal Fata Akbar
Aplikasi sistem Keuangan	31.037.600,00	2017	CV. Mahmudal Fata Akbar
Optimalisasi Website	19.990.300,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			207.788.993,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pendidikan			
Perangkat Lunak Sistem Operasi	21.000.000,00	2011	CV. Adira
Software / Aplikasi Komputer	401.955.000,00	2013	CV. Putra Wijaya
Belanja Modal Software / Aplikasi Komputer	96.066.500,00	2014	CV. Panjera Jaya
Software / Aplikasi Komputer	63.520.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Aplikasi Komputer SDN. 16 Pangkalan Batang	1.724.317,00	2016	CV. Panjera Jaya
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database	989.642.048,00	2016	CV. Bintang Nurjaya Lestari
Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum 2013 Jenjang SMP dan Sederajat Se-Kabupaten Bengkalis	936.232.000,00	2016	CV. Citra Gemilang
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SMP dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Gemilang Abadi
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif	374.741.813,00	2016	CV. Ade Liany
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif Untuk SMP dan Aplikasi Peningkatan Keterampilan TIK Berbasis Video Interaktif	1.582.578.486,00	2016	CV. Mifta Mafuh Mandiri
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database untuk Jenjang SMP	1.069.644.455,00	2016	CV. Ek Mandiri
Sumber Belajar Terpadu Berbasis IT	316.582.375,00	2016	UD. Putra Mas
Sarana dan Prasarana Pendukung Penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan Sederajat Se - Kabupaten Bengkalis	934.379.520,00	2016	CV. Prima Perkasa
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SD dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Surya Asyifa
Alat Peningkatan Mengajar Berbasis ICT	809.658.397,00	2016	CV. Riau Jaya
Komputer SDN. 35 Pematang Duku	1.729.240,00	2016	CV. Anugrah Persada
Perangkat Lunak Data Pendidikan dan Software Papan Informasi Pendidikan	122.898.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Perengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif Jenjang SD	607.951.341,00	2017	CV. Vibi Nabila



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif Jenjang SD	639.222.473,00	2017	CV. Berkah Karya Mandiri
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif	640.714.600,00	2017	CV. Megah Mandiri Sejahtera
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif	618.807.004,00	2017	CV. Cahaya Anugerah
Alat Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif Jenjang SMP	151.329.780,00	2018	CV. Putra Wijaya
Perangkat Lunak	173.910.000,00	2019	PT. Aditya Rama Daya Cipta
Aplikasi Master Bank Soal Tryout UN	76.335.900,00	2019	PT. Apsara Tiyasa Sambada
Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSvrSTDCore 2019 SINGL OLP 16Lic NL Acadm CoreLic	181.800.000,00	2019	PT. Astragraphia Xprins Indonesia
Jumlah	11.903.028.213,00		
Dinas Perikanan			
Software Website (www.dinaskelautan.bengkalisk ab.go.id)(software oodelniter3)	39.800.000,00	2018	CV. Ikrar Utama
Jumlah	39.800.000,00		
Inspektorat			
Software /perangkat komputer (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan - SIMHP)	53.067.500,00	2015	Toko New Visicom
Jumlah	53.067.500,00		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Sistem Aplikasi Perizinan	96.078.702,00	2012	PT. Murfa Surya Mahardika
Software Website www.bpmp2L.co.id	38.821.000,00	2013	CV. Melco (Melayu Era Technology)
Sistem Informasi Manajemen (SKRD)	91.491.500,00	2013	CV. Junico Jaya
Sistem Informasi (PTSP)	282.381.000,00	2013	CV. Putra Malay Cooperation
SIM PTSP	9.194.400,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIMPEG	85.302.300,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Anjungan Informasi Mandiri	97.324.800,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIM PTSP	87.015.400,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
SIM SKRD	60.854.600,00	2015	CV. Wahana Mitra Intermedia
Sistem Layanan Antrian	48.317.500,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Arsipan Digital	49.052.400,00	2017	CV. Media Gema Mandiri



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sistem Informasi Berbasis IT	55.363.900,00	2017	CV. Tri Jaya Multimedia
ePINTER DPMPSP BENGKALIS	37.400.000,00	2018	CV. Tri Jaya Multimedia
waming syistem (e-PINTER)	31.300.000,00	2019	CV. Tri Jaya Multimedia
Mobile layanan perizinan dan non perizinan	34.000.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Arsip digital	33.800.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Tanda Tangan Digital	41.800.000,00	2019	CV. Tri Jaya Multimedia
Jumlah		1.179.497.502,00	
RSUD Kecamatan Mandau			
Aplikasi Komputer (Software Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG RSUD)	50.436.900,00	2014	CV. Mandiri Karya
Pengembangan SIM dan IT/ Pengembangan Website RSUD (www.rsudmandau.com)	28.820.000,00	2016	PT. Raja Sakti Telematika
Perfengkapan pendukung SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	9.459.000,00	2017	Toko Alfa Komputer
Jumlah		88.715.900,00	
Kantor Camat Mandau			
Software Website (https://camatmandau.bengkalis.kab.go.id)	27.182.500,00	2016	CV.Putra Malay Cooperation
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (PATEN)	98.207.500,00	2018	CV. Annur Kegemilangan
Jaringan "SIMANTAP" (Pembuatan Aplikasi SIMANTAP)	149.728.400,00	2019	CV. Tyra Abadi Engineering
Jumlah		275.118.400,00	
Kantor Camat Rupert Utara			
Software Website Kecamatan (http://camatrupatutara.bengkalis.kab.go.id)	30.000.000,00	2017	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		30.000.000,00	
Kantor Camat Bengkalis			
Software/Aplikasi dan Perangkat Aplikasi SI- KEL Kota Bengkalis. Alamat Lokal Server : 192.168.99.1/sikel	70.000.000,00	2017	CV. Panjera Jaya
Jumlah		70.000.000,00	
Kantor Camat Bantan			
Software Website (https://camatbantan.bengkalis.kab.go.id)	15.000.000,00	2017	Toko Smart Com
Jumlah		15.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Siak Kecil			
Software Website Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis (siap.appsiakkecil.id)	15.000.000,00	2020	Toko Hendri Computer
Jumlah			15.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Software Sistem Aplikasi Kearsipan, Disposisi dan Pelayanan Kepegawaian	82.280.000,00	2012	CV. Masya
Jumlah			82.280.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Software Voip WEB based Voip Software	34.521.000,00	2013	CV. Indra Rukmana Karya Teknik
Server Xeon E3110 (3.0 Ghz, Fsb 1333 Mhz, Chace 6Mb)	9.862.850,00	2011	CV. Adira
Jumlah			44.383.850,00
Dinas Lingkungan Hidup			
Software Website Bank Sampah (http://Jakstradakabbengkalis.id)	74.778.000,00	2019	CV. Karya Anugrah Konsultan
Jumlah			74.778.000,00
Dinas Pertanian			
Aplikasi Data Keuangan & Administrasi Umum (Perencanaan)	49.950.000,00	2010	CV. De Fibra Konsultan
Aplikasi Pada Laptop (Citra Alus + Handing)	45.126.647,77	2011	CV. Tanjung Tipah
Software Website www.disbunhut.bengkaliskab.go.id	40.642.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Software Website (www.distanbengkaliskab.go.id)	29.850.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			165.568.647,77
Dinas Perhubungan			
Software Website (www.dishubkominfo.bengkalis.kab.go.id)	44.979.000,00	2013	PT. Bumi Mama Indonusa
Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	57.532.000,00	2018	CV. Hanin Tama
SIM PKB (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi E-KIR Gadget	99.000.000,00	2020	CV. Yastini



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aplikasi SMS Gateway	38.500.000,00	2020	CV. Yustini
Jumlah			372.322.820,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Aplikasi Keuangan	34.850.000,00	2011	CV. Guna Dharna
Software Website (http://pupr.bengkalis.go.id/)	124.135.000,00	2015	PT. Hegar Daya
Aplikasi Surat Menyurat (Sistem Informasi Aplikasi Persuratan) (http://puprbengkalis.com/sipp/)	128.972.500,00	2019	CV.Mmw
Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis WEB (http://simawar.puprbengkalis.com/)	131.613.500,00	2019	CV.Riau Cyber Teknologi
Aplikasi Kerusakan Jalan Kabupaten	99.744.000,00	2020	CV. Web Dragon
Jumlah			519.315.000,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan			
Aplikasi Database Tanah Berbasis Website (eSigab Perkimtan Bengkalis) di Google Playstore	144.550.000,00	2019	CV. Indosoft Media
Jumlah			144.550.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran			
Software Website (www.damkar.bengkalis.go.id)	39.024.000,00	2019	CV. Djitoe Pesisir
Jumlah			39.024.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Aplikasi Data Sistem Managemen Pemulihan dan Penanggulangan Bencana	48.058.200,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software Website (bpddamkar.bengkalis.go.id)	49.800.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website Pusdatin (www.bpbd.bengkalis.go.id)	49.720.000,00	2019	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			147.578.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Software Website (www.disdaldukb.bengkalis.go.id)	39.500.000,00	2018	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			39.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Software Website (www.dpk.bengkalis.go.id)	34.320.000,00	2015	CV. Putra Malay Corporation



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	49.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	35.625.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	36.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpp.bengkaliskab.go.id)	41.100.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah		196.045.000,00	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Software Website Pemkab Bengkalis (www.bengkaliskab.go.id)	29.056.500,00	2013	CV. Citra Buana
Aplikasi Buku Tamu Elektronik	60.039.400,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (pesonabengkalis.id)	39.600.000,00	2020	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah		128.695.900,00	
Kantor Camat Bandar Laksamana			
Software Website (https://camatbandarlaksamana.web.id)	24.750.000,00	2020	PT. Azli Internet dan Teknologi Informasi
Jumlah		24.750.000,00	
Kantor Camat Tabang Muandau			
Software Website (https://camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id)	29.700.000,00	2020	CV. Ikrar Utama
Jumlah		29.700.000,00	
Jumlah	21.708.968.193,57	21.708.968.193,57	

Tabel 5. 165 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Tidak Berwujud	21.708.968.193,57	21.096.919.193,57	612.049.000,00
Software	21.560.578.193,57	20.949.244.193,57	611.334.000,00
Lisensi	148.390.000,00	147.675.000,00	715.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.104.031.573,54)	(14.285.825.466,62)	(3.818.206.106,92)
Software	(18.000.158.573,54)	(14.196.791.466,62)	(3.803.367.106,92)
Lisensi	(103.873.000,00)	(89.034.000,00)	(14.839.000,00)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	3.604.936.620,03	6.811.093.726,95	(3.206.157.106,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 166 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku
Sekretariat Daerah	881.411.400,00	(808.115.900,00)	73.295.500,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	(429.444.533,33)	76.405.566,67
Dinas Kesehatan	357.780.596,00	(127.108.265,58)	230.672.330,42
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.670.000,00	(54.077.291,67)	145.592.708,33
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	(208.330.451,90)	16.163.931,10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	398.768.183,00	(197.697.345,00)	201.070.838,00
Badan Pendapatan Daerah	3.108.527.205,80	(2.407.152.601,63)	701.374.604,17
Dinas Kelahanan Pangan	97.958.400,00	(97.958.400,00)	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	(49.000.000,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	(196.095.099,25)	11.693.893,75
Dinas Pendidikan	11.903.028.213,00	(10.940.575.667,00)	962.452.546,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	(21.558.333,33)	18.241.666,67
Inspektorat	53.067.500,00	(53.067.500,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	(1.060.588.597,84)	118.908.904,16
RSUD Kecamatan Mandau	88.715.900,00	(86.548.212,50)	2.167.687,50
Kantor Camat Mandau	275.118.400,00	(122.003.022,91)	153.115.377,09
Kantor Camat Rupert Utara	30.000.000,00	(23.125.000,00)	6.875.000,00
Kantor Camat Bengkalis	70.000.000,00	(61.250.000,00)	8.750.000,00
Kantor Camat Bantan	15.000.000,00	(11.562.500,00)	3.437.500,00
Kantor Camat Siak Kecil	15.000.000,00	(625.000,00)	14.375.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	(82.280.000,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.383.850,00	(44.383.850,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	(31.157.500,00)	43.620.500,00
Dinas Pertanian	165.568.647,77	(165.568.647,77)	0,00
Dinas Perhubungan	372.322.820,00	(127.749.283,33)	244.573.536,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.315.000,00	(247.759.937,50)	271.555.062,50
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	(39.148.958,00)	105.401.042,00
Dinas Pemadam Kebakaran	39.024.000,00	(13.008.000,00)	26.016.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	(112.359.866,67)	35.218.333,33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	(172.670.000,00)	23.375.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	(21.395.833,33)	18.104.166,67
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	128.695.900,00	(87.365.975,00)	41.329.925,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Bandar Laksamana	24.750.000,00	(2.062.500,00)	22.687.500,00
Kantor Camat Talang Muandau	29.700.000,00	(1.237.500,00)	28.462.500,00
Jumlah	21.788.968.193,57	(18.104.031.573,54)	3.684.936.620,03

Tabel 5. 167 Rincian Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per OPD

II	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkani(Penurunan)
Sekretariat Daerah	881.411.400,00	806.556.400,00	74.855.000,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	505.850.100,00	0,00
Dinas Kesehatan	357.780.596,00	181.880.596,00	175.900.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.670.000,00	199.670.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	224.494.383,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	398.768.183,00	398.768.183,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.108.527.205,80	3.108.527.205,80	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	97.958.400,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Badan Peneliban dan Pengembangan	207.788.993,00	207.788.993,00	0,00
Dinas Pendidikan	11.903.028.213,00	11.903.028.213,00	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00
Inspektorat	53.067.500,00	53.067.500,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	1.179.497.502,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	88.715.900,00	88.715.900,00	0,00
Kantor Camat Mandau	275.118.400,00	275.118.400,00	0,00
Kantor Camat Rupa Utara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Kantor Camat Bantan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Kantor Camat Siak Kecil	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.383.850,00	44.383.850,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	74.778.000,00	0,00
Dinas Pertanian	165.568.647,77	165.568.647,77	0,00
Dinas Perhubungan	372.322.820,00	234.822.820,00	137.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.315.000,00	419.571.000,00	99.744.000,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	144.550.000,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	39.024.000,00	39.024.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	147.578.200,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	196.045.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	128.695.900,00	89.095.900,00	39.600.000,00
Kantor Camat Bander Laksamana	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
Jumlah	21.708.968.193,57	21.096.919.193,57	612.049.000,00

Tabel 5. 168 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	(808.115.900,00)	(771.962.600,00)	(36.153.300,00)
Sekretariat DPRD	(429.444.533,33)	(386.689.131,33)	(42.755.402,00)
Dinas Kesehatan	(127.108.265,58)	(88.645.133,25)	(38.463.132,33)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(54.077.291,67)	(4.159.791,67)	(49.917.500,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(208.330.451,90)	(199.897.080,90)	(8.433.371,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(197.697.345,00)	(102.409.849,00)	(95.287.496,00)
Badan Pendapatan Daerah	(2.407.152.601,63)	(2.042.449.001,63)	(364.703.600,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(97.958.400,00)	(91.621.883,33)	(6.336.516,67)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	(196.095.099,25)	(183.338.124,25)	(12.756.975,00)
Dinas Pendidikan	(10.940.575.667,00)	(8.283.196.063,00)	(2.657.379.604,00)
Dinas Perikanan	(21.558.333,33)	(11.538.333,33)	(10.020.000,00)
Inspektorat	(53.067.500,00)	(53.067.500,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.060.588.597,84)	(977.830.147,84)	(82.758.450,00)
RSUD Kecamatan Mandau	(86.548.212,50)	(77.578.879,17)	(8.969.333,33)
Kantor Camat Mandau	(122.003.022,91)	(53.789.724,99)	(68.213.297,92)
Kantor Camat Rupa Utara	(23.125.000,00)	(15.625.000,00)	(7.500.000,00)
Kantor Camat Bengkalis	(61.250.000,00)	(43.750.000,00)	(17.500.000,00)
Kantor Camat Bantan	(11.562.500,00)	0,00	(11.562.500,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(625.000,00)	0,00	(625.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(82.280.000,00)	(82.280.000,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(44.383.850,00)	(44.383.850,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(31.157.500,00)	(12.463.000,00)	(18.694.500,00)
Dinas Pertanian	(165.568.647,77)	(154.494.481,10)	(11.074.166,67)
Dinas Perhubungan	(127.749.283,33)	(68.829.983,33)	(58.919.300,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(247.759.937,50)	(180.535.437,50)	(67.224.500,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	(39.148.958,00)	(3.011.458,00)	(36.137.500,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(13.008.000,00)	(3.252.000,00)	(9.756.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(112.359.866,67)	(84.548.804,67)	(27.811.062,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(172.670.000,00)	(137.376.250,00)	(35.293.750,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(21.395.833,33)	(11.520.833,33)	(9.875.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(87.365.975,00)	(66.581.125,00)	(20.784.850,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	(2.062.500,00)	0,00	(2.062.500,00)
Kantor Camat Talang Muandau	(1.237.500,00)	0,00	(1.237.500,00)
Jumlah	(18.104.031.573,54)	(14.285.825.466,62)	(3.818.206.106,92)

5. Aset Lain-lain

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
205.137.864.730,88	101.928.248.672,27	103.209.616.058,61

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 seluruhnya diperoleh dari hasil inventarisasi karena adanya reklasifikasi dari aset tetap yang tidak layak disajikan dalam aset tetap. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp252.944.364.331,22 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp47.806.499.600,34. Rincian Aset lain-lain per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lain-lain	252.944.364.331,22	156.193.019.020,84	96.751.345.310,38
Aset Rusak Berat	39.435.680.705,64	57.473.714.706,65	(18.038.034.001,01)
Aset Tidak Ditemukan	36.802.652.454,03	98.719.304.314,19	(61.916.651.860,16)
Aset Lain-lainnya	176.706.031.171,55	0,00	176.706.031.171,55
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(47.806.499.600,34)	(54.264.770.348,57)	6.458.270.748,23
Aset Rusak Berat	(36.052.316.509,06)	(40.175.924.842,06)	4.123.608.333,00
Aset Tidak Ditemukan	(7.764.374.758,28)	(14.088.845.506,51)	6.324.470.748,23
Aset Lain-lainnya	(3.989.808.333,00)	0,00	(3.989.808.333,00)
Jumlah	205.137.864.730,88	101.928.248.672,27	103.209.616.058,61

Tabel 5. 170 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Sekretariat Daerah	1.878.285.866,00	(983.308.478,67)	894.977.387,33
Sekretariat DPRD	821.046.944,60	(709.992.716,95)	111.054.227,65
Dinas Kesehatan	2.184.713.610,00	(1.186.914.730,00)	1.017.798.880,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.602.976.810,00	(1.602.976.810,00)	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	371.849.100,00	(244.851.112,00)	126.997.988,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.377.166.492,74	(1.373.382.805,00)	3.783.687,74
Badan Pendapatan Daerah	247.635.000,00	(247.635.000,00)	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	600.246.379,15	(540.834.973,83)	59.411.405,32
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	177.725.582,13	(172.644.991,00)	5.080.591,13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	348.260.625,00	(290.195.298,00)	58.065.327,00
Dinas Ketahanan Pangan	588.551.448,46	(296.406.445,57)	292.145.002,89
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	622.783.364,67	(570.161.992,43)	52.621.372,24
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.969.037.263,00	(1.601.807.492,00)	3.367.229.771,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	867.285.127,00	(787.493.055,33)	79.792.071,67
Dinas Pendidikan	24.105.007.000,00	(3.989.808.333,00)	20.115.198.667,00
Dinas Perikanan	8.976.318.002,03	(2.097.844.198,59)	6.878.473.803,44
Inspektorat	1.703.921.960,00	(1.689.254.376,00)	14.667.584,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.086.151,00	(86.767.167,33)	169.318.983,67
Dinas Sosial	807.325.179,72	(684.093.151,13)	123.232.028,59
RSUD Bengkalis	9.175.484.198,77	(9.175.484.198,77)	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	1.181.407.550,00	(769.761.850,00)	411.645.700,00
Kantor Camat Mandau	1.597.107.811,79	(1.308.336.032,79)	288.771.779,00
Kantor Camat Rupat	42.025.000,00	(39.008.697,92)	3.016.302,08
Kantor Camat Rupat Utara	79.980.581,81	(49.954.491,54)	30.026.090,27
Kantor Camat Bengkalis	335.117.060,14	(179.241.269,23)	155.875.790,91
Kantor Camat Bukit Batu	186.993.599,00	(163.924.724,00)	23.068.875,00
Kantor Camat Bantan	1.049.010.188,00	(891.651.835,00)	157.358.353,00
Kantor Camat Siak Kecil	543.532.861,66	(247.852.208,99)	295.680.652,67
Kantor Camat Pinggir	666.027.990,00	(666.027.990,00)	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.049.893.123,78	(979.376.023,00)	70.517.100,78
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.558.280.172,00	(4.506.828.578,53)	1.051.451.593,47
Dinas Lingkungan Hidup	1.856.138.117,04	(1.129.904.059,00)	726.234.058,04
Dinas Pertanian	4.788.551.460,34	(1.612.790.526,67)	3.175.760.933,67
Dinas Perhubungan	1.729.193.897,00	(403.536.374,00)	1.325.657.523,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.048.556.103,55	(3.550.450.000,00)	160.498.106.103,55
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	955.320.088,00	(163.333,33)	955.156.754,67
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246.693.865,77	(237.928.056,00)	8.765.809,77
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.348.828.757,07	(2.757.906.224,74)	2.590.922.532,33
Jumlah	252.944.364.331,22	(47.806.499.600,34)	205.137.864.730,88



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.3.2. Kewajiban

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

Jumlah Kewajiban sebesar Rp82.537.732.628,60 dan Rp24.559.872.739,25 merupakan nilai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Kewajiban

Jenis Kewajiban	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

A. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp82.537.732.628,60 dan Rp24.559.872.739,25 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 172 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)
Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	57.533.376.593,10	180.617.509,75	57.352.759.083,35
Hutang Pihak Ketiga	22.100.255.714,50	21.185.961.691,50	914.294.023,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.904.100.321,00	3.190.512.616,00	(286.412.295,00)
Jumlah	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)

Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp0,00 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

Rincian perhitungan pihak ketiga sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 173 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Kantor Camat Rupert Utara	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)
Jumlah	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)

2. Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00

Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp948.812.752,57, berdasarkan surat Bupati Bengkalis Nomor 900/Keu/IV/697/2009 Tanggal 28 April 2009 perihal Permohonan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah disetujui sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-750/MK.05/2011 Tanggal 23 November 2011 perihal persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah. Penghapusan mutlak akan dilaksanakan paling cepat dua tahun setelah tanggal penetapan penghapusan bersyarat dimaksud.

Sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan tersebut diatas, maka antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah ditandatangani Naskah Perjanjian Perubahan (Amandemen) Pinjaman No. AMA-461/SLA-1085/DSMI/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Berdasarkan Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau tentang Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri Nomor SLA-1085/DP3/1998 tanggal 23 Desember 1998, dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA: BA-009/WPB.04/2015 diketahui bahwa saldo akhir hutang biaya pinjaman luar negeri Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp948.812.752,57.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 833/KMK.05/2016 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Karawang dan 22 (Dua Puluh Dua) Penanggung Utang Lainnya, Pinjaman Luar Negeri Kabupaten Bengkalis dengan nomor Pinjaman SLA-1085/DP3/1998 sebagaimana diubah dengan AMA-461/SLA-1085/DSMI/2012 sebesar Rp948.812.752,57 telah dihapuskan hak tagih atas piutang negara tersebut.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
57.533.376.593,10	180.617.509,75	57.352.759.083,35

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.533.376.593,10. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp180.617.509,75 dengan rincian :



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 174 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD

OPD	Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo 2020	Saldo 2019
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	169.348.350,00	137.595.843,08
	Sewa Lahan Bank Riau	81.666.666,76	0,00
RSUD Bengkalis	Sewa Lahan ATM Bank BRI	19.000.000,00	16.000.000,00
	Sewa Lahan ATM Bank	119.666.666,67	14.355.000,00
RSUD Kecamatan Mandau	Sewa Lahan ATM Bank	119.666.666,67	14.355.000,00
PPKD	Lebih Bayar DBH Pusat (Dana Perimbangan)	57.132.028.243,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Sewa Lahan Gardu Listrik	11.666.666,67	12.666.666,67
Jumlah		57.533.376.593,10	180.617.509,75

4. Hutang Kepada Pihak Ketiga

31 Des 2020	31 Des 2019	Konalkan/(Penurunan)
22.100.255.714,50	21.185.961.691,50	914.294.023,00

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.100.255.714,50. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.185.961.691,50.

Rincian hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp22.100.255.714,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Mutasi Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang Kepada Pihak Ketiga	APBD	BLUD	Jumlah
Saldo Awal Hutang	7.494.426.296,50	13.691.535.395,00	21.185.961.691,50
Koreksi Hutang	911.162.145,00	(14.166,00)	911.147.979,00
Hutang 2019 di Bayar 2020	449.314.855,00	13.691.521.229,00	14.140.836.084,00
Penambahan Tahun 2020	0,00	14.143.982.128,00	14.143.982.128,00
Saldo	7.956.273.596,50	14.143.982.128,00	22.100.255.714,50

Tabel 5. 176 Rincian Hutang Kepada Pihak Ketiga per OPD

Hutang Kepada Pihak Ketiga	Saldo 2020	Saldo 2019	Konalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	542.937.176,00	134.068.000,00	408.869.176,00
Badan Pendapatan Daerah	10.408.000,00	10.408.000,00	0,00
Satuan Polisi Pemong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkalis	14.143.982.128,00	10.847.083.122,00	3.296.899.006,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	2.844.452.273,00	(2.844.452.273,00)
Kantor Camat Mandau	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Bengkalis	0,00	0,00	0,00
PPKD	1.181.932.929,00	1.111.840.960,00	70.091.969,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	444.730.000,00	12.529.000,00	432.201.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.465.671.481,50	5.914.986.336,50	(449.314.855,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	260.644.000,00	260.644.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.100.255.714,50	21.185.981.691,50	914.294.023,00

Terhadap penambahan Utang kepada Pihak Ketiga pada PPKD, merupakan Utang Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp70.091.969,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 300/KPTS/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, jumlah bantuan yang diterima oleh Partai PKS sebesar Rp278.580.500,00, namun hanya dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp208.488.531,00. Selisih tersebut di akui sebagai Utang Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021.

Rincian Hutang Pihak Ketiga dapat dilihat pada:

Lampiran Hutang Pihak Ketiga

5. Hutang Jangka Pendek Lainnya

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
2.904.100.321,00	3.190.512.616,00	(286.412.295,00)

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.904.100.321,00. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.190.512.616,00.

Rincian hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.904.100.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	251.633.925,00	262.396.689,00	(10.762.764,00)
Sekretariat DPRD	4.134.000,00	76.192.553,00	(72.058.553,00)
Dinas Kesehatan	41.812.473,00	56.369.182,00	(14.556.709,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.076.880,00	15.741.661,00	7.335.219,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.383.818,00	11.940.054,00	1.443.764,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.305.923,00	25.622.064,00	1.683.859,00
Badan Pendapatan Daerah	31.301.400,00	35.924.247,00	(4.622.847,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	8.341.379,00	9.281.090,00	(939.711,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12.491.306,00	15.132.000,00	(2.640.692,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.415.701,00	8.503.410,00	912.291,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.882.064,00	8.175.231,00	706.833,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.313.404,00	5.643.779,00	(330.375,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	13.208.150,00	16.559.911,00	(3.351.761,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	8.312.399,00	9.443.132,00	(1.130.733,00)
Dinas Pendidikan	1.105.000,00	19.799.562,00	(18.694.562,00)
Dinas Perikanan	14.454.549,00	22.083.581,00	(7.629.032,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.587.511,00	27.869.818,00	(7.082.307,00)
Inspektorat	8.907.331,00	11.185.595,00	(2.278.264,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.279.321,00	15.403.439,00	(124.118,00)
Dinas Sosial	11.227.248,00	10.754.326,00	472.922,00
RSUD Bengkalis	114.807.250,00	336.174.100,00	(221.366.850,00)
RSUD Kecamatan Mandau	164.933.913,00	168.020.635,00	(3.086.722,00)
Kantor Camat Mandau	35.991.975,00	34.106.040,00	1.885.935,00
Kantor Camat Rupal	14.453.440,00	8.079.040,00	6.374.400,00
Kantor Camat Rupal Utara	3.495.285,00	3.092.888,00	402.397,00
Kantor Camat Bengkalis	17.048.864,00	18.065.911,00	(1.017.047,00)
Kantor Camat Bukit Batu	9.759.972,00	8.962.169,00	797.803,00
Kantor Camat Bantan	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	3.211.285,00	2.856.521,00	354.764,00
Kantor Camat Pinggir	6.316.593,00	5.872.479,00	444.114,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	18.848.764,00	16.449.067,00	2.399.697,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.871.099,00	40.829.631,00	4.041.468,00
Dinas Lingkungan Hidup	16.414.040,00	21.168.477,00	(4.754.437,00)
Dinas Pertanian	11.685.677,00	11.287.577,00	398.100,00
Dinas Perhubungan	45.201.414,00	54.355.902,00	(9.154.488,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.871.161,00	22.178.926,00	(5.307.765,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	1.788.267.651,00	1.687.946.321,00	100.321.330,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.781.938,00	8.353.000,00	(1.571.061,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	12.422.968,00	12.973.042,00	(550.074,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.120.471,00	8.231.562,00	(111.091,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.979.721,00	35.617.970,00	(19.638.249,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.411.170,00	12.035.867,00	(624.697,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.031.885,00	10.034.167,00	(3.002.282,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.904.100.321,00	3.190.512.616,00	(286.412.295,00)

5.3.3. Ekuitas

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,96	(670.373.014.915,78)

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.215.647.863.998,17 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.886.020.878.913,95.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkulu.

5.4.1. Pendapatan - LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
2.450.428.050.457,24	4.150.634.368.095,16	(1.700.206.317.637,92)

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bengkulu tahun 2020 sebesar Rp2.450.428.050.457,24 mengalami penurunan sebesar Rp1.700.206.317.637,92 atau 40,96% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4.150.634.368.095,16 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.178 Realisasi Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23
Pendapatan Transfer	2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)
Lain-lain Pendapatan yang sah	101.363.682.402,06	91.600.063.464,21	9.763.618.937,85
Jumlah	2.450.428.050.457,24	4.150.634.368.095,16	(1.700.206.317.637,92)

5.4.1.A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA. 2020 dan TA. 2019. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp251.321.533.656,18, Jika dibandingkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp227.541.008.898,95 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp23.780.524.757,23 atau 10,45%. Dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.179 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Daerah	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)
Pendapatan Retribusi Daerah	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)
Lain-lain PAD yang Sah	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91
Jumlah	251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci dan di jelaskan sebagai berikut :

1). Pendapatan Pajak Daerah

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) yang ditetapkan tahun 2020.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp71.112.407.050,33 jika dibandingkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 74.762.691.287,12 Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.650.284.236,79 atau 3,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Pajak Hotel	1.488.664.571,25	3.407.167.958,81	(1.918.503.387,56)
Pajak Restoran	8.794.951.522,00	10.747.087.232,00	(1.952.135.710,00)
Pajak Hiburan	671.437.300,00	2.042.325.384,00	(1.370.888.084,00)
Pajak Reklame	398.743.393,08	399.882.894,17	(1.139.501,09)
Pajak Penerangan Jalan PLN	19.340.014.933,00	18.623.714.559,00	716.300.374,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	13.995.255.847,00	11.558.780.582,04	2.436.475.264,96
Pajak Parkir	288.723.466,00	463.670.066,00	(176.946.600,00)
Pajak Air Tanah	531.112.588,00	675.773.039,30	(144.660.451,30)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Sarang Burung Walet	337.783.119,00	368.332.930,00	(30.549.811,00)
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	3.936.415.145,00	4.520.885.840,00	(584.470.695,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18.043.214.206,00	17.481.789.111,00	561.425.095,00
Pajak BPHTB	4.288.090.960,00	4.473.281.690,80	(185.190.730,80)
Jumlah	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)

Tabel 5.181 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pajak Hotel	1.509.075.439,25	1.488.664.571,25	20.410.868,00
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Hotel 2019 sebesar Rp20.410.868,00
Pajak Restoran	8.781.178.472,00	8.794.951.522,00	(13.773.050,00)
			Koreksi Kurang catat Piutang terdiri dari Pajak Restoran sebesar Rp16.012.850,00,
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Restoran 2019 sebesar Rp2.239.800,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Hiburan	672.591.600,00	671.437.300,00	1.154.300,00
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Restoran 2019 sebesar Rp1.154.300,00
Pajak Reklame	449.235.275,00	398.743.393,08	50.491.881,92
			Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp137.595.843,085
			Pembayaran piutang tahun 2020 sebesar Rp927.500,00
			Pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (2020) sebesar Rp(169.348.350,00)
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(19.666.875,00)
Pajak Penerangan Jalan PLN	19.340.014.933,00	19.340.014.933,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Penerangan Jalan Non PLN	13.827.016.897,00	13.995.255.847,00	(168.238.950,00)	
				Koreksi Kurang catat Piutang Pajak sebesar Pajak PPJ NON PLN sebesar Rp168.238.950,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Parkir	286.723.466,00	286.723.466,00	0,00	
Pajak Air Tanah	557.236.551,00	531.112.588,00	26.123.963,00	
				Penerimaan Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(45.032.614,00)
				Penerimaan Pembayaran Piutang 2019 sebesar Rp18.908.651,00
Pajak Sarang Burung Walet	336.843.119,00	337.783.119,00	(940.000,00)	
				Koreksi Kurang catat Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp940.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	3.936.415.145,00	3.936.415.145,00	0,00	
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9.680.396.732,00	18.043.214.206,00	(8.362.817.474,00)	
				Penerimaan Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(80.363.925,00)
				Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp9.169.181.399,00
Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	4.288.090.960,00	4.288.090.960,00	0,00	
Jumlah	63.664.818.589,25	72.112.407.050,33	(8.447.588.461,08)	

2). Pendapatan Retribusi Daerah

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)

Masing – masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan LO tahun 2020 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.182 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	472.075.000,00	652.200.000,00	(180.125.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	218.353.000,00	232.043.000,00	(13.690.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.316.189.500,00	1.447.064.500,00	(130.875.000,00)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	0,00	16.650.000,00	(16.650.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	133.005.000,00	91.940.100,00	41.064.900,00
Jumlah	3.342.948.500,00	3.632.694.600,00	(289.746.100,00)

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.183 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	293.260.000,00	370.230.000,00	(76.970.000,00)
Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	431.340.000,00	376.410.000,00	54.930.000,00
Retribusi Terminal	8.536.000,00	14.145.000,00	(5.609.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	121.195.000,00	113.635.000,00	7.560.000,00
Retribusi Tempat Rumah Potong Hewan	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Retribusi Jasa Kepetabuhan	3.583.885.839,00	5.056.743.949,00	(1.472.858.110,00)
Jumlah	4.946.249.089,00	5.947.163.949,00	(1.000.914.860,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.184 Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	570.000,00	3.820.000,00	(3.250.000,00)
Retribusi izin Usaha Perikanan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Jumlah	858.688.236,34	628.024.615,23	230.663.621,11

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah

Tabel 5.185 Realisasi Pendapatan Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.120.000,00	53.560.000,00	(1.440.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	114.480.000,00	105.460.000,00	9.020.000,00
Jumlah	166.600.000,00	159.020.000,00	7.580.000,00

b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.186 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00
Jumlah	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00

c) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.187 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi izin Usaha Perikanan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Jumlah	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.188 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	0,00	16.650.000,00	(16.650.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Jumlah	7.250.000,00	16.650.000,00	(9.400.000,00)

e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Tabel 5.189 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)

f) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.190 Realisasi Pendapatan Retribusi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.750.000,00	18.700.000,00	(16.950.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	6.715.000,00	8.175.000,00	(1.460.000,00)
Jumlah	8.465.000,00	26.875.000,00	(18.410.000,00)

g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.191 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	210.853.000,00	232.043.000,00	(21.190.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	133.005.000,00	91.940.100,00	41.064.900,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	385.040.000,00	376.410.000,00	8.630.000,00
Jumlah	728.898.000,00	700.393.100,00	28.504.900,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

h) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.192 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Jumlah	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00

i) Dinas Pertanian

Tabel 5.193 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pertanian

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00
Jumlah	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00

j) Dinas Perhubungan

Tabel 5.194 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	472.075.000,00	652.200.000,00	(180.125.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.316.189.500,00	1.447.064.500,00	(130.875.000,00)
Retribusi Terminal	8.536.000,00	14.145.000,00	(5.609.000,00)
Retribusi Jasa Kepelabuhan	3.583.885.839,00	5.056.743.949,00	(1.472.858.110,00)
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	570.000,00	3.820.000,00	(3.250.000,00)
Jumlah	5.381.256.339,00	7.173.973.449,00	(1.792.717.110,00)

k) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.195 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	239.390.000,00	297.970.000,00	(58.580.000,00)
Jumlah	239.390.000,00	297.970.000,00	(58.580.000,00)

l) Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.196 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00
Jumlah	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp9.147.885.825,34 jika dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp10.207.883.164,00 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.059.997.339,00 atau 10,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.197 Realisasi Pendapatan Retribusi Per OPD

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakanan (Penurunan)
Sekretariat Daerah	166.600.000,00	159.020.000,00	7.580.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.250.000,00	16.650.000,00	(9.400.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	8.465.000,00	26.875.000,00	(18.410.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	782.698.000,00	700.393.100,00	82.304.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Dinas Pertanian	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00
Dinas Pertubungan	5.381.256.339,00	7.173.973.449,00	(1.792.717.110,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239.390.000,00	297.970.000,00	(58.580.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00
Jumlah	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.198 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.161.435.000,00	1.161.435.000,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	487.575.000,00	472.075.000,00	15.500.000,00
			Selisih antara pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp15.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	210.853.000,00	218.353.000,00	(7.500.000,00)
			Koreksi Kurang catat Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp7.500.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.316.189.500,00	1.316.189.500,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	41.891.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	133.005.000,00	133.005.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.887.250,00	483.887.250,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	293.260.000,00	293.260.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	211.840.000,00	431.340.000,00	(219.500.000,00)
			Pembayaran Piutang dan Pengakuan Piutang tahun berjalan sebesar Rp.173.200.000
			Koreksi Kurang catat Piutang Retribusi Pasar Grosir sebesar Rp46.300.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Retribusi Terminal	8.536.000,00	8.536.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Prasangrahan/Villa	121.195.000,00	121.195.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.603.566.399,00	3.583.885.839,00	19.680.560,00
			Selisih antara pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp54.020.852,00
			Pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp34.340.292,00.
Retribusi izin Usaha Perikanan	288.600.000,00	288.600.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
Retribusi izin mendirikan Bangunan	569.518.236,34	569.518.236,34	0,00
Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	570.000,00	570.000,00	0,00
	8.956.066.385,34	9.147.885.825,34	(191.819.440,00)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.920.504.935,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp28.788.248.654,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp7.867.743.719,00 atau 27,33%.

4) Lain-lain PAD yang sah

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut jenisnya adalah :

Tabel 5.199 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	3.256.110.350,00	9.158.047.982,00	(5.901.937.632,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas	830.541.708,00	938.861.598,00	(108.319.890,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	19.481.596.510,00	2.983.980.005,00	16.497.616.505,00
Pendapatan Denda Pajak	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.147.958.273,22	88.497.550,00	7.059.460.723,22
Pendapatan dari Pengembalian	8.192.938.857,72	17.098.255.975,60	(8.905.317.117,88)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	88.976.081.659,00	71.000.485.734,00	17.975.595.925,00
Pendapatan Kerja Sama BLUD	362.606.798,24	(2.307.779.410,00)	2.670.386.208,24
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	43.778.333,33	183.909.921,00	(140.131.587,67)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Pendapatan LO lain-lain BLUD	6.564.483.611,00	0,00	6.564.483.611,00
Jumlah	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91

Tabel 5.200 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Hasil Penjualan Perikanan	303.269.700,00	303.269.700,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	723.380.000,00	0,00	723.380.000,00
			Pendapatan dari penjualan Aktiva Tetap tahun 2020 sebesar Rp723.380.000,00
Penerimaan Jasa Giro Daerah	3.256.110.350,00	3.256.110.350,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas	830.541.708,00	830.541.708,00	0,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	19.481.596.510,00	19.481.596.510,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	91.501.945,00	91.501.945,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.147.958.273,22	7.147.958.273,22	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	8.192.938.857,72	8.192.938.857,72	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	0,0	1.000.000,00	(1.000.000,00)
			Pendapatan sewa diterima dimuka 2020 atas sewa/ Pemanfaatan Kekayaan Daerah Disbudparpora sebesar Rp.1.000.000,00
Pendapatan BLUD	104.360.891.054,00	95.946.950.401,57	8.413.940.652,43
			Pembayaran Piutang BPJS dan Jamkesda tahun 2019 sebesar Rp 4.908.311.712,00 dan Piutang BPJS dan Jamkesda Meranti tahun 2020 Sebesar pada RSUD Bengkalis Rp 2.477.056.791,00
			Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020 pada RSUD Bengkalis Sebesar Rp 84.666.666,76
			Pembayaran Piutang BLUD RSUD Mandau 2019 sebesar Rp5.792.707.398,00 dan Piutang BLUD 2020 sebesar Rp. 5.792.707.398,00
			Pendapatan diterima dimuka BLUD RSUD Mandau tahun 2020 sebesar Rp105.311.666,67
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.888.868.100,00	13.888.868.100,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	107.423.508,00	0,00	107.423.508,00
			Realisasi Hasil Pengelolaan dana Bergulir atau penerimaan pendapatan investasi non permanen untuk LRA dikelompokkan kedalam lain-lain PAD yang sah lainnya, dan untuk LO tidak terealisasi karena masuk ke dalam pendapatan lainnya.
Jumlah	158.384.480.005,94	149.140.735.845,51	2.571.837.041,43

Realisasi akun lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan

Tabel 5.201 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Jumlah	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

b) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.202 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Denda	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Jumlah	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)

c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.203 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Jumlah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

d) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.204 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)
Jumlah	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)

e) RSUD Bengkulu

Tabel 5.205 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkulu

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	41.055.629.564,00	40.088.404.369,00	967.225.195,00
Pendapatan Kerja sama BLUD	288.055.577,24	170.592.442,00	117.463.135,24
Pendapatan Jasa Giro BLUD	6.564.483.611,00	0,00	6.564.483.611,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	835.000,00	(740.579.351,00)	741.414.351,00
Jumlah	47.909.003.752,24	39.518.417.460,00	8.390.586.292,24

f) RSUD Kec. Mandau

Tabel 5.206 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kec. Mandau

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	47.920.452.095,00	30.912.081.365,00	17.008.370.730,00
Pendapatan Jasa Giro BLUD	74.551.221,00	64.060.220,00	10.491.001,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	42.943.333,33	(1.617.942.800,00)	1.660.886.133,33
Jumlah	48.037.946.649,33	29.358.198.785,00	18.679.747.864,33



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

g) PPKD

Tabel 5.207 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah PPKD

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	3.256.110.350,00	9.158.047.982,00	(5.901.937.632,00)
Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas	830.541.708,00	938.861.598,00	(108.319.890,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	19.481.596.510,00	2.983.980.005,00	16.497.616.505,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.147.958.273,22	88.497.550,00	7.059.460.723,22
Pendapatan dari Pengembalian	8.192.938.857,72	17.098.255.975,60	(8.905.317.117,88)
Jumlah	38.909.145.698,94	30.267.643.110,60	8.641.502.588,34

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Realisasi Pendapatan tersebut untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp149.140.735.845,51. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp113.782.185.793,60 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp35.358.550.051,91 atau 31,08% dan di rincikan sebagai berikut:

Tabel 5.208 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Per OPD

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Badan Pendapatan Daerah	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)
RSUD Bengkalis	47.909.003.752,24	39.518.417.460,00	8.390.586.292,24
RSUD Kec. Mandau	48.037.946.649,33	29.358.198.785,00	18.679.747.864,33
PPKD	38.909.145.698,94	30.267.643.110,60	8.641.502.588,34
Jumlah	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91

5.4.1.B. Pendapatan Transfer

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.097.742.834.399,00 Jika dibandingkan Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebesar Rp3.831.493.295.732,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.733.750.461.333,00 atau 45,25%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.209 Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.940.237.142.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	35.625.236.000,00	131.071.695.996,00	(95.446.459.996,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	121.880.455.890,00	140.199.997.667,00	(18.319.541.777,00)
Jumlah	2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)

Tabel 5.210 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Transfer

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.275.653.458.310,00	1.940.237.142.509,00	335.416.315.801 Pembayaran Piutang Dana Perimbangan DBH Pusat sebesar Rp.335.416.315.801
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	166.657.936.000,00	35.625.236.000,00	131.032.700.000 Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di LO sebesar Rp.131.032.700.000
Transfer Pemerintah Provinsi	131.286.085.508,49	121.880.455.890,00	9.405.629.618,49 Merupakan total pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp.15.279.931.235,00 dan penambahan piutang tahun 2020 sebesar Rp.5.874.301.616,51
Jumlah	2.573.597.479.818,49	2.097.742.834.399,00	475.854.645.419,49

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.940.237.142.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.211 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil Pajak	877.285.068.514,00	1.615.971.473.471,00	(738.686.404.957,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak	516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)
Dana Alokasi Umum	338.731.609.000,00	373.268.646.000	(34.537.037.000,00)
Dana Alokasi Khusus	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)
Jumlah	1.940.237.142.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)

Tahun 2020 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1.940.237.142.509,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp3.560.221.602.069,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.619.984.459.560,00 atau 45,54% dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil Pajak

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	877.285.068.514,00	1.615.971.473.471,00	(738.686.404.957,00)

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp877.285.068.514,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.615.971.473.471,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp738.686.404.957,00 atau 45,71%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Non Migas, Sektor Pertambangan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Bagi Hasil Bagian Pemerintah Pusat bagi Rata serta bagi Hasil PBB Sektor lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.212 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil PBB	820.973.572.570,00	1.392.038.230.183,00	(571.064.657.613,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan	0,00	183.689.768.461,00	(183.689.768.461,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan	3.860.526.654,00	2.312.014.532,00	1.548.512.122,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	3.399.342.940,00	1.472.887.949,00	1.926.454.991,00
Bagi Hasil PPh 21, 25 & 29	48.992.326.114,00	36.237.590.476,00	12.754.735.638,00
Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	0,00	196.640.930,00	(196.640.930,00)
Bagi Hasil PBB Sektor lainnya	59.300.236,00	24.340.939,00	34.959.297,00
Jumlah	877.285.068.514,00	1.615.971.473.470,00	(738.686.404.956,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp. 3.358.973.000,00. Bagian Daerah sebesar Rp1.181.639.653.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp8.522.079.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp5.305.384.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.167.772.363.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp39.827.000,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp39.512.152.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp378.759.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp206.320.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp38.925.745.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp1.328.000,00. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 PBB menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Bagi Rata sebesar Rp1.153.653.617,00. Bagian Daerah sebesar Rp454.751.760.737,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp6.947.080.845,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp3.758.033.671,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp428.071.080.886,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp94.810.172,00. Biaya Pemungutan sektor Perkebunan sebesar Rp308.759.246,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp146.145.941,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp14.269.035.913,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.160.446,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketentuan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp51.941.949.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp1.013.081.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp58.928.868.000,00. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan TA 2018 yang Belum diselesaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp14.124.970.299,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp485.159.598,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp13.639.810.701,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp516.079.604.100,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.308.056.110.304,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp791.976.506.204,00 atau 60,55%. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari dana reboisasi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.213 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	0,00	1.588.687.856,00	(1.588.687.856,00)
Bagi Hasil iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti)	773.227.050,00	2.049.178.168,00	(1.275.951.118,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	784.599.000,00	760.783.703,00	23.815.297,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	508.889.468.800,00	1.298.891.397.177,00	(790.001.928.377,00)
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	124.200,00	0,00	124.200,00
Bagi Hasil dari iuran Hak Penguasa Hutan	5.632.185.050,00	4.766.063.400,00	866.121.650,00
Jumlah	516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak TA 2020 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp912.362.000,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp912.362.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 698.814.018,00.

Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp1.418.361.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp229.300.150,00

Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp547.687.804.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp545.833.996.000,00 dan Gas Bumi sebesar Rp1.853.808.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp157.675.630.632 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp157.071.061.795,00 dan Gas Bumi sebesar Rp604.568.837,00.

Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp9.437.275.000,00 dengan Rincian IIUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp9.437.275.000,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.434.542.476,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenalkari/(Penurunan)
338.731.609.000,00	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2020 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp344.485.485.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.214 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/ (Penurunan)
Dana Alokasi Umum (DAU)	338.731.609.000,00	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)
Jumlah	338.731.609.000,00	345.070.716.000,00	(6.339.107.000,00)

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/ (Penurunan)
	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)

Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah sebagai berikut :

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama per 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 . Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.140.860.895,00 atau 98,34% dari anggarannya sebesar Rp211.654.489.000,00

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.215 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/ (Penurunan)
DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	34.274.998.680,00	(34.274.998.680,00)
DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	19.484.492.836,00	16.383.720.515,00	3.120.772.321,00
DAK Reguler Bidang Perumahan,Air Minum dan Sanitasi	5.714.326.047,00	2.711.220.077,00	3.003.105.970,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.004.638.350,00	0,00	1.004.638.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan	649.241.000,00	725.538.306,00	(76.297.306,00)
DAK Reguler Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan	33.188.479.029,00	19.514.195.993,00	13.674.283.036,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Bidang RS Rujukan dan Pratama	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	2.216.867.750,00	18.849.667.658,00	(16.632.799.908,00)
Penyelesaian Tambah DAK Fisik tahun 2017	0,00	0,00	0,00
DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	3.462.428.565,00	1.829.200.000,00	1.633.228.565,00
Dak Penugasan Bidang Air Minum	1.112.337.434,00	3.647.321.000,00	(2.534.983.566,00)
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	570.501.000,00	497.900.000,00	72.601.000,00
DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	13.899.992.900,00	(13.899.992.900,00)
DAK Penugasan Bidang Pasar	0,00	2.508.252.135,00	(2.508.252.135,00)
DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	986.913.100,00	(986.913.100,00)
DAK Afirmasi Bidang Transportasi	0,00	20.625.010,00	(20.625.010,00)
DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	0,00	1.249.961.000,00	(1.249.961.000,00)
DAK Afirmasi Bidang Air Minum	0,00	3.675.587.300,00	(3.675.587.300,00)
DAK Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	817.000.000,00	(817.000.000,00)
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan / Bidang Penguatan Puskesmas DTPK (222)	5.915.039.982,00	0,00	5.915.039.982,00
Jumlah	73.318.351.993,00	121.572.093.674,00	(48.253.741.681,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Terhadap Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut :

Tabel 5.216 Ketetapan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi Penerimaan	Dasar Hukum
Tunjangan Profesi Guru PNSD	101.677.829.000,00	101.677.829.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dana Tambahan Penghasilan Guru	894.000.000,00	894.000.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.812.600.000,00	7.435.800.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Bantuan Operasional Kesehatan	8.112.480.000,00	11.659.944.275,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Akreditasi Puskesmas	1.088.755.000,00	0,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Jaminan Persalinan	3.520.693.000,00	0,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Bantuan Operasional KB	2.456.820.000,00	2.233.525.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.377.184.000,00	2.230.729.976,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.349.200.000,00	1.349.200.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	317.730.800,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	0,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan	5.250.000.000,00	7.023.749.851,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Jumlah	134.939.450.000,00	134.822.508.902,00	

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.217 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/(Penurunan)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	101.677.829.000,00	101.402.190.500,00	275.638.500,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	894.000.000,00	1.094.000.000,00	(200.000.000,00)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.435.800.000,00	7.583.400.000,00	(147.600.000,00)
Bantuan Operasional Kesehatan	11.659.944.275,00	8.609.485.000,00	3.050.459.275,00
Akreditasi Puskesmas	0,00	1.418.193.730,00	(1.418.193.730,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.576.000.000,00	(1.576.000.000,00)
Tambahan Penghasilan Pegawai	0,00	0,00	0,00	450.135.433.015,00	(450.135.433.015,00)
Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	10.397.979.320,00	(10.397.979.320,00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.931.120.000,00	8.336.160.000,00	93,34	8.898.360.000,00	(562.200.000,00)
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.805.700.000,00	98,33	7.938.000.000,00	(132.300.000,00)
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	157.500.000,00	26,25	600.000.000,00	(442.500.000,00)
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	372.960.000,00	94,87	360.360.000,00	12.600.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.885.245.210,00	(1.885.245.210,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	979.745.210,00	(979.745.210,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	(62.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00	(355.000.000,00)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00	(63.750.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	246.437.500,00	(246.437.500,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	(87.500.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00	(16.050.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	21.775.000,00	(21.775.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	11.812.500,00	(11.812.500,00)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	95.800.000,00	(95.800.000,00)
Jumlah	1.995.179.485.022,92	967.286.430.083,00	48,46	1.077.884.549.964,00	(110.618.068.881,00)

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan terealisasi sebesar Rp123.501.324.042,00 dari jumlah tersebut Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 1.447.122.625,00

Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkalis.

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.50 Rincian Belanja Pegawai Per OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=cb	e	f=c-e
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	758.839.806,00	232.288.844,00	30,61	757.644.950,00	(525.356.106,00)
Sekretariat Daerah	27.316.356.490,00	26.308.751.320,00	96,31	28.069.599.845,00	(1.760.848.525,00)
Sekretariat DPRD	38.985.916.204,00	37.648.674.158,00	96,57	38.956.179.772,00	(1.309.305.614,00)
Dinas Kesehatan	73.228.326.347,00	72.535.067.441,00	99,05	76.067.682.152,00	(3.472.614.711,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.925.745.356,00	7.453.678.733,00	94,04	7.478.144.842,00	(24.466.109,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.428.839.566,00	7.600.629.208,00	90,20	7.799.443.723,00	(198.814.515,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.266.284.368,00	8.000.405.955,00	96,78	7.677.581.892,00	322.824.063,00
Badan Pendapatan Daerah	13.299.647.588,00	12.736.554.045,00	95,77	14.908.474.294,00	(2.171.920.249,00)
Saluran Polisi Pamong Praja	9.816.815.664,00	9.571.201.173,00	97,50	10.584.448.745,00	(1.013.247.572,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.250.475.031,00	6.081.032.532,00	97,29	6.953.748.588,00	(872.716.056,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.847.799.056,00	5.408.837.079,00	92,49	5.472.085.282,00	(63.248.203,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.435.988.702,00	4.324.014.612,00	97,48	4.829.497.162,00	(505.482.550,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.105.121.410,78	4.678.210.015,00	91,64	4.781.370.590,00	(103.160.575,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.284.731.952,00	7.848.765.964,00	94,74	8.528.282.121,00	(679.516.157,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	4.207.701.449,00	3.965.168.424,00	94,24	4.324.671.647,00	(359.503.223,00)
Dinas Pendidikan	494.758.827.477,00	484.881.740.478,00	98,00	573.126.613.555,00	(88.244.873.077,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	7.081.693.321,00	6.772.828.420,00	95,64	7.362.650.381,00	(589.821.961,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.082.723.071,00	5.610.080.366,00	92,23	6.312.330.170,00	(702.249.804,00)
Inspektorat	6.942.194.360,00	6.535.536.211,00	94,14	6.701.017.932,00	(165.481.721,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8.598.050.887,25	8.249.241.147,00	95,94	9.028.473.082,00	(779.231.935,00)
Dinas Sosial	7.248.429.338,00	7.184.557.577,00	99,12	8.021.173.498,00	(836.515.921,00)
RSUD Bengkalis	32.520.890.412,00	30.538.944.084,00	93,91	32.766.159.714,00	(2.227.215.630,00)
RSUD Kecamatan Mandau	28.169.974.749,00	27.862.717.740,00	98,91	29.769.849.444,00	(1.907.131.704,00)
Kecamatan Mandau	12.577.538.388,00	11.377.282.946,00	90,46	12.189.447.517,00	(812.164.571,00)
Kecamatan Rupa	5.462.320.129,00	5.054.840.455,00	92,54	6.097.391.234,00	(1.042.550.779,00)
Kecamatan Rupa Utara	3.472.715.669,00	3.375.824.373,00	97,21	3.687.104.304,00	(311.279.931,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bengkulu	7.214.979.119,00	6.705.714.407,00	92,94	7.574.217.795,00	(868.503.388,00)
Kecamatan Bukit Batu	3.857.443.314,00	3.707.939.602,00	96,12	4.180.704.398,00	(472.764.796,00)
Kecamatan Bantan	2.898.369.353,00	2.857.201.611,00	98,58	3.444.959.243,00	(587.757.632,00)
Kecamatan Siak Kecil	3.310.720.503,00	3.122.008.010,00	94,30	3.396.296.617,00	(274.288.607,00)
Kecamatan Pinggir	4.078.922.588,00	4.016.946.489,00	98,48	4.117.504.085,00	(100.557.596,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.817.422.136,00	6.243.964.556,00	91,59	6.716.679.169,00	(472.714.613,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.267.665.983,00	8.006.488.599,00	96,84	9.221.868.814,00	(1.215.380.215,00)
Dinas Lingkungan Hidup	9.314.614.151,00	8.443.224.481,00	90,64	9.294.114.245,00	(850.869.764,00)
Dinas Pertanian	16.224.738.952,00	15.705.863.300,00	96,80	16.185.887.146,00	(480.023.846,00)
Dinas Perhubungan	13.312.640.144,00	12.129.541.817,00	91,11	12.977.498.621,00	(847.956.804,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.997.023.756,00	10.767.147.961,00	97,91	12.651.683.094,00	(1.884.535.133,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	7.967.459.396,78	7.564.610.751,00	94,94	8.140.338.310,00	(575.727.559,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.064.472.595,00	5.679.625.572,00	93,65	6.038.858.471,00	(359.232.899,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	5.844.746.359,00	5.347.698.565,00	91,74	5.899.061.017,00	(551.362.452,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.655.442.649,00	4.494.980.572,00	96,55	4.812.529.008,00	(317.548.436,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.077.901.181,65	34.797.264.697,00	99,20	23.407.592.216,00	11.389.672.481,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.387.096.858,00	5.151.008.087,00	95,62	5.330.124.158,00	(179.116.071,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.272.964.219,00	4.909.599.532,00	93,11	5.415.185.182,00	(505.585.650,00)
Kecamatan Bandar Leksamana	2.054.953.968,00	1.989.548.269,00	96,82	2.363.355.481,00	(373.809.212,00)
Kecamatan Talang Muandau	1.610.265.015,00	1.476.671.668,00	91,70	2.106.280.304,00	(629.608.636,00)
Kecamatan Bathin Solapan	2.487.924.990,00	2.314.260.227,00	93,02	2.418.746.144,00	(104.485.917,00)
Jumlah	997.589.744.011,46	967.268.480.083,00	96,96	1.077.884.549.964,00	(110.618.069.881,00)

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
998.125.522.329,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98	(108.169.473.074,98)

Realisasi belanja barang selama TA. 2020 sebesar Rp933.384.530.032,00 atau 93,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp998.125.522.329,60, jika dibandingkan TA 2019 sebesar Rp1.041.554.003.106,98 mengalami penurunan Rp108.169.473.074,98 atau 10,39%.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja barang dan jasa merupakan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan/dimanfaatkan kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak, penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas serta perjalanan dinas dan lain-lain. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.51 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bahan Habis Pakai	59.712.535.752,00	57.266.015.905,00	95,90	53.498.269.458,36	3.787.746.446,64
Belanja Bahan/ Material	41.406.664.019,00	40.261.778.974,00	97,24	43.502.793.417,94	(3.241.014.443,94)
Belanja Jasa Kantor	403.739.094.584,00	378.230.261.743,00	93,68	331.804.370.276,00	46.425.891.467,00
Belanja Premi Asuransi	1.447.852.020,00	1.248.488.420,00	86,23	1.504.413.364,00	(255.924.944,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.409.874.209,00	21.407.500.385,00	81,06	26.784.475.559,00	(5.376.975.174,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.733.925.528,00	12.312.805.967,00	89,65	15.898.790.411,00	(3.585.964.444,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.155.121.335,00	2.797.607.914,00	88,67	4.990.494.683,00	(2.192.886.769,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.370.130.000,00	1.141.570.000,00	83,32	2.527.870.882,00	(1.386.300.882,00)
Belanja Sewa Alat Berat	37.500.000,00	19.000.000,00	50,67	196.544.000,00	(177.544.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.471.770.000,00	1.776.461.181,00	71,87	3.762.995.500,00	(1.986.534.319,00)
Belanja Makanan dan Minuman	36.784.229.206,00	32.756.781.786,00	89,05	47.487.068.080,00	(14.730.286.294,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	972.735.000,00	893.310.000,00	91,83	1.668.388.600,00	(775.078.600,00)
Belanja Pakaian Kerja	870.676.000,00	849.617.500,00	97,58	2.261.711.100,00	(1.412.093.600,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1.666.955.000,00	1.595.366.000,00	95,71	4.115.037.430,00	(2.519.671.430,00)
Belanja Perjalanan Dinas	140.557.401.872,50	128.718.002.452,00	91,58	171.618.053.707,00	(42.900.051.255,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	210.000.000,00	209.511.000,00	99,77	25.000.000,00	184.511.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	6.370.260.389,00	5.916.992.910,00	92,88	10.791.199.212,00	(4.874.206.302,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	4.555.325.000,00	4.541.700.000,00	99,70	0,00	4.541.700.000,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	65.000.000,00	25.460.000,00	39,17	45.235.000,00	(19.775.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Pemeliharaan	7.529.098.362,00	6.819.697.523,00	90,58	5.908.648.522,00	911.049.001,00
Belanja Jasa Konsultasi	14.603.269.000,00	13.170.473.315,00	90,19	12.874.548.917,00	295.924.398,00
Belanja Barang Dana BOS	38.457.755.547,00	39.965.187.757,00	103,92	40.449.864.233,00	(484.676.476,00)
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	835.478.000,00	562.307.004,00	67,30	7.535.086.083,00	(6.972.779.079,00)
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	15.660.664.000,00	14.642.862.909,00	93,50	92.227.000.625,00	(77.584.137.616,00)
Belanja Uang Saku	268.100.000,00	211.540.000,00	78,90	0,00	211.540.000,00
Honorarium PNS	17.476.470.000,00	16.301.185.500,00	93,27	12.949.115.000,00	3.352.050.500,00
Honorarium Non PNS	24.836.770.389,00	22.332.679.908,00	89,92	35.677.263.100,00	(13.344.583.192,00)
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	7.771.390.000,00	7.437.028.565,00	95,70	14.248.301.200,00	(6.811.272.635,00)
Belanja Pegawai BLUD	8.500.000.000,00	7.146.645.000,00	84,08	4.617.339.550,00	2.529.305.450,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.183.660.237,10	90.966.626.794,00	98,68	71.970.744.057,68	18.995.882.736,32
Belanja Pegawai Dana BOS	24.465.816.900,00	21.880.083.620,00	89,35	20.613.381.039,00	1.246.702.581,00
Jumlah	998.125.522.329,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.106,98	(108.169.473.074,98)

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.52 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=cb	e	f=ce
Sekretariat Daerah	77.550.163.120,00	71.830.296.443,00	92,62	94.893.006.630,00	(23.062.710.187,00)
Sekretariat DPRD	71.190.941.649,50	65.477.024.269,00	91,97	66.606.770.865,00	(1.129.746.596,00)
Dinas Kesehatan	112.220.754.569,00	100.781.898.379,00	89,81	63.990.230.747,00	36.791.667.632,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.734.393.920,00	8.061.866.241,00	92,30	9.986.012.595,00	(1.924.146.354,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.496.695.420,00	3.493.951.096,00	99,92	4.564.742.711,00	(1.070.791.615,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.860.326.858,00	9.910.771.848,00	83,56	10.477.740.918,00	(586.969.070,00)
Badan Pendapatan Daerah	11.834.533.700,00	10.427.420.980,00	88,11	13.348.982.986,00	(2.921.562.006,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	11.353.522.203,00	11.185.415.506,00	98,52	13.638.409.108,00	(2.452.993.602,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.043.780.225,00	4.701.632.809,00	93,22	6.553.097.955,00	(1.851.466.146,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.540.784.317,00	20.761.387.869,00	96,38	29.843.876.059,00	(9.082.488.190,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.132.997.677,00	3.943.097.088,00	95,41	4.605.477.798,00	(662.380.710,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.121.737.780,00	1.680.621.618,00	79,21	2.943.773.021,00	(1.263.151.403,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.939.433.500,00	9.339.474.016,00	93,96	16.549.879.239,00	(7.210.405.223,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.799.963.400,00	2.688.845.997,00	96,03	3.474.509.661,00	(785.663.664,00)
Dinas Pendidikan	171.724.346.009,00	167.909.875.982,00	97,78	157.836.751.336,00	10.073.124.646,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	7.011.378.317,00	6.600.602.394,00	94,14	7.287.842.742,00	(687.240.348,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.161.982.853,00	3.854.987.541,00	92,62	9.535.402.808,00	(5.680.415.267,00)
Inspektorat	5.145.805.716,00	4.223.430.890,00	82,08	5.410.334.439,00	(1.186.903.549,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	4.101.040.160,00	3.918.974.649,00	95,56	7.716.584.532,00	(3.797.609.883,00)
Dinas Sosial	30.165.024.357,00	29.285.951.889,00	97,09	37.014.342.781,00	(7.726.390.892,00)
RSUD Bengkalis	80.945.674.337,10	76.133.806.789,00	94,06	71.444.566.335,00	4.689.240.454,00
RSUD Kecamatan Mandau	86.903.565.132,00	82.372.985.960,00	94,79	65.408.376.583,98	16.964.609.376,02
Kecamatan Mandau	17.280.854.520,00	17.173.595.061,00	99,38	17.926.182.688,00	(752.587.627,00)
Kecamatan Rupal	6.069.400.177,00	5.926.374.027,00	97,64	6.606.357.428,00	(679.983.401,00)
Kecamatan Rupal Utara	3.389.343.450,00	3.299.248.700,00	97,34	5.571.800.575,00	(2.272.551.875,00)
Kecamatan Bengkalis	4.386.337.190,00	4.319.750.236,00	98,48	5.336.664.533,00	(1.016.914.297,00)
Kecamatan Bukit Batu	3.134.979.500,00	3.021.989.045,00	96,40	3.971.551.130,00	(949.582.085,00)
Kecamatan Barisan	2.521.221.113,00	2.516.074.422,00	99,80	2.941.810.467,00	(425.736.045,00)
Kecamatan Siak Kecil	2.587.114.350,00	2.496.927.400,00	96,51	2.963.602.900,00	(466.675.500,00)
Kecamatan Pinggir	4.809.025.480,00	4.647.294.041,00	96,64	4.341.285.876,00	306.008.165,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.204.354.425,00	4.182.073.599,00	80,36	9.494.027.728,00	(5.311.954.129,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.342.239.520,00	12.402.693.664,00	92,96	15.269.386.715,00	(2.866.693.051,00)
Dinas Lingkungan Hidup	29.532.481.194,00	28.496.440.823,00	96,49	29.194.760.864,00	(698.320.041,00)
Dinas Pertanian	9.142.775.428,00	7.976.866.622,00	87,25	10.660.756.267,00	(2.683.889.645,00)
Dinas Perhubungan	17.589.663.004,00	13.613.900.018,00	77,40	15.594.615.221,00	(1.989.715.203,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.614.182.700,00	16.906.872.851,00	90,83	12.922.984.003,00	3.983.888.848,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	36.029.158.900,00	33.110.445.746,00	91,90	108.617.106.989,00	(75.506.860.943,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.819.395.850,00	3.290.693.759,00	86,16	5.642.469.763,00	(2.351.776.004,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	10.106.814.338,00	9.427.435.713,00	93,29	10.187.088.035,00	(759.652.322,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.795.749.400,00	7.673.866.653,00	87,25	7.223.754.029,00	450.112.624,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.314.498.320,00	36.471.874.489,00	95,19	39.312.932.364,00	(2.841.057.875,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.977.431.870,00	4.033.798.116,00	81,04	7.714.358.219,00	(3.680.560.103,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.510.985.000,00	6.262.262.342,00	96,18	8.475.356.215,00	(2.213.093.873,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	2.504.601.680,00	2.384.509.130,00	95,21	2.831.072.986,00	(446.563.856,00)
Kecamatan Talang Muandau	2.785.530.161,00	2.483.821.010,00	89,17	2.857.120.637,00	(373.299.627,00)
Kecamatan Bathin Solapan	2.699.539.560,00	2.681.402.312,00	99,33	2.766.245.926,00	(84.843.614,00)
Jumlah	998.125.522.328,60	933.384.530.032,00	93,51	1.041.554.003.108,98	(108.169.473.074,98)

3. Belanja Subsidi

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)

Realisasi belanja subsidi selama TA. 2020 adalah sebesar Rp9.618.696.893,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.618.696.893,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.277.056.715,00 atau 11,72% dibandingkan realisasi TA 2019 yang berjumlah Rp10.895.753.608,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)
Jumlah	9.618.696.893,00	9.618.696.893,00	100,00	10.895.753.608,00	(1.277.056.715,00)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalokasikan dana subsidi kepada Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat berdasar Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.

4. Belanja Hibah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
72.764.589.031,00	71.023.667.791,00	97,61	59.946.830.651,00	11.076.837.140,00

Realisasi belanja hibah selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.023.667.791,00 atau 97,61% dari anggaran sebesar Rp72.764.589.031,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.076.837.140,00 atau 18,48% dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp59.946.830.651,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja hibah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 408/KPTS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Uang Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.54 Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Hibah kepada Pemerintah	43.150.000.000,00	43.016.390.862,00	99,69	22.000.000.000,00	21.016.390.862,00
Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	14.007.000.000,00	13.701.866.551,00	97,82	20.590.267.479,00	(6.888.400.928,00)
Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	4.880.000.000,00	4.636.221.378,00	95,00	6.057.888.172,00	(1.421.666.794,00)
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.351.775.000,00	(2.351.775.000,00)
BOP PAUD Masyarakat / Swasta	7.812.600.000,00	7.048.800.000,00	90,22	7.336.200.000,00	(287.400.000,00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.398.100.000,00	1.103.500.000,00	78,93	1.610.700.000,00	(507.200.000,00)
Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.516.889.031,00	1.516.889.000,00	100,00	0,00	1.516.889.000,00
Jumlah	72.764.589.031,00	71.023.667.791,00	97,61	59.946.830.651,00	11.076.837.140,00

Tabel 5.55 Belanja Hibah kepada Pemerintah

Penerima Hibah kepada Pemerintah	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Polres Bengkalis	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	1.600.000.000,00	1.596.125.800,00	99,76
KPU Kabupaten Bengkalis	22.000.000.000,00	21.999.688.000,00	100,00
Bawaslu Kabupaten Bengkalis	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Kodim 0303 Bengkalis	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
Polteknik Bengkalis, Jalan Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis	2.800.000.000,00	2.670.577.062,00	95,38
Kodim 0303 Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020, Jl. Bantan-Bengkalis	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Polres Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020, Jl. Pertanian	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Jumlah	43.150.000.000,00	43.016.390.862,00	99,69

Tabel 5.56 Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

Penerima Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis	350.000.000,00	349.600.000,00	99,89
- KONI Kab. Bengkalis	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
- Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibu Harapan Bengkalis	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Bengkalis	250.000.000,00	210.241.900,00	84,10
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis	250.000.000,00	249.872.822,00	99,95
- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bengkalis	2.034.000.000,00	1.981.618.135,00	97,42
- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkalis	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
- Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bengkalis	100.000.000,00	99.290.000,00	99,29
- KORPRI Kabupaten Bengkalis	573.000.000,00	382.365.000,00	66,73
- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00
- PWI Kabupaten Bengkalis	200.000.000,00	193.741.088,00	96,87
- LAMR Kabupaten Bengkalis	1.015.000.000,00	1.014.762.000,00	99,98
- NPC Kabupaten Bengkalis	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syarifah Bengkalis	2.800.000.000,00	2.799.860.053,00	100,00
- Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bengkalis	140.000.000,00	127.994.805,00	91,42
- PMI Kabupaten Bengkalis	300.000.000,00	297.520.748,00	99,17
- Yayasan Darul Falah Bengkalis	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
- Yayasan Bengkalis Quran Center	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
- Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00
Jumlah	14.007.000.000,00	13.701.866.551,00	97,82

Tabel 5.57 Realisasi Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat

Penerima Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Rumah Ibadah	4.680.000.000,00	4.636.221.378,00	95,00
Jumlah	4.680.000.000,00	4.636.221.378,00	95,00

Tabel 5.58 Belanja Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat / Swasta

Penerima Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat / Swasta	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Kecamatan Bengkalis	1.427.400.000,00	1.260.900.000,00	88,34
Kecamatan Bentan	882.000.000,00	812.400.000,00	92,11
Kecamatan Bukit Batu	432.600.000,00	395.400.000,00	91,40
Kecamatan Siak Kecil	495.000.000,00	482.100.000,00	97,39
Kecamatan Mandau	1.603.200.000,00	1.384.800.000,00	86,38
Kecamatan Pinggir	761.400.000,00	731.700.000,00	96,10
Kecamatan Bathin Solepan	755.400.000,00	666.900.000,00	88,28
Kecamatan Talang Muandau	318.000.000,00	313.800.000,00	98,68
Kecamatan Rupal	634.800.000,00	576.900.000,00	90,88
Kecamatan Rupal Utara	217.200.000,00	144.900.000,00	66,71
Kecamatan Bandar Laksamana	285.600.000,00	279.000.000,00	97,69
Jumlah	7.812.600.000,00	7.048.800.000,00	90,22



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.59 Belanja Hibah kepada BOP Pendidikan Kesetaraan

Penerima Hibah kepada BOP Pendidikan Kesetaraan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	231.400.000,00	221.650.000,00	95,79
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	369.000.000,00	293.250.000,00	79,47
BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	748.800.000,00	588.600.000,00	78,61
Jumlah	1.349.200.000,00	1.103.500.000,00	81,79

Tabel 5.60 Belanja Hibah kepada Partai Politik

Penerima Hibah kepada Partai Politik	Pagu Anggaran	Realisasi	%
a	b	c	d=c/b
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	208.488.531,00	208.488.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	234.245.000,00	234.245.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	105.347.000,00	105.347.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	197.092.500,00	197.092.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	58.135.000,00	58.135.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	178.376.000,00	178.376.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	52.827.500,00	52.827.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	121.192.500,00	121.192.500,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra	157.828.000,00	157.828.000,00	100,00
Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat	158.812.500,00	158.812.500,00	100,00
Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia	44.544.500,00	44.544.500,00	100,00
Jumlah	1.516.889.031,00	1.516.889.000,00	100,00

5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari

Tabel 5.61 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)
Jumlah	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.697.500.000,00	(1.697.500.000,00)

B. Belanja Modal

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
559.891.175.437,55	500.329.662.982,84	89,36	1.108.175.580.894,99	(607.845.917.912,15)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi belanja modal selama per 31 Desember 2020 sebesar Rp500.329.662.982,84 atau 89,36% dari anggaran sebesar Rp559.891.175.437,55 dan mengalami penurunan sebesar Rp607.845.917.912,15 atau 54,85% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.108.175.580.894,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Belanja Modal

Urutan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Belanja Tanah	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48	(62.388.174.931,03)
Belanja Gedung dan Bangunan	154.765.065.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)
Belanj Jalan, Irigasi dan Jaringan	290.484.350.499,07	260.976.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80	(410.214.330.276,10)
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.665.825,00	(3.220.119.166,00)
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	559.891.175.437,55	500.329.662.982,84	89,36	1.108.175.580.894,99	(607.845.917.912,15)

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian realisasi modal berdasarkan jenis aset tetap dan hak kepemilikannya tahun Anggaran 2020. Adapun realisasi belanja modal selama per 31 Desember 2020 dan TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Tanah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)

Realisasi belanja modal tanah selama TA 2020 sebesar Rp815.248.000,00 atau 76,07% dari anggaran sebesar Rp1.071.700.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.819.644.400,00 atau 91,54% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp9.634.892.400,00.

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp815.248.000,00 merupakan belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Belanja Tanah

Belanja Tanah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	204.050.000,00	94.060.000,00	46,10	8.954.073.900,00	(8.860.013.900,00)
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	867.650.000,00	721.188.000,00	83,12	680.818.500,00	40.369.500,00
Jumlah	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)

Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.64 Rincian Belanja Modal Tanah berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Dinas Kesehatan	867.650.000,00	721.188.000,00	83,12	680.618.500,00	40.369.500,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00	1.108.377.900,00	(1.108.377.900,00)
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00	314.030.000,00	(314.030.000,00)
Kecamatan Bathin Sofapan	0,00	0,00	0,00	7.531.666.000,00	(7.531.666.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	204.060.000,00	94.060.000,00	46,10	0,00	94.060.000,00
Jumlah	1.071.700.000,00	815.248.000,00	76,07	9.634.892.400,00	(8.819.644.400,00)

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48	(62.388.174.931,03)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2020 sebesar Rp97.002.850.638,45 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp102.506.461.750,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp62.388.174.931,03 atau 39,14% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp159.391.025.569,48.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp97.002.850.638,45 merupakan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Perurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=e-a
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	501.942.250,00	498.961.000,00	99,40	2.640.199.200,71	(2.141.248.200,71)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	1.159.024.100,00	(1.159.024.100,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.934.206.000,00	1.891.093.267,00	48,07	16.667.471.318,00	(14.776.378.031,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	937.891.000,00	(937.891.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00	63.930.000,00	(63.930.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	41.495.000,00	(41.495.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	40.020.000,00	38.597.600,00	96,45	98.357.850,00	(59.760.250,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	569.842.500,00	(569.842.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	35.880.000,00	33.950.000,00	94,62	1.350.755.000,00	(1.316.805.000,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	253.650.000,00	250.700.000,00	98,84	73.850.000,00	176.850.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.993.508.300,00	1.893.462.445,45	94,98	9.189.197.170,00	(7.295.734.724,55)
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.245.969.500,00	4.595.971.100,00	37,53	13.539.255.015,00	(8.943.283.915,00)
Belanja modal Pengadaan Komputer	8.489.962.495,00	7.116.011.200,00	83,82	13.849.837.570,00	(6.733.826.370,00)
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.385.071.995,00	5.232.026.260,00	97,16	10.212.705.370,00	(4.980.679.110,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.517.166.000,00	2.094.258.800,00	83,20	5.390.565.860,00	(3.296.307.060,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	34.000.000,00	33.550.000,00	98,68	226.754.200,00	(193.204.200,00)
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	120.000.000,00	118.943.000,00	99,12	5.000.000,00	113.943.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	38.340.041.176,00	35.103.800.962,00	91,56	36.469.200.220,77	(1.365.399.258,77)
Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	973.677.570,00	862.778.000,00	88,61	1.264.078.800,00	(401.300.800,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	2.595.920.844,00	2.513.565.236,00	96,83	1.170.597.513,00	1.342.967.723,00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.177.520.000,00	1.176.041.930,00	99,87	5.528.859.300,00	(4.352.817.370,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	8.437.500,00	7.500.000,00	88,89	78.900.000,00	(71.400.000,00)
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	170.000.000,00	167.230.000,00	98,37	155.540.000,00	11.690.000,00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	89.136.000,00	88.973.000,00	99,82	231.032.430,00	(142.059.430,00)
Belanja Modal BLUD	7.500.000.000,00	11.689.827.770,00	155,86	4.463.176.466,00	7.226.451.304,00
Belanja Modal Dana BOS	16.100.352.120,00	21.595.819.048,00	134,13	34.006.509.686,00	(12.410.690.638,00)
Jumlah	102.508.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	158.391.025.569,48	(62.388.174.831,03)

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.66 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kelebihan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	5.313.443.000,00	4.915.984.690,00	92,52	8.208.166.365,00	(3.292.181.675,00)
Sekretariat DPRD	2.642.425.000,00	2.548.557.245,45	96,45	6.587.720.200,00	(4.039.162.954,55)
Dinas Kesehatan	16.277.613.171,00	13.081.061.363,00	80,36	10.468.610.336,71	2.612.451.046,29
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.736.220.000,00	2.215.664.200,00	80,98	1.819.106.795,00	396.557.405,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	245.140.000,00	242.890.000,00	99,08	396.960.000,00	(154.070.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.148.200.000,00	1.140.410.050,00	99,32	3.238.218.800,00	(2.097.808.750,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.859.658.650,00	(2.859.658.650,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	497.463.900,00	(497.463.900,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	635.573.000,00	(635.573.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.125.000,00	12.100.000,00	99,79	2.462.902.715,00	(2.450.802.715,00)
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	34.860.000,00	(34.860.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	64.070.000,00	(64.070.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	40.000.000,00	39.990.000,00	99,98	1.363.682.000,00	(1.323.692.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	59.700.000,00	44.498.000,00	74,54	245.465.000,00	(200.967.000,00)
Dinas Pendidikan	19.303.278.529,00	24.783.182.978,00	128,39	43.998.197.686,00	(19.215.014.708,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	120.000.000,00	119.446.000,00	99,54	262.234.000,00	(142.788.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	394.306.000,00	(394.306.000,00)
Inspektorat	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	183.645.000,00	(181.145.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	42.375.000,00	42.300.000,00	99,82	629.488.500,00	(587.188.500,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Sosial	307.000.000,00	299.374.500,00	97,52	747.013.777,00	(447.639.277,00)
RSUD Bengkulu	22.608.767.193,00	27.497.731.129,00	121,62	29.673.437.032,00	(2.175.705.903,00)
RSUD Kecamatan Mandau	13.471.156.807,00	10.642.582.176,00	79,00	7.095.757.336,77	3.546.824.839,23
Kecamatan Mandau	896.592.000,00	889.004.300,00	99,16	2.233.660.970,00	(1.344.656.670,00)
Kecamatan Rupet	203.670.000,00	203.670.000,00	100,00	1.323.997.300,00	(1.120.327.300,00)
Kecamatan Rupert Utara	22.500.000,00	22.110.000,00	98,27	1.291.201.900,00	(1.269.091.900,00)
Kecamatan Bengkulu	74.500.000,00	74.500.000,00	100,00	688.653.800,00	(614.153.800,00)
Kecamatan Bukit Batu	22.900.000,00	22.300.000,00	97,38	135.850.000,00	(113.550.000,00)
Kecamatan Bantan	44.062.500,00	44.062.500,00	100,00	302.317.800,00	(258.255.300,00)
Kecamatan Siak Kecil	61.500.000,00	61.250.000,00	99,59	164.050.000,00	(102.800.000,00)
Kecamatan Pinggir	90.500.000,00	71.182.000,00	78,65	22.495.000,00	48.687.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	61.225.000,00	58.985.000,00	96,34	27.100.000,00	31.885.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	206.000.000,00	203.150.000,00	98,62	1.239.050.800,00	(1.035.900.800,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.001.981.000,00	998.103.887,00	99,61	2.893.612.406,00	(1.895.508.519,00)
Dinas Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	849.085.000,00	(844.085.000,00)
Dinas Perhubungan	1.086.471.000,00	1.083.363.000,00	99,71	439.316.000,00	644.047.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.900.000,00	303.555.000,00	96,09	1.038.457.500,00	(734.902.500,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	390.150.000,00	(390.150.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	243.575.420,00	(243.575.420,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	909.449.250,00	904.238.700,00	99,43	856.787.000,00	47.451.700,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.726.095.000,00	277.300.000,00	3,59	720.357.830,00	(443.057.830,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.860.908.300,00	2.583.899.700,00	66,92	16.348.609.850,00	(13.764.710.150,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63.500.000,00	63.100.000,00	99,37	494.810.000,00	(431.710.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	782.386.000,00	775.294.200,00	99,09	4.943.019.900,00	(4.167.725.700,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	157.736.000,00	157.411.000,00	99,79	136.150.000,00	21.261.000,00
Kecamatan Talang Muandau	158.303.500,00	154.403.000,00	97,54	742.180.000,00	(587.777.000,00)
Kecamatan Bathin Solapan	422.928.500,00	418.896.000,00	99,00	0,00	418.696.000,00
Jumlah	102.506.461.750,00	97.002.850.638,45	94,63	159.391.025.569,48	(62.388.174.931,03)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
154.765.085.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama TA 2020 sebesar Rp131.718.395.987,69 atau 85,11% dari anggaran sebesar Rp154.765.085.363,48 dan mengalami penurunan sebesar Rp123.203.649.139,02 atau 48,33% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp254.922.045.126,71.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp131.718.395.987,69 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	147.219.474.845,48	124.412.877.642,69	84,51	242.996.168.267,10	(118.583.290.624,41)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.307.950.000,00	3.146.670.300,00	95,12	8.324.373.361,61	(5.177.703.061,61)
Belanja modal Pengadaan Rambu- Rambu	1.075.646.440,00	1.055.367.000,00	98,11	1.354.831.700,00	(299.464.700,00)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	653.500.000,00	594.438.000,00	90,96	175.374.000,00	419.064.000,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	295.000.000,00	292.987.000,00	99,01	847.654.760,00	(555.667.760,00)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	7.610.000,00	7.610.000,00	100,00	0,00	7.610.000,00
Belanja Modal Pengadaan Monumen / Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	1.223.643.038,00	(1.223.643.038,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	2.205.904.078,00	2.209.346.045,00	100,16	0,00	2.209.346.045,00
Jumlah	154.765.085.363,48	131.718.395.987,69	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.68 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	8.704.490.000,00	8.036.812.534,35	92,33	12.779.411.357,00	(4.742.598.822,65)
Sekretariat DPRD	2.192.180.000,00	2.171.769.252,10	99,07	3.737.141.000,00	(1.565.371.747,90)
Dinas Kesehatan	19.943.010.859,75	18.750.793.382,73	94,02	27.544.155.660,65	(8.793.362.297,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	887.000.000,00	882.563.428,00	99,50	1.203.409.616,00	(320.846.188,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	525.570.000,00	524.203.400,00	99,74	707.016.319,22	(182.812.919,22)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	799.300.000,00	796.413.808,12	99,64	546.741.760,00	249.672.048,12
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	613.842.000,00	(613.842.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	307.390.000,00	(280.390.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89.610.000,00	88.588.000,00	98,66	1.728.770.500,00	(1.640.182.500,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.721.000.000,00	5.714.328.200,00	99,88	1.310.860.760,00	4.403.867.440,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	15.147.963,00	(15.147.963,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.345.691.665,00	4.326.530.260,00	99,56	5.134.398.438,00	(807.868.178,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	395.000.000,00	394.013.000,00	99,75	305.109.000,00	88.904.000,00
Dinas Pendidikan	40.939.026.715,73	40.150.608.453,73	98,07	76.947.764.202,77	(36.797.155.749,04)
Dinas Perikanan	90.260.000,00	81.830.000,00	90,44	1.967.925.000,00	(1.886.295.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	631.325.000,00	620.369.163,00	98,26	1.817.315.700,00	(1.196.946.537,00)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	194.762.500,00	(194.762.500,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	452.000.000,00	451.869.000,00	99,97	1.212.862.000,00	(760.993.000,00)
Dinas Sosial	297.605.000,00	296.717.300,00	99,70	479.329.000,00	(182.611.700,00)
RSUD Bengkalis	6.311.280.000,00	206.025.000,00	3,26	4.088.789.000,00	(3.882.764.000,00)
RSUD Kecamatan Mandau	2.649.820.000,00	2.590.731.831,86	97,77	10.614.743.117,94	(8.024.011.286,08)
Kecamatan Mandau	189.915.000,00	187.752.734,90	98,86	3.739.231.000,00	(3.551.478.265,10)
Kecamatan Rupert	107.620.000,00	107.320.000,00	99,72	5.379.562.300,00	(5.272.242.300,00)
Kecamatan Rupert Utara	0,00	0,00	0,00	1.148.055.000,00	(1.148.055.000,00)
Kecamatan Bengkalis	0,00	0,00	0,00	197.112.000,00	(197.112.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	200.000.000,00	199.533.500,00	99,77	646.526.000,00	(446.992.500,00)
Kecamatan Bantan	11.000.000,00	4.500.000,00	40,91	0,00	4.500.000,00
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	358.355.000,00	(358.355.000,00)
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00	63.380.000,00	(63.380.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	79.150.000,00	(79.150.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.828.350.000,00	2.783.350.960,00	98,41	3.961.210.335,00	(1.177.859.375,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.829.070.000,00	1.813.985.334,00	99,18	3.338.195.000,00	(1.524.209.666,00)
Dinas Pertanian	604.754.733,00	599.887.000,00	99,20	687.563.600,00	(67.676.600,00)
Dinas Perhubungan	4.879.484.440,00	4.601.651.921,90	94,31	13.140.203.704,08	(8.538.651.782,18)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.643.021.950,00	29.276.195.862,00	68,65	60.097.479.403,05	(30.821.283.541,05)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	2.323.400.000,00	2.162.309.088,00	93,93	2.581.459.750,00	(399.150.662,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.500.000,00	31.370.000,00	99,59	341.474.000,00	(310.104.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	244.700.000,00	244.196.000,00	99,79	1.272.770.000,00	(1.028.574.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.006.800.000,00	1.784.498.715,00	88,92	701.694.000,00	1.082.804.715,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	175.000.000,00	174.391.000,00	99,65	2.354.818.000,00	(2.180.427.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.410.000.000,00	1.338.608.858,00	94,94	963.732.120,00	374.876.738,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	97.620.000,00	96.693.000,00	99,05	613.389.000,00	(516.696.000,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	181.700.000,00	181.186.000,00	99,72	0,00	181.186.000,00
Jumlah	154.765.085.363,48	131.718.395.987,89	85,11	254.922.045.126,71	(123.203.649.139,02)

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
290.484.350.499,07	260.976.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80	(410.214.330.276,10)

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan sebesar selama TA 2020 Rp260.976.621.697,70 atau 89,84% dari anggaran sebesar Rp290.484.350.499,07 dan mengalami penurunan sebesar Rp410.214.330.276,10 atau 61,12% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp671.190.951.973,80.

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp260.976.621.697,70 merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Jalan	206.878.442.659,07	190.505.311.790,76	92,09	560.474.983.699,49	(369.969.671.908,73)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal Pengadaan Jembatan	6.779.633.000,00	6.503.064.464,00	95,92	8.255.584.286,00	(1.752.519.822,00)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.587.465.518,00	6.641.068.705,28	77,33	16.373.172.813,60	(9.732.104.108,32)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.770.020.000,00	2.658.880.725,00	95,99	8.288.903.889,00	(5.630.023.164,00)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	35.247.169.000,00	26.693.886.785,00	75,73	39.838.774.051,35	(13.144.887.266,35)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.134.624.663,00	10.543.647.020,42	94,69	24.931.525.175,92	(14.387.878.155,50)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00	331.120.800,00	(331.120.800,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	50.000.000,00	48.898.000,00	97,80	0,00	48.898.000,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	226.800.000,00	224.590.000,00	99,03	720.430.000,00	(495.840.000,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	14.126.600,00	(14.126.600,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	119.650.000,00	(119.650.000,00)
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	700.931.000,00	683.235.348,24	97,48	483.019.280,00	200.216.068,24
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	18.109.264.459,00	16.474.038.859,00	90,97	11.359.661.378,44	5.114.377.480,56
Jumlah	290.484.350.499,07	260.978.621.697,70	89,84	671.190.951.973,80	(410.214.330.276,10)

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.70 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kelebihan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Sekretariat Daerah	174.150.000,00	167.243.000,00	96,03	315.425.000,00	(148.182.000,00)
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	295.570.000,00	(295.570.000,00)
Dinas Kesehatan	226.800.000,00	224.590.000,00	99,03	424.860.000,00	(200.270.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	39.770.280,00	(39.770.280,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	29.943.100,00	(29.943.100,00)
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	179.500.000,00	(179.500.000,00)
Dinas Perikanan	179.772.000,00	174.558.000,00	97,10	14.126.600,00	160.431.400,00
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	267.545.000,00	(267.545.000,00)
Kecamatan Mendau	4.021.958.500,00	3.975.637.554,35	98,85	1.822.036.300,00	2.153.601.254,35
Kecamatan Rupat	2.715.881.200,00	2.713.622.800,00	99,92	2.666.014.200,00	47.608.600,00
Kecamatan Bengkalis	2.226.168.750,00	2.208.205.117,00	99,19	1.896.592.900,00	311.612.217,00
Kecamatan Bukit Batu	491.560.000,00	486.710.700,00	99,01	514.630.800,00	(27.920.100,00)
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	95.622.000,00	(95.622.000,00)
Kecamatan Pinggir	1.018.600.000,00	1.017.848.981,00	99,93	998.100.000,00	19.748.981,00
Dinas Pertanian	2.744.718.978,00	2.730.860.000,00	99,50	6.460.743.000,00	(3.729.883.000,00)
Dinas Perhubungan	80.000.000,00	79.200.000,00	99,00	49.929.000,00	29.271.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.578.535.099,00	191.259.520.718,28	89,55	490.046.134.963,95	(298.786.614.245,57)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	62.966.205.972,07	55.879.442.827,07	88,75	185.074.408.829,85	(109.194.966.002,78)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000,00	49.632.000,00	99,26	0,00	49.632.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	9.550.000,00	95,50	0,00	9.550.000,00
Jumlah	290.484.350.499,07	280.976.621.897,70	89,84	671.190.951.973,80	(440.214.330.276,10)

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.665.825,00	(3.220.119.166,00)

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya selama TA 2020 sebesar Rp9.816.546.659,00 atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp11.063.577.825,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.220.119.166,00 atau 24,70% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp13.036.665.825,00.

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp9.816.546.659,00 merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal Pengadaan Buku	45.500.000,00	45.492.000,00	99,98	12.626.725.825,00	(12.581.233.825,00)
Belanja modal Pengadaan Tanaman	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	0,00	4.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja modal					
Pengadaan Barang	0,00	0,00	0,00	402.960.000,00	(402.960.000,00)
Bercorak Kebudayaan					
Belanja modal					
Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	(6.980.000,00)
Raga Lainnya					
Belanja Modal Aset					
tetap lainnya Dana	11.014.027.825,00	9.767.004.659,00	88,68	0,00	9.767.004.659,00
BOS					
Jumlah	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.965.825,00	(3.220.119.166,00)

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.72 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	(6.980.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	399.960.000,00	(399.960.000,00)
Dinas Pendidikan	11.014.027.825,00	9.767.004.659,00	88,68	12.516.626.025,00	(2.749.621.366,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)
Kecamatan Mandau	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	52.799.000,00	(47.799.000,00)
Kecamatan Bengkalis	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	26.210.000,00	(20.710.000,00)
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	13.098.800,00	(13.098.800,00)
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00	2.992.000,00	(2.992.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	0,00	4.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00	24.992.000,00	99,97	0,00	24.992.000,00
Jumlah	11.063.577.825,00	9.816.546.659,00	88,73	13.036.965.825,00	(3.220.119.166,00)

6. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada realisasi belanja modal Aset lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
164.617.292.563,01	152.938.659.147,00	92,91	0,00	152.938.659.147,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp152.938.659.147,00 atau 92,91% dari anggarannya sebesar Rp164.617.292.563,01 mengalami kenaikan sebesar Rp152.938.659.147,00 atau 100.00% jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga terealisasi berdasarkan :

- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 287/KPTS/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan besaran Belanja Tidak Terduga yang diterima dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk penanganan dampak-dampak sosial Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk kabupaten Bengkalis tahun 2020.
- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 441/KPTS/XI/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga yang diterima oleh perangkat daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 297/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Penyetoran Saldo Dana Unit Pelayanan Pengembangan Tuah Mina Lestari Cabang Pembantu Duri dari Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ke Rekening Kas Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 433/KPTS/XI/2020 tentang Penyetoran sisa dana desa Batang Duku Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dari Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.73 Rincian Belanja Tidak Terduga OPD berdasarkan SK Bupati

OPD	Berdasarkan SK Bupati	Realisasi 2020
	Besaran BTT (Rp)	Besaran BTT (Rp)
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	20.415.600.000,00	16.715.700.000,00
Dinas Kesehatan	688.000.000,00	660.000.000,00
RSUD Kabupaten Bengkalis	28.795.725.773,00	27.716.460.934,00
RSUD Kecamatan Mandau	3.978.250.000,00	3.955.913.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.350.805.250,00	13.284.555.218,00
Dinas Perhubungan	2.009.376.000,00	1.339.113.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24.277.398.960,00	23.867.851.246,00
Dinas Sosial	63.175.500.000,00	63.096.136.873,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	99.180.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	637.450.000,00	416.901.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	406.958.540,00	394.494.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00	244.982.000,00
Kecamatan Bengkalis	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Bantan	55.000.000,00	55.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Siak Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Bandar Laksamana	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	150.000.000,00	150.000.000,00
Kecamatan Mandau	225.000.000,00	222.495.000,00
Kecamatan Pinggir	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Talang Muandau	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Rupert	50.000.000,00	50.000.000,00
Kecamatan Rupert Utara	50.000.000,00	48.700.000,00
Total	161.015.064.523,00	152.716.482.271,00
Pengembalian Dana		



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengembalian Dana UPP Tuah Mina Lestari Cabang Pembantu Duri ke Rekening Kas Daerah Provinsi Riau TA. 2020		63.346.876,00
Penyetoran Sisa Dana Desa Batang Duku Kecamatan Bukit Batu dari TA. 2015 sampai dengan 2018		158.830.000,00
		222.176.876,00
Total ETT	184.617.292.563,01	152.938.659.147,00

5.1.3. Transfer

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
355.409.255.248,58	353.910.554.625,00	99,58	457.694.035.532,81	(103.783.480.907,81)

Realisasi Transfer Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah sebesar Rp353.910.554.625,00 atau 99,58% dari nilai anggaran sebesar Rp355.409.255.248,58. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp457.694.035.532,81 mengalami penurunan sebesar Rp103.783.480.907,81 atau 22,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Transfer

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00	(2.090.109.606,00)
Transfer Bantuan Keuangan	348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81	(101.693.371.301,81)
Jumlah	355.409.255.248,58	353.910.554.625,00	99,58	457.694.035.532,81	(103.783.480.907,81)

A. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00	(2.090.109.606,00)

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.678.949.377,00 atau 79,12% dari anggaran sebesar Rp7.177.650.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.090.109.606,00 atau 26,90% dibandingkan realisasi TA 2019 yang berjumlah Rp7.769.058.983,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	6.050.000.000,00	4.915.347.049,00	81,25	6.654.649.412,00	(1.739.302.363,00)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.127.650.000,00	763.602.328,00	67,72	1.114.409.571,00	(350.807.243,00)
Jumlah	7.177.650.000,00	5.678.949.377,00	79,12	7.769.058.983,00	(2.090.109.606,00)

Transfer Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

B. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81	(101.693.371.301,81)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan selama selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp348.231.605.248,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp348.231.605.248,58 mengalami penurunan sebesar Rp101.693.371.301,81 atau 22,60% dibandingkan realisasi TA 2019 yang berjumlah Rp449.924.976.549,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-a
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu	203.271.413.648,58	203.271.413.648,00	100,00	283.368.291.049,81	(80.096.877.401,81)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN Se-Kabupaten Bengkulu	131.360.191.600,00	131.360.191.600,00	100,00	134.130.368.000,00	(2.770.176.400,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se-Kabupaten Bengkulu	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	100,00	28.700.000.000,00	(15.100.000.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan PPKades Se-Kabupaten Bengkulu	0,00	0,00	0,00	2.218.190.000,00	(2.218.190.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	0,00	0,00	0,00	1.508.127.500,00	(1.508.127.500,00)
Jumlah	348.231.605.248,58	348.231.605.248,00	100,00	449.924.976.549,81	(101.693.371.301,81)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu terealisasi sebesar Rp203.271.413.648,0 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu nomor 43 tahun 2020 tentang Pengalokasian Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Dan Desa Adat dari APBN Se-Kabupaten Bengkulu terealisasi sebesar Rp131.360.191.600,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 44 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID / Bantuan Khusus Se-Kabupaten Bengkulu terealisasi sebesar Rp13.600.000.000 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 343/KPTS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Percepatan Pembangunan Penyediaan Infrastruktur Desa Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Adanya kekurangan penyetoran sisa Dana Desa sebesar Rp. 344.286.654,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ke Kas Umum Negara. Berdasarkan pencatatan pada aplikasi OMSPAN dari hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Hasil rekonsiliasi terhadap 136 Desa se Kabupaten Bengkulu, terdapat 55 Desa yang seharusnya menyetorkan sisa Dana Desa ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Bengkulu sebesar Rp. 796.238.964,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Selanjutnya sesuai rekapitulasi bukti setor desa ke RKUD Kab. Bengkulu, diketahui hanya 53 desa yang telah melakukan penyetoran dengan jumlah total Rp. 451.952.310 (Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Terhadap 2 (dua) desa lainnya sejumlah Rp. 344.286.654,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) tidak dapat dilakukan penyetoran dikarenakan hal-hal berikut:

- Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu senilai Rp. 199.817.433,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak dapat disetor ke RKUD Kab. Bengkulu, karena berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Nomor: 29/ITKAB-RHS/XI/2020 terkait sisa Dana Desa (DD) pada Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Desa Jangkang Kecamatan Bantan senilai Rp. 144.469.221,- (Seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tidak dapat disetor ke RKUD Kab. Bengkulu dikarenakan berdasarkan LHP Nomor 22/ITKAB-RHS/IX/2018 tanggal 26 September 2018, adapun Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap APBDes T.A 2016 dan saat ini masih dalam proses penegakan hukum.

5.1.4. Surplus (Defisit)

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
(222.090.595.626,37)	(71.079.021.819,82)	32,00	18.589.510.186,91	(87.668.532.006,73)

Jumlah Surplus (Defisit) sebesar Rp71.079.021.819,82 tersebut merupakan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk tahun Anggaran 2020 dimana jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan lebih kecil dari jumlah belanja daerah dan transfer. Total realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.917.393.229.734,02 sementara total realisasi belanja daerah dan transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.988.472.251.553,84.

5.1.5. Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.065.436,46	6.589.510.186,91

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama TA. 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu atau akhir tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.77 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penggunaan SILPA tahun lalu	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	6.589.510.186,91
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	6.589.510.186,91

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan selama per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 5.78 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)

5.1.6. SILPA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	151.011.573.806,55	0,00	222.090.595.626,37	(71.079.021.819,82)

Jumlah SiLPA sebesar Rp151.011.573.806,55 tersebut merupakan selisih lebih anggaran untuk tahun Anggaran 2020 dimana jumlah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Total realisasi penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.139.483.825.360,39 sementara total realisasi pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.988.472.251.553,84.

Tabel 5.79 SILPA

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Daerah	2.937.425.679.887,83	222.090.595.626,37	7,56	3.774.437.763.944,69	(3.552.347.168.318,32)
Belanja dan Transfer Daerah	3.169.616.276.514,20	2.988.472.251.553,84	94,59	3.757.848.253.757,78	(769.376.002.203,94)
Surplus/ (Defisit): 1-2	(222.090.595.626,37)	(2.766.381.655.927)	1.245,61	16.589.510.186,91	(2.782.971.166.114,38)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	215.501.085.439,46	6.589.510.186,91
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto : 4-5	222.090.595.626,37	222.090.595.626,37	100,00	205.501.085.439,46	16.589.510.186,91
SILPA (SIKPA) 3+6	(0,00)	(2.544.291.060.301,10)	0,00	(222.090.595.626,37)	(2.766.381.655.927,47)

Jumlah SiLPA selama TA. 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp71.079.021.819,82 atau 32,00% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp222.090.595.626,37 dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.80 Rincian SILPA

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi 2019	%
Kas di BUD	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	143,66
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.876.550.420,00	0,00	0,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.986.433,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.900.000,00	0,00
Kas di Bendahara JKN	1.624.173.188,00	1.271.486.892,00	78,28
Kas di Bendahara BLUD	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	299,73
Kas di Bendahara BOS	139.307.364,00	4.860.382.090,00	3.488,96
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	68,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37, mengalami kenaikan sebesar Rp6.589.510.186,91 atau 3,06% jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp215.501.085.439,46.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2020, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp222.090.595.626,37, mengalami kenaikan sebesar Rp6.589.510.186,91 atau 3,06% jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp215.501.085.439,46.

5.2.3. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA selama TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 mengalami penurunan sebesar Rp71.079.021.819,82 atau 32,00 % jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp222.090.595.626,37.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Untuk Tahun 2020 tidak terdapat koreksi.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih selama TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55 terdiri dari :

Saldo Anggaran Lebih TA 2020 sebesar Rp151.011.573.806,55.

Tabel 5. 81 Rincian Saldo Anggaran Lebih

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Tren
	Rp	Rp	%
Kas di BUD	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	(30,39)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.976.550.420,00	0,00	0,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.986.433,00	(100,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.900.000,00	(100,00)
Kas di Bendahara JKN	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00	27,74
Kas di Bendahara BLUD	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(66,64)
Kas di Bendahara BOS	139.307.384,00	4.660.382.090,00	(97,13)
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	-32,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp222.090.595.626,37.
Penerimaan SAL TA 2020 terdiri dari :

Tabel 5. 82 Rincian Penerimaan SAL

	Tahun 2020	Tahun 2019	Tren
Pendapatan Asli Daerah	251.925.869.915,53	226.245.884.732,22	11,35
Pendapatan Transfer	2.573.597.479.818,49	3.463.146.359.212,47	(25,69)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	91.869.880.000,00	85.045.520.000,00	8,02
Jumlah	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69	(22,71)
Belanja Operasi	1.981.293.374.799,00	2.191.978.637.329,98	(9,61)
Belanja Modal	500.329.662.962,84	1.108.175.580.894,99	(54,85)
Belanja Tidak Terduga	152.938.659.147,00	0,00	0,00
Transfer	353.910.554.625,00	457.694.035.532,81	(22,68)
Jumlah	2.988.472.251.553,84	3.757.848.253.757,78	(20,47)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
Jumlah	222.090.595.626,37	205.501.085.439,46	8,07

Tabel 5. 83 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2020	Tahun 2019	Tren
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pendapatan	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69	(22,71)
Belanja dan Transfer	2.988.472.251.553,84	3.757.848.253.757,78	(20,47)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
Jumlah	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	(32,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2020 berasal dari:

Tabel 5. 84 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

	Tahun 2020	Tahun 2019	Tren
Realisasi Pendapatan	2.917.393.229.734,02	3.774.437.763.944,69	(22,71)
Realisasi Belanja dan Transfer	2.988.472.251.553,84	3.757.848.253.757,78	(20,47)
Penerimaan Pembiayaan	222.090.595.626,37	215.501.085.439,46	3,06
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.000.000.000,00	(100,00)
SILPA	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37	(32,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 3. PENJELASAN POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

5. 3. 1. Aset

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
	9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20	(612.395.155.026,43)

Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.298.185.596.626,77 dan Rp9.910.580.751.653,20 terdiri dari:

Tabel 5. 85 Rincian Aset Kabupaten Bengkulu

	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Aset Lancar	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47	(354.761.016.239,33)
Investasi Jangka Panjang	518.962.048.762,00	519.711.981.948,00	(749.933.186,00)
Aset Tetap	7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85	(356.887.664.552,79)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88	100.003.458.951,69
	9.298.185.596.626,77	9.910.580.751.653,20	(612.395.155.026,43)

A. Aset Lancar

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47	(354.761.016.239,33)

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp684.450.486.246,14 dan Rp1.039.211.502.485,47 terdiri dari:

Tabel 5. 86 Rincian Aset Lancar

	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Kas di Kas Daerah	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	(63.153.009.866,82)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.767.355,00	(6.767.355,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)
Kas di Bendahara JKN	1.624.173.186,00	1.271.465.892,00	352.707.294,00
Kas di BLUD	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(5.424.308.510,00)
Kas di Bendahara BOS	139.307.364,00	4.860.382.090,00	(4.721.074.726,00)
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00
Piutang Retribusi Daerah	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.682.331.914,00	11.214.397.462,00	(8.532.065.548,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)
Piutang Lainnya	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00
Penyisihan Piutang	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)
Beban Dibayar Dimuka	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67
Persediaan	61.779.121.203,23	260.803.124.727,78	(199.024.003.524,55)
	684.450.486.246,14	1.039.211.502.485,47	(354.761.016.239,33)

1. Kas di Kas Daerah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
144.655.673.806,01	207.808.683.672,83	(63.153.009.866,82)

Akun ini merupakan kas sebesar Rp144.655.673.806,01 yang berada di Kas Daerah Per 31 Desember 2020 dan Rp207.808.683.672,83 di Kas Daerah Per 31 Desember 2019. Nilai kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Kas di Kas Daerah

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Des 2020	31 Des 2019
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-00180	144.649.973.806,01	207.808.683.672,83
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-03-00022	0,00	0,00
Deposito Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-96000	0,00	0,00
Koreksi Kurang Kesalahan Pencatatan		5.700.000,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		144.655.673.806,01	207.808.683.672,83

Terjadinya perbedaan Saldo Rekening Koran Bank Riau dengan Saldo Pembukuan karena adanya:

1. Double Pencairan SP2D atas Nomor 06977/SP2D-LS yaitu BOP KB Amanah Bunda Siak Kecil	5.700.000,00
Jumlah	5.700.000,00

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 88 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	207.808.683.672,83
Pendapatan	2.577.356.225.962,02	0,00	2.785.164.909.634,85
Setoran Jasa Giro 2019	82.164.648,00	0,00	2.785.247.074.282,85



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Setoran UYHD 2020	25.661.716.880,00	0,00	2.810.908.791.162,85
Penempatan Deposito	0,00	825.000.000.000,00	1.985.908.791.162,85
Pencairan Deposito	825.000.000.000,00	0,00	2.810.908.791.162,85
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	5.900.000,00	0,00	2.810.914.691.162,85
Belanja (SP2D)		2.666.259.017.356,84	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Sosial Pemerintah Provinsi Riau Tahap I TA.2020	2.171.700.000,00	2.171.700.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Kelurahan se-Kab. Bengkalis TA. 2020	10.345.000,00	10.345.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Tidak Terduga dari Prov. Riau TA. 2020	583.500.000,00	583.500.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Kecamatan dan Kelurahan Pemprov Riau TA. 2020	42.128.600,00	42.128.600,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Kesalahan Setor BPHTB TA. 2020 an. Yanti	37.493.600,00	37.493.600,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Kesalahan Setor BPHTB TA. 2020 an. Hengky Wanto Gurning	3.500.000,00	3.500.000,00	144.655.673.806,01
Pengembalian Dana Desa ke Kas Negara (kode Akun 425919)	451.952.314,00	451.952.314,00	144.655.673.806,01
Double SP2D-LS/06977 BOP KB Amanah Bunda Siak Kecil	0,00	5.700.000,00	144.649.973.806,01
	3.431.406.627.004,02	3.494.565.336.870,84	

Saldo kas pada Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.655.673.806,01.

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 89 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri (PFK) Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PFK	130.055.634.127,00	0,00	130.055.634.127,00
Pengeluaran PFK	0,00	130.055.634.127,00	0,00
	130.055.634.127,00	130.055.634.127,00	

Untuk melihat rincian Kas di Kasda dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Kasda



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00

Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00
Jumlah	1.876.550.420,00	0,00	1.876.550.420,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp1.876.550.420,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

Untuk melihat rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	6.767.355,00	(6.767.355,00)

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 terdiri dari Jasa Giro di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah serta utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	2.010.778,00	(2.010.778,00)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	8.686,00	(8.686,00)
Dinas Sosial	0,00	538,00	(538,00)
Kantor Camat Rupal	0,00	5.142,00	(5.142,00)
Kantor Camat Rupal Utara	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)
Kantor Camat Pinggir	0,00	13.830,00	(13.830,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.376,00	(9.376,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	1.938.083,00	(1.938.083,00)
Jumlah	0,00	6.767.355,00	(6.767.355,00)

4. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)

Akun ini merupakan saldo kas yang ada dalam pengelolaan bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

5. Kas di Bendahara JKN

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00	352.707.296,00

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Kas di Bendahara JKN merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di rekening maupun tangan Bendahara Penerimaan JKN pada FKTP-UPT Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 93 Rincian Kas di Bendahara JKN

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
UPT Puskesmas Bengkalis	367.325.940,00	189.552.547,00	177.773.393,00
UPT Puskesmas Pematang Duku	73.480,00	0,00	73.480,00
UPT Puskesmas Selat Baru	221.943.075,00	221.920.773,00	22.302,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

UPT Puskesmas Teluk Pambang	87.954.153,00	0,00	87.954.153,00
UPT Puskesmas Sungai Pakning	127.546.800,00	122.184.480,00	5.362.320,00
UPT Puskesmas Lubuk Muda	171.510,00	49.676,00	121.834,00
UPT Puskesmas Sadar Jaya	4.853.651,00	291.728,00	4.561.923,00
UPT Puskesmas Batu Panjang	144.310.892,00	144.310.892,00	0,00
UPT Puskesmas Teluk Lecah	195.627.200,00	195.255.800,00	371.400,00
UPT Puskesmas Tanjung Medang	25.607.820,00	25.607.820,00	0,00
UPT Puskesmas Duri Kota	199.764.918,00	180.624.661,00	19.140.257,00
UPT Puskesmas Balai Makam	79.871.418,00	50.326.569,00	29.544.849,00
UPT Puskesmas Sebangar	53.457.476,00	53.457.476,00	0,00
UPT Puskesmas Sebanga	46.194.970,00	46.194.970,00	0,00
UPT Puskesmas Muara Basung	36.025.325,00	30.688.500,00	5.336.825,00
UPT Puskesmas Serai Wangi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
UPT Puskesmas Tenggayun	22.444.560,00	0,00	22.444.560,00
UPT Puskesmas Pematang Pudu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00	352.707.296,00

6. Kas di BLUD

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(5.424.308.510,00)

Kas di BLUD merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BLUD pada Rumah sakit Umum Daerah Bengkulu dan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkulu.

Tabel 5. 94 Rincian Kas di BLUD per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
RSUD Bengkulu	186.037.729,10	7.665.960.237,10	(7.479.922.508,00)
RSUD Kecamatan Mandau	2.529.831.299,44	474.217.301,44	2.055.613.998,00
Jumlah	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54	(5.424.308.510,00)

OPD	Kas Di Bank	Kas Tunai	Jumlah
RSUD Bengkulu	178.257.554,10	7.780.175,00	186.037.729,10
RSUD Kecamatan Mandau	2.529.831.299,44	0,00	2.529.831.299,44
Jumlah	2.708.088.853,54	7.780.175,00	2.715.869.028,54



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas BLUD di RSUD Bengkalis

Tabel 5. 95 Mutasi Kas BLUD di RSUD Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	7.665.960.237,10
Pendapatan BLUD	50.424.925.340,00	0,00	58.090.885.577,10
Belanja BLUD	0,00	57.904.847.848,00	186.037.729,10
Jumlah	50.424.925.340,00	57.904.847.848,00	

Adapun Kas di Bendahara BLUD RSUD Bengkalis terdapat pada :

Tabel 5. 96 Rincian Kas BLUD di RSUD Bengkalis

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	7.780.175,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00086	1.440.757,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis	108-02-00087	1.190,00
4	Bank BRI Cabang Bengkalis	56001000864301	176.815.607,10
	Jumlah		186.037.729,10

Kas BLUD di RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5. 97 Mutasi Kas BLUD di RSUD Kecamatan Mandau

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	474.217.301,44
Pendapatan BLUD	53.935.965.714,00	0,00	54.410.183.015,44
Belanja BLUD	0,00	51.880.351.716,00	2.529.831.299,44
Jumlah	53.935.965.714,00	51.880.351.716,00	

Adapun Kas di Bendahara BLUD RSUD Kecamatan Mandau terdapat pada:

Tabel 5. 98 Rincian Kas BLUD di RSUD Kecamatan Mandau

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	0,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00006	27.693.342,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00034	679.348.698,59
4	Bank BRI Cabang Duri Kota	56001000834306	1.822.789.258,85
	Jumlah		2.529.831.299,44

7. Kas di Bendahara Dana BOS

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
139.307.364,00	4.860.382.090,00	(4.721.074.726,00)

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bengkalis.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 99 Rincian Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Dana BOS Reguler / 391 Sekolah	135.112.897,00	129.344.409,00	5.768.488,00
Dana BOS Afimasi / 76 Sekolah	916.086,00	4.089.465.863,00	(4.088.549.777,00)
Dana BOS Kinerja / 46 Sekolah	237.660,00	560.567.500,00	(560.329.840,00)
Jumlah	136.266.643,00	4.779.377.772,00	(4.643.111.129,00)

Tabel 5. 100 Rincian Kas di Bendahara BOS (Jasa Giro)

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Jasa Giro	3.040.721,00	81.004.318,00	(77.963.597,00)
Jumlah	3.040.721,00	81.004.318,00	(77.963.597,00)

8. Piutang

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
	471.659.791.236,36	556.315.001.209,32	(84.655.209.972,96)

Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp471.659.791.236,36 dan Rp556.315.001.209,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Rincian Piutang

Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Piutang Pajak Daerah	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00
Piutang Retribusi Daerah	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.682.331.914,00	11.214.397.462,00	(8.532.065.548,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)
Piutang Lainnya	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00
Penyisihan Piutang	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)
Beban Dibayar Dimuka	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67
	471.659.791.236,36	556.315.001.209,32	(84.655.209.972,96)

a) Piutang Pajak Daerah

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
	82.404.274.028,73	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00

Akun piutang pajak merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 102 Mutasi Piutang Pajak

Jenis Piutang	Saldo Awal 01 Jan 2020	Mutasi 2020	Saldo Akhir 2020
Pajak Hiburan	2.300.060,00	(1.154.300,00)	1.145.760,00
Pajak Hotel	1.256.764.312,56	(20.410.866,00)	1.236.353.444,56
Pajak Restoran	458.420.288,00	13.773.050,00	472.193.338,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	381.662.275,24	300.866.616,00	682.528.891,24
Pajak Sarang Burung Walet	84.025.000,00	940.000,00	84.965.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	40.801.935,60	11.343.877,00	52.145.812,60
Pajak PBB P2	71.444.029.225,00	8.362.817.474,00	79.806.846.699,00
Pajak Reklame	72.657.583,33	(4.562.500,00)	68.095.083,33
Jumlah	73.740.660.679,73	8.663.613.349,00	82.404.274.028,73

b) Piutang Retribusi Daerah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiaku/(Penurunan)
5.631.891.589,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00

Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen penetapan retribusi lainnya. Adapun rincian piutang retribusi daerah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Mutasi Piutang Retribusi

Jenis Piutang	Saldo Awal 01 Jan 2020	Mutasi 2020	Saldo Akhir 2020
Retribusi Izin Gangguan / HO Golongan	3.002.227.945,50	0,00	3.002.227.945,50
Retribusi tempat pesangrahan/vila	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	732.725.500,00	219.500.000,00	952.225.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Retribusi Limbah Cair	3.517.300,00	0,00	3.517.300,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	784.232.306,00	(19.680.560,00)	764.551.746,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	131.600.000,00	(15.500.000,00)	116.100.000,00
Jasa umum Pasien 2011	12.706.150,00	0,00	12.706.150,00
Ambulance	0,00	0,00	0,00
Jamkesmas	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BPJS Kesehatan	280.259.100,00	0,00	280.259.100,00
BPJS Ketenagakerjaan	2.803.828,00	0,00	2.803.828,00
Jumlah	5.440.072.129,50	191.819.440,00	5.631.891.569,50

Untuk Piutang Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusinya adalah sebagai berikut :

Retribusi HO Golongan

Tabel 5. 104 Rincian Piutang Retribusi HO Golongan

- Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	426.426.125,00
Jumlah	3.002.227.945,50

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Tabel 5. 105 Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	952.225.500,00
Jumlah	952.225.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 5. 106 Rincian Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.500.000,00
Jumlah	7.500.000,00

Retribusi Limbah Cair

Tabel 5. 107 Rincian Piutang Retribusi Limbah Cair

- Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00
Jumlah	3.517.300,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 5. 108 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Dinas Perhubungan	490.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
Jumlah	490.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tabel 5. 109 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

- Dinas Perhubungan	764.551.746,00
Jumlah	764.551.746,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tabel 5. 110 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- Dinas Perhubungan	116.100.000,00
Jumlah	116.100.000,00

Jasa umum Pasien 2011

Tabel 5. 111 Rincian Piutang Retribusi Jasa umum Pasien 2011

- RSUD Bengkulu	12.706.150,00
Jumlah	12.706.150,00

BPJS Kesehatan

Tabel 5. 112 Rincian Piutang Retribusi BPJS Kesehatan

- RSUD Kecamatan Mandau	280.259.100,00
Jumlah	280.259.100,00

BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 5. 113 Rincian Piutang Retribusi BPJS Ketenagakerjaan

- RSUD Kecamatan Mandau	2.803.828,00
Jumlah	2.803.828,00

Jenis Piutang Retribusi Berdasarkan OPD terdiri dari :

Tabel 5. 114 Rincian Piutang Retribusi per OPD

Piutang Retribusi	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkulu	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	283.062.928,00	283.062.928,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00	3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.370.651.746,00	1.405.832.306,00	(35.180.560,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	959.725.500,00	732.725.500,00	227.000.000,00
Jumlah	5.631.891.569,50	5.440.072.129,50	191.819.440,00

Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan Surat Ketetapan besarnya retribusi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 oleh pelanggan kepada pengelola pendapatan retribusi.

Untuk rincian Piutang retribusi per OPD dapat dilihat pada:

Lampiran Piutang Retribusi



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	2.662.331.914,00	11.214.397.462,00	(8.532.065.548,00)

Akun piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang BLUD yang merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang terdapat pada RSUD Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau. Adapun rincian piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

RSUD Bengkulu

Tabel 5. 115 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkulu

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
BPJS	2.220.347.000,00	4.735.097.000,00	(2.514.750.000,00)
Ambulance BPJS	70.376.000,00	70.376.000,00	0,00
Ambulance Jamkesda	0,00	0,00	0,00
Jamkesda Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Jamkesda Meranti	256.709.791,00	175.803.741,00	80.906.050,00
Jampersal 2019	0,00	0,00	0,00
Jampersal 2018	0,00	0,00	0,00
Obat RI (Jamkesda)	0,00	0,00	0,00
Obat RJ (Jamkesda)	0,00	0,00	0,00
Kantin	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.547.432.791,00	4.981.276.741,00	(2.433.843.950,00)

RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5. 116 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Jamkesda Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Jamkesda Siak	64.255.429,00	44.600.188,00	19.655.241,00
Jampersal Siak	70.643.694,00	42.049.400,00	28.594.294,00
Jampersal Rohil	0,00	0,00	0,00
Jampersal Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Inhealth	0,00	2.662.300,00	(2.662.300,00)
BPJS	0,00	6.143.628.233,00	(6.143.628.233,00)
Jasa Raharja 2019	0,00	180.600,00	(180.600,00)
Jumlah	134.899.123,00	6.233.120.721,00	(6.098.221.598,00)

d) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Akun piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan selisih antara surat ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan dana yang telah disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp428.603.107.748,00 dan Rp499.145.967.339,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	420.221.813.497,00	326.700.525.146,00	93.521.288.351,00
DBH Pajak Penghasilan	51.920.311,00	12.109.197.945,00	(12.057.277.634,00)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	420.169.893.186,00	314.591.327.201,00	105.578.565.985,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	8.381.294.251,00	172.445.442.193,00	(164.064.147.942,00)
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	166.072.426.367,00	(166.072.426.367,00)
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	698.814.018,00	935.589.809,00	(236.775.791,00)
DBH SDA Kehutanan	7.453.180.083,00	5.263.120.825,00	2.190.059.258,00
DBH SDA Perikanan	229.300.150,00	174.305.192,00	54.994.958,00
Jumlah	428.603.107.748,00	499.145.967.339,00	(70.542.859.591,00)

Tabel 5. 118 Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	499.145.967.339,00
DBH Pajak Penghasilan	51.920.311,00	12.109.197.945,00	487.088.689.705,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	267.056.107.925,00	161.477.541.940,00	592.667.255.690,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	166.072.426.367,00	426.594.829.323,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	408.035.850,00	644.811.641,00	426.358.053.532,00
DBH SDA Kehutanan	5.864.492.227,00	3.674.432.969,00	428.548.112.790,00
DBH SDA Perikanan	58.672.247,00	3.677.289,00	428.603.107.748,00
Jumlah	273.439.228.560,00	343.982.088.151,00	

Piutang DBH Pusat berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 mengalami perubahan. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 menetapkan bahwa PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 di cabut dan tidak berlaku lagi.

e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi disajikan berdasarkan saldo bagi hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar dan Rp5.965.064.148,51 dan Rp15.370.693.767,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

Jenis Piutang	Saldo 2020	Saldo 2019	kenaikan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.100.125.752,51	3.482.237.894,00	617.887.858,51
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	0,00	1.731.270.158,00	(1.731.270.158,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.751.770.845,00	3.352.320.218,00	(1.600.549.373,00)
Pajak Air Permukaan (Pajak AP)	22.405.019,00	75.899.270,00	(53.494.251,00)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	6.638.203.695,00	(6.638.203.695,00)
Pendapatan Lainnya	86.712.532,00	86.712.532,00	0,00
Jumlah	5.965.064.148,51	15.370.693.767,00	(9.405.629.618,49)

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.965.064.148,51 berdasarkan rincian piutang dari Dinas Pendapatan Daerah. Terdapat pelunasan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.279.931.235,00 dan penambahan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.874.301.616,51.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, Pasal 26 dengan pembagian 70% Provinsi Riau dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Pendapatan Lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan, Pendapatan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis No 13/PK/III/2011 dan No 03/PJJ-HK/IV/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan pembagian Provinsi Riau 60% dan Kabupaten/Kota 40%.

f) Piutang Lainnya

31 Des 2020	31 Des 2019	kenaikan/(Penurunan)
11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00

Akun piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 mempunyai saldo sebesar Rp11.493.903.651,24 dan Rp11.493.903.651,24 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 120 Rincian Piutang Lainnya

Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiatan/(Penurunan)
Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD	182.064.000,00	182.064.000,00	0,00
Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD	1.375.373.000,00	1.375.373.000,00	0,00
Piutang dari PT BLJ atas Bagi Hasil Penyediaan Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang	490.180.223,00	490.180.223,00	0,00
Piutang pada PT Tengganau Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Piutang pada Pihak Ketiga	7.446.286.428,24	7.446.286.428,24	0,00
Jumlah	11.493.903.651,24	11.493.903.651,24	0,00

Akun Piutang Lain-lain merupakan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.493.903.651,24 terdiri atas :

Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

Saldo awal piutang penunjang operasi pimpinan DPRD sebesar Rp265.608.000,00 pada Tahun Anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2010 sebesar Rp21.000.000,00, TA 2011 sebesar Rp62.544.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2013 sebesar Rp182.064.000,00.

Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD

Saldo awal sebesar Rp2.191.626.000,00 pada tahun anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2009 sebesar Rp576.168.000,00, TA 2011 sebesar Rp30.500.000,00, TA 2012 sebesar Rp109.295.000,00, TA 2013 sebesar Rp72.095.000,00, TA 2014 sebesar Rp28.195.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.375.373.000,00.

Kewajiban Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. Terhadap saldo tersebut telah sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Piutang lain-lain khususnya pengembalian dana belanja operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis TA 2013 antara sub Bagian Keuangan pada Bagian umum sekretariat DPRD dengan sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Desember 2014.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Bagi Hasil dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) atas keuntungan pengelolaan Jual Beli Listrik dan Pengelolaan PKS dengan Rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2008, PT. BLJ berdasarkan perjanjian Kerjasama Nomor 07/PJJ-HK/VII/2007 dan atau nomor 002/PPJ-BLJ/LIST/IV/2008 tanggal 2 Januari 2008 antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) tentang Bagi Hasil Pembelian/ Penyediaan (Jual Beli Daya) Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menerima pendapatan Bersih sebesar 70% dari hasil penjualan daya listrik yang diterima oleh PT. BLJ dan harus dibayarkan oleh PT. BLJ paling lambat tanggal 20 setiap bulannya melalui penyetoran langsung ke Kas Daerah. Saldo awal piutang bagi hasil kepada BUMD sebesar Rp1.601.755.223,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.111.575.000,00 sehingga saldo piutang bagi hasil Per 31 Desember 2012 sebesar Rp490.180.223,00 sesuai berita acara rekonsiliasi realisasi pembayaran piutang lain-lain pada PT. Bumi Laksamana Jaya TA 2012 tanggal 10 Jan 2012 antara PT. Bumi Laksamana Jaya dengan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kab. Bengkalis.

Piutang pada PT Tengganau Mandiri

Piutang Kabupaten Bengkalis pada Koperasi Tengganau Mandiri tercatat sebesar Rp2.000.000.000,00. Piutang tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 29 agustus 2005 sesuai perjanjian kerjasama.

Nomor : 573 /EK /93

Nomor : 21 / KOP-TM / VIII / 2005

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125K/Pid.sus/2014 Tanggal 17 September 2014 JO putusan pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tinggi Riau nomor 05TIPIKOR/2014/PTR Tanggal 6 Mei 2014 jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 42/Pid.sus/TIPIKOR/2013/PN.pbr tanggal 4 Februari 2014, bahwa atas aset-aset pada PMKS Tengganau mandiri tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Piutang Pada Pihak Ketiga

Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan atau kontraktor) atas pelaksanaan kegiatan TA 2009 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp7.446.286.428,24. Kelebihan ini timbul akibat adanya perbedaan penetapan hutang yang lebih rendah berdasarkan LHP BPK RI No.52/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dengan SK Bupati Bengkalis No. 171/KPTS/V/2010 tanggal 03 Mei 2010.

9. Penyisihan Piutang

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.186.183.514,62 sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Rincian Penyisihan Piutang per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkalis	(394.144.540,00)	(115.819.595,00)	(278.324.945,00)
RSUD Kecamatan Mandau	(369.953.763,68)	(1.663.848.107,74)	1.293.894.344,06
PPKD	(4.047.617.223,00)	(4.047.617.223,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(50.372.571.608,60)	(44.568.467.933,75)	(5.804.103.674,85)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(426.426.125,00)	(426.426.125,00)	0,00
Dinas Perhubungan	(1.348.125.735,10)	(1.272.387.139,75)	(75.738.595,35)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.446.286.428,24)	(7.446.286.428,24)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(3.517.300,00)	(3.517.300,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(789.330.000,00)	(601.074.000,00)	(188.256.000,00)
Jumlah	(65.197.972.723,62)	(60.145.443.852,48)	(5.052.528.871,14)

Tabel 5. 122 Rincian Jenis Penyisihan Piutang per OPD

	Penyisihan Piutang			
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
RSUD Bengkalis				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				12.706.150,00
	0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah				70.376.000,00
	135.220,00	228.519.820,00	82.407.350,00	
Total				394.144.540,00
RSUD Kec. Mandau				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan				283.062.928,00
	0,00	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah				86.649.588,00
	241.247,68	0,00	0,00	
Total				369.953.763,68
PPKD				
Piutang Lainnya				4.047.617.223,00
	0,00	0,00	0,00	
Total				4.047.617.223,00
Badan Pendapatan Daerah				
Piutang Pajak				37.489.894.071,00
	46.871.046,76	1.877.520.158,38	8.382.484.511,96	
Piutang Retribusi HO Golongan				2.575.801.820,50
	0,00	0,00	0,00	
Total				50.372.571.608,60



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Piutang Retribusi HO Golongan				
	0,00	0,00	0,00	426.426.125,00
Total				426.426.125,00
Dinas Perhubungan				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan				
	56.477,10	486.158,00	11.271.646,00	743.211.454,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	0,00	0,00	0,00	103.100.000,00
Total				1.348.125.735,10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Piutang Lainnya				
	0,00	0,00	0,00	7.446.286.428,24
Total				7.446.286.428,24
Dinas Lingkungan Hidup				
Retribusi Limbah Cair				
	0,00	0,00	0,00	3.517.300,00
Total				3.517.300,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
	141.250,00	8.335.000,00	60.725.000,00	719.175.500,00
Retribusi Jasa Pelayanan Pasar				
	8.250,00	495.000,00	450.000,00	0,00
Total				789.330.000,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG				65.197.972.723,62

10. Beban Dibayar Dimuka

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja tahun 2020 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Akun Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020 mempunyai saldo sebesar Rp77.190.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 123 Rincian Beban Dibayar Dimuka per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	48.315.900,00	13.316.700,00	34.999.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran	28.875.000,00	41.433.333,33	(12.558.333,33)
Jumlah	77.190.900,00	54.750.033,33	22.440.866,67

Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan pembayaran belanja barang/jasa terhadap Sewa Tempat Server LPSE terhitung mulai bulan Maret 2020, serta Sewa Ruko/Gudang Bagian Umum terhitung mulai bulan Mei 2020. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 124 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
Tempat Server LPSE (Masa Pembayaran Bulan Maret)	79.900.700,00	66.584.000,00	13.316.700,00
Ruko/Gudang Bagian Umum (Masa Pembayaran Bulan Mei)	105.000.000,00	70.000.800,00	34.999.200,00
Jumlah	184.900.700,00	136.584.800,00	48.315.900,00

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja sewa terhadap pemakaian gedung untuk UPT pada satu kecamatan, yaitu kecamatan Mandau terhitung mulai bulan Desember 2020. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 125 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
UPT Kecamatan Mandau (Masa Pembayaran Bulan Desember)	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00
Jumlah	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00

11. Persediaan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
61.779.121.203,23	260.803.124.727,78	(199.024.003.524,55)

Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp61.779.121.203,23 terdiri dari persediaan obat sebesar Rp22.881.348.638,42 dan persediaan non obat sebesar Rp38.897.772.564,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Rincian Persediaan

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Persediaan Obat	22.881.348.638,42	21.397.206.752,33	1.484.141.886,09
Persediaan Alat Kesehatan	13.536.278.688,47	6.127.122.431,08	7.409.156.257,39
Persediaan ATK	440.528.448,83	1.285.893.857,01	(825.365.408,18)
Persediaan Barang Cetak	963.631.750,97	599.079.422,00	364.552.328,97
Persediaan Alat Kebersihan	835.006.967,89	318.386.033,76	516.620.934,13
Persediaan Perlengkapan Listrik	194.488.909,20	236.900.647,89	(42.411.738,69)
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.133.600,00	2.409.000,00	7.724.600,00
Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih	118.494.845,00	101.528.614,00	16.966.231,00
Persediaan Suku Cadang	109.926.468,00	130.352.098,00	(20.425.630,00)
Persediaan Bahan Bakar	400.000,00	5.987.000,00	(5.587.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Persediaan Bahan Kimia	2.137.567.272,03	2.361.001.928,38	(223.434.656,35)
Persediaan Hibah pada Pihak Ketiga/ Masyarakat	20.179.501.814,42	228.096.303.143,33	(207.916.801.328,91)
Persediaan Makanan Pokok	371.813.800,00	160.953.800,00	210.860.000,00
Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	61.779.121.203,23	260.803.124.727,78	(199.024.003.524,55)

a) Persediaan Obat

Nilai persediaan obat per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.881.348.638,42 berada pada OPD:

Tabel 5. 127 Rincian Persediaan Obat per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	8.673.210.872,57	6.017.995.833,00	2.655.215.039,57
Dinas Perikanan	0,00	26.159.675,00	(26.159.675,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.321.326,00	94.381.559,00	(17.060.233,00)
RSUD Bengkalis	9.258.301.958,00	11.104.944.408,89	(1.846.642.450,89)
RSUD Kecamatan Mendau	4.872.514.481,85	4.153.725.276,44	718.789.205,41
Jumlah	22.881.348.638,42	21.397.206.752,33	1.484.141.886,09

b) Persediaan ATK

Nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp440.528.448,83 berada pada OPD:

Tabel 5. 128 Rincian Persediaan ATK per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	2.866.600,03	5.511.472,77	(2.644.872,74)
Sekretariat DPRD	4.820.100,00	6.073.100,00	(1.253.000,00)
Dinas Kesehatan	0,00	2.816.200,00	(2.816.200,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	161.600.100,00	1.048.102.100,00	(886.502.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Keersipan	770.000,00	1.023.400,00	(253.400,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	674.200,00	946.700,00	(272.500,00)
Badan Pendapatan Daerah	3.670.400,00	1.646.760,00	2.023.640,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.839.900,00	1.889.042,00	(49.142,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.123.600,00	2.391.400,00	(1.267.800,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.190.000,00	802.600,00	387.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.661.700,00	3.942.700,00	719.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.807.000,00	2.402.800,00	4.404.200,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	397.000,00	702.700,00	(305.700,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penelitian dan Pengembangan	5.313.500,00	4.620.000,00	693.500,00
Dinas Pendidikan	2.735.400,00	381.500,00	2.353.900,00
Dinas Perikanan	2.901.200,00	3.490.000,00	(588.800,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	578.060,00	588.100,00	(10.040,00)
Inspektorat	854.000,00	662.400,00	191.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.383.700,00	2.694.300,00	(1.310.600,00)
Dinas Sosial	650.000,00	896.000,00	(246.000,00)
RSUD Bengkulu	1.017.700,00	803.790,00	213.910,00
RSUD Kecamatan Mandau	173.827.898,80	111.243.588,24	62.584.310,56
Kantor Camat Mandau	937.200,00	812.500,00	124.700,00
Kantor Camat Rupat	516.600,00	538.800,00	(22.200,00)
Kantor Camat Rupat Utara	4.476.300,00	8.367.850,00	(3.891.550,00)
Kantor Camat Bengkulu	76.200,00	569.200,00	(493.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	282.000,00	341.000,00	(59.000,00)
Kantor Camat Bantan	1.459.300,00	3.024.100,00	(1.564.800,00)
Kantor Camat Siak Kecil	3.287.500,00	994.400,00	2.293.100,00
Kantor Camat Pinggir	2.180.500,00	2.689.000,00	(508.500,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	185.500,00	191.200,00	(5.700,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.011.800,00	3.796.000,00	(784.200,00)
Dinas Lingkungan Hidup	494.500,00	525.000,00	(30.500,00)
Dinas Pertanian	2.782.490,00	6.583.154,00	(3.800.664,00)
Dinas Perhubungan	3.674.400,00	3.961.000,00	(286.600,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.819.000,00	4.008.000,00	(2.189.000,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	364.300,00	763.200,00	(398.900,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	530.000,00	867.400,00	(337.400,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	287.000,00	2.172.600,00	(1.885.600,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.280.000,00	2.254.400,00	25.600,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.462.900,00	1.308.800,00	21.154.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.060.800,00	1.279.900,00	(219.100,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.767.900,00	9.397.000,00	(4.629.100,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	788.200,00	1.314.100,00	(525.900,00)
Kantor Camat Talang Muandau	1.693.000,00	3.629.000,00	(1.936.000,00)
Kantor Camat Bathin Solapan	1.429.000,00	2.875.700,00	(1.446.700,00)
Jumlah	440.528.448,83	1.265.893.857,01	(825.365.408,18)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Persediaan Barang Cetak

Nilai persediaan barang cetakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp963.631.750,97 berada pada OPD:

Tabel 5. 129 Rincian Persediaan Barang Cetak per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	288.000,00	320.000,00	(32.000,00)
Sekretariat DPRD	1.955.500,00	2.082.000,00	(126.500,00)
Dinas Kesehatan	0,00	6.768.632,00	(6.768.632,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	471.333.750,00	287.317.625,00	184.016.125,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.000,00	262.000,00	(21.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.210.000,00	1.083.000,00	127.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.300.800,00	937.500,00	363.300,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.975.000,00	1.822.000,00	153.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.664.000,00	679.800,00	1.984.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.541.000,00	1.172.600,00	368.400,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	467.500,00	520.000,00	(52.500,00)
Dinas Pendidikan	300.000,00	350.200,00	(50.200,00)
Dinas Perikanan	975.000,00	0,00	975.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	2.016.320,00	2.397.850,00	(381.530,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	583.400,00	673.000,00	(89.600,00)
Dinas Sosial	0,00	780.500,00	(780.500,00)
RSUD Bengkalis	21.770.000,00	18.786.000,00	2.984.000,00
RSUD Kecamatan Mandau	223.257.472,97	164.644.950,00	58.612.522,97
Kantor Camat Mandau	270.000,00	270.000,00	0,00
Kantor Camat Rupat	22.500,00	272.700,00	(250.200,00)
Kantor Camat Bengkalis	0,00	204.000,00	(204.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	280.000,00	155.000,00	125.000,00
Kantor Camat Bantan	432.330,00	1.270.980,00	(838.650,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.744.000,00	1.030.000,00	714.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	424.500,00	554.500,00	(130.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	808.000,00	458.000,00	350.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	702.800,00	515.000,00	187.800,00
Dinas Pertanian	389.418,00	0,00	389.418,00
Dinas Perhubungan	221.684.460,00	98.457.885,00	123.226.575,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.237.500,00	2.160.500,00	(923.000,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	575.800,00	508.000,00	67.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	935.000,00	1.270.000,00	(335.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.700,00	165.000,00	(46.300,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.000,00	241.800,00	(131.800,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	346.000,00	568.400,00	(222.400,00)
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	380.000,00	(380.000,00)
Jumlah	963.631.750,97	599.079.422,00	364.552.328,97

d) Persediaan Alat Kebersihan

Nilai persediaan alat kebersihan per 31 Desember 2020 sebesar Rp835.006.967,89 berada pada OPD:

Tabel 5. 130 Rincian Persediaan Alat Kebersihan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	2.052.350,00	2.183.570,00	(131.220,00)
Sekretariat DPRD	2.474.000,00	2.083.000,00	391.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	679.500,00	(679.500,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	460.100,00	224.000,00	236.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	375.000,00	38.000,00	337.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	148.100,00	339.873,00	(191.773,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	730.000,00	0,00	730.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.658.000,00	734.000,00	3.924.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.057.600,00	644.000,00	413.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	218.000,00	272.600,00	(54.600,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	772.600,00	546.500,00	226.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pendidikan	0,00	70.200,00	(70.200,00)
Dinas Perikanan	0,00	661.000,00	(661.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	88.009,00	30.723,00	57.286,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	406.000,00	273.000,00	133.000,00
Dinas Sosial	680.000,00	850.000,00	(170.000,00)
RSUD Bengkulu	3.355.000,00	511.000,00	2.844.000,00
RSUD Kecamatan Mandau	795.022.508,89	293.672.567,76	501.349.941,13
Kantor Camat Mandau	1.037.200,00	363.300,00	673.900,00
Kantor Camat Rupat	104.300,00	104.000,00	300,00
Kantor Camat Bengkulu	9.000,00	115.000,00	(106.000,00)
Kantor Camat Bukit Batu	89.400,00	66.800,00	22.600,00
Kantor Camat Bantan	835.000,00	1.281.000,00	(446.000,00)
Kantor Camat Siek Kecil	927.000,00	700.000,00	227.000,00
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	42.000,00	166.200,00	(124.200,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.946.000,00	721.000,00	3.225.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.400,00	18.000,00	56.400,00
Dinas Pertanian	2.743.800,00	2.492.200,00	251.600,00
Dinas Perhubungan	7.098.000,00	1.485.000,00	5.613.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.900,00	628.700,00	(422.800,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	3.737.000,00	3.077.000,00	660.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	149.000,00	0,00	149.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran	395.000,00	605.000,00	(210.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	490.000,00	543.000,00	(53.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.055.700,00	(1.055.700,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	182.800,00	297.000,00	(114.200,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bandar Laksamana	50.000,00	624.000,00	(574.000,00)
Kantor Camat Talang Muandau	160.000,00	160.000,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	233.900,00	69.600,00	164.300,00
Jumlah	835.006.967,89	318.386.033,76	516.620.934,13



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

e) Persediaan Perlengkapan Listrik

Nilai persediaan perlengkapan listrik per 31 Desember 2020 sebesar Rp194.488.909,20 berada pada OPD:

Tabel 5. 131 Rincian Persediaan Perlengkapan Listrik per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	3.838.909,20	3.686.181,89	152.727,31
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	227.400,00	413.400,00	(186.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	323.000,00	555.186,00	(232.186,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	126.000,00	252.000,00	(126.000,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.189.000,00	1.309.200,00	(120.200,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	925.000,00	490.000,00	435.000,00
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	375.000,00	70.000,00	305.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	171.076.000,00	196.732.800,00	(25.656.800,00)
Kantor Camat Bengkulu	0,00	87.500,00	(87.500,00)
Kantor Camat Bantan	100.000,00	252.000,00	(152.000,00)
Kantor Camat Siak Kecil	861.000,00	1.156.000,00	(295.000,00)
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.475.000,00	755.000,00	720.000,00
Dinas Pertanian	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	900.000,00	(900.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Perukiman dan Pertanahan	1.865.000,00	26.445.500,00	(24.580.500,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	677.000,00	(677.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	510.000,00	640.000,00	(130.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.978.000,00	1.891.200,00	3.086.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	160.000,00	203.680,00	(43.680,00)
Kantor Camat Talang Muandau	279.000,00	279.000,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	98.600,00	105.000,00	(6.400,00)
Jumlah	194.488.909,20	236.900.847,89	(42.411.738,69)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

f) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Nilai persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.133.600,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 132 Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	150.000,00	360.000,00	(210.000,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.000,00	0,00	12.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Mandau	90.000,00	60.000,00	30.000,00
Kantor Camat Rumpit Utara	90.000,00	90.000,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	90.000,00	210.000,00	(120.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	255.000,00	456.000,00	(201.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	825.000,00	450.000,00	375.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.393.600,00	0,00	5.393.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.000,00	90.000,00	45.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	693.000,00	693.000,00	0,00
Jumlah	10.133.600,00	2.409.000,00	7.724.600,00

g) Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih

Nilai persediaan pupuk/ pakan/ benih per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.494.845,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 133 Rincian Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Perikanan	118.494.845,00	101.528.614,00	16.966.231,00
Jumlah	118.494.845,00	101.528.614,00	16.966.231,00

h) Persediaan Suku Cadang Mobil

Nilai persediaan suku cadang mobil per 31 Desember 2020 sebesar Rp109.926.468,00 berada pada OPD:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 134 Rincian Persediaan Suku Cadang Mobil per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
RSUD Kecamatan Mandau	109.926.468,00	130.352.098,00	(20.425.630,00)
Jumlah	109.926.468,00	130.352.098,00	(20.425.630,00)

i) Persediaan Bahan Bakar

Nilai persediaan bahan bakar per 31 Desember 2020 sebesar Rp400.000,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 135 Rincian Persediaan Bahan Bakar per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Perikanan	0,00	5.537.000,00	(5.537.000,00)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Rupert Utara	400.000,00	450.000,00	(50.000,00)
Jumlah	400.000,00	5.987.000,00	(5.587.000,00)

j) Persediaan Bahan Kimia

Nilai persediaan bahan kimia per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.137.567.272,03 berada pada OPD:

Tabel 5. 136 Rincian Persediaan Bahan Kimia per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
RSUD Bengkalis	867.941.834,00	1.128.661.436,67	(260.719.602,67)
RSUD Kecamatan Mandau	1.269.625.438,03	1.232.340.491,71	37.284.946,32
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.137.567.272,03	2.361.001.928,38	(223.434.656,35)

k) Persediaan Hibah

Nilai persediaan yang akan dihibahkan pada masyarakat per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.179.501.814,42 berada pada OPD:

Tabel 5. 137 Rincian Persediaan Hibah per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	1.121.588.199,00	0,00	1.121.588.199,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	1.300.835.260,00	(1.300.835.260,00)
Dinas Pendidikan	7.850.497.699,81	14.495.112.438,65	(6.644.614.738,84)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	635.403.828,00	635.403.828,00	0,00
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	2.776.918.063,00	32.989.143.063,00	(30.212.225.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.980.000,00	0,00	199.980.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.763.164,61	32.598.815.340,63	(31.783.052.176,02)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.779.350.860,00	146.076.993.213,05	(139.297.642.353,05)
Jumlah	20.179.501.814,42	228.096.303.143,33	(207.916.801.328,91)

l) Persediaan Makanan Pokok

Nilai persediaan makanan pokok per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.813.800,00 Berada pada OPD:

Tabel 5. 138 Rincian Persediaan Makanan Pokok per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Dinas Ketahanan Pangan	371.813.800,00	160.953.800,00	210.860.000,00
Jumlah	371.813.800,00	160.953.800,00	210.860.000,00

m) Persediaan Alat Kesehatan

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.536.278.688,47 berada pada OPD:

Tabel 5. 139 Rincian Persediaan Alat Kesehatan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	7.737.907.385,61	0,00	7.737.907.385,61
RSUD Kecamatan Mandau	5.205.726.859,86	5.433.867.412,08	(228.140.552,22)
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	592.644.443,00	693.255.019,00	(100.610.576,00)
Jumlah	13.536.278.688,47	6.127.122.431,08	7.409.156.257,39

Rincian Persediaan Per OPD dapat dilihat pada:

Lampiran Persediaan

B. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Non Permanen

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	31.670.421.119,00	31.777.844.627,00	(107.423.508,00)
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	(31.252.521.119,00)	(31.300.244.627,00)	47.723.508,00
Nilai Bersih	417.900.000,00	477.600.000,00	(59.700.000,00)

Akun investasi non permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.670.421.119,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp31.777.844.627,00 merupakan pinjaman kepada masyarakat berupa Dana Bergulir, Pinjaman Lunak, Buffer Stock, Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan penagihan piutang terhadap investasi non permanen kepada KPKNL untuk diproses lebih lanjut, sampai dengan saat laporan keuangan dibuat investasi non permanen pada Dinas Perikanan sudah dilakukan proses penagihan kepada debitur.

Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Nomor SPnPPN-01/PUPNC.03.03/2016 perihal penolakan pengurusan Piutang Negara, proyek P3TP dan PUPR dikeluarkan dari investasi non permanen dikarenakan:

- 1) Tidak adanya kepastian ada dan besarnya piutang negara
- 2) Tidak adanya dokumen yang mendukung dan membuktikan sebagai piutang negara
- 3) Sesuai dengan surat nomor 5.24.3/DISTANNAK/XI/2015/135 tanggal 23 November 2015 terhadap dua proyek tersebut diatas telah dinyatakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Bahwa bukan Pinjaman bagi petani tetapi merupakan bantuan saprodi langsung habis pakai kepada petani.

Tabel 5. 140 Rincian Investasi Non Permanen per OPD

OPD	Nilai Kotor	Diragukan Tertagih	Nilai Bersih
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19.421.278.679,00	(19.421.278.679,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.476.548.860,00	(5.476.548.860,00)	0,00
Dinas Perikanan	2.167.432.180,00	(2.167.432.180,00)	0,00
Dinas Pertanian	4.405.161.400,00	(3.987.261.400,00)	417.900.000,00
Pabrik VCO Yayasan Melayu	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00
Jumlah	31.670.421.119,00	(31.252.521.119,00)	417.900.000,00

a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenakan/(Penurunan)
Investasi non permanen	19.421.278.679,00	19.447.505.949,00	(26.227.270,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(19.421.278.679,00)	(19.447.505.949,00)	26.227.270,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Koperasi dan UKM mempunyai 3 (tiga) rekening penampung yaitu: No.108-0321034, 108-0321046 dan 108-0307740. Saldo pada rekening penampung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321034, sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321046 dan sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0307740.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM berasal dari Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM, Proyek Pengembangan Usaha Koperasi di Kecamatan Bantan dan Rangsang, Proyek Pembangunan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu dan Kegiatan Pengembangan Koperasi Unggulan.

b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	5.476.548.860,00	5.496.836.008,00	(20.287.148,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(5.476.548.860,00)	(5.496.836.008,00)	20.287.148,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 2 (dua) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu: No.108-0317190 sebesar Rp205.705.035,00 dan pada Rekening nomor 108-0300571 sebesar Rp51.993.230,00.

Investasi non permanen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kecil Kabupaten Bengkulu dan Proyek Peningkatan Pengembangan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2001, Proyek Pinjaman Lunak untuk Percepatan Ekonomi Tahun 2005 dan Penguatan Modal Usaha Kecil Kec. Pinggir dan Mandau, Penguatan Modal Usaha Kec. Merbau, T. Tinggi dan T. Tinggi Barat, Penguatan Modal Usaha Kec. Bantan, Bengkulu, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupal dan Rupal Utara.

c) Dinas Perikanan

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perikanan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	2.167.432.180,00	2.168.341.270,00	(909.090,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(2.167.432.180,00)	(2.168.341.270,00)	909.090,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Perikanan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2020 yaitu: No.108-2000231 sebesar Rp0,00.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan berasal dari kegiatan Proyek Pinjaman Lunak Untuk Percepatan Ekonomi Masyarakat dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Jaring Apung.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d) Dinas Pertanian

Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Pertanian

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	4.405.161.400,00	4.465.161.400,00	(60.000.000,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(3.987.261.400,00)	(3.987.561.400,00)	300.000,00
Nilai bersih investasi non permanen	417.900.000,00	477.600.000,00	(59.700.000,00)

Perlu kami informasikan Dinas Pertanian mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan No.10-80-32221-1 yang telah berstatus tidak aktif dan telah ditutup.

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian berasal dari Proyek Pinjaman Lunak Percepatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkalis (PPL PEK) dan Proyek Pengembangan Tanaman Holtikultura Kabupaten Bengkalis (PPTH) Tahun 2002.

f) Pabrik VCO Yayasan Melayu

Berdasarkan hasil inventarisasi, Investasi non permanen per 31 Desember 2020 pada Pabrik VCO Yayasan Melayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Rincian Investasi Non Permanen Pabrik VCO Yayasan Melayu

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)	0,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	518.544.148.762,00	519.234.381.848,00	(690.233.186,00)

Akun investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan terdiri dari penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jenis Penyertaan	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Penyertaan Modal pada PDAM Bengkalis	0,00	1,00	(1,00)
Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Line	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	131.606.200.000,00	131.606.200.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis	378.937.948.762,00	379.628.181.946,00	(690.233.184,00)
Penyertaan Modal pada PT. S/MT Bengkalis	0,00	1,00	(1,00)
Jumlah	518.544.148.762,00	519.234.381.948,00	(690.233.186,00)

Penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) dilakukan kepada 5 Badan Usaha dengan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp518.544.148.762,00.

Penyertaan awal Modal Pemerintah Daerah (PMP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 5 Badan Usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkalis

Pembentukan PDAM Bengkalis berdasarkan atas Perda Kabupaten Bengkalis No. 04 Tahun 1994 tanggal 20 Januari 1994. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki 100% kepemilikan atas PDAM Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PDAM Bengkalis hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp28.006.482.531,00. Berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2020 (Unaudit) diketahui bahwa PDAM Kabupaten Bengkalis memperoleh kerugian sebesar Rp1.142.611.127,00. Sehingga rugi tersebut menambah saldo laba ditahan tahun sebelumnya yang bernilai minus Rp62.443.530.963,94. Konsisten dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PDAM Kabupaten Bengkalis disajikan senilai Rp0,00 di karenakan Rugi PDAM masih belum melebihi penyertaan modal sebesar minus Rp63.586.142.090,94.

Hal tersebut didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 6 Revisi Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi paragraf 47 yang menyatakan bahwa Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, maka penyertaan modal PT. PDAM di sajikan Rp0,00 atau Nihil.

Tabel 5. 147 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkalis

Tahun	Jumlah
2000	350.000.000,00
2001	1.109.400.000,00
2002	1.000.000.000,00
2003	3.000.000.000,00
2004	3.187.500.000,00
2005	6.000.000.000,00
2006	6.000.000.000,00
2007	8.200.000.000,00
2012	(8.224.347.689,00)
2014	3.044.859.174,00
2016	4.339.071.046,00
Jumlah	28.006.482.531,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Berdasarkan data/informasi yang tersedia, kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas saham Maskapai Penerbangan Riau Airlines adalah 5,5% dari keseluruhan modal PT. Riau Airlines sesuai dengan Surat Pernyataan Penyertaan Modal tanggal 17 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT. Riau Airlines tercatat sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- per lembar saham. Pada Tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Air Line dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. RAL, sehingga status pailit PT. RAL dinyatakan berakhir.

Tabel 5. 148 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Tahun	Jumlah
2005	8.000.000.000,00
Jumlah	8.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pada Bank Riau Kepri

PT. Bank Riau merupakan perusahaan daerah di Provinsi Riau yang bergerak di bidang perbankan di mana sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sampai dengan 31 Desember 2019 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau sebesar Rp131.606.200.000,00, persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas PT. Bank Riau sebesar 11,81% untuk posisi Per 31 Desember 2019.

Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri pada Tahun 2017 sebesar Rp5.248.746.825,00 akan tetapi penyertaan modal tersebut belum bisa di akui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan belum terbitnya Perda Penyertaan Modal dan akan diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah di Perdakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5. 149 Rincian Penyertaan Modal Pada Riau Kepri

Tahun	Jumlah
2006	15.004.000.000,00
2007	25.000.000.000,00
2008	2.000.200.000,00
2009	50.000.000.000,00
2011	9.602.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2012	20.000.000.000,00
2019	10.000.000.000,00
Jumlah	131.606.200.000,00

Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 46 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001. Seluruh kepemilikan saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu ini dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkulu menambahkan penyertaan modal ke PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,-. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu di PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp426.630.3993.067,00.

Terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkulu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor B-3284/L.4.13/Fu.1/11/2019 tentang Jawaban Permohonan Pengembalian Aset PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 25 November 2019, bahwa barang bukti berupa Aset PT. Bumi Laksamana Jaya telah di Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 162/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp154.690.000,00 dan hasilnya telah disetor ke Kas Negara, serta barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.750.973.000,00 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Bank Riau Kepri dengan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 September 2018 dan 14 Maret 2019.

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu per 31 Desember 2020 (Unaudit) diketahui bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp690.233.184,00, dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkulu disajikan senilai Rp378.937.948.762,00.

Tabel 5. 150 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Tahun	Jumlah
2001	10.000.000.000,00
2002	2.000.000.000,00
2003	41.621.000.000,00
2004	11.150.000.000,00
2005	5.000.000.000,00
2007	7.500.000.000,00
2008	40.906.480.267,00
2009	8.452.912.800,00
2012	300.000.000.000,00
Jumlah	426.630.393.067,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Jumlah penyertaan modal berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Sri Junjungan Media Televisi (PT. SJMT) yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi hingga akhir tahun 2013 masih tercatat sebesar Rp8.236.000.000,00. PT SJMT sampai dengan laporan keuangan dibuat tidak beroperasi lagi. PT SJMT semula dikelola oleh PT. BLJ namun dilatarbelakangi oleh telah berakhirnya KSO antara Pemkab. Bengkalis dan PT. BLJ dalam pengelolaan PT. SJMT dan PT. BLJ tidak berhak melakukan Penyiaran televisi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. melalui surat kepada Bupati Bengkalis No.133/BLJ-Dirut/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 hal rencana serah terima, PT BLJ berkeinginan untuk menyerahkan seluruh aset dan pengelolaan PT.SJMT. Seluruh Aset PT SJMT telah diserahkan dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 151 Rincian Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Tahun	Jumlah
2005	1.236.000.000
2006	3.500.000.000
2007	3.500.000.000
Jumlah	8.236.000.000,00

Rincian Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada:
Lampiran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

C. Aset Tetap

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85	(356.887.664.552,79)

Jumlah Aset Tetap 31 Desember 2020 sebesar Rp7.879.234.544.017,06 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.236.122.208.569,85. Nilai aset tetap TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp356.887.664.554,79. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 152 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Tanah	1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04	53.711.769.740,27
Peralatan dan Mesin	1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33	116.769.806.056,70
Gedung dan Bangunan	3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10	184.282.733.426,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42	748.588.080.192,43
Aset Tetap Lainnya	126.159.968.170,72	117.319.205.805,72	8.840.762.365,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	335.652.200.689,21	807.736.619.379,16	(472.084.418.689,95)
Akumulasi Penyusutan	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)
Jumlah	7.879.234.544.017,06	8.236.122.208.569,85	(356.887.664.552,79)

Rincian dan uraian per masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

I. Tanah

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04	53.711.769.740,27

Nilai aset tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.118.098.988.741,31 dan Rp1.064.387.219.001,04 maka terdapat kenaikan dari periode sebelumnya sebesar Rp53.711.769.740,27.

Mutasi aset tetap tanah sebesar Rp1.118.098.988.741,31 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	1.064.387.219.001,04
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja modal Tanah	721.188.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Hutang Pihak Ketiga	0,00
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	52.283.713.101,20
Reklasifikasi	259.971.369,07
Hibah	3.402.860.000,00
Total Mutasi Tambah	56.667.732.470,27
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi	508.369.500,00
Penghapusan	147.145.840,00
Koreksi Pencatatan	2.300.447.390,00
Total Mutasi Kurang	2.955.962.730,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020	1.118.098.988.741,31

Rincian aset tetap tanah sebesar Rp1.118.098.988.741,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Aset Tetap Tanah

Jenis	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah Persil			
Tanah Bangunan			
Perumahan/G. Tempat Tinggal	89.831.015.094,40	0,00	89.831.015.094,40
Tanah Untuk Bangunan			
Ged. Perdagangan/ Perusahaan	85.805.706.714,72	0,00	85.805.706.714,72
Tanah Untuk Bangunan Industri	20.490.951.100,00	0,00	20.490.951.100,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	479.363.971.102,15	0,00	479.363.971.102,15
Tanah Untuk Bangunan Gedung Serana Olah Raga	24.668.278.789,07	0,00	24.668.278.789,07
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.423.717.490,00	0,00	5.423.717.490,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	921.541.645.806,61	(921.541.645.806,61)
Tanah Non Persil			
Tanah Basah	13.851.048.000,00	0,00	13.851.048.000,00
Tanah Kering	5.321.118.800,00	0,00	5.321.118.800,00
Tanah Perkebunan	266.524.500,00	90.000.000,00	176.524.500,00
Tanah Hutan	6.799.979.600,00	6.799.979.600,00	0,00
Tanah Tandus	1.476.384.000,00	1.304.784.000,00	171.600.000,00
Tanah Pertanian	1.019.290.000,00	597.655.000,00	421.635.000,00
Tanah Kebun Campuran	0,00	100.674.500,00	(100.674.500,00)
Tanah Kolam Ikan	0,00	310.391.600,00	(310.391.600,00)
Tanah Danau/Rawa	0,00	9.657.636.400,00	(9.657.636.400,00)
Tanah Pengguna Lain	0,00	171.600.000,00	(171.600.000,00)
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	84.917.067.144,43	(84.917.067.144,43)
Lapangan			
Tanah Lapangan Olah Raga	22.324.993.570,00	0,00	22.324.993.570,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	17.593.785.066,66	0,00	17.593.785.066,66
Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	4.242.101.480,00	0,00	4.242.101.480,00
Tanah Untuk Jalan	245.942.478.075,34	0,00	245.942.478.075,34
Tanah Untuk Bangunan Air	36.580.337.248,97	0,00	36.580.337.248,97
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	76.625.000,00	0,00	76.625.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3.070.279.000,00	0,00	3.070.279.000,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	59.900.000,00	0,00	59.900.000,00
Tanah Untuk Makam	26.789.823.950,00	0,00	26.789.823.950,00
Tanah Untuk Taman	14.957.573.160,00	0,00	14.957.573.160,00
Tanah Kampung	12.143.107.000,00	38.895.784.950,00	(26.752.677.950,00)
Jumlah	1.118.098.988.741,31	1.064.387.219.001,04	53.711.769.740,27

Kenaikan Penurunan Aset Tanah dapat di lihat pada:

Lampiran Aset Tanah

2. Peralatan dan Mesin

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33	116.769.806.056,70

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.720.936.637.948,03 dan Rp1.604.166.831.891,33.

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.720.936.637.948,03 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)		1.604.166.831.891,33
Mutasi Tambah		
Pembelian (sesuai harga perolehan)		
Belanja Barang dan Jasa	263.833.800,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	85.484.297.958,45	
Belanja Gedung dan Bangunan	574.266.902,13	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.590.000,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	36.875.000,00	
Koreksi BPK	0,00	
Hutang Pihak Ketiga	81.232.550,00	
Total Pembelian		86.665.096.210,58
Hibah	3.178.237.727,00	
Transfer masuk	6.612.327.366,00	
Koreksi Pencatatan	4.480.000,00	
Reklasifikasi	18.275.895.816,68	
Aset Covid-19	13.129.542.330,00	
Koreksi BPK	0,00	
Total Mutasi Tambah		41.200.483.239,68
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	6.612.327.366,00	
Penghapusan	4.091.446.027,56	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	392.000.000,00	
Total Mutasi Kurang		11.095.773.393,56
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020		1.720.936.637.948,03

Rincian aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.720.936.637.948,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo 2020	Saldo 2019	Kerjakan/(Penurunan)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	62.426.616.910,01	61.711.331.610,01	715.285.300,00
Alat Besar Apung	482.279.137,24	1.064.598.137,24	(582.319.000,00)
Alat Bantu	61.816.138.388,38	59.071.016.346,00	2.745.122.042,38
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	275.911.112.196,49	279.069.578.617,05	(3.158.466.420,56)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.889.094.179,35	1.156.602.399,35	732.491.780,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	27.126.919.338,22	27.126.919.338,22	0,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10.289.897.406,00	10.289.897.406,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	2.762.546.304,85	2.764.425.269,85	(1.878.965,00)
Alat Bengkel Tak Bermesin	3.421.388.416,82	3.267.936.095,82	153.452.321,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Ukur	12.252.970.517,77	11.638.113.258,77	614.857.259,00
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	24.608.202.543,96	13.630.423.613,82	10.977.778.930,14
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	11.530.145.203,14	(11.530.145.203,14)
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	102.720.710.027,02	98.600.070.165,18	4.120.639.861,84
Alat Rumah Tangga	278.225.552.984,89	272.358.750.901,41	5.866.802.083,48
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.037.722.160,20	25.911.419.226,33	1.126.302.933,87
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	30.663.595.695,91	31.356.115.914,59	(692.520.218,68)
Alat Komunikasi	9.212.615.326,87	13.093.846.135,84	(3.881.230.808,97)
Peralatan Pemancar	19.093.207.850,52	3.251.108.359,13	15.842.099.491,39
Peralatan Komunikasi Navigasi	23.978.000,00	0,00	23.978.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	327.009.303.467,38	258.534.457.118,33	68.474.846.349,05
Alat Kesehatan Umum	1.321.678.474,28	15.900.639.501,78	(14.578.961.027,50)
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	175.062.376.419,40	167.805.596.071,01	7.256.780.348,39
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.001.974.722,00	3.903.876.404,00	98.098.318,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	87.722.698.158,60	86.774.147.069,67	948.551.088,93
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	432.912.022,72	449.831.622,72	(16.919.600,00)
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.682.637.807,84	3.194.145.191,84	488.492.616,00
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	2.397.500,00	6.316.332.553,94	(6.313.935.053,94)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.370.788.338,43	3.393.920.238,43	(23.131.900,00)
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.727.396.068,92	3.722.211.068,92	5.185.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	717.212.042,00	0,00	717.212.042,00
Alat Persenjataan			
Senjata Api	242.809.527,00	248.072.527,00	(5.263.000,00)
Persenjataan Non Senjata Api	1.717.851.535,21	385.471.290,10	1.332.380.245,11
Senjata Sinar	9.772.458,00	9.772.458,00	0,00
Alat Khusus Kepolisian	693.373.821,00	0,00	693.373.821,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	10.263.257.124,51	(10.263.257.124,51)
Komputer			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Komputer Unit	98.587.082.545,75	0,00	98.587.082.545,75
Peralatan Komputer	38.508.907.983,58	116.372.803.653,33	(77.863.895.669,75)
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	86.625.000,00	0,00	86.625.000,00
Alat Pelindung	4.885.041,00	0,00	4.885.041,00
Alat Sar	5.693.480.762,07	0,00	5.693.480.762,07
Alat Kerja Penerbangan	141.770.000,00	0,00	141.770.000,00
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Laku Lintas Darat	16.893.583.611,35	0,00	16.893.583.611,35
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	522.894.000,00	0,00	522.894.000,00
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	817.679.257,00	0,00	817.679.257,00
Jumlah	1.720.936.637.948,03	1.604.166.831.891,33	116.769.806.056,70

Kenaikan Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dapat di lihat pada:
Lampiran Aset Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10	184.282.733.426,63

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.135.001.432.141,73 dan Rp2.950.718.698.715,10.

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.135.001.432.141,73 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	2.950.718.698.715,10
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	2.821.243.000,00
Belanja Barang dan jasa menjadi Aset Gedung	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.156.052.675,00
Belanja Gedung dan Bangunan	91.508.752.001,09
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Hutang Pihak Ketiga	1.747.640.000,00
Total Pembelian	99.233.687.676,09
Transfer masuk	5.884.029.755,00
Aset Dari KDP	27.197.083.771,22
Reklasifikasi	2.896.887.200,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Covid-19	10.154.918.399,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	72.261.282.890,00	
Total Mutasi Tambah		118.394.202.015,22
Mutasi Kurang		
Transfer keluar	5.884.029.755,00	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Reklasifikasi	26.985.384.059,68	
Penghapusan	64.896.000,00	
Koreksi Pencatatan	410.846.450,00	
Total Mutasi Kurang		33.345.156.264,68
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020		3.135.001.432.141,73

Rincian aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.135.001.432.141,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 155 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.791.116.269.245,22	2.660.179.939.221,90	130.936.330.023,32
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	240.437.789.197,21	230.778.918.518,62	9.658.870.678,59
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	34.426.806.561,45	0,00	34.426.806.561,45
Tugu Peringatan	0,00	8.580.875.623,93	(8.580.875.623,93)
Tugu Peringatan Lain	0,00	243.376.547,00	(243.376.547,00)
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	4.063.817.404,85	4.063.817.404,85	0,00
Bangunan Bersejarah	0,00	28.992.609.687,45	(28.992.609.687,45)
Monomen/Bangunan Bersejarah	0,00	380.067.000,00	(380.067.000,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	64.956.749.733,00	0,00	64.956.749.733,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	249.069.000,00	(249.069.000,00)
Rambu-Rambu	0,00	16.727.131.711,35	(16.727.131.711,35)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	522.894.000,00	(522.894.000,00)
Jumlah	3.135.001.432.141,73	2.950.718.698.715,10	184.282.733.426,63

Kenaikan Penurunan Aset Gedung dan Bangunan dapat di lihat pada:
Lampiran Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42	748.588.080.192,43

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.975.413.810.264,85 dan Rp8.226.825.730.072,42.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.975.413.810.264,85 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited) 8.226.825.730.072,42

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	240.180.000,00	
Belanja Modal Tanah	0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	800.605.692,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.626.986.718,70	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	
Total Pembelian		225.667.772.410,70

Transfer Masuk	0,00	
Aset dari KDP	458.387.608.817,73	
Reklasifikasi	68.486.969.006,00	
Aset Covid-19	7.000.000,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		526.881.577.823,73

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	0,00	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	3.961.270.042,00	
Total Mutasi Kurang		3.961.270.042,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 8.975.413.810.264,85

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.975.413.810.264,85 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 156 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Jalan dan Jembatan			
Jalan	6.520.578.663.309,70	5.977.703.129.443,18	542.875.533.866,52
Jembatan	523.408.864.540,76	425.936.886.992,57	97.471.977.548,19
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	340.980.152.634,34	339.587.275.134,34	1.392.877.500,00
Bangunan Pengaliran Pasang Surut	15.671.828.933,96	16.091.925.768,96	(420.096.835,00)
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	3.729.662.176,05	1.952.040.686,00	1.777.621.490,05
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	828.658.035.717,07	775.255.835.012,56	53.402.200.704,51
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	4.944.205.227,74	4.937.205.227,74	7.000.000,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	425.869.607.183,19	100.310.070.705,81	325.559.536.477,38
Bangunan Air Kotor	12.208.563.465,83	12.208.563.465,83	0,00
Bangunan Air	0,00	227.745.301.374,46	(227.745.301.374,46)
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	44.109.854.497,53	44.109.854.497,53	0,00
Instalasi Air Kotor	647.980.178,51	647.980.178,51	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.259.815.001,05	6.126.697.072,28	133.117.928,77
Instalasi Gardu Listrik	2.200.412.086,28	1.724.445.338,04	475.966.748,24
Instalasi Pertahanan	1.129.114.308,00	1.129.114.308,00	0,00
Instalasi Gas	388.540.793,10	388.540.793,10	0,00
Instalasi Pengaman	417.030.256,70	417.030.256,70	0,00
Jaringan			
Jaringan Air Minum	129.855.362.363,59	177.147.056.276,59	(47.291.693.913,00)
Jaringan Listrik	113.689.854.568,26	112.740.514.517,03	949.340.051,23
Jaringan Telepon	666.263.023,19	666.263.023,19	0,00
Jumlah	8.975.413.810.264,85	8.226.825.730.072,42	748.588.080.192,43

Kenaikan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di fihat pada:
Lampiran Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
126.159.968.170,72	117.319.205.805,72	8.840.762.365,00

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp126.159.968.170,72 dan Rp117.319.205.805,72.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Mutasi aset tetap lainnya sebesar Rp126.159.968.170,72 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 (Audited)	117.319.205.805,72
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	51.050.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.771.328.422,00
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	9.822.378.422,00
Transfer Masuk	0,00
Reklasifikasi	95.252.000,00
Total Mutasi Tambah	95.252.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi	1.072.388.057,00
Koreksi Pencatatan	4.480.000,00
Total Mutasi Kurang	1.076.868.057,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020	126.159.968.170,72

Rincian aset tetap lainnya sebesar Rp126.159.968.170,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan			
Bahan Perpustakaan Tercetak	109.780.434.665,38	0,00	109.780.434.665,38
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	125.577.840,00	0,00	125.577.840,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	4.337.881.681,00	0,00	4.337.881.681,00
Musik	152.943.000,00	0,00	152.943.000,00
Karya Grafika (Graphic Material)	21.306.498,00	0,00	21.306.498,00
Three Dimensional Artefacts And Reelita	110.828.469,00	0,00	110.828.469,00
Tarsalit	790.000,00	0,00	790.000,00
Buku	0,00	100.901.687.749,38	(100.901.687.749,38)
Terbitan	0,00	363.147.837,00	(363.147.837,00)
Barang-Barang Perpustakaan	0,00	3.519.119.388,00	(3.519.119.388,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	2.052.957.567,95	0,00	2.052.957.567,95
Alat Bercorak Kebudayaan	2.321.919.285,00	4.544.556.687,95	(2.222.637.402,95)
Tanda Penghargaan	30.966.700,00	0,00	30.966.700,00
Alat Olah Raga Lainnya	0,00	558.231.679,00	(558.231.679,00)
Hewan			
Hewan Piaraan	0,00	95.000.000,00	(95.000.000,00)
Tanaman			
Tanaman	2.864.032.717,39	2.864.032.717,39	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.360.329.747,00	4.473.429.747,00	(113.100.000,00)
Jumlah	125.159.968.170,72	117.319.205.805,72	8.840.762.365,00

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
335.652.200.689,21	807.736.619.379,16	(472.084.418.689,95)

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp335.652.200.689,21 dan Rp807.736.619.379,16.

Mutasi KDP sebesar Rp335.652.200.689,21 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 31 Desember 2019 (Audited)	807.736.619.379,16
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	22.707.415.099,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.749.336.108,00
Utang Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	26.456.751.207,00
Transfer Masuk	9.223.390.000,00
Reklasifikasi	9.223.390.000,00
Koreksi Pencatatan	11.322.323.000,00
Total Mutasi Tambah	29.769.103.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	9.223.390.000,00
Reklasifikasi	519.034.482.896,95
Aset di Serahkan Pemda Lain	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penghapusan	52.400.000,00
Koreksi BPK	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Kurang	528.310.272.896,95
Saldo aset tetap per 31 Desember 2020	335.652.200.689,21

Rincian aset tetap KDP per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	24.417.999,82	24.417.999,82	0,00
Sekretariat DPRD	99.396.000,00	99.396.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	3.750.112.652,56	10.122.737.108,20	(6.372.624.455,64)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.800.309,00	98.800.309,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	24.770.000,00	(24.770.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.224.000,00	172.224.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	200.769.797,00	200.769.797,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.968.000,00	0,00	39.968.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	38.427.425,00	38.427.425,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00
Dinas Pendidikan	11.555.714.290,00	10.514.506.939,58	1.041.207.350,42
Dinas Perikanan	81.630.000,00	52.400.000,00	29.230.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
Dinas Sosial	2.095.198.645,51	2.120.245.645,51	(25.047.000,00)
RSUD Bengkalis	2.539.875.000,00	2.539.875.000,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	235.051.000,00	646.696.700,00	(411.645.700,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	190.650.000,00	(190.650.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	514.226.000,00	514.226.000,00	0,00
Dinas Pertanian	193.000.000,00	505.896.000,00	(312.896.000,00)
Dinas Perhubungan	8.464.830.467,80	9.033.513.428,80	(568.682.961,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.742.282.850,71	757.790.989.130,55	(464.048.706.279,84)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	4.690.347.147,00	5.749.853.207,89	(1.059.506.060,89)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.785.343.104,81	7.097.024.687,81	(311.681.583,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	181.186.000,00	0,00	181.186.000,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	335.652.200.689,21	807.736.619.379,16	(472.084.418.689,95)

7. Akumulasi Penyusutan

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenalkan/(Penurunan)
(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)

Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp7.532.028.493.938,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.430.450.968.470,36)	(1.295.152.550.625,79)	(135.298.417.844,57)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(954.785.318.054,54)	(881.584.309.120,07)	(73.201.008.934,47)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(5.086.892.120.199,48)	(4.298.230.189.221,19)	(788.661.930.978,29)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(59.900.087.214,41)	(60.065.047.327,87)	164.960.113,46
Jumlah	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)

Tabel 5. 160 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	(300.768.648.784,28)	(287.221.774.414,28)	(13.546.874.370,00)
Sekretariat DPRD	(61.008.095.532,77)	(54.960.296.127,09)	(6.047.799.405,68)
Dinas Kesehatan	(121.571.349.951,68)	(108.691.321.541,68)	(12.880.028.410,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(12.874.918.772,68)	(11.047.707.343,68)	(1.827.211.429,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(22.779.129.415,46)	(21.294.660.660,46)	(1.484.468.755,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(12.390.013.088,24)	(11.164.499.607,24)	(1.225.513.481,00)
Badan Pendapatan Daerah	(17.310.971.645,82)	(15.575.112.495,82)	(1.735.859.150,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(8.270.763.592,57)	(7.512.684.901,57)	(758.078.691,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(8.752.761.366,12)	(8.076.851.994,12)	(675.909.372,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(19.502.987.396,83)	(18.962.738.450,83)	(540.248.946,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(7.692.225.196,45)	(7.220.095.268,45)	(472.129.928,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(4.837.425.345,80)	(4.954.498.868,80)	117.073.523,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(56.272.799.423,66)	(46.726.000.916,77)	(9.546.798.506,89)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(14.994.719.335,01)	(14.212.351.274,01)	(782.368.061,00)
Dinas Pendidikan	(616.077.305.787,94)	(560.684.308.544,36)	(55.392.997.243,58)
Dinas Perikanan	(21.022.832.489,76)	(19.368.015.422,76)	(1.654.817.067,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(20.295.150.351,11)	(19.265.049.242,11)	(1.030.101.109,00)
Inspektorat	(8.392.900.273,25)	(8.089.856.414,25)	(303.043.859,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(8.515.510.574,09)	(7.917.168.651,09)	(598.341.923,00)
Dinas Sosial	(15.944.949.255,07)	(14.486.073.005,07)	(1.458.876.250,00)
RSUD Bengkalis	(188.734.312.069,62)	(165.261.435.838,62)	(23.472.876.231,00)
RSUD Kecamatan Mandau	(169.573.161.323,88)	(146.832.608.622,88)	(22.740.552.701,00)
Kantor Camat Mandau	(45.813.482.458,15)	(39.410.868.184,82)	(6.402.614.273,33)
Kantor Camat Rupit	(25.813.662.390,54)	(21.527.504.369,54)	(4.286.158.021,00)
Kantor Camat Rupit Utara	(13.355.399.938,17)	(11.159.338.871,17)	(2.196.061.067,00)
Kantor Camat Bengkalis	(25.584.061.436,14)	(22.416.023.585,14)	(3.168.037.851,00)
Kantor Camat Bukit Batu	(17.677.049.674,00)	(15.329.081.030,00)	(2.347.968.644,00)
Kantor Camat Bantan	(16.176.331.070,73)	(14.092.389.229,73)	(2.083.941.841,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(11.571.834.906,66)	(9.865.945.774,66)	(1.705.889.132,00)
Kantor Camat Pinggir	(19.342.035.620,70)	(16.102.214.671,70)	(3.239.820.949,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(20.297.343.715,85)	(19.574.785.647,85)	(722.558.068,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(61.792.523.319,88)	(56.879.107.813,88)	(4.913.415.506,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(55.702.556.607,62)	(51.073.362.401,62)	(4.629.194.206,00)
Dinas Pertanian	(60.096.276.185,59)	(54.395.149.221,59)	(5.701.126.964,00)
Dinas Perhubungan	(328.739.078.257,47)	(244.752.601.274,70)	(83.986.476.982,77)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(3.557.991.939.782,58)	(2.998.654.901.242,80)	(559.337.038.539,78)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	(1.240.001.221.403,19)	(1.106.674.943.071,68)	(133.326.278.331,51)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.690.515.076,23)	(5.275.550.871,23)	(414.964.205,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(22.951.800.900,22)	(21.826.110.824,22)	(1.125.690.076,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.953.643.687,36)	(5.760.206.880,36)	(1.193.436.807,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(263.005.805.262,21)	(248.871.823.026,88)	(14.133.982.235,33)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(4.568.077.862,14)	(4.075.037.416,14)	(493.040.446,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(7.181.511.497,60)	(5.472.541.551,60)	(1.708.969.946,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	(1.343.570.093,00)	(741.000.431,00)	(602.569.662,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Talang Muandau	(1.748.634.481,00)	(936.728.398,00)	(811.906.083,00)
Kantor Camat Bathin Solapan	(1.047.207.339,67)	(639.770.898,67)	(407.436.441,00)
Jumlah	(7.532.028.493.938,79)	(6.535.032.096.294,92)	(996.996.397.643,87)

D. Dana Cadangan

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	0,00	0,00

Akun Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 mempunyai saldo sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. Aset Lainnya

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88	100.003.458.951,69

Jumlah Aset lainnya sebesar Rp76.912.314.915,02 dan Rp115.535.058.649,88 merupakan aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap seperti: Tuntutan ganti rugi, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 161 Rincian Aset Lainnya

Jenis Aset Tetap	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Tuntutan Ganti Rugi	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	488.750.000,00	488.750.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.604.936.620,03	6.811.093.726,95	(3.206.157.106,92)
Aset Lain-lain	205.137.864.730,88	101.928.248.672,27	103.209.616.058,61
Jumlah	215.538.517.601,57	115.535.058.649,88	100.003.458.951,69

1. Tuntutan Ganti Rugi

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Rincian Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai Berikut:

Tabel 5. 162 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

Inisial	Saldo 31 Desember 2019	Mutasi 2020	Saldo 31 Desember 2020
I K	3.096.695.428,00	0,00	3.096.695.428,00
M K	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
A S	799.783.820,00	0,00	799.783.820,00
F M	364.045.684,00	0,00	364.045.684,00
E D			
M N	663.828.068,00	0,00	663.828.068,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

K H	651.250.097,00	0,00	651.250.097,00
A L	447.454.860	0,00	447.454.860,00
BAPENDA	126.908.294	0,00	126.908.293,66
JUMLAH	6.306.966.250,66	0,00	6.306.966.250,66

Rincian Mutasi TGR per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat DPRD	3.096.695.428,00	3.096.695.428,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	799.783.820,00	799.783.820,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	364.045.684,00	364.045.684,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	663.828.068,00	663.828.068,00	0,00
Dinas Perhubungan	651.250.097,00	651.250.097,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	126.908.293,66	126.908.293,66	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	447.454.860,00	447.454.860,00	0,00
Jumlah	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Proses Hukum TGR dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk TGR pada Badan Penelitian dan Pengembangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Pbr.
2. Untuk TGR pada Sekretariat DPRD telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/Tipikor/2017/PN.Pbr.
3. Untuk TGR pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
488.750.000,00	488.750.000,00	0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp488.750.000,00 berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Riau Angkasa Indah, surat perjanjian Nomor 01/PJJ-PSR/2000 tentang perjanjian kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan di Duri Kabupaten Bengkalis-Riau. Dalam kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan lahan senilai RP488.750.000,00 untuk dibangun lokasi dagang dan kantor UPTD dengan rincian :



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

9 unit kios @ Rp. 50.000.000,00	450.000.000,00
1 unit kantor UPTD	38.750.000,00
	<u>488.750.000,00</u>

dimana sistem kerjasama adalah BOT (*Build Operate Transfer*) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditambah 3 (tiga) tahun masa pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan, terhitung bulan April 2000.

3. Aset Tidak Berwujud

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
3.604.936.620,03	6.811.093.726,95	(3.206.157.106,92)

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp21.708.968.193,57 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp18.104.031.573,54. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.604.936.620,03, sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.811.093.726,95.

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.304.786.148,53 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 (*Audited*) **6.811.093.726,95**

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	177.100.000,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	419.949.000,00	
Koreksi Pencatatan	15.000.000,00	
Hutang Pihak Ketiga	0,00	
Total Pembelian		612.049.000,00

Transfer Masuk	0,00	
Total Mutasi Tambah		0,00

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	0,00	
Aset diserahkan ke Pemda lain	0,00	
Amortisasi 2020	3.817.484.659,92	
Koreksi Amortisasi	721.447,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		3.818.206.106,92

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 **3.604.936.620,03**

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan Nilai Perolehan sebesar Rp21.708.968.193,57 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 164 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

Nama ATB	Nilai Perolehan	Tahun Pembelian	Perusahaan
Sekretariat Daerah			
Software/Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan	57.530.000,00	2011	CV. Adira
Website Dinamis dan Interaktif (bengkalisab.go.id)	19.900.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SMS Gateway Berbasis Web	34.950.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SIMBADA	18.500.000,00	2011	CV. Gold Print
Software/Aplikasi Gaji	189.000.000,00	2012	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi SIMPEG	97.800.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software OS Window Server	10.196.400,00	2013	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi Operating System	21.243.000,00	2015	CV. Ikrar Utama
Software/ Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	73.194.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software SIAP	61.899.000,00	2015	CV. Mahmudal Fata Akbar
Software/Aplikasi Data Rumah Ibadah	14.780.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Sistem dan Aplikasi Laporan Online untuk Bagian Penyusunan Program	49.398.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Sistem Informasi Manajemen Ruang Setda dan Software Sistem Informasi Document Sharing Berbasis Cloud	147.666.000,00	2016	CV. Pratama Cipta
Software OS Window Server	10.500.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Aplikasi Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa	74.855.000,00	2020	CV. Rishan Anugrah
Jumlah		881.411.400,00	
Sekretariat DPRD			
Software Website (http://dprd-bengkalisab.go.id/admin/dprd)	300.580.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software Website (www.DPRD.Bengkalisab.go.id)	58.711.700,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.e-wartawan.bengkalisab.go.id/HumasSetwan/)	44.598.400,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.SPPD.Bengkalisab.go.id)	47.960.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.DPRD.bengkalisab.go.id/perpustakaan/)	54.000.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	505.850.100,00		
Dinas Kesehatan			
Software Website dinkes.bengkalisab.go.id	86.661.400,00	2013	CV. Inti Media
Aplikasi Laporan Obat dan Perbekalan Kesehatan	95.219.196,00	2019	PT. Nuasa Cerah Informasi
Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	175.900.000,00	2020	PT. Nuasa Cerah Informasi
Jumlah	357.780.596,00		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Software Website (http://sidupa.bengkalisab.go.id/login)	199.670.000,00	2019	CV. Quantum Solution
Jumlah	199.670.000,00		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Komputer Server /Main Frame (Mikro Film) Perangkat Lunak NCI Book Man	122.300.000,00	2008	CV. Berkama Karya
Software Database Sistem Kearsipan	68.460.900,00	2011	CV. Defitra Konsultan
Aplikasi Untuk Pendataan Dan Pentaan Dokumen/Arsip Daerah (Digital Arsip)	33.733.483,00	2018	CV. Ladini
Jumlah	224.494.383,00		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Software Website (www.bappeda.bengkalisab.go.id)	17.618.183,00	2012	CV. Guna Dharma
Software E-Planning	194.150.000,00	2018	PT. Raja Sakti Telematika
Software E-Monev	187.000.000,00	2019	PT. Adityarama Daya Cipta
Jumlah	398.768.183,00		
Badan Pendapatan Daerah			
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL Core Lic Qlfd	81.257.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 ENG DiskKt MVL DVD	693.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssnts 2012 SNGL	14.410.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssnts 2012 64Bit	715.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Pemetaan Aplikasi SIM PBB : Aplikasi Pemetaan Mapinfo Profesional V 11.5	51.315.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Software Aplikasi Simpeg, Aplikasi Pajak Daerah dan Sistim Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (Simpeda)	650.570.000,00	2011	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB Online	261.118.205,80	2012	CV. Liandino Utama.
Software/Aplikasi Perjalanan Dinas dan Website Dispenda	69.025.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi POS (Pay- ment Online System) untuk PBB-P2	198.800.000,00	2013	PT. Citra Media Interaktif.
Software/Aplikasi Komputer (Smart Map) untuk Pengelolaan PBB-P2	170.500.000,00	2014	PT. Global Aero Dinamika
Connector LAN - AMP Ori	750.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Kabel LAN - Belden Ori	2.810.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Anti Virus Komputer Desktop (3 user) - Kaspersky 2016	5.460.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2 - Anti Virus Karperky - 1 Server 5 Client	4.000.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2	126.500.000,00	2015	PT. Cartenz Technology International.
Software/Aplikasi Komputer Sistem Informasi PBB-P2	65.827.200,00	2016	PT. Eloku Mitra Utama
Aplikasi Perhitungan Piutang PBB-P2	65.492.800,00	2016	PT. Borion Mitra Utama
Software Aplikasi Komputer SMS Gateway	66.630.000,00	2016	PT. Cipta Pusaka Utama
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Self Assesment berupa iTax - Hotel Tax Application dan iTax- Restaurant Tax Application.	197.890.000,00	2017	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Pemeliharaan Aplikasi Komputer Pengelolaan PBB-P2	20.000.000,00	2017	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi Imotax Pendaftaran Wajib Pajak	194.535.000,00	2018	PT. Mentari Kode Informatika.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sistem Aplikasi Informasi Manajemen Pajak Daerah Official Assesment dan Self Assesment	378.840.000,00	2018	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Windows Server	39.800.000,00	2019	CV. Dwi Mandiri
Aplikasi Informasi Pajak Daerah (Software Sistem Informasi Dashboard)	149.710.000,00	2019	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Aplikasi E-SPTPD Untuk Penerapan pajak secara On-Line	194.590.000,00	2019	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi System Informasi Pembukuan Pajak Daerah	97.289.000,00	2019	PT. Geo Space Informatika.
Jumlah			3.108.527.205,00
Dinas Ketahanan Pangan			
Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar	25.428.000,00	2013	CV. Media Jasa
Aplikasi Software Database Kelompok Tani pada Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluh	29.080.000,00	2013	Toko JC Computer
Software Website (www.dkp.bengkalisab.go.id)	43.450.400,00	2016	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah			97.958.400,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Software Website (www.kesbangpol.bengkalisab.go.id)	49.000.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Jumlah			49.000.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Software /Aplikasi Elibrary/ fitur	21.158.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Software /Aplikasi Database berbasis WEB	20.993.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Visualisasi Website Ekominia Wisata Tasik Biospher (www.ecominawisatabiosphere.com)	57.924.467,00	2012	CV. Mitra Utama Konsultan
Software Website (www.balitbang.bengkalisab.go.id)	31.185.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Aplikasi sistem Keuangan	12.000.000,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Penatausahaan Keuangan	13.500.000,00	2016	CV. Mahmudal Fata Akbar
Aplikasi sistem Keuangan	31.037.600,00	2017	CV. Mahmudal Fata Akbar
Optimalisasi Website	19.990.300,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			207.788.993,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pendidikan			
Perangkat Lunak Sistem Operasi	21.000.000,00	2011	CV. Adira
Software / Aplikasi Komputer	401.955.000,00	2013	CV. Putra Wijaya
Belanja Modal Software / Aplikasi Komputer	96.066.500,00	2014	CV. Panjera Jaya
Software / Aplikasi Komputer	63.520.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Aplikasi Komputer SDN. 16 Pangkalan Batang	1.724.317,00	2016	CV. Panjera Jaya
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database	989.642.048,00	2016	CV. Bintang Nurjaya Lestari
Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum 2013 Jenjang SMP dan Sederajat Se-Kabupaten Bengkalis	936.232.000,00	2016	CV. Citra Gemilang
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SMP dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Gemilang Abadi
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif	374.741.813,00	2016	CV. Ade Liany
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif Untuk SMP dan Aplikasi Peningkatan Keterampilan TIK Berbasis Video Interaktif	1.582.578.486,00	2016	CV. Mifta Mafuh Mandiri
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database untuk Jenjang SMP	1.069.644.455,00	2016	CV. Ek Mandiri
Sumber Belajar Terpadu Berbasis IT	316.582.375,00	2016	UD. Putra Mas
Sarana dan Prasarana Pendukung Penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan Sederajat Se - Kabupaten Bengkalis	934.379.520,00	2016	CV. Prima Perkasa
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SD dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Surya Asyifa
Alat Peningkatan Mengajar Berbasis ICT	809.658.397,00	2016	CV. Riau Jaya
Komputer SDN. 35 Pematang Duku	1.729.240,00	2016	CV. Anugrah Persada
Perangkat Lunak Data Pendidikan dan Software Papan Informasi Pendidikan	122.898.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Perengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif Jenjang SD	607.951.341,00	2017	CV. Vibi Nabila



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif Jenjang SD	639.222.473,00	2017	CV. Berkah Karya Mandiri
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif	640.714.600,00	2017	CV. Megah Mandiri Sejahtera
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif	618.807.004,00	2017	CV. Cahaya Anugerah
Alat Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif Jenjang SMP	151.329.780,00	2018	CV. Putra Wijaya
Perangkat Lunak	173.910.000,00	2019	PT. Aditya Rama Daya Cipta
Aplikasi Master Bank Soal Tryout UN	76.335.900,00	2019	PT. Apsara Tiyasa Sambada
Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSvrSTDCore 2019 SINGL OLP 16Lic NL Acadm CoreLic	181.800.000,00	2019	PT. Astragraphia Xprins Indonesia
Jumlah	11.903.028.213,00		
Dinas Perikanan			
Software Website (www.dinaskelautan.bengkalis ab.go.id)(software oodelniter3)	39.800.000,00	2018	CV. Ikrar Utama
Jumlah	39.800.000,00		
Inspektorat			
Software /perangkat komputer (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan - SIMHP)	53.067.500,00	2015	Toko New Visicom
Jumlah	53.067.500,00		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Sistem Aplikasi Perizinan	96.078.702,00	2012	PT. Murfa Surya Mahardika
Software Website www.bpmp2L.co.id	38.821.000,00	2013	CV. Melco (Melayu Era Technology)
Sistem Informasi Manajemen (SKRD)	91.491.500,00	2013	CV. Junico Jaya
Sistem Informasi (PTSP)	282.381.000,00	2013	CV. Putra Malay Cooperation
SIM PTSP	9.194.400,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIMPEG	85.302.300,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Anjungan Informasi Mandiri	97.324.800,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIM PTSP	87.015.400,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
SIM SKRD	60.854.600,00	2015	CV. Wahana Mitra Intermedia
Sistem Layanan Antrian	48.317.500,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Arsipan Digital	49.052.400,00	2017	CV. Media Gema Mandiri



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sistem Informasi Berbasis IT	55.363.900,00	2017	CV. Tri Jaya Multimedia
ePINTER DPMPSP BENGKALIS	37.400.000,00	2018	CV. Tri Jaya Multimedia
waming syistem (e-PINTER)	31.300.000,00	2019	CV. Tri Jaya Multimedia
Mobile layanan perizinan dan non perizinan	34.000.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Arsip digital	33.800.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Tanda Tangan Digital	41.800.000,00	2019	CV. Tri Jaya Multimedia
Jumlah		1.179.497.502,00	
RSUD Kecamatan Mandau			
Aplikasi Komputer (Software Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG RSUD)	50.436.900,00	2014	CV. Mandiri Karya
Pengembangan SIM dan IT/ Pengembangan Website RSUD (www.rsudmandau.com)	28.820.000,00	2016	PT. Raja Sakti Telematika
Perfengkapan pendukung SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	9.459.000,00	2017	Toko Alfa Komputer
Jumlah		88.715.900,00	
Kantor Camat Mandau			
Software Website (https://camatmandau.bengkalis.kab.go.id)	27.182.500,00	2016	CV.Putra Malay Cooperation
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (PATEN)	98.207.500,00	2018	CV. Annur Kegemilangan
Jaringan "SIMANTAP" (Pembuatan Aplikasi SIMANTAP)	149.728.400,00	2019	CV. Tyra Abadi Engineering
Jumlah		275.118.400,00	
Kantor Camat Rupert Utara			
Software Website Kecamatan (http://camatrupatutara.bengkalis.kab.go.id)	30.000.000,00	2017	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		30.000.000,00	
Kantor Camat Bengkalis			
Software/Aplikasi dan Perangkat Aplikasi SI- KEL Kota Bengkalis. Alamat Lokal Server : 192.168.99.1/sikel	70.000.000,00	2017	CV. Panjera Jaya
Jumlah		70.000.000,00	
Kantor Camat Bantan			
Software Website (https://camatbantan.bengkalis.kab.go.id)	15.000.000,00	2017	Toko Smart Com
Jumlah		15.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Siak Kecil			
Software Website Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis (siap.appsiakkecil.id)	15.000.000,00	2020	Toko Hendri Computer
Jumlah			15.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Software Sistem Aplikasi Kearsipan, Disposisi dan Pelayanan Kepegawaian	82.280.000,00	2012	CV. Masya
Jumlah			82.280.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Software Voip WEB based Voip Software	34.521.000,00	2013	CV. Indra Rukmana Karya Teknik
Server Xeon E3110 (3.0 Ghz, Fsb 1333 Mhz, Chace 6Mb)	9.862.850,00	2011	CV. Adira
Jumlah			44.383.850,00
Dinas Lingkungan Hidup			
Software Website Bank Sampah (http://Jakstradakabbengkalis.id)	74.778.000,00	2019	CV. Karya Anugrah Konsultan
Jumlah			74.778.000,00
Dinas Pertanian			
Aplikasi Data Keuangan & Administrasi Umum (Perencanaan)	49.950.000,00	2010	CV. De Fibra Konsultan
Aplikasi Pada Laptop (Citra Alus + Handing)	45.126.647,77	2011	CV. Tanjung Tipah
Software Website www.disbunhut.bengkaliskab.go.id	40.642.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Software Website (www.distanbengkaliskab.go.id)	29.850.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			165.568.647,77
Dinas Perhubungan			
Software Website (www.dishubkominfo.bengkalis.kab.go.id)	44.979.000,00	2013	PT. Bumi Mama Indonusa
Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	57.532.000,00	2018	CV. Hanin Tama
SIM PKB (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi E-KIR Gadget	99.000.000,00	2020	CV. Yastini



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aplikasi SMS Gateway	38.500.000,00	2020	CV. Yustini
Jumlah		372.322.820,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Aplikasi Keuangan	34.850.000,00	2011	CV. Guna Dharna
Software Website (http://pupr.bengkalis.go.id/)	124.135.000,00	2015	PT. Hegar Daya
Aplikasi Surat Menyurat (Sistem Informasi Aplikasi Persuratan) (http://puprbengkalis.com/sipp/)	128.972.500,00	2019	CV.Mmw
Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis WEB (http://simawar.puprbengkalis.com/)	131.613.500,00	2019	CV.Riau Cyber Teknologi
Aplikasi Kerusakan Jalan Kabupaten	99.744.000,00	2020	CV. Web Dragon
Jumlah		519.315.000,00	
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan			
Aplikasi Database Tanah Berbasis Website (eSigab Perkimtan Bengkalis) di Google Playstore	144.550.000,00	2019	CV. Indosoft Media
Jumlah		144.550.000,00	
Dinas Pemadam Kebakaran			
Software Website (www.damkar.bengkalis.go.id)	39.024.000,00	2019	CV. Djitoe Pesisir
Jumlah		39.024.000,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Aplikasi Data Sistem Managemen Pemulihan dan Penanggulangan Bencana	48.058.200,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software Website (bpddamkar.bengkalis.go.id)	49.800.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website Pusdatin (www.bpbd.bengkalis.go.id)	49.720.000,00	2019	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		147.578.200,00	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Software Website (www.disdaldukb.bengkalis.go.id)	39.500.000,00	2018	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		39.500.000,00	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Software Website (www.dpk.bengkalis.go.id)	34.320.000,00	2015	CV. Putra Malay Corporation



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	49.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	35.625.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkaliskab.go.id)	36.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpp.bengkaliskab.go.id)	41.100.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	196.045.000,00		
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Software Website Pemkab Bengkalis (www.bengkaliskab.go.id)	29.056.500,00	2013	CV. Citra Buana
Aplikasi Buku Tamu Elektronik	60.039.400,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (pesonabengkalis.id)	39.600.000,00	2020	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	128.695.900,00		
Kantor Camat Bandar Laksamana			
Software Website (https://camatbandarlaksamana.web.id)	24.750.000,00	2020	PT. Azli Internet dan Teknologi Informasi
Jumlah	24.750.000,00		
Kantor Camat Tabang Muandau			
Software Website (https://camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id/)	29.700.000,00	2020	CV. Ikrar Utama
Jumlah	29.700.000,00		
Jumlah	21.708.968.193,57	21.708.968.193,57	

Tabel 5. 165 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Tidak Berwujud	21.708.968.193,57	21.096.919.193,57	612.049.000,00
Software	21.560.578.193,57	20.949.244.193,57	611.334.000,00
Lisensi	148.390.000,00	147.675.000,00	715.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.104.031.573,54)	(14.285.825.466,62)	(3.818.206.106,92)
Software	(18.000.158.573,54)	(14.196.791.466,62)	(3.803.367.106,92)
Lisensi	(103.873.000,00)	(89.034.000,00)	(14.839.000,00)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	3.604.936.620,03	6.811.093.726,95	(3.206.157.106,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 166 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku
Sekretariat Daerah	881.411.400,00	(808.115.900,00)	73.295.500,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	(429.444.533,33)	76.405.566,67
Dinas Kesehatan	357.780.596,00	(127.108.265,58)	230.672.330,42
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.670.000,00	(54.077.291,67)	145.592.708,33
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	(208.330.451,90)	16.163.931,10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	398.768.183,00	(197.697.345,00)	201.070.838,00
Badan Pendapatan Daerah	3.108.527.205,80	(2.407.152.601,63)	701.374.604,17
Dinas Kelahanan Pangan	97.958.400,00	(97.958.400,00)	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	(49.000.000,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	(196.095.099,25)	11.693.893,75
Dinas Pendidikan	11.903.028.213,00	(10.940.575.667,00)	962.452.546,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	(21.558.333,33)	18.241.666,67
Inspektorat	53.067.500,00	(53.067.500,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	(1.060.588.597,84)	118.908.904,16
RSUD Kecamatan Mandau	88.715.900,00	(86.548.212,50)	2.167.687,50
Kantor Camat Mandau	275.118.400,00	(122.003.022,91)	153.115.377,09
Kantor Camat Rupert Utara	30.000.000,00	(23.125.000,00)	6.875.000,00
Kantor Camat Bengkalis	70.000.000,00	(61.250.000,00)	8.750.000,00
Kantor Camat Bantan	15.000.000,00	(11.562.500,00)	3.437.500,00
Kantor Camat Siak Kecil	15.000.000,00	(625.000,00)	14.375.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	(82.280.000,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.383.850,00	(44.383.850,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	(31.157.500,00)	43.620.500,00
Dinas Pertanian	165.568.647,77	(165.568.647,77)	0,00
Dinas Perhubungan	372.322.820,00	(127.749.283,33)	244.573.536,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.315.000,00	(247.759.937,50)	271.555.062,50
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	(39.148.958,00)	105.401.042,00
Dinas Pemadam Kebakaran	39.024.000,00	(13.008.000,00)	26.016.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	(112.359.866,67)	35.218.333,33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	(172.670.000,00)	23.375.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	(21.395.833,33)	18.104.166,67
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	128.695.900,00	(87.365.975,00)	41.329.925,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Bandar Laksamana	24.750.000,00	(2.062.500,00)	22.687.500,00
Kantor Camat Talang Muandau	29.700.000,00	(1.237.500,00)	28.462.500,00
Jumlah	21.788.968.193,57	(18.104.031.573,54)	3.684.936.620,03

Tabel 5. 167 Rincian Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per OPD

II	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenalkani(Penurunan)
Sekretariat Daerah	881.411.400,00	806.556.400,00	74.855.000,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	505.850.100,00	0,00
Dinas Kesehatan	357.780.596,00	181.880.596,00	175.900.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.670.000,00	199.670.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	224.494.383,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	398.768.183,00	398.768.183,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.108.527.205,80	3.108.527.205,80	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	97.958.400,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Badan Peneliban dan Pengembangan	207.788.993,00	207.788.993,00	0,00
Dinas Pendidikan	11.903.028.213,00	11.903.028.213,00	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00
Inspektorat	53.067.500,00	53.067.500,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	1.179.497.502,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	88.715.900,00	88.715.900,00	0,00
Kantor Camat Mandau	275.118.400,00	275.118.400,00	0,00
Kantor Camat Rupa Utara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Kantor Camat Bantan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Kantor Camat Siak Kecil	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.383.850,00	44.383.850,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	74.778.000,00	0,00
Dinas Pertanian	165.568.647,77	165.568.647,77	0,00
Dinas Perhubungan	372.322.820,00	234.822.820,00	137.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.315.000,00	419.571.000,00	99.744.000,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	144.550.000,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	39.024.000,00	39.024.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	147.578.200,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	196.045.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	128.695.900,00	89.095.900,00	39.600.000,00
Kantor Camat Bander Laksamana	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
Jumlah	21.708.968.193,57	21.096.919.193,57	612.049.000,00

Tabel 5. 168 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	(808.115.900,00)	(771.962.600,00)	(36.153.300,00)
Sekretariat DPRD	(429.444.533,33)	(386.689.131,33)	(42.755.402,00)
Dinas Kesehatan	(127.108.265,58)	(88.645.133,25)	(38.463.132,33)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(54.077.291,67)	(4.159.791,67)	(49.917.500,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(208.330.451,90)	(199.897.080,90)	(8.433.371,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(197.697.345,00)	(102.409.849,00)	(95.287.496,00)
Badan Pendapatan Daerah	(2.407.152.601,63)	(2.042.449.001,63)	(364.703.600,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(97.958.400,00)	(91.621.883,33)	(6.336.516,67)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	(196.095.099,25)	(183.338.124,25)	(12.756.975,00)
Dinas Pendidikan	(10.940.575.667,00)	(8.283.196.063,00)	(2.657.379.604,00)
Dinas Perikanan	(21.558.333,33)	(11.538.333,33)	(10.020.000,00)
Inspektorat	(53.067.500,00)	(53.067.500,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.060.588.597,84)	(977.830.147,84)	(82.758.450,00)
RSUD Kecamatan Mandau	(86.548.212,50)	(77.578.879,17)	(8.969.333,33)
Kantor Camat Mandau	(122.003.022,91)	(53.789.724,99)	(68.213.297,92)
Kantor Camat Rupa Utara	(23.125.000,00)	(15.625.000,00)	(7.500.000,00)
Kantor Camat Bengkalis	(61.250.000,00)	(43.750.000,00)	(17.500.000,00)
Kantor Camat Bantan	(11.562.500,00)	0,00	(11.562.500,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(625.000,00)	0,00	(625.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(82.280.000,00)	(82.280.000,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(44.383.850,00)	(44.383.850,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(31.157.500,00)	(12.463.000,00)	(18.694.500,00)
Dinas Pertanian	(165.568.647,77)	(154.494.481,10)	(11.074.166,67)
Dinas Perhubungan	(127.749.283,33)	(68.829.983,33)	(58.919.300,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(247.759.937,50)	(180.535.437,50)	(67.224.500,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	(39.148.958,00)	(3.011.458,00)	(36.137.500,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(13.008.000,00)	(3.252.000,00)	(9.756.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(112.359.866,67)	(84.548.804,67)	(27.811.062,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(172.670.000,00)	(137.376.250,00)	(35.293.750,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(21.395.833,33)	(11.520.833,33)	(9.875.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(87.365.975,00)	(66.581.125,00)	(20.784.850,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	(2.062.500,00)	0,00	(2.062.500,00)
Kantor Camat Talang Muandau	(1.237.500,00)	0,00	(1.237.500,00)
Jumlah	(18.104.031.573,54)	(14.285.825.466,62)	(3.818.206.106,92)

5. Aset Lain-lain

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
205.137.864.730,88	101.928.248.672,27	103.209.616.058,61

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 seluruhnya diperoleh dari hasil inventarisasi karena adanya reklasifikasi dari aset tetap yang tidak layak disajikan dalam aset tetap. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp252.944.364.331,22 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp47.806.499.600,34. Rincian Aset lain-lain per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lain-lain	252.944.364.331,22	156.193.019.020,84	96.751.345.310,38
Aset Rusak Berat	39.435.680.705,64	57.473.714.706,65	(18.038.034.001,01)
Aset Tidak Ditemukan	36.802.652.454,03	98.719.304.314,19	(61.916.651.860,16)
Aset Lain-lainnya	176.706.031.171,55	0,00	176.706.031.171,55
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(47.806.499.600,34)	(54.264.770.348,57)	6.458.270.748,23
Aset Rusak Berat	(36.052.316.509,06)	(40.175.924.842,06)	4.123.608.333,00
Aset Tidak Ditemukan	(7.764.374.758,28)	(14.088.845.506,51)	6.324.470.748,23
Aset Lain-lainnya	(3.989.808.333,00)	0,00	(3.989.808.333,00)
Jumlah	205.137.864.730,88	101.928.248.672,27	103.209.616.058,61

Tabel 5. 170 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Sekretariat Daerah	1.878.285.866,00	(983.308.478,67)	894.977.387,33
Sekretariat DPRD	821.046.944,60	(709.992.716,95)	111.054.227,65
Dinas Kesehatan	2.184.713.610,00	(1.186.914.730,00)	1.017.798.880,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.602.976.810,00	(1.602.976.810,00)	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	371.849.100,00	(244.851.112,00)	126.997.988,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.377.166.492,74	(1.373.382.805,00)	3.783.687,74
Badan Pendapatan Daerah	247.635.000,00	(247.635.000,00)	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	600.246.379,15	(540.834.973,83)	59.411.405,32
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	177.725.582,13	(172.644.991,00)	5.080.591,13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	348.260.625,00	(290.195.298,00)	58.065.327,00
Dinas Ketahanan Pangan	588.551.448,46	(296.406.445,57)	292.145.002,89
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	622.783.364,67	(570.161.992,43)	52.621.372,24
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.969.037.263,00	(1.601.807.492,00)	3.367.229.771,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	867.285.127,00	(787.493.055,33)	79.792.071,67
Dinas Pendidikan	24.105.007.000,00	(3.989.808.333,00)	20.115.198.667,00
Dinas Perikanan	8.976.318.002,03	(2.097.844.198,59)	6.878.473.803,44
Inspektorat	1.703.921.960,00	(1.689.254.376,00)	14.667.584,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.086.151,00	(86.767.167,33)	169.318.983,67
Dinas Sosial	807.325.179,72	(684.093.151,13)	123.232.028,59
RSUD Bengkalis	9.175.484.198,77	(9.175.484.198,77)	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	1.181.407.550,00	(769.761.850,00)	411.645.700,00
Kantor Camat Mandau	1.597.107.811,79	(1.308.336.032,79)	288.771.779,00
Kantor Camat Rupat	42.025.000,00	(39.008.697,92)	3.016.302,08
Kantor Camat Rupat Utara	79.980.581,81	(49.954.491,54)	30.026.090,27
Kantor Camat Bengkalis	335.117.060,14	(179.241.269,23)	155.875.790,91
Kantor Camat Bukit Batu	186.993.599,00	(163.924.724,00)	23.068.875,00
Kantor Camat Bantan	1.049.010.188,00	(891.651.835,00)	157.358.353,00
Kantor Camat Siak Kecil	543.532.861,66	(247.852.208,99)	295.680.652,67
Kantor Camat Pinggir	666.027.990,00	(666.027.990,00)	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.049.893.123,78	(979.376.023,00)	70.517.100,78
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.558.280.172,00	(4.506.828.578,53)	1.051.451.593,47
Dinas Lingkungan Hidup	1.856.138.117,04	(1.129.904.059,00)	726.234.058,04
Dinas Pertanian	4.788.551.460,34	(1.612.790.526,67)	3.175.760.933,67
Dinas Perhubungan	1.729.193.897,00	(403.536.374,00)	1.325.657.523,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.048.556.103,55	(3.550.450.000,00)	160.498.106.103,55
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	955.320.088,00	(163.333,33)	955.156.754,67
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246.693.865,77	(237.928.056,00)	8.765.809,77
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.348.828.757,07	(2.757.906.224,74)	2.590.922.532,33
Jumlah	252.944.364.331,22	(47.806.499.600,34)	205.137.864.730,88



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.3.2. Kewajiban

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

Jumlah Kewajiban sebesar Rp82.537.732.628,60 dan Rp24.559.872.739,25 merupakan nilai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Kewajiban

Jenis Kewajiban	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

A. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp82.537.732.628,60 dan Rp24.559.872.739,25 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 172 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)
Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	57.533.376.593,10	180.617.509,75	57.352.759.083,35
Hutang Pihak Ketiga	22.100.255.714,50	21.185.961.691,50	914.294.023,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.904.100.321,00	3.190.512.616,00	(286.412.295,00)
Jumlah	82.537.732.628,60	24.559.872.739,25	57.977.859.889,35

1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)

Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp0,00 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

Rincian perhitungan pihak ketiga sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 173 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Kantor Camat Rupert Utara	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)
Jumlah	0,00	2.780.922,00	(2.780.922,00)

2. Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00

Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp948.812.752,57, berdasarkan surat Bupati Bengkalis Nomor 900/Keu/IV/697/2009 Tanggal 28 April 2009 perihal Permohonan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah disetujui sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-750/MK.05/2011 Tanggal 23 November 2011 perihal persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah. Penghapusan mutlak akan dilaksanakan paling cepat dua tahun setelah tanggal penetapan penghapusan bersyarat dimaksud.

Sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan tersebut diatas, maka antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah ditandatangani Naskah Perjanjian Perubahan (Amandemen) Pinjaman No. AMA-461/SLA-1085/DSMI/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Berdasarkan Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau tentang Hutang Biaya Pinjaman Luar Negeri Nomor SLA-1085/DP3/1998 tanggal 23 Desember 1998, dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA: BA-009/WPB.04/2015 diketahui bahwa saldo akhir hutang biaya pinjaman luar negeri Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp948.812.752,57.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 833/KMK.05/2016 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Karawang dan 22 (Dua Puluh Dua) Penanggung Utang Lainnya, Pinjaman Luar Negeri Kabupaten Bengkalis dengan nomor Pinjaman SLA-1085/DP3/1998 sebagaimana diubah dengan AMA-461/SLA-1085/DSMI/2012 sebesar Rp948.812.752,57 telah dihapuskan hak tagih atas piutang negara tersebut.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
57.533.376.593,10	180.617.509,75	57.352.759.083,35

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.533.376.593,10. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp180.617.509,75 dengan rincian :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 174 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD

OPD	Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo 2020	Saldo 2019
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	169.348.350,00	137.595.843,08
	Sewa Lahan Bank Riau	81.666.666,76	0,00
RSUD Bengkalis	Sewa Lahan ATM Bank BRI	19.000.000,00	16.000.000,00
	Sewa Lahan ATM Bank	119.666.666,67	14.355.000,00
RSUD Kecamatan Mandau	Sewa Lahan ATM Bank	119.666.666,67	14.355.000,00
PPKD	Lebih Bayar DBH Pusat (Dana Perimbangan)	57.132.028.243,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Sewa Lahan Gardu Listrik	11.666.666,67	12.666.666,67
Jumlah		57.533.376.593,10	180.617.509,75

4. Hutang Kepada Pihak Ketiga

31 Des 2020	31 Des 2019	Konalkan/(Penurunan)
22.100.255.714,50	21.185.961.691,50	914.294.023,00

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.100.255.714,50. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.185.961.691,50.

Rincian hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp22.100.255.714,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Mutasi Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang Kepada Pihak Ketiga	APBD	BLUD	Jumlah
Saldo Awal Hutang	7.494.426.296,50	13.691.535.395,00	21.185.961.691,50
Koreksi Hutang	911.162.145,00	(14.166,00)	911.147.979,00
Hutang 2019 di Bayar 2020	449.314.855,00	13.691.521.229,00	14.140.836.084,00
Penambahan Tahun 2020	0,00	14.143.982.128,00	14.143.982.128,00
Saldo	7.956.273.596,50	14.143.982.128,00	22.100.255.714,50

Tabel 5. 176 Rincian Hutang Kepada Pihak Ketiga per OPD

Hutang Kepada Pihak Ketiga	Saldo 2020	Saldo 2019	Konalkan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	542.937.176,00	134.068.000,00	408.869.176,00
Badan Pendapatan Daerah	10.408.000,00	10.408.000,00	0,00
Satuan Polisi Pemong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkalis	14.143.982.128,00	10.847.083.122,00	3.296.899.006,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	2.844.452.273,00	(2.844.452.273,00)
Kantor Camat Mandau	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Bengkalis	0,00	0,00	0,00
PPKD	1.181.932.929,00	1.111.840.960,00	70.091.969,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	444.730.000,00	12.529.000,00	432.201.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.465.671.481,50	5.914.986.336,50	(449.314.855,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	260.644.000,00	260.644.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.100.255.714,50	21.185.981.691,50	914.294.023,00

Terhadap penambahan Utang kepada Pihak Ketiga pada PPKD, merupakan Utang Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp70.091.969,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 300/KPTS/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, jumlah bantuan yang diterima oleh Partai PKS sebesar Rp278.580.500,00, namun hanya dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp208.488.531,00. Selisih tersebut di akui sebagai Utang Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021.

Rincian Hutang Pihak Ketiga dapat dilihat pada:

Lampiran Hutang Pihak Ketiga

5. Hutang Jangka Pendek Lainnya

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	2.904.100.321,00	3.190.512.616,00	(286.412.295,00)

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.904.100.321,00. Bila dibandingkan dengan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.190.512.616,00.

Rincian hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.904.100.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Rincian Hutang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	251.633.925,00	262.396.689,00	(10.762.764,00)
Sekretariat DPRD	4.134.000,00	76.192.553,00	(72.058.553,00)
Dinas Kesehatan	41.812.473,00	56.369.182,00	(14.556.709,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.076.880,00	15.741.661,00	7.335.219,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.383.818,00	11.940.054,00	1.443.764,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.305.923,00	25.622.064,00	1.683.859,00
Badan Pendapatan Daerah	31.301.400,00	35.924.247,00	(4.622.847,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	8.341.379,00	9.281.090,00	(939.711,00)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12.491.306,00	15.132.000,00	(2.640.692,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.415.701,00	8.503.410,00	912.291,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.882.064,00	8.175.231,00	706.833,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.313.404,00	5.643.779,00	(330.375,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	13.208.150,00	16.559.911,00	(3.351.761,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	8.312.399,00	9.443.132,00	(1.130.733,00)
Dinas Pendidikan	1.105.000,00	19.799.562,00	(18.694.562,00)
Dinas Perikanan	14.454.549,00	22.083.581,00	(7.629.032,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.587.511,00	27.869.818,00	(7.082.307,00)
Inspektorat	8.907.331,00	11.185.595,00	(2.278.264,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.279.321,00	15.403.439,00	(124.118,00)
Dinas Sosial	11.227.248,00	10.754.326,00	472.922,00
RSUD Bengkalis	114.807.250,00	336.174.100,00	(221.366.850,00)
RSUD Kecamatan Mandau	164.933.913,00	168.020.635,00	(3.086.722,00)
Kantor Camat Mandau	35.991.975,00	34.106.040,00	1.885.935,00
Kantor Camat Rupal	14.453.440,00	8.079.040,00	6.374.400,00
Kantor Camat Rupal Utara	3.495.285,00	3.092.888,00	402.397,00
Kantor Camat Bengkalis	17.048.864,00	18.065.911,00	(1.017.047,00)
Kantor Camat Bukit Batu	9.759.972,00	8.962.169,00	797.803,00
Kantor Camat Bantan	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	3.211.285,00	2.856.521,00	354.764,00
Kantor Camat Pinggir	6.316.593,00	5.872.479,00	444.114,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	18.848.764,00	16.449.067,00	2.399.697,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	44.871.099,00	40.829.631,00	4.041.468,00
Dinas Lingkungan Hidup	16.414.040,00	21.168.477,00	(4.754.437,00)
Dinas Pertanian	11.685.677,00	11.287.577,00	398.100,00
Dinas Perhubungan	45.201.414,00	54.355.902,00	(9.154.488,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.871.161,00	22.178.926,00	(5.307.765,00)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	1.788.267.651,00	1.687.946.321,00	100.321.330,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.781.938,00	8.353.000,00	(1.571.061,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	12.422.968,00	12.973.042,00	(550.074,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.120.471,00	8.231.562,00	(111.091,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.979.721,00	35.617.970,00	(19.638.249,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.411.170,00	12.035.867,00	(624.697,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.031.885,00	10.034.167,00	(3.002.282,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.904.100.321,00	3.190.512.616,00	(286.412.295,00)

5.3.3. Ekuitas

	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	9.215.647.863.998,17	9.886.020.878.913,96	(670.373.014.915,78)

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.215.647.863.998,17 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.886.020.878.913,95.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkalis.

5.4.1. Pendapatan - LO

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
2.450.428.050.457,24	4.150.634.368.095,16	(1.700.206.317.637,92)

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar Rp2.450.428.050.457,24 mengalami penurunan sebesar Rp1.700.206.317.637,92 atau 40,96% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4.150.634.368.095,16 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.178 Realisasi Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23
Pendapatan Transfer	2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)
Lain-lain Pendapatan yang sah	101.363.682.402,06	91.600.063.464,21	9.763.618.937,85
Jumlah	2.450.428.050.457,24	4.150.634.368.095,16	(1.700.206.317.637,92)

5.4.1.A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA. 2020 dan TA. 2019. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp251.321.533.656,18, Jika dibandingkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp227.541.008.898,95 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp23.780.524.757,23 atau 10,45%. Dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.179 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaihan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Daerah	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)
Pendapatan Retribusi Daerah	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)
Lain-lain PAD yang Sah	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91
Jumlah	251.321.533.656,18	227.541.008.898,95	23.780.524.757,23

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci dan di jelaskan sebagai berikut :

1). Pendapatan Pajak Daerah

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaihan/(Penurunan)
	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) yang ditetapkan tahun 2020.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp71.112.407.050,33 jika dibandingkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 74.762.691.287,12 Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.650.284.236,79 atau 3,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaihan/(Penurunan)
Pajak Hotel	1.488.664.571,25	3.407.167.958,81	(1.918.503.387,56)
Pajak Restoran	8.794.951.522,00	10.747.087.232,00	(1.952.135.710,00)
Pajak Hiburan	671.437.300,00	2.042.325.384,00	(1.370.888.084,00)
Pajak Reklame	398.743.393,08	399.882.894,17	(1.139.501,09)
Pajak Penerangan Jalan PLN	19.340.014.933,00	18.623.714.559,00	716.300.374,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	13.995.255.847,00	11.558.780.582,04	2.436.475.264,96
Pajak Parkir	288.723.466,00	463.670.066,00	(176.946.600,00)
Pajak Air Tanah	531.112.588,00	675.773.039,30	(144.660.451,30)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Sarang Burung Walet	337.783.119,00	368.332.930,00	(30.549.811,00)
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	3.936.415.145,00	4.520.885.840,00	(584.470.695,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18.043.214.206,00	17.481.789.111,00	561.425.095,00
Pajak BPHTB	4.288.090.960,00	4.473.281.690,80	(185.190.730,80)
Jumlah	72.112.407.050,33	74.762.691.287,12	(2.650.284.236,79)

Tabel 5.181 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pajak Hotel	1.509.075.439,25	1.488.664.571,25	20.410.868,00
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Hotel 2019 sebesar Rp20.410.868,00
Pajak Restoran	8.781.178.472,00	8.794.951.522,00	(13.773.050,00)
			Koreksi Kurang catat Piutang terdiri dari Pajak Restoran sebesar Rp16.012.850,00,
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Restoran 2019 sebesar Rp2.239.800,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Hiburan	672.591.600,00	671.437.300,00	1.154.300,00
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Restoran 2019 sebesar Rp1.154.300,00
Pajak Reklame	449.235.275,00	398.743.393,08	50.491.881,92
			Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp137.595.843,085
			Pembayaran piutang tahun 2020 sebesar Rp927.500,00
			Pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (2020) sebesar Rp(169.348.350,00)
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(19.666.875,00)
Pajak Penerangan Jalan PLN	19.340.014.933,00	19.340.014.933,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Penerangan Jalan Non PLN	13.827.016.897,00	13.995.255.847,00	(168.238.950,00)
			Koreksi Kurang catat Piutang Pajak sebesar Pajak PPJ NON PLN sebesar Rp168.238.950,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Parkir	286.723.466,00	286.723.466,00	0,00
Pajak Air Tanah	557.236.551,00	531.112.588,00	26.123.963,00
			Penerimaan Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(45.032.614,00)
			Penerimaan Pembayaran Piutang 2019 sebesar Rp18.908.651,00
Pajak Sarang Burung Walet	336.843.119,00	337.783.119,00	(940.000,00)
			Koreksi Kurang catat Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp940.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	3.936.415.145,00	3.936.415.145,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9.680.396.732,00	18.043.214.206,00	(8.362.817.474,00)
			Penerimaan Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(80.363.925,00)
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp9.169.181.399,00
Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	4.288.090.960,00	4.288.090.960,00	0,00
Jumlah	63.664.818.589,25	72.112.407.050,33	(8.447.588.461,08)

2). Pendapatan Retribusi Daerah

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)

Masing – masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan LO tahun 2020 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.182 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	472.075.000,00	652.200.000,00	(180.125.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	218.353.000,00	232.043.000,00	(13.690.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.316.189.500,00	1.447.064.500,00	(130.875.000,00)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	0,00	16.650.000,00	(16.650.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	133.005.000,00	91.940.100,00	41.064.900,00
Jumlah	3.342.948.500,00	3.632.694.600,00	(289.746.100,00)

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.183 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	293.260.000,00	370.230.000,00	(76.970.000,00)
Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	431.340.000,00	376.410.000,00	54.930.000,00
Retribusi Terminal	8.536.000,00	14.145.000,00	(5.609.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	121.195.000,00	113.635.000,00	7.560.000,00
Retribusi Tempat Rumah Potong Hewan	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Retribusi Jasa Kepetabuhan	3.583.885.839,00	5.056.743.949,00	(1.472.858.110,00)
Jumlah	4.946.249.089,00	5.947.163.949,00	(1.000.914.860,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.184 Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	570.000,00	3.820.000,00	(3.250.000,00)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Jumlah	858.688.236,34	628.024.615,23	230.663.621,11

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah

Tabel 5.185 Realisasi Pendapatan Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.120.000,00	53.560.000,00	(1.440.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	114.480.000,00	105.460.000,00	9.020.000,00
Jumlah	166.600.000,00	159.020.000,00	7.580.000,00

b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.186 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00
Jumlah	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00

c) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.187 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Jumlah	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.188 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	0,00	16.650.000,00	(16.650.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
Jumlah	7.250.000,00	16.650.000,00	(9.400.000,00)

e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Tabel 5.189 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)

f) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.190 Realisasi Pendapatan Retribusi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.750.000,00	18.700.000,00	(16.950.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	6.715.000,00	8.175.000,00	(1.460.000,00)
Jumlah	8.465.000,00	26.875.000,00	(18.410.000,00)

g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.191 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	210.853.000,00	232.043.000,00	(21.190.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	133.005.000,00	91.940.100,00	41.064.900,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	385.040.000,00	376.410.000,00	8.630.000,00
Jumlah	728.898.000,00	700.393.100,00	28.504.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

h) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.192 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Jumlah	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00

i) Dinas Pertanian

Tabel 5.193 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pertanian

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00
Jumlah	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00

j) Dinas Perhubungan

Tabel 5.194 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	472.075.000,00	652.200.000,00	(180.125.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.316.189.500,00	1.447.064.500,00	(130.875.000,00)
Retribusi Terminal	8.536.000,00	14.145.000,00	(5.609.000,00)
Retribusi Jasa Kepelabuhan	3.583.885.839,00	5.056.743.949,00	(1.472.858.110,00)
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	570.000,00	3.820.000,00	(3.250.000,00)
Jumlah	5.381.256.339,00	7.173.973.449,00	(1.792.717.110,00)

k) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.195 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	239.390.000,00	297.970.000,00	(58.580.000,00)
Jumlah	239.390.000,00	297.970.000,00	(58.580.000,00)

l) Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.196 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakikan/(Penurunan)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00
Jumlah	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp9.147.885.825,34 jika dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp10.207.883.164,00 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.059.997.339,00 atau 10,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.197 Realisasi Pendapatan Retribusi Per OPD

OPD	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenakanan (Penurunan)
Sekretariat Daerah	166.600.000,00	159.020.000,00	7.580.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	288.600.000,00	0,00	288.600.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.250.000,00	16.650.000,00	(9.400.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	569.518.236,34	624.204.615,23	(54.686.378,89)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	8.465.000,00	26.875.000,00	(18.410.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	782.698.000,00	700.393.100,00	82.304.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.161.435.000,00	1.159.991.000,00	1.444.000,00
Dinas Pertanian	16.895.000,00	16.000.000,00	895.000,00
Dinas Pertubungan	5.381.256.339,00	7.173.973.449,00	(1.792.717.110,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239.390.000,00	297.970.000,00	(58.580.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	32.806.000,00	9.085.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	483.887.250,00	0,00	483.887.250,00
Jumlah	9.147.885.825,34	10.207.883.164,23	(1.059.997.338,89)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.198 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.161.435.000,00	1.161.435.000,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	487.575.000,00	472.075.000,00	15.500.000,00
			Selisih antara pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp15.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	210.853.000,00	218.353.000,00	(7.500.000,00)
			Koreksi Kurang catat Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp7.500.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.316.189.500,00	1.316.189.500,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	41.891.000,00	41.891.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	133.005.000,00	133.005.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.887.250,00	483.887.250,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	293.260.000,00	293.260.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	211.840.000,00	431.340.000,00	(219.500.000,00)
			Pembayaran Piutang dan Pengakuan Piutang tahun berjalan sebesar Rp.173.200.000
			Koreksi Kurang catat Piutang Retribusi Pasar Grosir sebesar Rp46.300.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Retribusi Terminal	8.536.000,00	8.536.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Prasangrahan/Villa	121.195.000,00	121.195.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.603.566.399,00	3.583.885.839,00	19.680.560,00
			Selisih antara pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp54.020.852,00
			Pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp34.340.292,00.
Retribusi izin Usaha Perikanan	288.600.000,00	288.600.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00
Retribusi izin mendirikan Bangunan	569.518.236,34	569.518.236,34	0,00
Retribusi Izin Trayek/ Kartu Pengawasan (KP)	570.000,00	570.000,00	0,00
	8.956.066.385,34	9.147.885.825,34	(191.819.440,00)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00	(7.867.743.719,00)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.920.504.935,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp28.788.248.654,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp7.867.743.719,00 atau 27,33%.

4) Lain-lain PAD yang sah

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut jenisnya adalah :

Tabel 5.199 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	3.256.110.350,00	9.158.047.982,00	(5.901.937.632,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas	830.541.708,00	938.861.598,00	(108.319.890,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	19.481.596.510,00	2.983.980.005,00	16.497.616.505,00
Pendapatan Denda Pajak	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.147.958.273,22	88.497.550,00	7.059.460.723,22
Pendapatan dari Pengembalian	8.192.938.857,72	17.098.255.975,60	(8.905.317.117,88)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	88.976.081.659,00	71.000.485.734,00	17.975.595.925,00
Pendapatan Kerja Sama BLUD	362.606.798,24	(2.307.779.410,00)	2.670.386.208,24
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	43.778.333,33	183.909.921,00	(140.131.587,67)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Pendapatan LO lain-lain BLUD	6.564.483.611,00	0,00	6.564.483.611,00
Jumlah	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91

Tabel 5.200 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Hasil Penjualan Perikanan	303.269.700,00	303.269.700,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	723.380.000,00	0,00	723.380.000,00
			Pendapatan dari penjualan Aktiva Tetap tahun 2020 sebesar Rp723.380.000,00
Penerimaan Jasa Giro Daerah	3.256.110.350,00	3.256.110.350,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas	830.541.708,00	830.541.708,00	0,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	19.481.596.510,00	19.481.596.510,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	91.501.945,00	91.501.945,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.147.958.273,22	7.147.958.273,22	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	8.192.938.857,72	8.192.938.857,72	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	0,0	1.000.000,00	(1.000.000,00)
			Pendapatan sewa diterima dimuka 2020 atas sewa/ Pemanfaatan Kekayaan Daerah Disbudparpora sebesar Rp.1.000.000,00
Pendapatan BLUD	104.360.891.054,00	95.946.950.401,57	8.413.940.652,43
			Pembayaran Piutang BPJS dan Jamkesda tahun 2019 sebesar Rp 4.908.311.712,00 dan Piutang BPJS dan Jamkesda Meranti tahun 2020 Sebesar pada RSUD Bengkalis Rp 2.477.056.791,00
			Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020 pada RSUD Bengkalis Sebesar Rp 84.666.666,76
			Pembayaran Piutang BLUD RSUD Mandau 2019 sebesar Rp5.792.707.398,00 dan Piutang BLUD 2020 sebesar Rp. 5.792.707.398,00
			Pendapatan diterima dimuka BLUD RSUD Mandau tahun 2020 sebesar Rp105.311.666,67
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.888.868.100,00	13.888.868.100,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	107.423.508,00	0,00	107.423.508,00
			Realisasi Hasil Pengelolaan dana Bergulir atau penerimaan pendapatan investasi non permanen untuk LRA dikelompokkan kedalam lain-lain PAD yang sah lainnya, dan untuk LO tidak terealisasi karena masuk ke dalam pendapatan lainnya.
Jumlah	158.384.480.005,94	149.140.735.845,51	2.571.837.041,43

Realisasi akun lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan

Tabel 5.201 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Jumlah	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

b) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.202 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Denda	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Jumlah	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)

c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.203 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Jumlah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

d) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.204 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)
Jumlah	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)

e) RSUD Bengkulu

Tabel 5.205 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkulu

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	41.055.629.564,00	40.088.404.369,00	967.225.195,00
Pendapatan Kerja sama BLUD	288.055.577,24	170.592.442,00	117.463.135,24
Pendapatan Jasa Giro BLUD	6.564.483.611,00	0,00	6.564.483.611,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	835.000,00	(740.579.351,00)	741.414.351,00
Jumlah	47.909.003.752,24	39.518.417.460,00	8.390.586.292,24

f) RSUD Kec. Mandau

Tabel 5.206 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kec. Mandau

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaiakan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	47.920.452.095,00	30.912.081.365,00	17.008.370.730,00
Pendapatan Jasa Giro BLUD	74.551.221,00	64.060.220,00	10.491.001,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	42.943.333,33	(1.617.942.800,00)	1.660.886.133,33
Jumlah	48.037.946.649,33	29.358.198.785,00	18.679.747.864,33



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

g) PPKD

Tabel 5.207 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah PPKD

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	3.256.110.350,00	9.158.047.982,00	(5.901.937.632,00)
Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas	830.541.708,00	938.861.598,00	(108.319.890,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	19.481.596.510,00	2.983.980.005,00	16.497.616.505,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.147.958.273,22	88.497.550,00	7.059.460.723,22
Pendapatan dari Pengembalian	8.192.938.857,72	17.098.255.975,60	(8.905.317.117,88)
Jumlah	38.909.145.698,94	30.267.643.110,60	8.641.502.588,34

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Realisasi Pendapatan tersebut untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp149.140.735.845,51. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp113.782.185.793,60 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp35.358.550.051,91 atau 31,08% dan di rincikan sebagai berikut:

Tabel 5.208 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Per OPD

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	13.888.868.100,00	13.567.724.070,00	321.144.030,00
Badan Pendapatan Daerah	91.501.945,00	511.420.368,00	(419.918.423,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	303.269.700,00	557.782.000,00	(254.512.300,00)
RSUD Bengkalis	47.909.003.752,24	39.518.417.460,00	8.390.586.292,24
RSUD Kec. Mandau	48.037.946.649,33	29.358.198.785,00	18.679.747.864,33
PPKD	38.909.145.698,94	30.267.643.110,60	8.641.502.588,34
Jumlah	149.140.735.845,51	113.782.185.793,60	35.358.550.051,91

5.4.1.B. Pendapatan Transfer

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.097.742.834.399,00 Jika dibandingkan Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebesar Rp3.831.493.295.732,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.733.750.461.333,00 atau 45,25%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.209 Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.940.237.142.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	35.625.236.000,00	131.071.695.996,00	(95.446.459.996,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	121.880.455.890,00	140.199.997.667,00	(18.319.541.777,00)
Jumlah	2.097.742.834.399,00	3.831.493.295.732,00	(1.733.750.461.333,00)

Tabel 5.210 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Transfer

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.275.653.458.310,00	1.940.237.142.509,00	335.416.315.801 Pembayaran Piutang Dana Perimbangan DBH Pusat sebesar Rp.335.416.315.801
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	166.657.936.000,00	35.625.236.000,00	131.032.700.000 Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di LO sebesar Rp.131.032.700.000
Transfer Pemerintah Provinsi	131.286.085.508,49	121.880.455.890,00	9.405.629.618,49 Merupakan total pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp.15.279.931.235,00 dan penambahan piutang tahun 2020 sebesar Rp.5.874.301.616,51
Jumlah	2.573.597.479.818,49	2.097.742.834.399,00	475.854.645.419,49

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1.940.237.142.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2020:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.211 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil Pajak	877.285.068.514,00	1.615.971.473.471,00	(738.686.404.957,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak	516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)
Dana Alokasi Umum	338.731.609.000,00	373.268.646.000	(34.537.037.000,00)
Dana Alokasi Khusus	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)
Jumlah	1.940.237.142.509,00	3.560.221.602.069,00	(1.619.984.459.560,00)

Tahun 2020 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1.940.237.142.509,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp3.560.221.602.069,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.619.984.459.560,00 atau 45,54% dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil Pajak

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
	877.285.068.514,00	1.615.971.473.471,00	(738.686.404.957,00)

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp877.285.068.514,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.615.971.473.471,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp738.686.404.957,00 atau 45,71%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Non Migas, Sektor Pertambangan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Bagi Hasil Bagian Pemerintah Pusat bagi Rata serta bagi Hasil PBB Sektor lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.212 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil PBB	820.973.572.570,00	1.392.038.230.183,00	(571.064.657.613,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan	0,00	183.689.768.461,00	(183.689.768.461,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan	3.860.526.654,00	2.312.014.532,00	1.548.512.122,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	3.399.342.940,00	1.472.887.949,00	1.926.454.991,00
Bagi Hasil PPh 21, 25 & 29	48.992.326.114,00	36.237.590.476,00	12.754.735.638,00
Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	0,00	196.640.930,00	(196.640.930,00)
Bagi Hasil PBB Sektor lainnya	59.300.236,00	24.340.939,00	34.959.297,00
Jumlah	877.285.068.514,00	1.615.971.473.470,00	(738.686.404.956,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp. 3.358.973.000,00. Bagian Daerah sebesar Rp1.181.639.653.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp8.522.079.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp5.305.384.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.167.772.363.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp39.827.000,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp39.512.152.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp378.759.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp206.320.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp38.925.745.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp1.328.000,00. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 PBB menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Bagi Rata sebesar Rp1.153.653.617,00. Bagian Daerah sebesar Rp454.751.760.737,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp6.947.080.845,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp3.758.033.671,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp428.071.080.886,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp94.810.172,00. Biaya Pemungutan sektor Perkebunan sebesar Rp308.759.246,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp146.145.941,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp14.269.035.913,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.160.446,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketentuan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp51.941.949.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp1.013.081.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp58.928.868.000,00. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan TA 2018 yang Belum diselesaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp14.124.970.299,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp485.159.598,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp13.639.810.701,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp516.079.604.100,00 jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.308.056.110.304,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp791.976.506.204,00 atau 60,55%. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari dana reboisasi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.213 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	0,00	1.588.687.856,00	(1.588.687.856,00)
Bagi Hasil iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti)	773.227.050,00	2.049.178.168,00	(1.275.951.118,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	784.599.000,00	760.783.703,00	23.815.297,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	508.889.468.800,00	1.298.891.397.177,00	(790.001.928.377,00)
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	124.200,00	0,00	124.200,00
Bagi Hasil dari iuran Hak Penguasa Hutan	5.632.185.050,00	4.766.063.400,00	866.121.650,00
Jumlah	516.079.604.100,00	1.308.056.110.304,00	(791.976.506.204,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak TA 2020 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp912.362.000,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp912.362.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 698.814.018,00.

Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp1.418.361.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp229.300.150,00

Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp547.687.804.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp545.833.996.000,00 dan Gas Bumi sebesar Rp1.853.808.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp157.675.630.632 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp157.071.061.795,00 dan Gas Bumi sebesar Rp604.568.837,00.

Bagi Hasil dari Provisi Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar Rp9.437.275.000,00 dengan Rincian IIUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp9.437.275.000,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMk.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi pada tahun 2020, Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.434.542.476,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenalkannya (Penurunan)
338.731.609.000,00	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2020 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp344.485.485.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.214 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/ (Penurunan)
Dana Alokasi Umum (DAU)	338.731.609.000,00	373.268.646.000,00	(34.537.037.000,00)
Jumlah	338.731.609.000,00	345.070.716.000,00	(6.339.107.000,00)

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/ (Penurunan)
	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00	(54.784.511.399,00)

Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah sebagai berikut :

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama per 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 . Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.140.860.895,00 atau 98,34% dari anggarannya sebesar Rp211.654.489.000,00

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.215 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2020	Realisasi 2019	kenaikan/ (Penurunan)
DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	34.274.998.680,00	(34.274.998.680,00)
DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	19.484.492.836,00	16.383.720.515,00	3.120.772.321,00
DAK Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	5.714.326.047,00	2.711.220.077,00	3.003.105.970,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.004.638.350,00	0,00	1.004.638.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan	649.241.000,00	725.538.306,00	(76.297.306,00)
DAK Reguler Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan	33.188.479.029,00	19.514.195.993,00	13.674.283.036,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Bidang RS Rujukan dan Pratama	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	2.216.867.750,00	18.849.667.658,00	(16.632.799.908,00)
Penyelesaian Tambah DAK Fisik tahun 2017	0,00	0,00	0,00
DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	3.462.428.565,00	1.829.200.000,00	1.633.228.565,00
Dak Penugasan Bidang Air Minum	1.112.337.434,00	3.647.321.000,00	(2.534.983.566,00)
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	570.501.000,00	497.900.000,00	72.601.000,00
DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	13.899.992.900,00	(13.899.992.900,00)
DAK Penugasan Bidang Pasar	0,00	2.508.252.135,00	(2.508.252.135,00)
DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	986.913.100,00	(986.913.100,00)
DAK Afirmasi Bidang Transportasi	0,00	20.625.010,00	(20.625.010,00)
DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	0,00	1.249.961.000,00	(1.249.961.000,00)
DAK Afirmasi Bidang Air Minum	0,00	3.675.587.300,00	(3.675.587.300,00)
DAK Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	817.000.000,00	(817.000.000,00)
DAK Afirmasi Bidang Kesehatan / Bidang Penguatan Puskesmas DTPK (222)	5.915.039.982,00	0,00	5.915.039.982,00
Jumlah	73.318.351.993,00	121.572.093.674,00	(48.253.741.681,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Terhadap Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut :

Tabel 5.216 Ketetapan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi Penerimaan	Dasar Hukum
Tunjangan Profesi Guru PNSD	101.677.829.000,00	101.677.829.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dana Tambahan Penghasilan Guru	894.000.000,00	894.000.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.812.600.000,00	7.435.800.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Bantuan Operasional Kesehatan	8.112.480.000,00	11.659.944.275,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Akreditasi Puskesmas	1.088.755.000,00	0,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Jaminan Persalinan	3.520.693.000,00	0,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Bantuan Operasional KB	2.456.820.000,00	2.233.525.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.377.184.000,00	2.230.729.976,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.349.200.000,00	1.349.200.000,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Dana Pelayanan Kepariwisataaan	344.050.000,00	317.730.800,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	0,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan	5.250.000.000,00	7.023.749.851,00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Jumlah	134.939.450.000,00	134.822.508.902,00	

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.217 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/(Penurunan)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	101.677.829.000,00	101.402.190.500,00	275.638.500,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	894.000.000,00	1.094.000.000,00	(200.000.000,00)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.435.800.000,00	7.583.400.000,00	(147.600.000,00)
Bantuan Operasional Kesehatan	11.659.944.275,00	8.609.485.000,00	3.050.459.275,00
Akreditasi Puskesmas	0,00	1.418.193.730,00	(1.418.193.730,00)